



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**PEMERINTAH
KOTA TASIKMALAYA**

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045



Jl. Letnan harun No.1 - bappelitbangda.tasikmalayakota.go.id



bappelitbangda@tasikmalayakota.go.id



**WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025 - 2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tasikmalaya Tahun 2025 - 2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode Tahun 2025 - 2045.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis, selaras dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi, Daerah dan dengan kabupaten/kota yang berbatasan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Kedudukan;
- b. Sistematika, isi dan uraian;
- c. Tata Cara Perubahan RPJPD;
- d. Pengendalian dan evaluasi; dan
- e. Ketentuan peralihan.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 4

RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat Visi, Misi dan program Wali Kota.

BAB V SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN

Pasal 5

- (1) Sistematika penulisan RPJPD adalah sebagai berikut:
 - a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. bab III permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - d. bab IV visi dan misi Daerah;
 - e. bab V arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
 - f. bab VI penutup.
- (2) Isi dan uraian sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

TATA CARA PERUBAHAN RPJPD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi RPJPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Ketentuan mengenai RPJPD Tahun 2005-2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.



Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 November 2024
Pj. WALIKOTA TASIKMALAYA,

ASEP SUKMANA

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 November 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ASEP GOPARULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, telah ditetapkan visi pembangunan nasional tahun 2025-2045, yaitu “Menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Visi pembangunan nasional tersebut mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan pada periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Kota Tasikmalaya 20 (dua puluh) tahun mendatang akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan pembangunan Nasional dan Jawa Barat. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042, Kota Tasikmalaya sebagai Pusat Pengembangan Wilayah (PKW) di Jawa Barat dengan berbagai potensi perdagangan dan jasa yang ditunjang oleh sarana dan prasarana yang representatif serta konektivitas antar wilayah di Priangan Timur, akomodasi yang mendukung, dan sumber daya manusia yang kreatif akan menjadikan Kota Tasikmalaya tahun 2045 sebagai pusat perdagangan, jasa dan industri termaju di Priangan Timur.

Kota Tasikmalaya akan dihadapkan dengan berbagai tantangan pembangunan, baik global, nasional maupun regional, seperti: (1) Megatrend global yang akan mengubah cara memandang pembangunan global; (2) Perubahan iklim; (3) Geopolitik dan geoekonomi; (4) Perkembangan teknologi; (5) Peningkatan konektivitas wilayah dan adopsi sistem finansial digital. Tantangan yang akan dihadapi oleh Kota Tasikmalaya diantaranya: (1) Pada tahun 2030 Kota Tasikmalaya akan mengalami bonus demografi dan masa keemasan di tahun 2045; (2) Urbanisasi akan semakin masif sebagai implikasi pembangunan perkotaan; (3) Persaingan sumber daya alam yang ditunjukkan oleh perkiraan menurunnya daya dukung sumber daya alam, lahan hutan, dan lahan sawah sehingga pembangunan perlu diarahkan menjadi pembangunan hijau (*green development*); (4) Pemerataan pembangunan wilayah dan peningkatan pendapatan masyarakat menengah ke bawah; (5) Pemerataan infrastruktur digital yang berkualitas dan transformasi digital berkelanjutan; (6) Transportasi yang berkelanjutan.

Dalam menyikapi tantangan tersebut, perlu adanya perubahan paradigma implementasi pembangunan dengan didorong oleh kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan, adaptif terhadap perkembangan teknologi, meningkatkan pembangunan infrastruktur, dan konektivitas wilayah yang lebih berkelanjutan serta ditunjang oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter berbasis religi penyusunan RPJPD 2025-2045 Kota Tasikmalaya, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan, disamping sebagai salah satu upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Jawa Barat lebih jauh juga untuk mendukung pembangunan Nasional dalam rangka menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu upaya untuk mengakomodir bentuk arahan pembangunan jangka panjang yang baru, sehingga mampu melanjutkan arahan pembangunan jangka panjang saat ini, sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Tasikmalaya 2005 – 2025, juga dapat melanjutkan pembangunan jangka panjang sampai ke 20 (dua puluh) mendatang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun. Teknis penyusunan dokumen RPJPD mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.2.1/3674/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, dan Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045.

Dokumen RPJPD yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan seperti yang diamanatkan pada Pasal 7 s.d. Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Keempat pendekatan tersebut adalah pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara *bottom-up* dengan *top down planning*. Secara substansi, penyusunan dokumen RPJPD menggunakan pendekatan THIS (tematik, holistik, integratif, dan spasial).

RPJPD disusun dengan memperhatikan permasalahan yang ada di masyarakat baik permasalahan ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur dan lingkungan, sehingga isu strategis yang dapat muncul antara lain kemiskinan, kualitas sumber daya manusia, pengangguran, ekonomi dan lingkungan. Selain itu, komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan mencakup aspek pengelolaan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas hidup warganya sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang tertuang dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2045.

Penyusunan RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2045 dimulai dengan tahapan evaluasi atas RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025, penyusunan rancangan awal, konsultasi publik, penyepakatan rancangan awal dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), penyusunan Rancangan RPJPD, Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD, penyusunan rancangan akhir RPJPD, review Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RPJPD, pembahasan Ranperda RPJPD, evaluasi Ranperda RPJPD dan penetapan Peraturan Daerah (Perda) RPJPD.

Berdasarkan Hasil Evaluasi RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025, bahwa terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dalam periode RPJPD selanjutnya diantaranya meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan; meningkatkan pelayanan sosial; penanggulangan kemiskinan;

meningkatkan sektor ekonomi unggulan; menjamin ketahanan pangan; meningkatkan kualitas tenaga kerja dan penyediaan lapangan kerja serta lapangan berusaha; meningkatkan investasi daerah; meningkatkan infrastruktur perkotaan; meningkatkan pengelolaan persampahan; meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan; meningkatkan kapasitas fiskal daerah; serta menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

RPJPD diharapkan menjadi instrumen yang kokoh dan relevan dalam mengarahkan pembangunan jangka panjang, memastikan keselarasan antara aspirasi masyarakat, kebijakan nasional, dan kondisi lokal. RPJPD berfungsi sebagai panduan strategis untuk pembangunan wilayah dalam periode 20 (dua puluh) tahun dengan penjelasan tentang rumusan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok jangka panjang yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan yang lebih rinci, serta pedoman bagi semua pihak yang berperan dalam pembangunan.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan RPJPD Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);

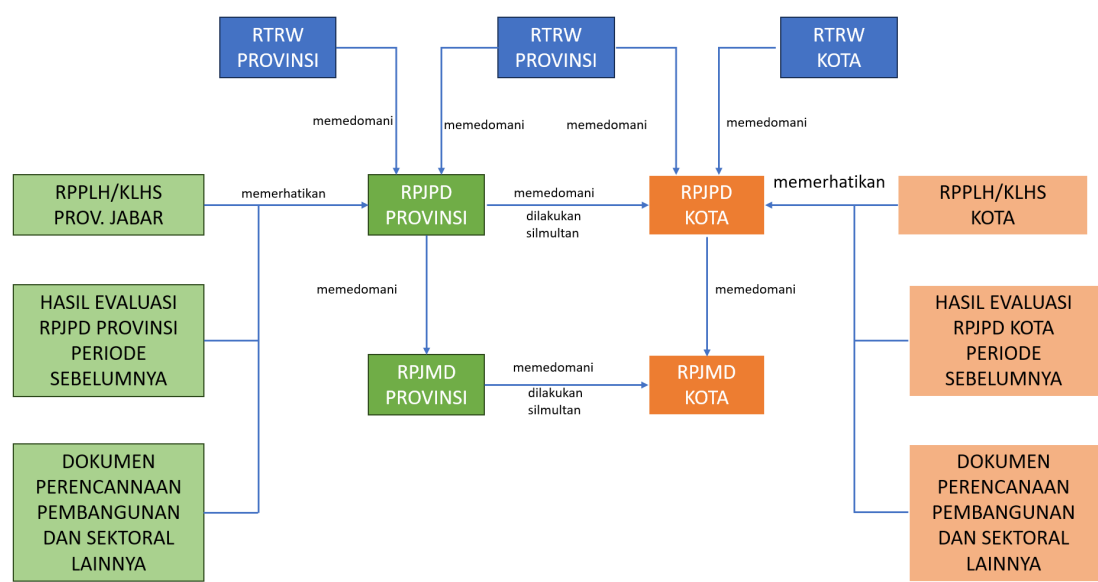
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
12. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.2.1/3674/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Nomor 13 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 5).

1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya

RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, sasaran pokok dan Sasaran Pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW Kota Tasikmalaya serta mempedomani secara simultan dengan RPJPD Provinsi. RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang dilakukan dengan menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

RPJPD disusun dengan memperhatikan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan dan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), hasil evaluasi RPJPD periode sebelumnya, serta dokumen perencanaan Pembangunan dan sektoral lainnya.

Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen Perencanaan



Sumber: Inmendagri No. 1 Tahun 2024

Penyusunan RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2045 mempedomani substansi RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat, terutama terkait dengan arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana, serta kinerja atau indikator pembangunan. Adapun substansi Rancangan Peraturan Daerah RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2024-2044 yang dipedomani yaitu arah pengembangan wilayah dan indikasi program RTRW.

Adapun substansi RPPLH yang diperhatikan yaitu kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Substansi KLHS yang diperhatikan yaitu daya dukung dan daya tampung lingkungan serta isu-isu strategis. Sedangkan substansi Hasil Evaluasi RPJPD periode sebelumnya yang diperhatikan yaitu hasil capaian pembangunan periode RPJPD Tahun 2005-2025 dan rekomendasinya.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJPD adalah sebagai acuan resmi pembangunan dalam menentukan perencanaan dan prioritas 20 (dua puluh) tahun ke depan dalam upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Tujuan dari penyusunan RPJPD yaitu:

- 1. Merumuskan masalah dan isu strategis Kota Tasikmalaya untuk prioritas Pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan;
- 2. Merumuskan visi, arah dan tujuan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan;
- 3. Menjadi acuan perencanaan jangka menengah dengan periode lima tahunan;
- 4. Menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen RPJPD disusun sesuai dengan sistematika yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 sebagaimana berikut ini:

1. Pendahuluan

Pada bab ini, dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RPJPD yang terdiri dari latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud tujuan dan sistematika penulisan.

2. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Pada bab ini, dijelaskan mengenai kondisi eksisting pembangunan daerah dengan pendekatan beberapa aspek sebagai bahan acuan perencanaan yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, evaluasi hasil RPJPD periode sebelumnya, tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, serta pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

3. Permasalahan dan Isu Strategis

Pada bab ini, dijelaskan hasil analisa terhadap data dan informasi pembangunan dengan mengidentifikasi masalah dan isu strategis berdasarkan evaluasi RPJPD periode sebelumnya, dan *Focus Group Discussion* (FGD) RPJPD Tahun 2025-2045.

4. Visi dan Misi Daerah

Penjelasan rumusan visi daerah yaitu hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan tahun 2045 dan misi daerah yang memuat upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi.

5. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah

Merinci arah kebijakan berupa tahapan pembangunan per lima tahun dalam rangka mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045 serta menjelaskan kuantifikasi (penargetan dengan indikator kinerja) visi misi dalam sasaran pokok.

6. Penutup

Menjelaskan ketentuan perencanaan menjelang akhir periode perencanaan RPJPD serta kaidah pelaksanaan RPJPD dalam RPJMD empat periode ke depan.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Geografi

2.1.1.1. Peran Strategis Kota Tasikmalaya

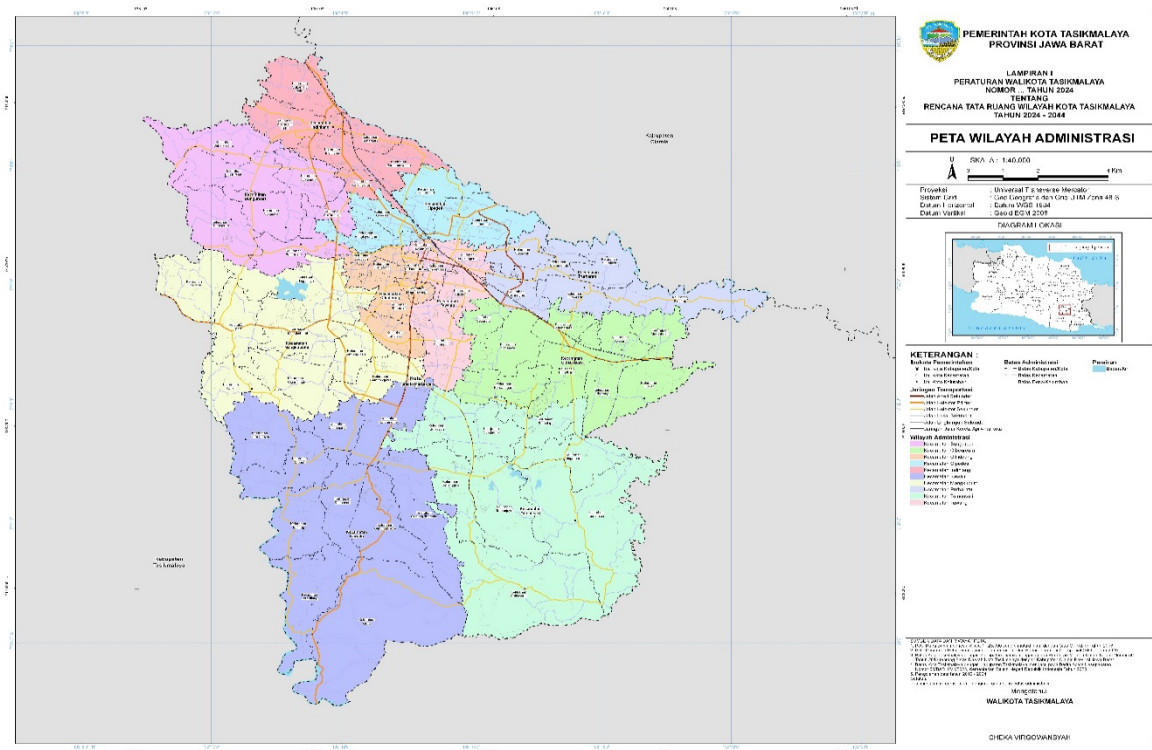
Secara geografis, Kota Tasikmalaya memiliki posisi yang strategis, yaitu pada 108° 08' 38" – 108° 24' 02" BT dan 7° 10' 00" – 7° 26' 32" LS, berada pada posisi bagian tenggara wilayah Provinsi Jawa Barat, berjarak ±105 km dari Kota Bandung dan ±255 km dari Kota Jakarta.

Kota Tasikmalaya mempunyai batas-batas wilayah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupotensi paten Tasikmalaya; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya.

Untuk lebih jelasnya mengenai letak orientasi dan batas administrasi dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2. 1 Peta Orientasi dan Pembagian Wilayah Kota Tasikmalaya



Sumber: Rancangan Perda RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2024-2044.

Kota Tasikmalaya merupakan pemekaran dari Kabupaten Tasikmalaya yang secara resmi dibentuk pada tanggal 17 Oktober 2001 melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Pada tahun 2022 secara administratif Kota Tasikmalaya terbagi

dalam 10 kecamatan dan 69 kelurahan, dengan jumlah RW sebanyak 864 dan jumlah RT sebanyak 3.643.

Batas Daerah Kota Tasikmalaya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut menjadi dasar untuk menghitung luas wilayah Kota Tasikmalaya sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021 yaitu seluas 183,94 Km² (dihitung menggunakan Sistem Proyeksi *Cylindrical Equal Area/CEA*) atau 184,22 Km² (dihitung menggunakan Sistem Proyeksi *Unit Transverse Mercator/UTM*).

Saat ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat sedang dalam proses perubahan karena adanya Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah antara Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 100/06/Pem.X/2021 dan Nomor: P/2251/PN.0309/Pem/2021 tanggal 25 Oktober 2021. Adapun hasil dari perhitungan luas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat dan Berita Acara tersebut diatas, maka luas wilayah Kota Tasikmalaya adalah 182,96 Km² (dihitung menggunakan Sistem Proyeksi *Cylindrical Equal Area/CEA*) atau 183,24 Km² (dihitung menggunakan Sistem Proyeksi *Unit Transverse Mercator/UTM*).

Kota Tasikmalaya berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 diarahkan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Wilayah (PWK) dengan sarana prasarana yang terintegrasi, serta pusat pengembangan industri kerajinan, perdagangan dan jasa.

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

A. Kehutanan

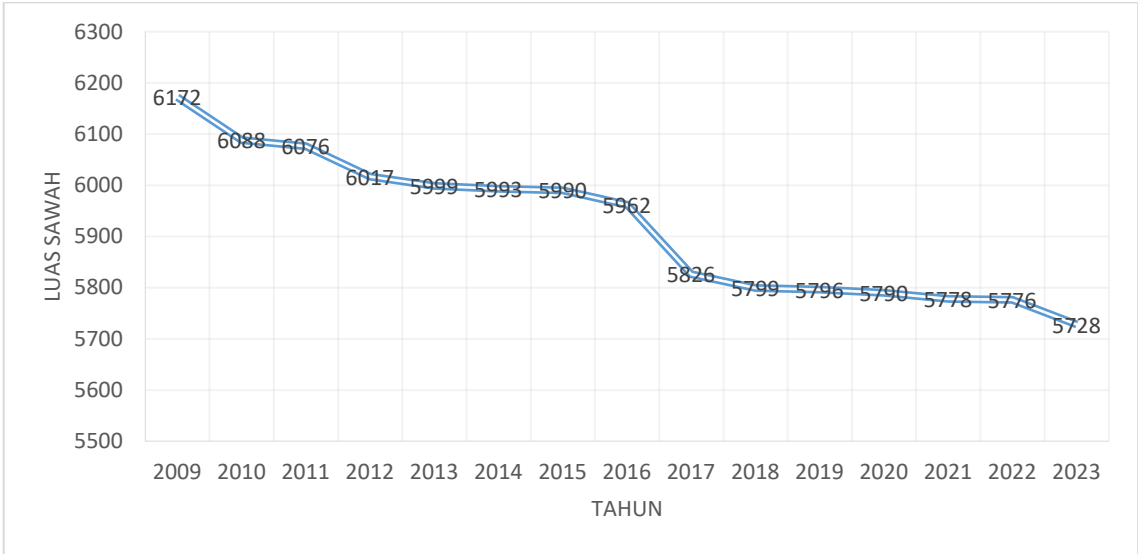
Kota Tasikmalaya mempunyai hutan produksi seluas 372 Ha yang berperan penting dari segi lingkungan, ekonomi serta sosial budaya. Sektor kehutanan bukan merupakan kewenangan kabupaten kota, sehingga Hutan produksi ini dikelola oleh Perum Perhutani.

B. Pertanian

Berdasarkan Statistik Pertanian dan Perikanan lahan pertanian di Kota Tasikmalaya pada tahun 2023 seluas 12.161 Ha yang terdiri dari lahan sawah seluas 5.728 Ha dan lahan bukan sawah seluas 6.433 Ha, dengan rasio persentase antara luas lahan sawah dan luas lahan bukan sawah sebesar 52,9 persen dan 47,9 persen.

Perkembangan luas lahan sawah di Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu 14 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan. Pada tahun 2009 lahan sawah seluas 6.172 Ha menjadi 5.728 Ha pada tahun 2023, sehingga berkurang 444 Ha atau 7,19 persen dengan rata-rata pertahun mengalami penurunan sebesar 0,51 persen, sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2. 2 Perubahan Luas Sawah

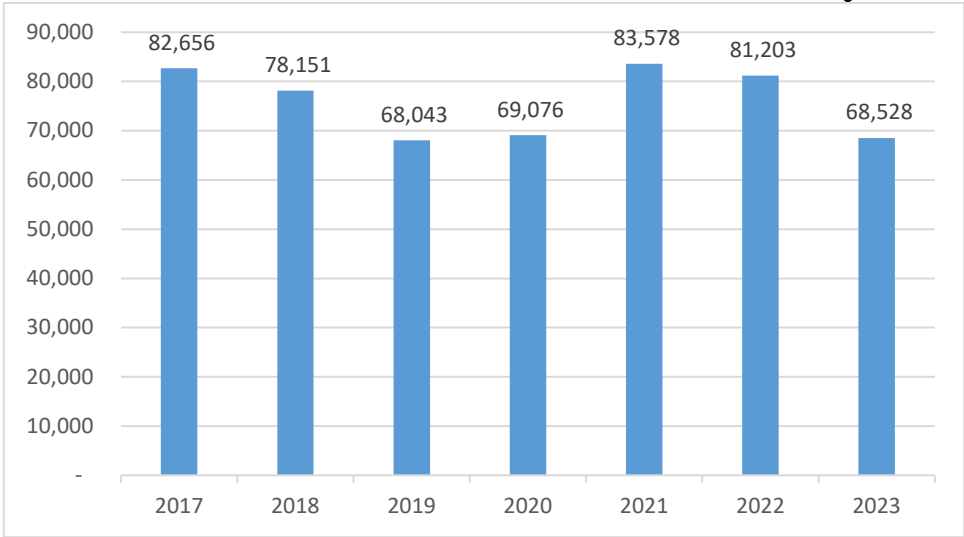


Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2023.

Sebagaimana tercantum dalam rancangan Peraturan Daerah RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2024-2044 direncanakan memiliki kawasan pertanian seluas 2.762 Ha yang terdiri dari kawasan tanaman pangan, kawasan perkebunan serta kawasan peternakan. Kawasan pertanian tanaman pangan seluas 1.242 Ha, kawasan peternakan seluas 44 Ha, dan kawasan perkebunan seluas 1.476 Ha. Dari luas kawasan pertanian tanaman pangan akan ditetapkan Luas Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 855 Ha untuk melindungi dan menjamin kawasan dan lahan pertanian secara berkelanjutan dalam rangka menjaga ketahanan pangan.

Padi merupakan produk unggulan pertanian Kota Tasikmalaya. Berdasarkan data lima tahun terakhir, produksi padi berfluktuasi dan belum memenuhi kebutuhan beras penduduk Kota Tasikmalaya. Produksi beras baru memenuhi 69,46 persen dari total kebutuhan. Penurunan produksi padi disebabkan oleh alih fungsi lahan, produktivitas lahan, dan perubahan iklim. Produktivitas padi pada tahun 2023 mencapai 6,26 ton/hektar. Produktivitas lahan sangat dipengaruhi oleh penggunaan pupuk kimiawi atau pupuk anorganik secara terus menerus dalam waktu lama.

Gambar 2. 3 Produksi Padi di Kota Tasikmalaya



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 2024.

Sementara di sektor peternakan, pada tahun 2023 di Kota Tasikmalaya terdapat populasi ternak besar berupa sapi potong sebanyak 1.686 ekor, sapi perah sebanyak 118 ekor dan 94 ekor kerbau yang dipelihara oleh 3.680 rumah tangga (BPS, 2024). Dalam proses budidaya ternak ini, penanganan limbah belum dilakukan secara optimal sesuai standar teknis pengolahan limbah, baru sebatas fermentasi alami sebelum menjadi pupuk kandang dalam budidaya padi.

Dalam upaya menjaga ketahanan pangan dan menjaga kualitas lahan pertanian, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah merintis aplikasi pupuk organik dalam budidaya pertanian. Pemerintah Kota Tasikmalaya juga telah merintis pola budidaya pertanian perkotaan atau urban farming dengan metode budidaya tanaman secara hidroponik, tanaman buah dalam pot (Tabulampot) dan budidaya ikan dalam ember (budikdamber).

C. Perikanan Budidaya

Pada tahun 2023 areal perikanan budidaya seluas 692,28 Ha yang terdiri dari kolam pembenihan 19,49 Ha, kolam pembesaran 621,23 Ha, sawah irigasi untuk pengembangan minapadi seluas 51,42 Ha, dan kolam air deras 0,14 Ha.

Produksi perikanan dalam kurun waktu tahun 2021-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 produksi perikanan budidaya sebesar 9.990,39 ton, sedangkan pada tahun 2022 naik menjadi 10.003,31 ton dan turun kembali tahun 2023 menjadi 9.960,08 ton. Produktivitas area perikanan budidaya mencapai 14,82 ton/hektar.

Penurunan produksi perikanan disebabkan oleh perubahan iklim dan mayoritas pembudidaya ikan masih menerapkan teknik budidaya tradisional. Sementara angka konsumsi ikan perkapita penduduk Kota Tasikmalaya tahun 2023 masih cukup rendah yaitu 23,41 kg/kapita/tahun dibandingkan dengan penduduk Provinsi Jawa Barat secara umum yang telah mencapai 37,01 kg/kapita/tahun.

D. Pariwisata

Pariwisata di Kota Tasikmalaya mempunyai potensi pertumbuhan yang cukup besar dan dapat terus dikembangkan seperti wisata alam, wisata budaya, wisata minat khusus, wisata kuliner, wisata kriya, wisata rekreasi, dan wisata buatan dengan dukungan sarana prasarana yang memadai, berupa hotel dan *guest house*. Pada tahun 2021 kunjungan wisatawan tercatat sebanyak 483.569 orang, bertambah menjadi 642.128 orang pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 642.862 orang. Kunjungan wisatawan mancanegara mengalami pertambahan yang cukup besar, tahun 2021 wisatawan mancanegara tercatat hanya 6 orang, tahun 2022 meningkat menjadi 30 orang dan tahun 2023 meningkat tajam menjadi 691 orang.

Tabel 2. 1 Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Wisatawan (Orang)		Jumlah Total (Orang)
	Mancanegara	Domestik	
2021	6	483.563	483.569
2022	30	642.098	642.128
2023	691	642.171	642.862

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya, 2024.

2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Berdasarkan Dokumen KLHS RPJPD Kota Tasikmalaya, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan kapasitas jasa lingkungan dalam mendukung peri kehidupan makhluk hidup di suatu ekoregion. Daya dukung air dianalisis dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan air di Kota Tasikmalaya. Ketersediaan dihitung berdasarkan curah hujan dan koefisien limpasan di Kota Tasikmalaya, sementara kebutuhan air dibagi menjadi kebutuhan air domestik dan kebutuhan air untuk lahan. Ketersediaan air dihitung dengan mengalikan indeks jasa ekosistem pada tiap grid dengan ketersediaan air pada wilayah sungai. Setelah dilakukan analisis, ketersediaan air di Kota Tasikmalaya sebesar 308.704.500 m³/tahun. Kebutuhan air domestik berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 adalah sebesar 800 m³/kapita/tahun. Berdasarkan analisis, diketahui kebutuhan air domestik adalah sebesar 586.325.600 m³/tahun. Sementara itu, ditinjau dari ketentuan pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional, menyatakan bahwa kebutuhan air untuk lahan pertanian mengikuti rasio sawah : perkebunan : kebun campuran : tegalan/ladang adalah 4 : 1,5 : 1,5 : 1. Total kebutuhan air untuk lahan adalah sebesar 119.162.320 m³/tahun, sehingga total kebutuhan air domestik dan lahan sebesar 705.487.920 m³/tahun. Terdapat selisih antara ketersediaan dan kebutuhan sebesar -396.783.420 m³/tahun.

Selain itu, kondisi daya dukung air dianalisis secara spasial untuk memetakan daerah yang daya dukung airnya terlampaui dan belum terlampaui. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebesar 84 persen wilayah atau seluas 15.501,74 Ha telah terlampaui dari segi daya dukung air, 16 persen sisanya atau seluas 2.919,98 Ha belum terlampaui. Daerah dengan daya dukung air terlampaui tersebar di seluruh wilayah. Hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah penduduk di beberapa area dan kebutuhan air untuk lahan pertanian yang luas.

Tabel 2. 2 Daya Dukung Air Kota Tasikmalaya Tahun 2022

Uraian	Volume
Ketersediaan air	308.704.500 m ³ /tahun
Kebutuhan air	705.487.920 m ³ /tahun
a. Domestik	586.325.600 m ³ /tahun
b. Lahan	119.162.320 m ³ /tahun
Selisih	-396.783.420 m ³ /tahun
Ambang Batas (jiwa)	386.806

Sumber: KLHS RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2045, 2024.

Daya dukung pangan dianalisis dengan menghitung selisih antara ketersediaan pangan, berupa nilai Angka Kecukupan Gizi (AKG) dari produksi pertanian pangan yang dihasilkan dengan kebutuhan pangan berupa standar kebutuhan AKG seluruh penduduk tiap tahunnya. Standar AKG adalah sebesar 2.150 kkal/kapita/hari. Ketersediaan pangan di Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 adalah sebesar 188.935,11 juta kkal/Tahun, sedangkan kebutuhannya mencapai 575.148,77 juta kkal/Tahun, terdapat selisih sebesar -386.213,66 juta kkal/Tahun. Selisih yang ada cukup besar, mengingat wilayah Kota Tasikmalaya memiliki lahan produksi pangan yang terbatas secara spasial sebesar 12.761 Ha atau 69 persen dari total luas wilayah berstatus telah

terlampauai daya dukung pangannya, sedangkan sisanya seluas 5.661 Ha atau 31 persen luas wilayah berstatus belum terlampauai. Berikut merupakan rincian ketersediaan dan kebutuhan pangan di Kota Tasikmalaya.

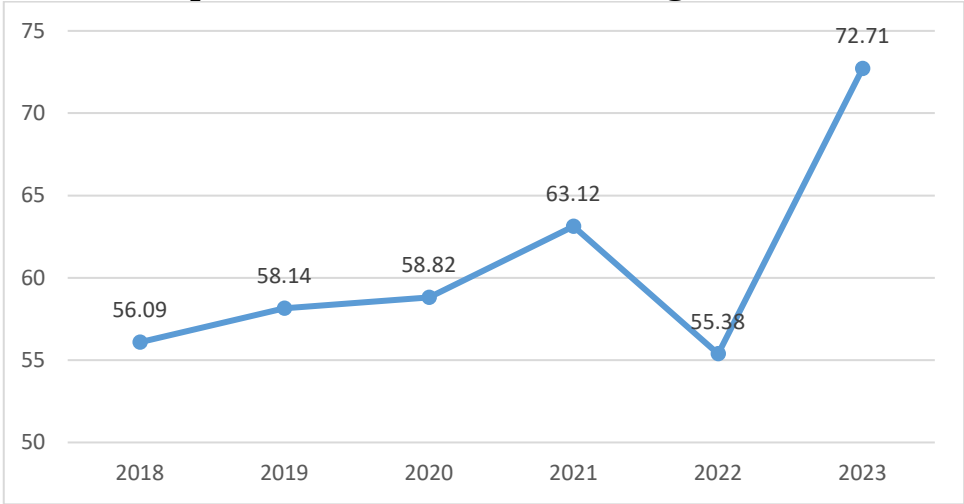
Tabel 2. 3 Daya Dukung Pangan Kota Tasikmalaya Tahun 2022

Uraian	Volume
Ketersediaan Pangan	188.935,11 juta kkal/Tahun
Kebutuhan pangan	575.148,77 juta kkal/Tahun
Selisih	-386.213,66 juta kkal/Tahun
Ambang batas (jiwa)	239.568

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 2024.

Hal ini sejalan dengan hasil kajian Badan Ketahanan Pangan yang menunjukkan nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2023 berfluktuasi diantara 55,38-72,71 poin, walaupun Kota Tasikmalaya memiliki ketahanan pangan yang baik yaitu ada pada kelompok 4-6, namun nilai IKP Kota Tasikmalaya termasuk dalam peringkat terendah karena menempati peringkat 86 dari 98 kota se-Indonesia. Berikut nilai IKP Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu 6 tahun terakhir.

Gambar 2. 4 Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kota Tasikmalaya



Sumber: Badan Ketahanan Pangan Nasional, 2024.

2.1.1.4. Perubahan Iklim dan Ketahanan Bencana

Berdasarkan dokumen hasil kajian risiko bencana di Provinsi Jawa Barat 2016 – 2020 dijelaskan bahwa Kota Tasikmalaya memiliki skor 119 atau termasuk klasifikasi kelas sedang. Berdasarkan hasil kajian tersebut, di Kota Tasikmalaya terdapat beberapa potensi risiko bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi diantaranya adalah banjir bandang, banjir, cuaca ekstrim, epidemi dan wabah penyakit, gempa bumi, gunung berapi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan tanah longsor. Berikut penjelasan mengenai jenis bencana yang ada di Kota Tasikmalaya:

1. Banjir Bandang

Lokasi risiko banjir bandang berada di sekitar alur Sungai serta di bagian Barat, Selatan dan Utara Kota Tasikmalaya. Tingkat indeks risiko

kebencanaan banjir bandang di Kota Tasikmalaya adalah sedang hingga tinggi.

2. Banjir

Lokasi risiko banjir cakupannya cukup luas dimulai dari utara hingga ke pusat kota dan sebagian wilayah selatan. Tingkat Indeks rawan bencana banjir di Kota Tasikmalaya adalah rendah hingga tinggi.

3. Risiko Cuaca Ekstrem

Lokasi risiko cuaca ekstrem mencakup seluruh wilayah Kota Tasikmalaya. Tingkat Indeks rawan bencana risiko cuaca ekstrem di Kota Tasikmalaya sedang-tinggi.

4. Epidemik dan Wabah Penyakit

Lokasi epidemik dan wabah penyakit berada di sekitar area terbangun di Kota Tasikmalaya. Tingkat indeks risiko kebencanaan epidemik dan wabah penyakit di Kota Tasikmalaya adalah rendah.

5. Gempa

Potensi rawan bencana di Kota Tasikmalaya diantaranya bencana gempa bumi dan ikutannya, bencana alam geologi aliran lahar, dan rawan gerakan tanah skala menengah. Intensitas suatu guncangan gempa bumi dalam suatu peristiwa gempa bumi di suatu daerah atau wilayah tertentu tidak hanya tergantung pada kekuatan gempa bumi yang terjadi dan jarak daerah atau wilayah terhadap pusat gempa bumi, melainkan sangat dipengaruhi oleh kondisi geologi setempat. Lapisan-lapisan sedimen lunak permukaan dapat memperkuat atau mengamplifikasi gelombang gempa bumi menjadi lebih kuat dibandingkan dengan daerah sekitarnya yang disusun oleh batuan keras.

Kajian potensi bencana gempa bumi dan ikutannya di Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2019, terdapat beberapa zona potensi bencana gempa bumi dan ikutannya di Kota Tasikmalaya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Zona Potensi Bencana Gempa Bumi dan Ikutan I, meliputi sebagian kecil wilayah Kecamatan Cibeureum, Tamansari, Kawalu dan Mangkubumi. Zona ini memiliki bentang alam terdiri dari lereng kipas bawah Gunung Galunggung dan kipas lahar gunungapi tua berupa lembah alur sungai. Potensi bencana gempa bumi dengan percepatan dipermukaan tanah adalah 0,68 g. Tingkat risiko yang dapat terjadi setara intensitas VIII-IX MMI;
- 2) Zona Potensi Bencana Gempa Bumi dan Ikutan II, meliputi 50 persen wilayah Kecamatan Indihiang, 65 persen wilayah Kecamatan Cipedes, 60 persen wilayah Kecamatan Tawang, 75 persen wilayah Kecamatan Cihideung, 45 persen wilayah Kecamatan Cibeureum dan 50 persen wilayah Kecamatan Kawalu. Zona ini memiliki bentang alam terdiri dari lereng kipas tengah Gunung Galunggung dan lereng kipas bawah Gunung Galunggung serta perbukitan bergelombang berupa kaki gunung berlereng 10°-15° hingga landai. Potensi bencana gempa bumi di zona ini berupa guncangan tanah relatif sedang dengan percepatan dipermukaan tanah adalah 0,49 g;
- 3) Zona Potensi Bencana Gempa Bumi dan Ikutan III, meliputi 50 persen wilayah Kecamatan Indihiang, 35 persen wilayah Kecamatan Cipedes, 40 persen wilayah Kecamatan Tawang, 25 persen wilayah Kecamatan

Cihideung, 40 persen wilayah Kecamatan Cibeureum dan 25 persen wilayah Kecamatan Kawalu. Zona ini memiliki bentang alam terdiri dari lembah Gunung Cibeureum dan kipas tengah Gunung Galunggung berupa lereng perbukitan dan lembah alur sungai. Potensi bencana gempa bumi di zona ini berupa guncangan tanah relatif rendah dengan percepatan dipermukaan tanah adalah 0,35g.

6. Bahaya Gunung Api

Gunung api yang paling dekat dengan Kota Tasikmalaya adalah Gunung Galunggung yang terletak sekitar 10 Km dari pusat kota, gunung ini merupakan gunung api tipe A yang masih aktif, letusan terakhir terjadi pada tahun 1982 yang mengakibatkan kerusakan yang cukup parah.

Adapun lokasi risiko bahaya gunung api berada di wilayah utara Kota Tasikmalaya yang menyusuri aliran sungai. Tingkat indeks risiko bahaya gunung api di Kota Tasikmalaya adalah rendah hingga sedang.

7. Tanah Longsor

Potensi bencana gerakan tanah di Kota Tasikmalaya akan terjadi di sepanjang aliran sungai yang memiliki tebing sungai yang cukup terjal di atas 45°. Sungai-sungai yang terdapat di Kota Tasikmalaya dan sekitarnya, memiliki ciri lembah berbentuk V, hal ini menunjukkan bahwa sungai-sungai tersebut memiliki karakter erosi makan ke hulu dan ke dasar lembah. Potensi gerakan tanah yang dapat terjadi diantaranya runtuhnya tanah penutup, jatuhnya bongkah tanah dan bongkah batuan beku. Potensi gerakan tanah di Kota Tasikmalaya dapat terjadi di bukit-bukit/ gunung-gunung yang telah ditambang atau digali, sehingga menyisakan bukit-bukit berlereng terjal. Mengingat batuan penyusun bukit-bukit ini yang terdiri dari campuran breksi, lava dan tufa yang bersifat lepas antara satu dengan lainnya dan tidak terkompaksi secara baik sehingga memiliki potensi terjadinya gerakan tanah yang sangat besar dengan jenis jatuhnya atau runtuhnya bongkah breksi dan lava.

Potensi bencana gunung api sebagai bencana ikutan yang mungkin dapat terjadi pada peristiwa gempa bumi kuat berdasarkan peta Kawasan Rawan Bencana Gunung api Galunggung, Jawa Barat berskala 1:50.000 (Direktorat Vulkanologi/PVMBG, 1983) diantaranya berupa lontaran batu pijar dan hujan abu lebat pada radius 1,5 km dari pusat erupsi, terlanda lontaran batu pijar terdapat pada radius 4 km dari pusat erupsi, dan terlanda hujan abu vulkanik dan terkena lontaran batu pijar pada radius 8 km dari pusat erupsi. Selain itu, gunung api ini juga mempunyai daerah yang selalu berpotensi terancam aliran awan panas, lava dan gas beracun, zona potensi terlanda aliran awan panas, lava dan lahar hujan serta daerah potensi terlanda aliran lahar hujan.

8. Kebakaran Hutan dan Lahan

Lokasi risiko bahaya kebakaran hutan dan lahan berada di wilayah Selatan Kota Tasikmalaya terutama daerah yang berbukit dan kering. Tingkat indeks risiko kebakaran hutan dan lahan di Kota Tasikmalaya adalah rendah hingga tinggi.

9. Kekeringan

Lokasi risiko bahaya kekeringan berada di seluruh Kota Tasikmalaya terutama daerah yang berbukit di wilayah selatan. Tingkat indeks risiko kekeringan di Kota Tasikmalaya adalah rendah hingga tinggi.

Indeks Risiko Bencana Kota Tasikmalaya tahun 2018-2023 yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 2. 4 Indeks Risiko Bencana di Kota Tasikmalaya
Tahun 2018-2023**

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai (poin)	119,2	119,2	119,2	117,37	114,69	106,93
Katagori	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang

Sumber: BNPB, 2023.

**Tabel 2. 5 Indeks Risiko Bencana Gempabumi di Kota Tasikmalaya
Tahun 2018-2023**

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai (poin)	21,6	21,6	21,6	20,49	19,65	16,1
Katagori	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi

Sumber: BNPB, 2023.

**Tabel 2. 6 Indeks Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
di Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2023**

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai (poin)	36	36	36	34,16	32,75	26,83
Katagori	tinggi	tinggi	Tinggi	tinggi	tinggi	tinggi

Sumber: BNPB, 2023.

**Tabel 2. 7 Indeks Risiko Bencana Tanah Longsor di Kota Tasikmalaya
Tahun 2018-2023**

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai (poin)	12	12	12	11,39	10,93	8,94
Katagori	Sedang	sedang	Sedang	sedang	sedang	sedang

Sumber: BNPB, 2023.

**Tabel 2. 8 Indeks Risiko Bencana Kekeringan di Kota Tasikmalaya
Tahun 2018-2023**

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai (poin)	36	36	36	34,16	32,75	26,83
Katagori	tinggi	tinggi	Tinggi	tinggi	tinggi	Tinggi

Sumber: BNPB, 2023.

**Tabel 2. 9 Indeks Risiko Bencana Cuaca Ekstrem
di Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2023**

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai (poin)	13,6	13,6	13,6	12,9	12,37	10,14
Katagori	tinggi	tinggi	Tinggi	tinggi	tinggi	tinggi

Sumber: BNPB, 2023.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Indeks Ketahanan Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2018 sebesar 0,34 yang berangsur-angsur naik pada tahun 2023 sebesar

0,43. Hal ini menunjukkan bahwa semakin nilai IKD mendekati angka 1, maka kemampuan dalam mengantisipasi bencana semakin tinggi, demikian pula sebaliknya, semakin mendekati angka 0 maka semakin rendah kemampuan dalam mengantisipasi bencana.

Tabel 2. 10 Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2023

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai (poin)	N/A	N/A	N/A	0,34	0,35	0,43

Sumber: BPBD, 2024.

2.1.1.5. Emisi Gas Rumah Kaca

Gas rumah kaca (GRK) adalah sejumlah gas yang menimbulkan efek rumah kaca yang terdapat di atmosfer bumi. Gas rumah kaca ini berfungsi seperti kaca yang meneruskan cahaya matahari tetapi menangkap energi panas dari dalamnya. Menurut Konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim terdapat 6 (enam) jenis gas yang digolongkan sebagai GRK, yaitu: CO₂ (karbon dioksida), CH₄ (metana), N₂O (dinitrogenoksida), HFC (hidro fluoro karbon), PFC (per fluoro karbon), dan SF₆ (sulfurheksa florida).

Sumber emisi GRK terdiri dari 6 (enam) katagori sumber diantaranya energi, proses Industri, penggunaan zat pelarut dan produk-produk lainnya, pertanian, tata guna lahan dan kehutanan, dan limbah.

Nilai penurunan GRK untuk Kota Tasikmalaya pada tahun 2018 sebesar 31,59437 Ton CO₂eq terus meningkat sampai dengan tahun 202` sebesar 401,96937 Ton CO₂eq. Sedangkan untuk tahun 2022 dan 2023 penurunan GRK tidak mengalami perubahan. Nilai tersebut merupakan nilai dari katagori energi berupa transportasi, sedangkan untuk katagori lainnya belum dilakukan perhitungan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.11 Capaian Pembangunan Rendah Karbon Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2023

Tahun	Penurunan Emisi (Ton CO ₂ eq)
2018	31,59437
2019	51,57437
2020	56,62437
2021	401,96937
2022	401,96937
2023	401,96937

Sumber: AKSARA, 2024 (Data diolah).

2.1.1.6. Lingkungan Hidup

Pertumbuhan penduduk yang relatif cepat berimplikasi pada ketersediaan lahan yang cukup untuk menopang tuntutan kesejahteraan hidup. Sementara lahan yang tersedia bersifat tetap dan tidak bisa bertambah sehingga menambah beban lingkungan hidup. Daya dukung alam ternyata semakin tidak seimbang dengan laju tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup penduduk. Pembangunan kota yang berkelanjutan mensyaratkan agar prinsip-prinsip pembangunan kota harus berwawasan dan ramah lingkungan.

Pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara mensejajarkan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya. Setiap kebijakan dalam pemanfaatan sumber daya alam tidak semata hanya dilihat dari pertimbangan nilai ekonomi yang bisa dihasilkan, tetapi juga harus mengedepankan pertimbangan sosial budaya yang ditopang oleh kondisi lingkungan yang sehat. Pembangunan segala aspek di era globalisasi dan otonomi daerah berkembang sangat cepat dan pesat, namun hal ini tidak saja memberikan dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan penduduk, tetapi juga dampak negatif berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan. Indikator yang menjadi penanda suatu lingkungan dalam kondisi yang baik diantaranya Kualitas Lingkungan Hidup yang tergambarkan melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

**Tabel 2. 12 Indikator Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya
Tahun 2019-2023**

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	51,83 Sedikit Memenuhi	72,37 Memenuhi	64,52 Memenuhi	35,33 Sedikit	38,44 kurang
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	81,32, Cukup / Baik	78,20 Baik	83,82 Baik	82,26 Baik	83,72 Baik
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Poin	86,09	86,09	24,35	24,39	39,52

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023.

Indeks kualitas air di Kota Tasikmalaya dari tahun 2019-2023 mengalami penurunan kualitas yang disebabkan rumus perhitungan IKA terbaru berbeda dengan pada saat penentuan target, yaitu tanpa menyertakan faktor koreksi, sehingga menimbulkan penurunan nilai IKA di tahun 2022 dan 2023. Selain itu juga ada beberapa sungai yang status mutu airnya cemar berat, di antaranya Sungai Cilamajang Hulu, Cilamajang Tengah, Ciloseh Tengah, Cikalang Tengah, Sungai Cimulu Hilir, dan beberapa sungai lainnya yang merupakan pusat perdagangan dan jasa di Kota Tasikmalaya.

Indeks Kualitas Udara di Kota Tasikmalaya dari tahun 2019-2023 mengalami fluktuatif, namun secara umum kualitas udara di Kota Tasikmalaya berada pada kondisi baik. Hal ini disebabkan karena secara kumulatif daerah yang memiliki aktivitas cukup tinggi masih terpusat di beberapa titik, sehingga masih banyak wilayah yang kondisinya udara baik.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kota Tasikmalaya dari tahun 2019-2023 mengalami penurunan yang cukup tajam dari tahun 2019 sebesar 86,09 menjadi 39,52 pada tahun 2023. Hal ini disebabkan ada perbedaan konstanta dalam proses perhitungan berdasarkan tutupan hutan primer, sedangkan untuk hutan primer tidak berada di wilayah Kota Tasikmalaya.

2.1.1.6. Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan

Rencana pola ruang berdasarkan ranperda RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2024-2044 terdiri dari kawasan lindung seluas 331 Ha dan kawasan budidaya seluar 17.913 Ha. Adapun rincian dari masing-masing kawasan dalam dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 13 Rencana Pola Ruang Kota Tasikmalaya Tahun 2024-2044

No.	Kawasan	Luas (Ha)	%
A	Kawasan Lindung	331	1,81
1	Badan Air	193	1,06
2	Kawasan Perlindungan Setempat	3	0,02
3	Ruang Terbuka Hijau	9	0,05
4	Kawasan Cagar Budaya	126	0,69
B	Kawasan Budidaya	17913	98,19
1	Badan Jalan	47	0,26
2	Kawasan hutan produksi	372	2,04
3	Kawasan Pertanian	2759	15,12
4	Kawasan Perikanan	3	0,02
5	Kawasan Pertambangan dan Energi	58	0,32
6	Kawasan Peruntukan Industri	449	2,46
7	Kawasan Permukiman	10314	56,53
8	Kawasan Perdagangan dan Jasa	3603	19,75
9	Kawasan Perkantoran	19	0,10
10	Kawasan Transportasi	11	0,06
11	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	278	1,52
	Total	18244	100,00

Sumber: Draft Ranperda RTRW Kota Tasikmalaya 2024-2044.

Penggunaan lahan di Kota Tasikmalaya dalam periode 2002 sampai dengan 2016 masih didominasi oleh lahan sawah, permukiman dan tegal/kebun. Lahan permukiman mengalami kenaikan yang cukup signifikan seluas 1.583 Ha, sedangkan untuk penggunaan lahan lainnya relatif mengalami penurunan khususnya lahan sawah dan ladang, lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 14 Penggunaan Lahan di Kota Tasikmalaya Tahun 2002-2016

No.	Penggunaan Lahan	Tahun		
		2002	2008	2016
1	Tanah Sawah	6508	6184	6397
2	Pekarangan (termasuk Permukiman)	3426	4046	5009
3	Tegal/Kebun	6318	2202	1743

No.	Penggunaan Lahan	Tahun		
		2002	2008	2016
4	Ladang Huma	-	624	226
5	Padang Rumput	-	20	-
6	Hutan Rakyat	-	1086	3658
7	Hutan Negara	343	343	-
8	Perkebunan	-	877	-
9	Kolam/Empang	384	680	258
10	Badan jalan	-	-	32
11	Bandar Udara	-	-	90
12	Bangunan Industri	-	-	93
13	Bangunan Pemerintahan	-	-	11
14	Danau/Situ	-	-	46
15	Fasilitas Peribadatan	-	-	1
16	Kawasan Pariwisata	-	-	9
17	Lahan Tidak Terbangun	-	-	699
18	Lapangan	-	-	22
19	Pasar	-	-	14
20	Pemukaman	-	-	25
21	Sungai	-	-	81
22	Terminal	-	-	8
23	Lain-lain	177	1094	-
Total		17156	17156	18422

Sumber: Diolah dari berbagai sumber RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2004, RTRW Kota Tasikmalaya 2011-2031, Draft Ranperda RTRW Kota Tasikmalaya 2024-2044.

2.1.1.7. Energi

Pasokan listrik di Indonesia dikelola oleh Perusahaan Listrik Negara atau disingkat dengan PLN. Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 18, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Pada tahun 2021, PLN Rayon Kota Tasikmalaya mampu memproduksi energi listrik sebanyak 785.262.714 kWh. Jumlah energi listrik yang terjual mencapai 503.973.401 kWh.

Tabel 2. 15 Statistik Kelistrikan Kota Tasikmalaya Tahun 2021

Uraian	Volume
Daya Terpasang	301.432,09 kW
Produksi Listrik	785.262.714 kWh
Listrik Terjual	503.973.401 kWh
Dipakai Sendiri	3.069.903 kWh
Susut/Hilang	57.221.787 kWh

Sumber: PT. PLN (Persero) Kota Tasikmalaya, 2021.

Data penggunaan listrik Kota Tasikmalaya untuk tahun 2021 menggambarkan kapasitas terpasang sebesar 301.432,09 kW, dengan produksi total mencapai 785.262.714 kWh. Dari produksi tersebut, 503.973.401 kWh berhasil terjual, sedangkan penggunaan internal adalah 3.069.903 kWh. Angka susut atau kehilangan listrik, yang mungkin mencerminkan kerugian teknis atau non-teknis, tercatat pada 57.221.787 kWh.

2.1.1.8. Persampahan

Pengelolaan persampahan di Kota Tasikmalaya dilaksanakan melalui dua langkah, yaitu penanganan dan pengurangan sampah. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, maka setiap tahunnya jumlah sampah akan semakin meningkat pula. Timbulan sampah di Kota Tasikmalaya pada tahun 2023 adalah 117.955,24 ton/tahun atau 323,17 ton/hari, sedangkan capaian pengelolaan sampah yaitu sebesar 265,55 ton/hari atau 96.925,31 ton/tahun. Dengan demikian capaian pengelolaan sampah baru mencapai 82,17 persen dari timbulan sampah keseluruhan pada tahun 2023. Tabel berikut ini memperlihatkan capaian pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya.

Tabel 2. 16 Pengelolaan Persampahan di Kota Tasikmalaya
Tahun 2019–2023

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Pengelolaan Sampah	%	71,04	71,45	77,86	81,77	82,17
2	Persentase Penanganan Sampah	%	58,98	60,93	61,23	65,11	65,21
3	Persentase Pengurangan Sampah	%	12,05	10,52	12,53	16,66	16,96

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2024.

Apabila melihat tabel di atas, capaian pengelolaan sampah selama tahun 2019-2023 menunjukkan trend yang meningkat mulai dari 71,04 persen pada tahun 2019 sampai 82,17 pada tahun 2023.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya tingkat capaian penanganan sampah diantaranya masih terbatasnya sarana dan prasarana pengangkutan sampah baik kuantitas maupun kualitasnya, kurangnya sumber daya manusia, dan belum adanya teknologi pengolahan sampah di TPA Ciangir. Selain itu, salah satu penyebab yang menentukan terhadap capaian penanganan persampahan yaitu pengurangan sampah atau pengelolaan sampah secara mandiri dari sumbernya belum menjadi pola hidup atau kebiasaan pada masyarakat Kota Tasikmalaya.

Peningkatan jumlah penduduk di Kota Tasikmalaya akan diikuti oleh jumlah sampah yang dihasilkan. Hal ini tentunya harus ditunjang dengan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang mendukung agar tidak terjadi penumpukan sampah. Penyebab kondisi penumpukan sampah pada beberapa wilayah dikarenakan sistem pengangkutan sampah kurang efektif dan efisien. Berikut ini adalah jenis dan jumlah sarana pengangkutan sampah di Kota Tasikmalaya.

Tabel 2. 17 Sarana Pengangkutan Persampahan Tahun 2023

No.	Jenis	Kondisi			Jumlah
		Baik	Layak	Tidak Layak/ Rusak	
1	Dump Truck	11	6	13	30
2	Arm roll	2	8	4	14
3	Truck Engkel	1	1	1	3
4	Pick Up	-	2	-	3
5	Motor Roda 3	7	8	12	27
6	Kontainer Amroll	26	16	45	87
Jumlah					164

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2024.

Selain sarana pengangkutan sampah, dalam pengelolaan sampah juga diperlukan sarana alat berat. Berikut sarana alat berat yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Tabel 2. 11 Sarana Alat Berat Persampahan Tahun 2023

No.	Jenis	Kondisi			Jumlah
		Baik	Layak	Rusak	
1	Buldozer D31	-	-	1	1
2	Buldozer D39	-	-	1	1
3	Eksavator Liu Gong	-	-	1	1
4	Eksavator Pindad	1	1	-	2
Jumlah					5

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2024.

Pengelolaan sampah di TPA Ciangir saat ini masih menggunakan sistem yang paling sederhana yaitu *open dumping*. Sistem *open dumping* yang dilakukan tanpa pengolahan dalam jangka panjang dapat menimbulkan masalah, terutama untuk jenis sampah organik yang membusuk karena menimbulkan gangguan bau, pencemaran air, estetika, dan menjadi sumber penularan penyakit. TPA Ciangir yang memiliki luas ±13 Ha, saat ini terlihat penuh oleh tumpukan sampah bahkan hingga menutupi jalan inspeksi, walaupun sebenarnya volume efektifnya belum mencapai *over capacity*. Kondisi ini terjadi karena belum optimalnya penanganan sampah di TPA Ciangir yang disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya SDM, dan pelaksanaan SOP yang belum maksimal dalam operasional TPA.

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan sampah, telah dikembangkan gerakan 3R melalui kegiatan bank sampah yang dimulai dari tingkat paling rendah yaitu tingkat RW sampai dengan tingkat kecamatan. Pada tahun 2021 Pemerintah Kota Tasikmalaya mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan dibentuknya bank sampah di setiap kelurahan melalui anggaran Dana Kelurahan, sehingga sampai dengan tahun 2023 jumlah bank sampah, baik bank sampah induk maupun unit, dan TPS3R di Kota Tasikmalaya mencapai 31 unit. Secara lebih jelas jumlah bank sampah diperlihatkan pada tabel berikut.

**Tabel 2. 12 Jumlah Bank Sampah di Kota Tasikmalaya
Tahun 2021 - 2023**

Jenis Bank Sampah	Tahun		
	2021	2022	2023
Bank Sampah Induk	1	1	1
Bank Sampah Unit	16	21	28
TPS3R	2	2	2
Jumlah	19	24	31

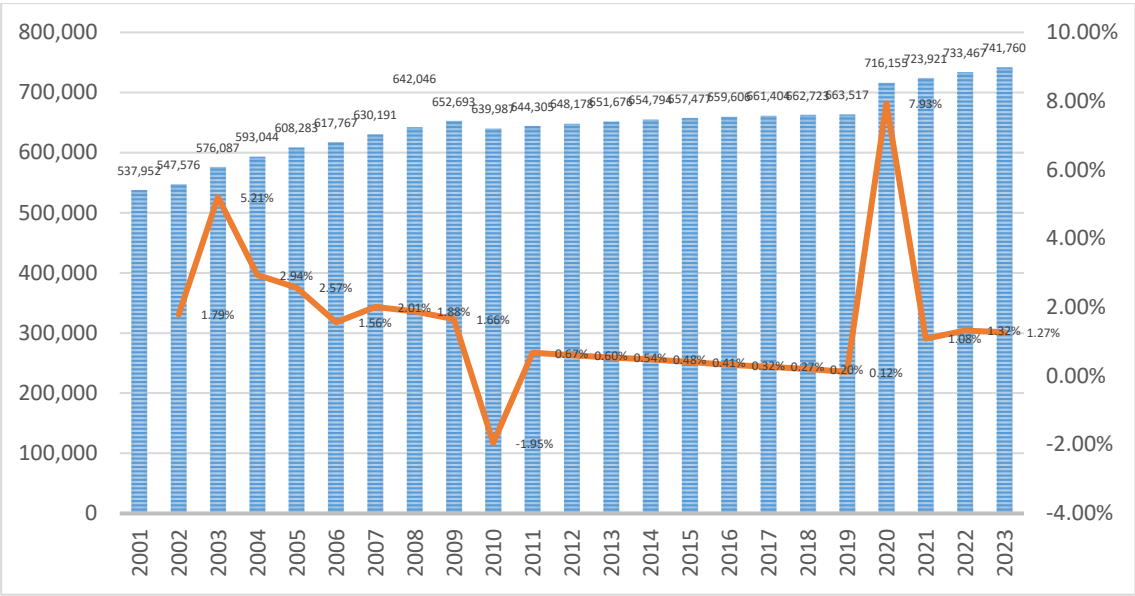
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2024.

2.1.2. Demografi

2.1.2.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Keberadaan penduduk sangat penting didalam proses pembangunan, oleh karena itu penduduk akan menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola dengan baik dan sebaliknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola dengan baik. Perubahan jumlah penduduk dalam suatu periode tertentu, diukur dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi tingkat kelahiran, tingkat kematian dan imigrasi penduduk.

Gambar 2. 5 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2001-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya, 2023.

Kota Tasikmalaya sejak awal berdiri tahun 2001 hingga tahun 2023, Kota Tasikmalaya cenderung mengalami peningkatan jumlah penduduk, hanya terjadi penurunan di tahun 2009 ke 2010. Kota Tasikmalaya dapat dikategorikan sebagai Kota Besar sejak awal berdiri, yaitu jumlah penduduk 537.952 jiwa di tahun 2001.

Berbeda dengan tahun 2023, jumlah penduduk Kota Tasikmalaya pada tahun 2019 memiliki perbandingan yang cukup besar yakni mencapai 1,15

persen. Dari total penduduk semula 663.517 jiwa pada 2019 meningkat menjadi 741.760 jiwa pada tahun 2023. Kenaikan tersebut didasarkan dengan adanya sensus penduduk pada tahun 2020. Laju pertumbuhan penduduk juga mengalami kenaikan dari tahun 2001 sampai dengan 2022, terutama pada tahun 2020 yang sangat tinggi diangka 7,93 persen, kenaikan ini dilakukan sensus penduduk tahun 2020 oleh BPS dan adanya cara perhitungan yang dilakukan oleh BPS.

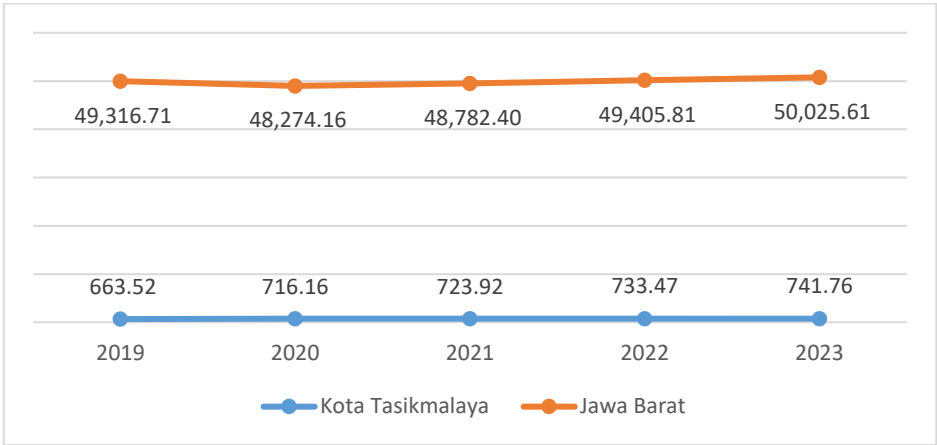
Tabel 2. 20 Jumlah Penduduk, Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kota Tasikmalaya

Kecamatan	Penduduk (ribu jiwa)					Persentase Penduduk (%)					Kepadatan Penduduk (per km ²)				
Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2021	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Kawalu	96.942	96,78	97,59	98,64	99,51	13,47	13,51	13,48	13,45	13,42	2.267	2.286	2.305	2.372	2.393
Tamansari	75.970	77,07	78,25	79,62	80,87	10,55	10,76	10,81	10,86	10,90	2.111	2.083	2.115	2.166	2.200
Cibeureum	68.604	68,6	69,06	69,69	70,19	9,53	9,58	9,54	9,50	9,46	3.603	3.730	3.755	3.745	3.771
Purbaratu	45.048	44,38	44,85	45,42	45,92	6,26	6,2	6,2	6,19	6,19	3.754	3.514	3.551	3.735	3.776
Tawang	64.114	60,16	60,81	61,61	62,31	8,91	8,4	8,4	8,40	8,40	9.068	8.706	8.801	8.929	9.030
Cihideung	73.372	71,95	72,73	73,69	74,52	10,19	10,05	10,05	10,05	10,05	13.365	13.202	13.345	13.521	13. 672
Mangkubumi	96.834	97,91	98,81	99,96	100,92	13,45	13,67	13,65	13,63	13,61	3.948	4.079	4.119	4.135	4.176
Indihiang	57.826	57,57	58,39	59,36	60,24	8,03	8,04	8,07	8,09	8,12	5.238	5.301	5.377	5.451	5.532
Bungursari	59.064	60,19	61,55	63,09	64,54	8,20	8,41	8,5	8,60	8,70	3.495	3.416	3.493	3.591	3.673
Cipedes	82.108	81,56	81,88	82,39	82,75	11,41	11,39	11,31	11,23	11,16	9.164	9.022	9.057	9.114	9.154
Kota Tasikmalaya	719,88	716,16	723,92	733,47	741,76	100	100	100	100	100	3.917	3.887	3.930	4.005	4.050

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2020-2024.

Apabila dilihat dari jumlahnya, penduduk Kota Tasikmalaya tahun 2023 sekitar 741,76 ribu orang atau ekuivalen dengan 1,48 persen dari jumlah total penduduk Provinsi Jawa Barat.

Gambar 2. 6 Jumlah Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2019-2023

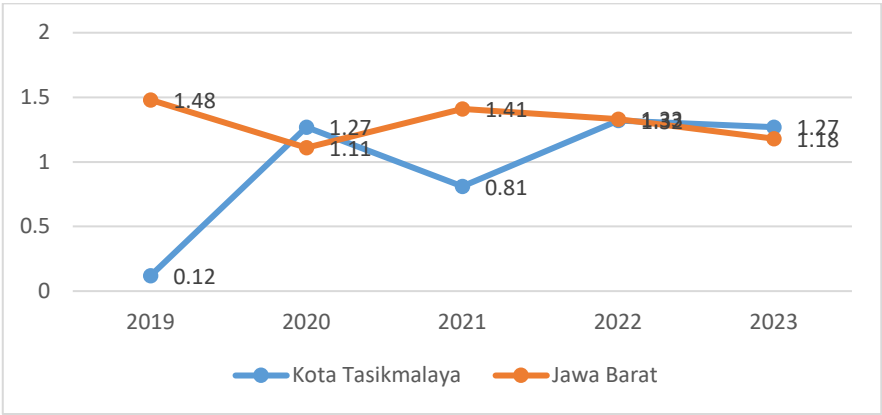


Sumber: Data BPS Kota Tasikmalaya, data diolah (2024).

Perubahan jumlah penduduk dalam suatu periode tertentu, diukur dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi tingkat kelahiran, tingkat kematian dan imigrasi penduduk.

Berbeda dengan tahun 2023, jumlah penduduk Kota Tasikmalaya pada tahun 2019 memiliki perbandingan yang cukup besar yakni mencapai 1,15 persen. Dari total penduduk semula 663.517 jiwa pada 2019 meningkat menjadi 741.760 jiwa pada tahun 2023. Kenaikan tersebut didasarkan dengan adanya sensus penduduk pada tahun 2020. Laju pertumbuhan penduduk juga mengalami kenaikan dari tahun 2001 sampai dengan 2022, terutama pada tahun 2020 yang sangat tinggi diangka 7,93 persen, kenaikan ini dilakukan sensus penduduk tahun 2020 oleh BPS dan adanya cara perhitungan yang dilakukan oleh BPS.

Gambar 2. 7 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2019-2023



Sumber: Data BPS Kota Tasikmalaya, data diolah (2024).

Mencermati dinamika penduduk Kota Tasikmalaya yang cenderung bertambah dan dalam rangka menangkap peluang bonus demografi maka perlu perubahan paradigma tentang bonus demografi yang tidak hanya menekankan perubahan struktur penduduk tetapi lebih menekankan konfigurasi tingkat pendidikan penduduk. Karena itu, perhatian sangat besar pada keterampilan manusia sangat diperlukan.

Selain itu, terdapat 4 (empat) aspek yang harus diantisipasi dalam menghadapi bonus demografi, yaitu:

1. Keberlanjutan ekonomi, melalui peningkatan pertumbuhan LPE dengan menekan rasio gini serta menurunkan TPT dengan penguatan akses ketenagakerjaan di sektor formal dan informal.
2. Keberlanjutan sosial budaya, melalui peningkatan serta efektivitas sistem perlindungan sosial yang inklusif, dan pemajuan kebudayaan.
3. Keberlanjutan ekologi, melalui efektivitas pemenuhan standar lingkungan yang tinggi serta penggunaan energi baru dan terbarukan dalam menopang efektivitas pembangunan.
4. Investasi SDM untuk menjawab daya saing Kota Tasikmalaya agar bisa unggul atau setidaknya kompetitif di berbagai aspek di level internasional, memaksimalkan era industry 4.0 menuju *society 5.0* yang ditandai dengan masyarakat telah mencapai *comfort, vitality and high quality life*.

2.1.2.2. Komposisi Penduduk

Berdasarkan komposisi penduduk Kota Tasikmalaya berada pada periode jendela kesempatan atau *window opportunity* untuk menikmati bonus demografi. Bonus demografi merupakan keadaan kependudukan dimana jumlah usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif.

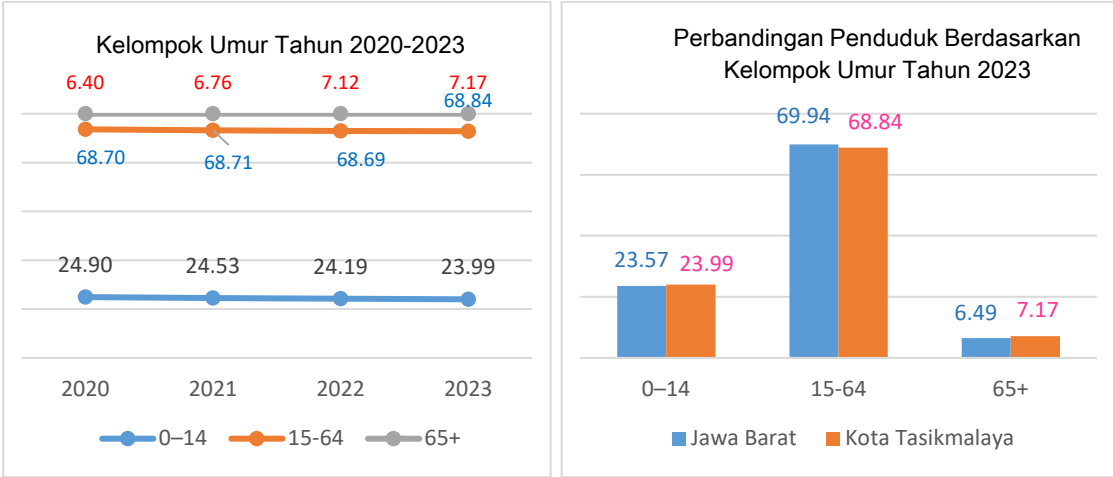
Tabel 2. 21 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2023

Kelompok Umur	Jumlah			
	2020	2021	2022	2023
0-4	60.765	60.999	61.360	63.195
5-9	56.084	55.781	55.862	56.700
10-14	61.465	60.807	60.171	58.056
15-19	61.616	61.394	61.372	62.085
20-24	60.110	60.010	59.953	60.939
25-29	58.544	58.741	59.090	59.650
30-34	56.926	57.163	57.470	58.299
35-39	54.014	54.392	54.959	55.826
40-44	50.901	51.369	51.840	52.582
45-49	46.258	47.206	48.247	48.811
50-54	40.663	41.710	42.839	43.320
55-59	35.569	36.802	38.084	37.879
60-64	27.384	28.624	29.988	31.204
65-69	21.110	22.270	23.430	23.263
70-74	12.906	13.992	15.183	16.195

Kelompok Umur	Jumlah			
	2020	2021	2022	2023
75+	11.840	12.661	13.619	13.756
Kota Tasikmalaya	716.155	723.921	733.467	741.760

Sumber: BPS, Kota Tasikmalaya Dalam Angka tahun 2020-2023.

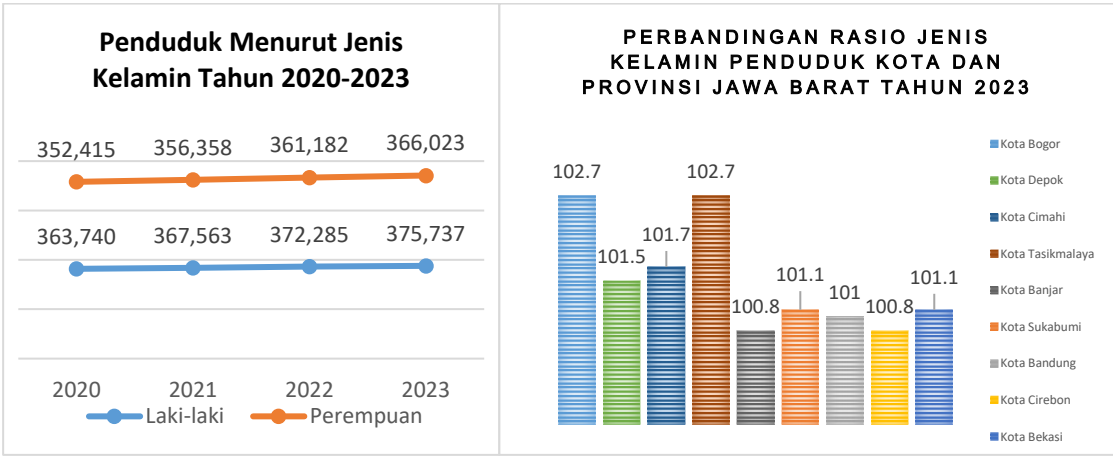
Gambar 2. 8 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2023



Sumber: Data BPS Kota Tasikmalaya, data diolah (2024).

Tren penduduk usia produktif Kota Tasikmalaya cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mencapai 68,84 persen di tahun 2023 lebih sedikit dibawah Provinsi Jawa Barat yang mencapai 69,94 persen. Penduduk usia produktif yang tinggi tersebut dipengaruhi oleh tingkat kelahiran dan kematian yang sama-sama rendah.

Gambar 2. 9 Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2023



Sumber: Data BPS Kota Tasikmalaya, data diolah (2024).

Berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki di Kota Tasikmalaya cenderung lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, rasio penduduk Kota Tasikmalaya sebesar 102,65 persen yang artinya terdapat 102 laki-laki per 100 perempuan.

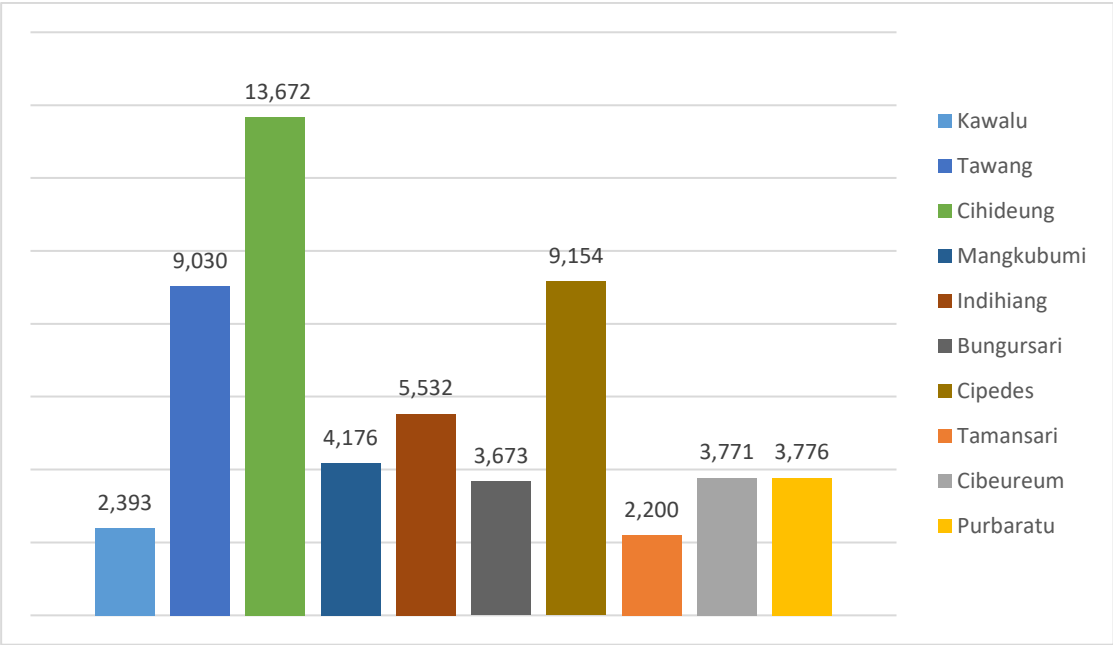
Komposisi penduduk menurut jenis kelamin mempengaruhi tingkat kesetaraan gender (*gender equality*), yaitu kesamaan hak dan peluang antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, tantangan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menangani jumlah penduduk yang besar dengan rasio penduduk yang relatif setara adalah bagaimana memaksimalkan kontribusi perempuan dalam pembangunan. Sehingga tidak ada diskriminasi dan marginalisasi terhadap perempuan dalam pembangunan di Kota Tasikmalaya.

2.1.2.3. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah ukuran persebaran penduduk yang menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah.

Kecamatan Cihideung merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terbesar yaitu 13.672 jiwa/km² dan Kecamatan Tamansari merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu 2.200 jiwa/km² Sedangkan kepadatan penduduk Kota Tasikmalaya adalah 4.050 jiwa/km².

Gambar 2. 10 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Tasikmalaya Tahun 2023



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2024.

2.1.2.4. Pengendalian Penduduk

Salah satu upaya untuk mengatasi kepadatan penduduk, dibutuhkan pengendalian penduduk khususnya di Kota Tasikmalaya. Indikator yang digunakan untuk mengukur pengendalian penduduk adalah Total Fertility Rate (TFR). Angka Kelahiran Total atau TFR merupakan parameter fertilitas untuk mengetahui angka kelahiran total per wanita subur (15-49 tahun). TFR adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya, apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Semakin rendah angka ini menunjukkan makin terkendalnya jumlah kelahiran penduduk.

**Tabel 2. 22 Total Fertility Rate (TFR) Kota Tasikmalaya
Tahun 2021-2023**

Indikator Kinerja	Tahun		
	2021	2022	2023
Angka Kelahiran Total (TFR)	2,03	2,01	2,00

Sumber: Dinas P2KBP3A Kota Tasikmalaya, 2024

Berdasarkan tabel di atas, kelahiran total di Kota Tasikmalaya tahun 2023 adalah 2,00 lebih rendah dari dua tahun sebelumnya. Penurunan fertilitas mengakibatkan proporsi anak-anak dalam populasi ikut menurun. Kondisi ini dapat mengakibatkan rasio ketergantungan menjadi lebih rendah dan menciptakan bonus demografi, dengan terciptanya SDM yang berkualitas, kecukupan pendidikan dan kesehatan.

Pengukuran indikator Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) cara modern dilakukan dengan membandingkan jumlah perempuan yang berstatus kawin usia 15-49 tahun dan menggunakan alat/cara KB modern dengan jumlah perempuan usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. Semakin tinggi angka mCPR menunjukkan capaian kepesertaan ber-KB masyarakat khususnya pada metode kontrasepsi modern semakin baik.

**Tabel 2. 23 Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)
Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2023**

Indikator Kinerja	Tahun		
	2021	2022	2023
Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	72,37	72,98	73,07

Sumber : Dinas P2KBP3A Kota Tasikmalaya, 2024

Berdasarkan tabel di atas, Angka prevalensi kontrasepsi modern di Kota Tasikmalaya tahun 2023 adalah 73,07 persen. Capaian ini lebih baik dari capaian Provinsi Jawa Barat sebesar 63,2 persen. Manfaat mCPR untuk masyarakat salah satunya untuk menjaga kesehatan reproduksi dengan menggunakan KB cara modern yang sesuai dengan tujuan dan kondisi kesehatan reproduksinya.

Disamping itu, persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet Need*) adalah persentase wanita kawin 15-49 tahun (pasangan usia subur) yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjaga jarak kelahiran berikutnya tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi apapun.

**Tabel 2. 24 Persentase Unmet Need Kota Tasikmalaya
Tahun 2021-2023**

Indikator Kinerja	Tahun		
	2021	2022	2023
Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	14,00	12,94	13,59

Sumber : Dinas P2KBP3A Kota Tasikmalaya, 2024

Berdasarkan tabel di atas, persentase *unmet need* di Kota Tasikmalaya tahun 2023 sebesar 13,59 persen lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Barat sebesar 10,6 persen. Hal ini perlu mendapat perhatian, karena dengan meningkatnya angka *unmet need*, KB perlu ditinjau lebih dalam karena faktor penyebab terjadinya *unmet need* tidak hanya masalah akses pelayanan. Terdapat beberapa permasalahan sosial yang menjadi penyebab terjadinya *unmet need* seperti masyarakat yang masih menganggap bahwa KB tidak diperbolehkan dalam agama, pasangan usia subur yang tinggal berjauhan sehingga merasa tidak perlu menggunakan alat kontrasepsi atau peran penyuluh lapangan (PKB/PLKB) belum optimal. Sehingga berdampak pada putus pakai dan menurunnya pemakaian kontrasepsi modern.

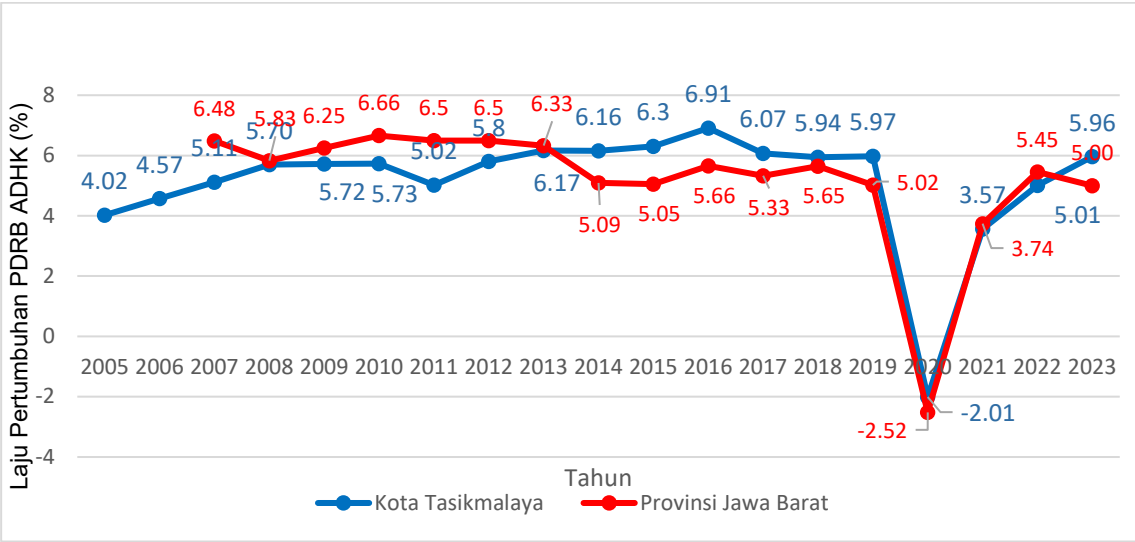
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan ekonomi

Menurut Todaro dan Smith (2004), ada 3 faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan penduduk, akumulasi modal dan kemajuan teknologi. Selain itu pertumbuhan ekonomi banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya faktor ekonomi, sosial, dan politik. Jika faktor-faktor tersebut bekerja dengan tepat maka peningkatan pertumbuhan ekonomi tak dapat dielakkan. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. LPE Kota Tasikmalaya pada kurun waktu 2005-2023 disajikan melalui grafik berikut.

Gambar 2. 11 Perkembangan LPE Kota Tasikmalaya 2005-2023



Sumber: BPS, 2024.

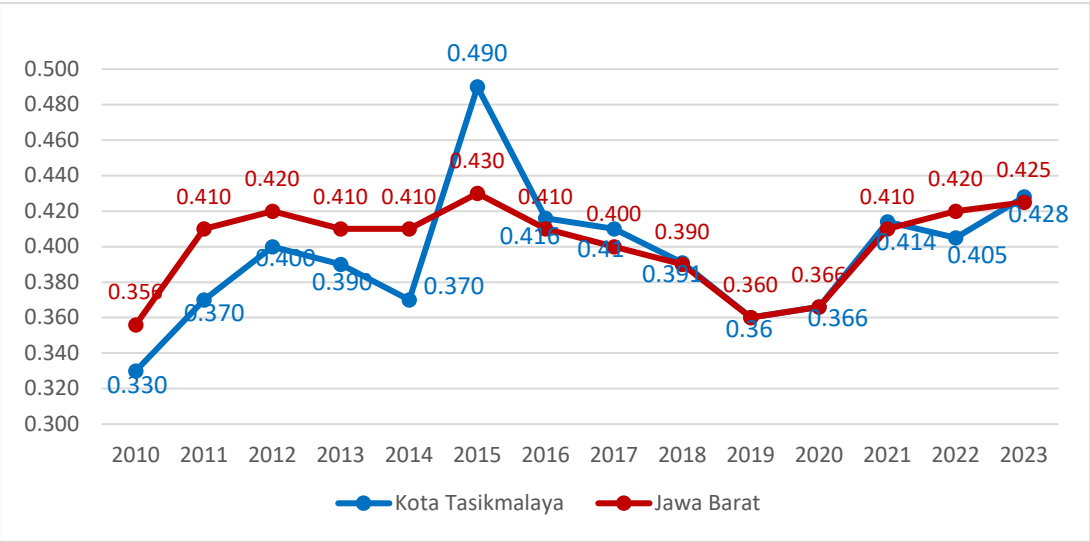
Grafik tersebut menunjukkan bahwa LPE memiliki sedikit kecenderungan peningkatan dalam kurun waktu tahun 2005-2023, mengecualikan penurunan signifikan pada tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Pada tahun 2005, LPE yang tercatat adalah sebesar 4,02 persen sedangkan pada tahun 2023, LPE yang tercatat adalah sebesar 5,96 persen. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, LPE Kota Tasikmalaya menunjukkan angka yang lebih tinggi terhitung sejak tahun 2013 hingga 2020. LPE pasca-pandemi

menunjukkan indikasi pemulihan yang signifikan, meskipun belum mampu mencapai nilai LPE seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

2.2.1.2 Ketimpangan Pendapatan

Koefisien Gini memberikan gambaran distribusi pendapatan antara individu di dalam wilayah tertentu, yang mengindikasikan ketimpangan di wilayah tersebut. Indeks gini diukur dalam skala 0 – 1, di mana 0 merepresentasikan kesetaraan distribusi pendapatan yang sempurna, sedangkan 1 merepresentasikan ketimpangan distribusi pendapatan yang sempurna. Koefisien gini Kota Tasikmalaya disajikan melalui grafik berikut.

Gambar 2. 12 Koefisien Gini Kota Tasikmalaya 2010-2023



Sumber: BPS, 2024.

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien Gini di Kota Tasikmalaya cenderung fluktuatif dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat. Meskipun demikian, secara umum nilai koefisien Gini di tingkat kota masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat provinsi. Jika dirata-ratakan, koefisien Gini Kota Tasikmalaya selama 12 tahun adalah sebesar 0,393, sedangkan koefisien Gini Provinsi Jawa Barat pada periode yang sama adalah sebesar 0,407. Angka tersebut mengindikasikan bahwa pendapatan antar individu di Kota Tasikmalaya sedikit lebih terdistribusi secara merata dibandingkan dengan distribusi pendapatan di tingkat provinsi, walaupun secara umum menunjukkan distribusi yang masih timpang dan secara historis cenderung menunjukkan peningkatan ketimpangan.

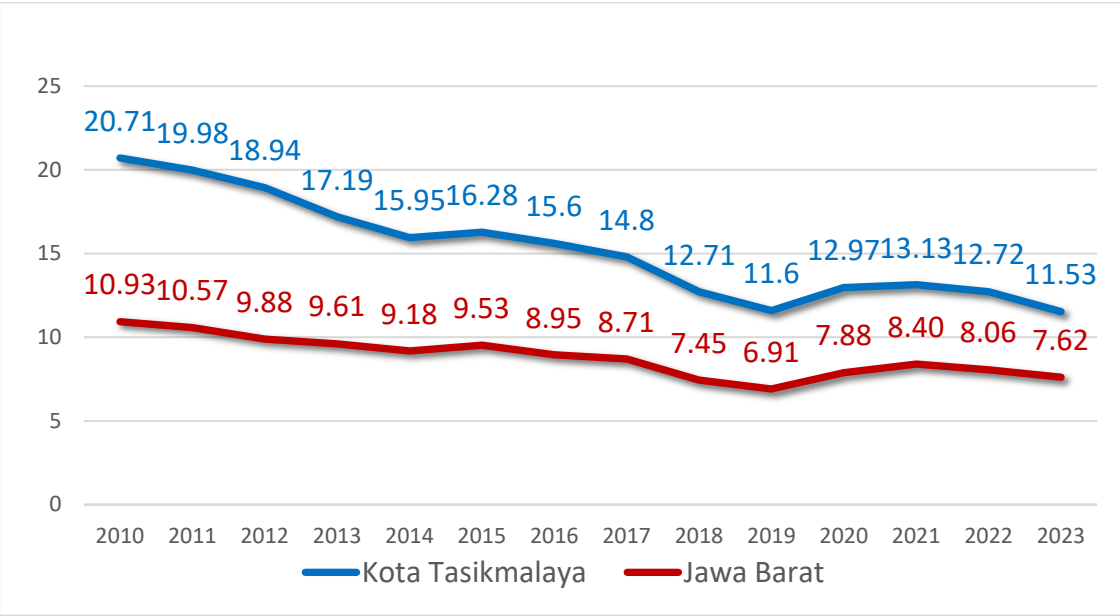
2.2.1.3 Kemiskinan

Tingkat kesejahteraan erat kaitannya dengan kemiskinan, karena dengan berkurangnya penduduk miskin dapat mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan bukan hal yang terbentuk dengan sendirinya, melainkan hasil interaksi dalam kehidupan manusia baik dari aspek sosial maupun ekonomi.

Angka kemiskinan dinyatakan sebagai persentase penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan (GK) terhadap total penduduk di wilayah tersebut. Data BPS menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya

mengalami lonjakan besar pada tahun 2008, di mana persentase penduduk miskin meningkat menjadi 26,08 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 9,30 persen. Sejak lonjakan tersebut, angka kemiskinan di kota Tasikmalaya konsisten berada di atas tingkat kemiskinan provinsi yang sejak tahun 2005 cenderung terus mengalami penurunan. Meskipun demikian, angka kemiskinan di tingkat kota memiliki tren penurunan yang signifikan pasca lonjakan tahun 2008, dari angka 26,08 persen menjadi 11,53 persen pada tahun 2022.

Gambar 2. 13 Angka Kemiskinan Kota Tasikmalaya 2005-2023



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2023.

Indikator makro kemiskinan Kota Tasikmalaya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 25 Indikator Makro Kemiskinan Kota Tasikmalaya
Tahun 2012-2023**

INDIKATOR	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Garis Kemiskinan (Rp/bulan/kapita)	263.177	293.985	328.399	337.841	351.718	367.673	397.215	397.215	447.008	457.899	470.150	480.341	498.711	537.497
Penduduk Miskin (orang)	131.538	129.759	123.400	112.163	105.440	106.780	102.790	97.850	84.220	76.900	86.130	89.460	87.130	79.370
Tingkat Kemiskinan (%) (P0)	20,71	19,98	18,92	17,19	15,95	16,28	15,60	14,80	12,71	11,60	12,97	13,13	12,72	11,53
Kedalaman Kemiskinan (%) (P1)	4,11	3,21	3,97	2,57	3,12	2,85	2,37	2,01	1,52	1,98	1,75	2,42	2,34	1,62
Keparahan Kemiskinan (%) (P2)	1,17	0,94	1,25	0,63	0,86	0,69	0,57	0,42	0,31	0,53	0,39	0,69	0,65	0,32

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2005-2023.

Persentase penduduk miskin atau tingkat kemiskinan di Kota Tasikmalaya dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang cukup signifikan, ini dapat diartikan bahwa program-program yang telah dilaksanakan pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah memiliki dampak terhadap hal tersebut. Namun pada tahun 2020 dan 2021 tingkat kemiskinan mengalami kenaikan karena adanya pandemi covid 19. Akibat dari pandemi ini jumlah masyarakat di bawah garis kemiskinan bertambah cukup signifikan. Tingkat kemiskinan kembali turun pada tahun 2022 tercatat sebesar 12,72 persen serta tahun 2023 tercatat sebesar 11,53 persen, hal ini mengindikasikan bahwa kondisi masyarakat Kota Tasikmalaya kembali pulih setelah pandemi Covid 19.

Garis kemiskinan di Kota Tasikmalaya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun artinya pengeluaran masyarakat Kota Tasikmalaya untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non makanan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa garis kemiskinan tidak terlepas dari inflasi yang terjadi di Kota Tasikmalaya, dan pemenuhan barang-barang makanan dan non makanan pun mengalami kenaikan.

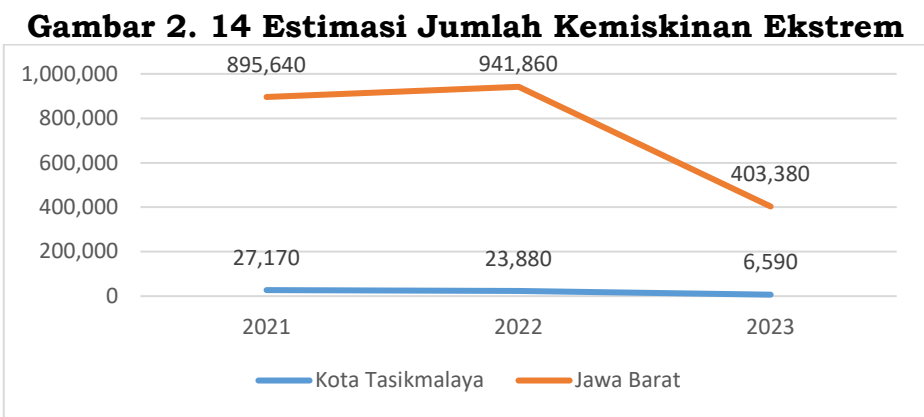
Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Tasikmalaya mengalami penurunan dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2019 mengalami kenaikan dari yang tercatat pada tahun 2018 sebesar 1,52 persen menjadi 1,98 persen artinya pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari Garis Kemiskinan. Pada tahun 2020 P1 mengalami penurunan, namun pada tahun 2021 terjadi kenaikan yang cukup besar yakni sebesar 2,42 persen. Hal ini menunjukkan semakin besar potensi ekonomi atau dana yang dibutuhkan untuk menurunkan kemiskinan. Pada tahun 2022 P1 kembali turun menjadi 2,34 persen. Hal ini menggambarkan pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati Garis Kemiskinan, dan pada tahun 2023 kedalaman kemiskinan berada pada angka 1,62 persen, hal ini menunjukkan bahawa pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi Garis Kemiskinan.

Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Tasikmalaya pun mengalami penurunan dari tahun ke tahun, namun seperti kedalaman kemiskinan, keparahan kemiskinan pun mengalami penurunan pada tahun 2020, dari yang tercatat sebesar 0,53 persen pada tahun 2019 menjadi 0,39 persen pada tahun 2020. Namun demikian terjadi kenaikan kembali pada tahun 2021 menjadi sebesar 0,69. Hal ini mengindikasikan semakin besarnya ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin. Pada tahun 2022 terjadi penurunan P2 sebesar 0,04 persen menjadi 0,65 persen, hal ini menggambarkan keparahan kondisi diantara penduduk miskin kembali merapat atau tidak terlalu senggang, dan pada tahun 2023 P2 berada pada angka 0,32 persen, hal ini menunjukkan bahwa keparahan kondisi diantara penduduk miskin semakin merapat atau gap diantara penduduk miskin semakin mengecil.

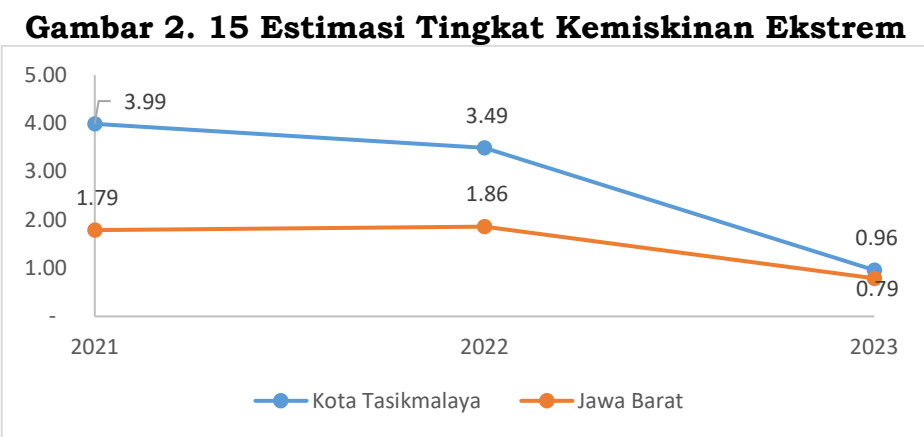
Pada tahun 2022 Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Melalui Inpres ini pemerintah menginstruksikan keterpaduan dan sinergi program serta kerja sama antar kementerian/ lembaga maupun pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antarkementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap

pendapatan dan layanan sosial. Penduduk miskin ekstrem merupakan bagian dari penduduk miskin, karena mereka hidup di bawah Garis Kemiskinan. Berikut perkembangan kemiskinan ekstrem di Kota Tasikmalaya dan Jawa Barat Tahun 2021-2023.



Sumber: BPS, 2023 dan P3KE.

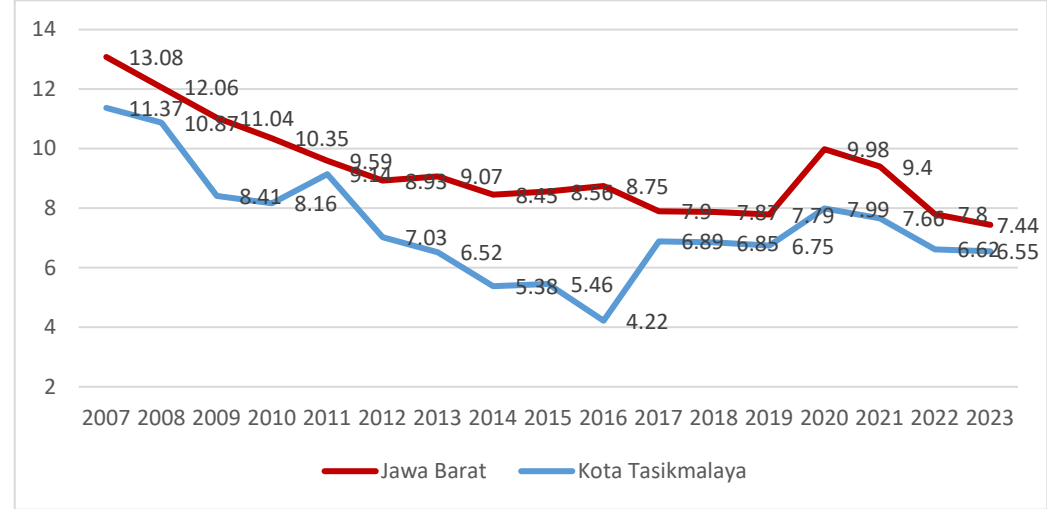


Sumber: BPS, 2023 dan P3KE.

2.2.1.4 Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah penduduk yang berstatus sebagai penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka mencakup penduduk yang tidak memiliki dan tidak mencari pekerjaan, penduduk yang tidak memiliki tetapi sedang mencari pekerjaan, dan penduduk yang sudah memiliki tetapi belum memulai pekerjaan. TPT Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu tahun 2007-2022 disajikan dalam grafik berikut.

Gambar 2. 16 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tasikmalaya Tahun 2007-2023



Sumber: BPS, 2024.

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2007 hingga tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka di Kota Tasikmalaya konsisten berada di bawah rata-rata provinsi dan cenderung mengalami penurunan. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa jarak antara besaran TPT di tingkat kota dengan tingkat provinsi mengalami penurunan, khususnya sejak tahun 2017 dan setelahnya. Selain itu, TPT juga menunjukkan tren penurunan baik di tingkat kota maupun di tingkat provinsi dalam kurun waktu tersebut.

2.2.1.5 Pembangunan Manusia

Konsep pembangunan manusia (*human development*) telah diperkenalkan sejak tahun 1990 oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) dalam *Global Human Development Report*. Konsep ini disebut sebagai paradigma baru model pembangunan. Menurut UNDP, pembangunan manusia merupakan proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging the people’s choices*) dengan tujuan utama menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Pencapaian tujuan ini sangat bergantung pada empat hal pokok, yaitu produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), kesinambungan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

Indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu:

- 1. Umur panjang dan hidup sehat
- 2. Pengetahuan
- 3. Standar hidup layak

Pada Tabel 2.5 digambarkan kondisi IPM di di Kota Tasikmalaya beserta komponennya, yaitu Umur Harapan Hidup (Tahun), Harapan Lama Sekolah (Tahun), Rata-rata Lama Sekolah (Tahun), serta Pengeluaran per Kapita. Jika dibandingkan dengan Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, angka IPM Kota Tasikmalaya cenderung lebih tinggi. Berdasarkan data dari Badan Pusat

Statistik Jawa Barat, IPM Tasikmalaya meningkat sejak tahun 2005-2009, kemudian terjadi penurunan angka pada tahun 2009-2010. Namun, pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 angka IPM Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan.

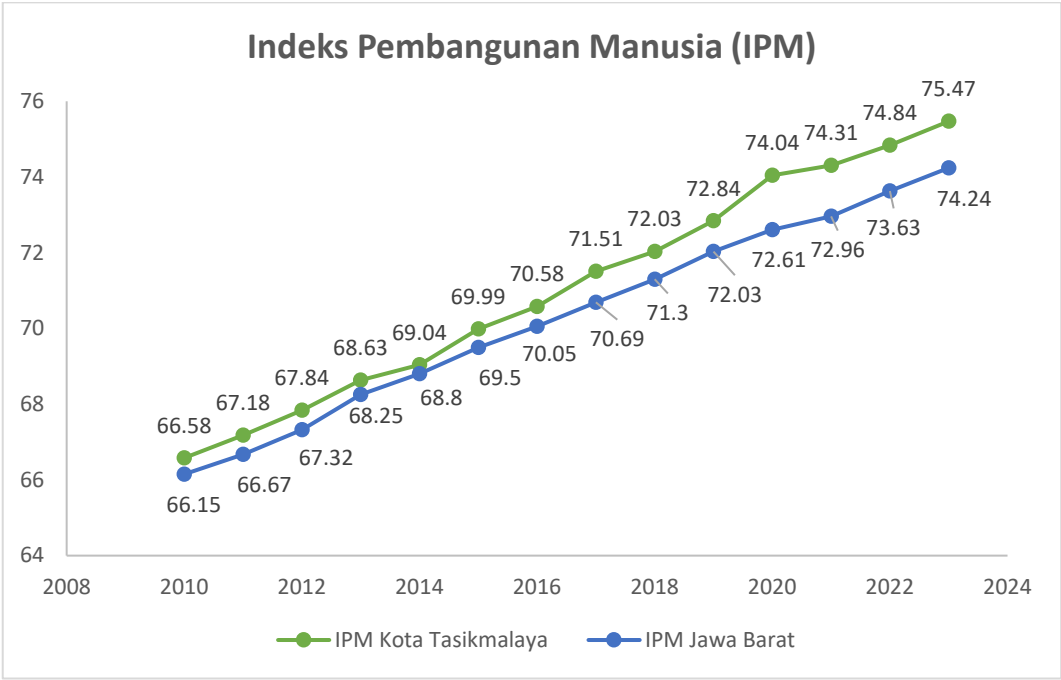
Sejak tahun 2005, IPM Kota Tasikmalaya berada dalam rentang kategori sedang dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Jawa Barat. Kemudian pada tahun 2006-2009, angka IPM Kota Tasikmalaya meningkat dan masuk pada kateori tinggi. Sempat terjadi penurunan pada tahun 2009-2010, namun pada tahun 2010-2015, IPM Kota Tasikmalaya kembali meningkat dan berada dalam kategori sedang. Kemudian, pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2024, IPM Kota Tasikmalaya masuk ke dalam kategori tinggi, dan jika dibandingkan dengan konteks regional, IPM Kota Tasikmalaya secara konsisten berada pada posisi lebih tinggi dari IPM Provinsi Jawa Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kota Tasikmalaya cenderung lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Jawa Barat. IPM Kota Tasikmalaya dapat dilihat selengkapnya pada tabel dan gambar berikut.

**Tabel 2. 26 Indeks Pembangunan Manusia Kota Tasikmalaya
Tahun 2005-2023**

Tahun	IPM Kota Tasikmalaya	Umur Harapan Hidup/UHH (tahun)	Harapan Lama Sekolah/HLS (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah/RL S (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (000 Rp.)
2005	72,08	_*	_*	_*	_*
2006	72,26	_*	_*	_*	_*
2007	72,74	_*	_*	_*	_*
2008	73,35	_*	_*	_*	_*
2009	73,96	_*	_*	_*	_*
2010	66,58	70,73	11,85	8,23	7828,00
2011	67,18	70,81	12,24	8,28	7910,00
2012	67,84	70,87	12,66	8,34	8013,00
2013	68,63	70,93	13,11	8,44	8158,00
2014	69,04	70,96	13,36	8,51	8210,00
2015	69,99	71,26	13,37	8,56	8785,00
2016	70,58	71,37	13,40	8,63	9145,00
2017	71,51	71,48	13,41	9,03	9497,00
2018	72,03	71,70	13,42	9,04	9855,00
2019	72,84	71,93	13,44	9,13	10414,00
2020	74,04	74,34	13,45	9,33	10263,00
2021	74,31	74,52	13,46	9,52	10213,00
2022	74,84	74,80	13,47	9,53	10578,00
2023	75,47	75,08	13,49	9,54	11063,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2023 (diolah).

Gambar 2. 17 Perbandingan IPM Kota Tasikmalaya dan Jawa Barat



Sumber: SP Long Form BPS Kota Tasikmalaya, 2024 (diolah).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tasikmalaya tahun 2023 mencapai 75,47, meningkat 0,63 poin (0,84 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (74,84). Selama 2020–2023, IPM Kota Tasikmalaya rata-rata meningkat sebesar 0,64 persen per tahun. Peningkatan IPM Kota Tasikmalaya tahun 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pertumbuhan IPM Kota Tasikmalaya tahun 2023 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami percepatan pertumbuhan, terutama dimensi standar hidup layak dan pengetahuan. Dua indikator mengalami percepatan pertumbuhan yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 0,15 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 0,07 persen dan Pengeluaran Riil per Kapita sebesar 4,58 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 3,57 persen. Sementara itu, Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) pertumbuhannya sedikit melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dari 0,38 persen menjadi 0,37 persen. Demikian juga Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pertumbuhannya juga melambat dari 0,11 persen menjadi 0,10 persen.

Apabila ditinjau dari capaian komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kota-kota di Jawa Barat, Kota Tasikmalaya berada pada urutan terendah. Untuk Pengeluaran Ril Per Kapita Kota Tasikmalaya berada di angka 11.063 ribu rupiah/orang/tahun. Sedangkan untuk Rata-rata Lama Sekolah berada di 9,54 tahun dan Umur Harapan Hidup mencapai 75,08 tahun. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 27 Perbandingan Komponen IPM Kota Tasikmalaya dengan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

No.	Kota	Pengeluaran Ril Per Kapita (ribu rupiah/orang/tahun)	Rata Lama Sekolah (Tahun)	Umur Harapan Hidup (Tahun)
1	Bogor	12.656	10,64	75,52
2	Sukabumi	11.799	10,37	74,89

No.	Kota	Pengeluaran Ril Per Kapita (ribu rupiah/orang/tahun)	Rata Lama Sekolah (Tahun)	Umur Harapan Hidup (Tahun)
3	Bandung	18.230	11,06	75,53
4	Cirebon	12.506	10,37	75,17
5	Bekasi	16.479	11,66	75,86
6	Depok	16.729	11,58	75,53
7	Cimahi	12.883	11,39	75,27
8	Tasikmalaya	11.063	9,54	75,08
9	Banjar	11.356	8,79	74,77

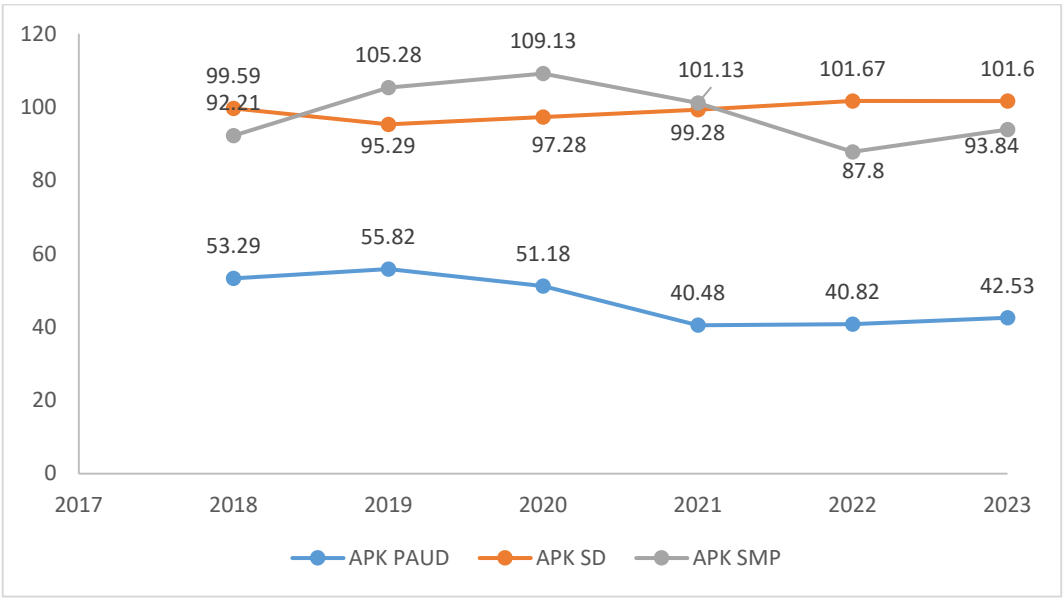
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024 (diolah).

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

2.2.2.1. Kualitas Pendidikan

Indikator yang menggambarkan kualitas pendidikan adalah angka partisipasi kasar (APK) yang menggambarkan partisipasi peserta didik untuk masing-masing tingkatan pendidikan sesuai dengan usianya. Capaian APK Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu tahun 2018-2023 dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 2. 18 Angka Partisipasi Kasar Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2023



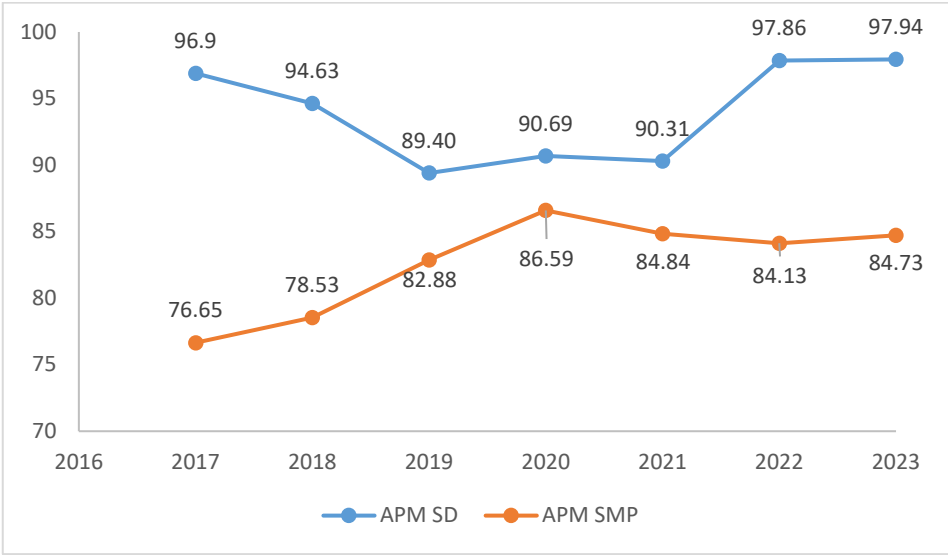
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2024.

APK pada jenjang pendidikan SD dan SMP mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 terjadi penurunan pada APK PAUD menjadi sebesar 51,18 persen dari tahun 2019 sebesar 55,82 persen, hal ini menunjukkan adanya penurunan sebesar 4,46 persen. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid 19, sehingga terdapat anak usia PAUD yang tidak bersekolah. Namun demikian, sejak tahun 2021 sampai tahun 2023 mengalami kenaikan seiring dengan pulihnya keadaan sosial ekonomi.

Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur seberapa banyak anak usia sekolah yang bersekolah tepat waktu. APM didefinisikan sebagai jumlah siswa/penduduk kelompok usia tertentu yang bersekolah pada tingkat

pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok usia tertentu.

Gambar 2. 19 Angka Partisipasi Murni Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2023



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2024.

APM SD/MI Sederajat pada tahun 2023 menunjukkan angka 97,94 persen sedangkant tahun sebelumnya 97,86 persen atau naik sebesar 0,08 persen, yang berarti bahwa terdapat 97,94 persen penduduk usia SD/MI sederajat yang mengenyam pendidikan SD/MI Sederajat, sendangkan APM SMP sebesar 84,73 persen pada tahun 2023 atau naik sebesar 0,6 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 84,73 persen penduduk usia SMP Sederajat yang mengenyam pendidikan SMP Sederajat.

Salah satu penunjang peningkatan angka indikator rata-rata lama sekolah adalah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, seperti jumlah sekolah dan rombongan belajar (rombel) yang mencukupi untuk semua penduduk usia sekolah, juga banyaknya guru yang mengajar mencukupi untuk semua murid. Selain jumlah guru yang mencukupi, kualitas guru pun sangat menentukan berhasil tidaknya suatu pendidikan.

Tabel 2. 28 Rasio Guru-Murid dan Rombel-Murid SD di Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2023

Tahun	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Jumlah Rombel	Rasio Guru-Murid	Rasio Rombel-Murid
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2017	2.975	64.278	2.299	1 : 21,60	1 : 28,00
2018	2.991	64.276	2.367	1 : 21,50	1 : 27,10
2019	2.982	63.827	2.390	1 : 21,36	1 : 26,60
2020	3.234	63.475	2.398	1 : 19,60	1 : 26,50
2021	3.188	62.421	2.025	1 : 19,58	1 : 30,82
2022	3.330	62.469	2.443	1 : 18,76	1 : 25,57
2023	3.454	75.360	2.422	1 : 21,82	1 : 31,11

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2024

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa untuk tingkat Sekolah Dasar pada tahun 2020 di Kota Tasikmalaya mengalami perbaikan yang signifikan yang ditunjukkan dengan jumlah guru yang bertambah sehingga rasio murid dengan guru selama periode tersebut mengalami penurunan sampai pada posisi mendekati standar 1 : 28 ditunjukkan dengan rasio 1 : 21,82. Dengan demikian rasio guru dan murid Sekolah Dasar di Kota Tasikmalaya sudah di atas standar. Sedangkan untuk rasio rombel-murid pada tahun 2023 sebesar 1 : 31,11 sudah di atas standar sesuai Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

Jenjang pendidikan lanjutan (SMP) menunjukkan kecenderungan lebih baik dibandingkan dengan sekolah tingkat dasar dari sisi rasio guru dan murid serta rasio murid dan rombel. Rasio guru dengan murid berada pada posisi 1 : 23,80. Hal ini menunjukkan bahwa satu orang guru SMP/MTs di Kota Tasikmalaya melayani 15 orang murid SMP/MTs. Dengan demikian rasio guru dan murid SMP di Kota Tasikmalaya sudah di atas standar. Sedangkan untuk rasio rombel-murid pada tahun 2023 sebesar 1 : 37,22 hal ini masih di atas standar yaitu 1 : 32 walaupun mengalami kenaikan sebagaimana Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

Tabel 2. 29 Rasio Guru-Murid dan Rombel-Murid SMP di Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2023

Tahun	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Jumlah Rombel	Rasio Guru-Murid	Rasio Rombel-Murid
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)
2017	1.628	28.755	964	1 : 17,7	1 : 29,8
2018	1.685	28.116	974	1 : 16,7	1 : 28,9
2019	1.665	28.155	976	1 : 16,8	1 : 28,7
2020	1.764	28.571	1.970	1 : 17,2	1 : 23,8
2021	1.777	28.739	1.057	1 : 16,17	1: 27,19
2022	1.843	28.357	980	1 : 15,39	1 : 28,94
2023	1.890	44.994	1.209	1 : 23,80	1 : 37,22

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2024.

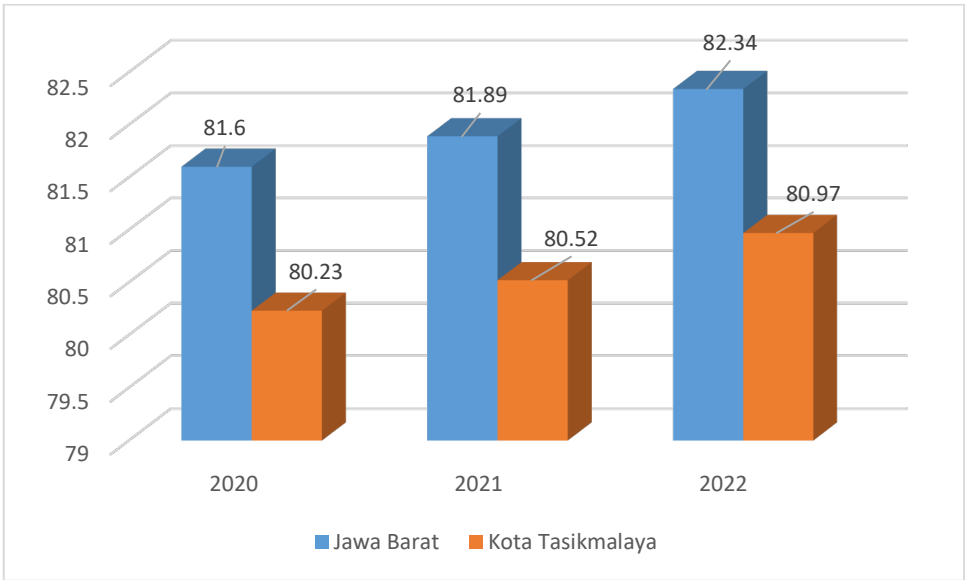
2.2.2.2. Keluarga Sehat

Derajat kesehatan masyarakat dapat diukur melalui berbagai indikator kesehatan, salah satunya adalah indeks kesehatan, dimana komponen indeks kesehatan meliputi:

- 1) Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan
- 2) Persentase balita yang diimunisasi dasar lengkap
- 3) Persentase balita yang memiliki gizi normal
- 4) Umur Harapan hidup (UHH)

Adapun perbandingan indeks kesehatan Kota Tasikmalaya dengan Provinsi Jawa Barat sebagai berikut.

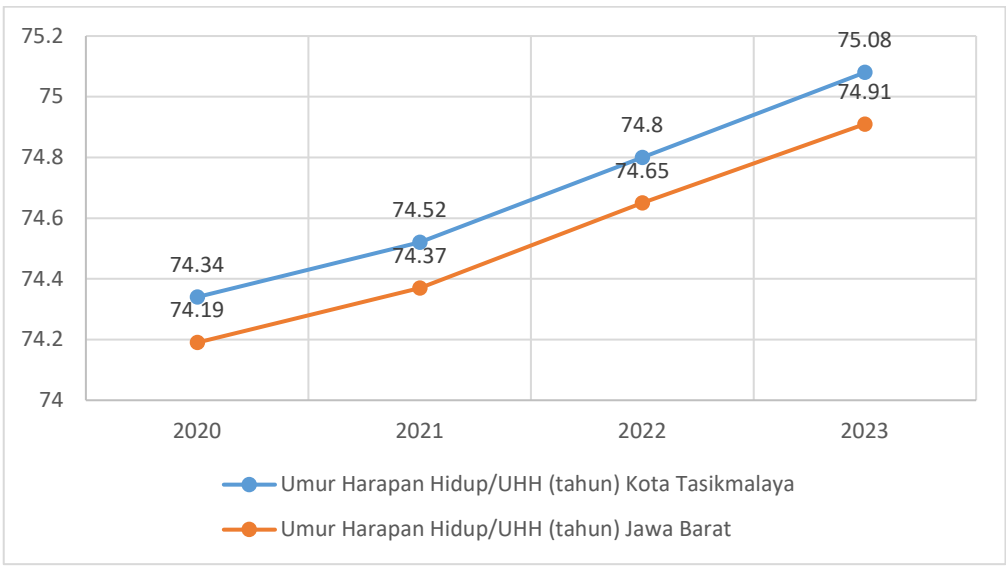
Gambar 2.20 Indeks Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Kota Tasikmalaya



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

Umur Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Hal ini menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir mempunyai harapan untuk dapat menjalani hidup lebih panjang. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Faktor-faktor yang memperngaruhi UHH diantaranya adalah faktor kesehatan yaitu tingkat kelahiran dan kematian, pelayanan kesehatan, dan gizi buruk. Selain faktor kesehatan, UHH juga dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor sosial.

Gambar 2. 21 Perbandingan UHH Kota Tasikmalaya dan Jawa Barat



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya (Long Form SP 2020), 2024.

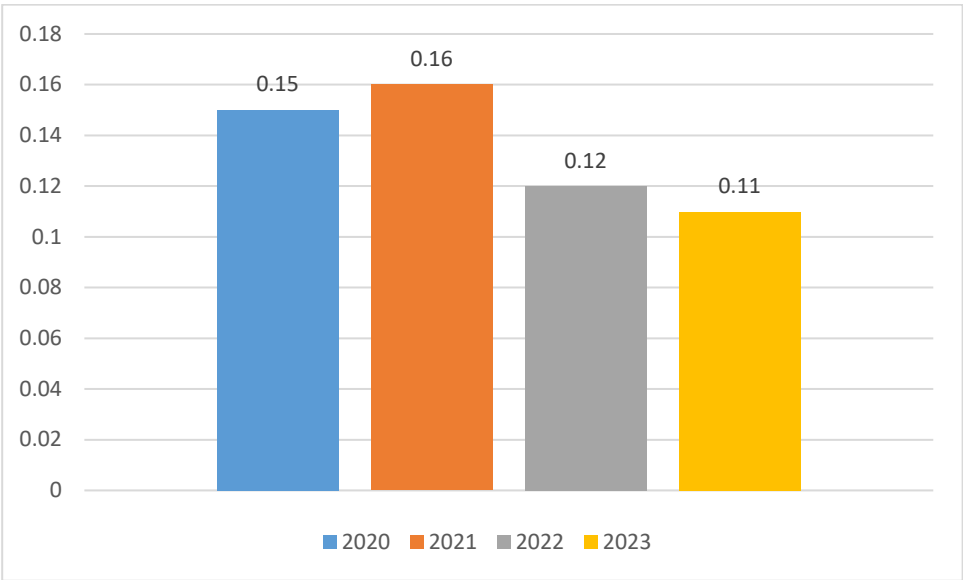
UHH di Kota Tasikmalaya dipengaruhi kondisi lingkungan yang belum memenuhi sanitasi aman, dan belum optimalnya akses terhadap air bersih serta air minum layak, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, tingginya angka penyakit menular dan tidak menular.

Indikator lain yang dapat menggambarkan atau mengukur derajat kesehatan masyarakat selain UHH adalah Indeks Keluarga Sehat (IKS). Indeks Keluarga Sehat adalah indeks yang menggambarkan kondisi perilaku hidup bersih dan sehat yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial dan lingkungan, serta dilaksanakan oleh setiap keluarga. Indikator Keluarga sehat terdiri dari perhitungan 12 (dua belas) indikator yaitu:

- 1) Keluarga Mengikuti Program Keluarga Berencana (KB);
- 2) Ibu melakukan persalinan di fasilitas Kesehatan;
- 3) Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
- 4) Bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
- 5) Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;
- 6) Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar;
- 7) Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;
- 8) Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak diterlantarkan;
- 9) Anggota keluarga tidak ada yang merokok;
- 10) Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- 11) Keluarga mempunyai akses sarana air bersih;
- 12) Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Berikut gambaran IKS Kota Tasikmalaya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

Gambar 2. 22 Indeks Keluarga Sehat Kota Tasikmalaya



Sumber: Dinas Kesehatan, 2024.

Keluarga yang tergolong dalam keluarga sehat adalah keluarga dengan IKS lebih dari 0,8 sesuai dengan pedoman Program Indonesia Sehat-Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Kementerian Kesehatan. Capaian IKS Kota Tasikmalaya mengalami penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022 dan 2023 karena adanya indikator yang tidak terpenuhi dari 12 (dua belas) indikator tersebut, yakni indikator ke 9 (Sembilan) atau anggota keluarga tidak ada yang merokok. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat tahun 2045, sesuai dengan amanat dari Kementerian Kesehatan, pembangunan kesehatan difokuskan untuk

penguatan upaya promotif dan preventif dengan tidak mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif.

Selain UHH dan IKS, hal lain yang mempengaruhi dengan derajat kesehatan masyarakat adalah perkembangan penyakit menular dan tidak menular. Berikut adalah perkembangan kasus penyakit menular dan tidak menular di Kota Tasikmalaya tahun 2020-2023.

Tabel 2. 30 Perkembangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

No.	Jenis Penyakit	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
	PENYAKIT MENULAR				
	Bersumber Binatang				
1	Malaria	3	10	1	9
2	Berdarah Dengue (DBD)	1.409	909	1.855	353
3	Filariasis	-	3	1	1
	Penyakit Menular Langsung				
4	Diare	9.884	12.238	10.852	17.174
5	Pneumonia	1.150	1.024	1.344	1.711
6	Kusta	5	7	12	5
7	Tuberkulosis Paru	1.041	1.476	2.875	4.747
8	HIV	96	99	111	145
	Penyakit Menular yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I)				
9	Difteri	1	-	-	2
10	Campak	-	-	31	276
	PENYAKIT TIDAK MENULAR				
11	Diabetes	8.906	9.729	9.729	9.729
12	Hipertensi	206.084	215.761	215.661	215.661
13	Orang Dengan Gangguan Jiwa	928	955	961	1.033

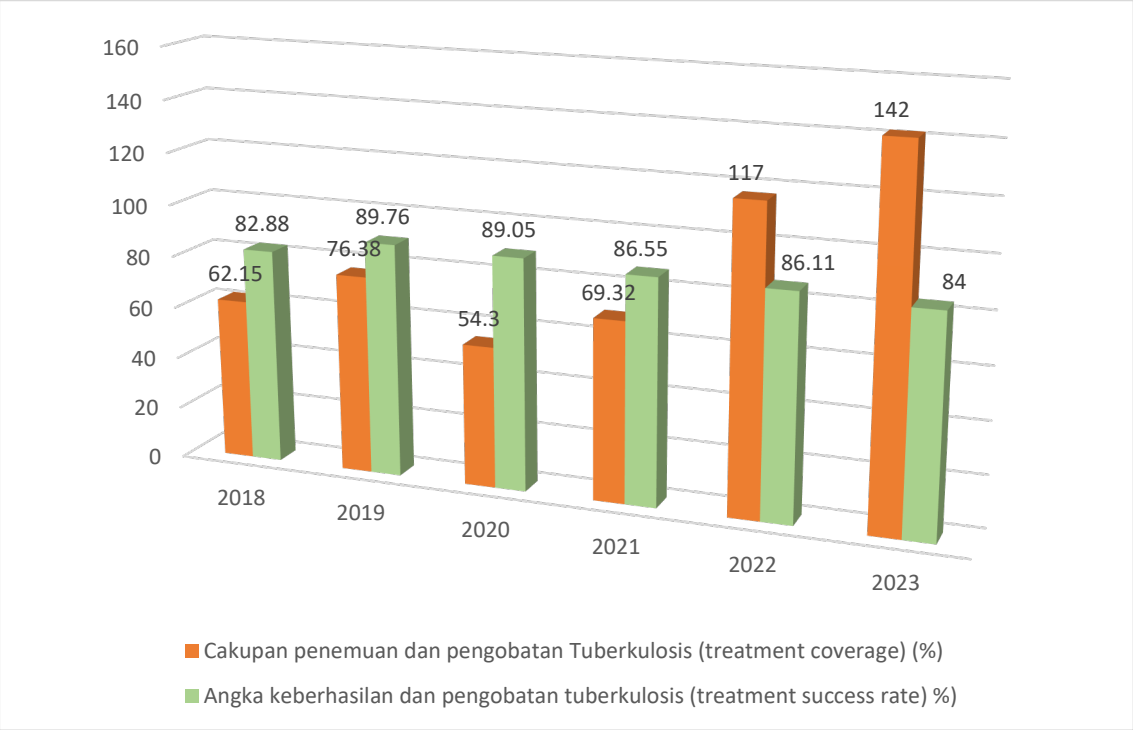
Sumber: Dinas Kesehatan, 2024 (Data Diolah).

Salah satu penyakit yang berdampak besar terhadap kehidupan manusia adalah Tuberkulosis Paru. Penyakit Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program penanggulangan TB secara berkesinambungan. Pada tahun 2023 target Terduga TB sebanyak 18.014 orang, capaian penemuan terduga sebanyak 17.346 orang (96 persen), target penemuan kasus TB sebanyak 3.336 orang, capaian penemuan kasus TB sebanyak 4.747 orang (142 persen), target penemuan kasus tuberkulosis anak sebanyak 277 orang, capaian penemuan kasus tuberkulosis anak (usia 0-14 tahun) sebanyak 1.522 kasus (549 persen).

Jumlah penemuan kasus tuberkulosis semakin meningkat dari tahun ke tahun karena adanya *screening* untuk kelompok rentan resiko, melalui program *Active Case Finding* (ACF) dari Kementerian Kesehatan untuk kabupaten/kota,

serta koordinasi lintas sektor dengan *stakeholder* kesehatan, kolaborasi penemuan kasus dengan klinik-klinik. Peningkatan jumlah kasus tuberkulosis paru dipengaruhi faktor PHBS yang belum sepenuhnya diterapkan, dan kontak dengan penderita tuberkulosis.

Gambar 2. 20 Angka Keberhasilan dan Cakupan Penemuan TB



Sumber: Dinas Kesehatan, 2024 (Data diolah).

Indikator makro kesehatan yang dapat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat adalah Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan prevalensi stunting. Berikut gambaran perkembangan AKI, AKB, prevalensi stunting di Kota Tasikmalaya.

Tabel 2. 31 Perkembangan AKI, AKB, Prevalensi Stunting Kota Tasikmalaya 2017-2023

No.	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	116,75	101,00	80,00	162,25	303,87	180,15	192,22
2.	Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	6,09	5,72	5,29	6,15	8,5	7,67	7,87
3.	Prevalensi Stunting (persen)*	12,3	11,00	10,50	20,10	14,81	12,62	10,75
4.	Prevalensi Stunting (persen)**	-	30,7	25,73	24,75	28,90	22,40	27,10
5.	Cakupan Kepesertaan JKN	68,64	74,29	80,27	77,99	79,40	94,42	101,74

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024 (Data diolah), Tahun 2024.

Ket * berdasarkan EPPGM Kota Tasikmalaya.

** berdasarkan SSGI.

Angka Kematian Ibu mengalami penurunan dari tahun 2017 s.d. 2019, lalu meningkat pada tahun 2020 dan 2021. Hal tersebut juga terjadi pada Angka Kematian Bayi yang menurun pada tahun 2017-2019, lalu meningkat pada tahun 2020 dan 2021. Prevalensi Stunting juga cenderung mengalami tren yang sama, yakni terjadi penurunan pada tahun 2017-2019 dan kenaikan di tahun 2020 dan 2021. Tren tersebut kemungkinan terjadi disebabkan oleh Pandemi COVID-19, namun penurunan kembali terjadi di tahun 2022 menjadi 12,62 menurut Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat Kota Tasikmalaya dan menurut Survei Status Gizi Nasional menjadi 22,4 persen. Pada tahun 2023 AKI naik menjadi 192,22 persen, AKB sebesar 7,87 persen, serta prevalensi stunting sebesar 10,75 persen berdasarkan EPPGM Kota Tasikmalaya, dan sebesar 27,1 persen berdasarkan SSGL.

2.2.2.3. Kualitas Keluarga

Kualitas rata-rata keluarga pada suatu daerah dapat dilihat dengan angka Indeks Pembangunan Keluarga (IPK). Konsep pembangunan keluarga ini dicanangkan oleh Bappenas untuk mewujudkan keluarga yang kuat dan sejahtera dengan salah satu pendekatannya yaitu meningkatkan ketahanan keluarga sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020, Indeks Pembangunan Keluarga terdiri dari 3 dimensi yaitu ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Indeks Pembangunan Keluarga Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 tercatat sebesar 56,87 dan Kota Tasikmalaya berada pada urutan ke 16 dari 27 di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kualitas keluarga di Kota Tasikmalaya masih perlu ditingkatkan, dengan cara meningkatkan akses air minum yang layak, akses sanitasi layak, perentase rumah layak huni, penurunan prevalensi stunting, dan cakupan jaminan kesehatan.

2.2.2.4. Kualitas Anak

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat ditentukan oleh kualitas hidup manusia sejak usia dini. Perwujudan SDM yang berkualitas tidak terlepas dari anak-anak yang akan memegang peranan penting dalam upaya perwujudan Indonesia Emas 2045. Anak-anak yang saat ini masih berada di bangku sekolah adalah generasi harapan bangsa yang akan meneruskan tonggak perjuangan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang unggul. Oleh karena itu, perlindungan dan pemenuhan hak anak harus menjadi salah satu fokus pembangunan di Kota Tasikmalaya.

Kota Tasikmalaya berupaya mewujudkan pemenuhan perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA). KLA merupakan Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. KLA diwujudkan melalui pemenuhan 5 klaster, yaitu: (1) Hak Sipil dan Kebebasan; klaster (2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; klaster (3) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; klaster (4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya; klaster (5) Perlindungan Khusus. Poin terpenting dari proses pengembangan KLA, yaitu adanya komitmen dari pimpinan daerah untuk mewujudkan pemenuhan Hak-hak anak dengan di dukungan oleh pemangku kebijakan di Kecamatan dan Kelurahan, serta koordinasi di antara

para *stakeholder* pemenuhan hak-hak anak dan *pemangku kebijakan* yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Berikut capaian KLA di Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu tahun 2019-2023.

Tabel 2. 32 Tingkat Capaian KLA Kota Tasikmalaya 2019-2023

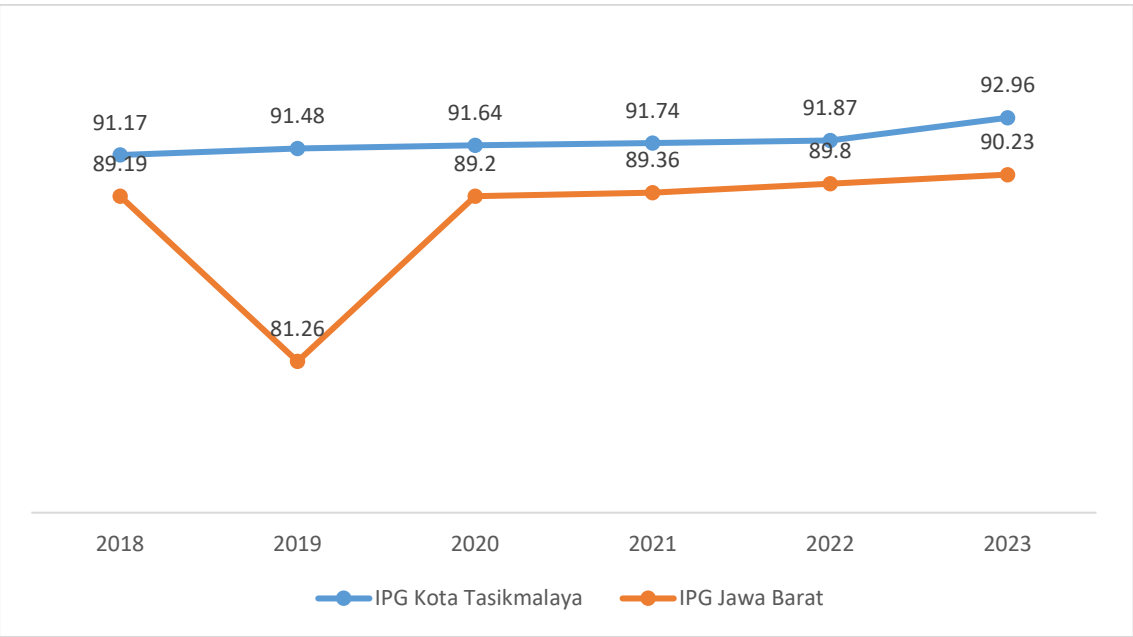
Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Capaian KLA (poin)	699,7	Tidak dilaksanakan karena Covid-19	756	382,1	430

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024 (Data diolah), Tahun 2024.

**2.2.2.5. Pemberdayaan Perempuan
Indeks Ketimpangan Gender (IPG)**

Gender merupakan suatu perbedaan peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dibentuk atau dikonstruksikan oleh masyarakat dan bersifat dinamis. Kesetaraan gender merupakan hak yang harus didapatkan laki laki dan perempuan agar memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dalam berbagai bidang kehidupan. Indikator yang digunakan untuk melihat capaian Pembangunan gender adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG). IPG Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, dan telah melampaui Provinsi Jawa Barat, hal ini menunjukkan bahwa semakin setara pembangunan antara perempuan dan laki-laki di Kota Tasikmalaya.

**Gambar 2. 21 IPG Kota Tasikmalaya dan Jawa Barat
Tahun 2018-2023**

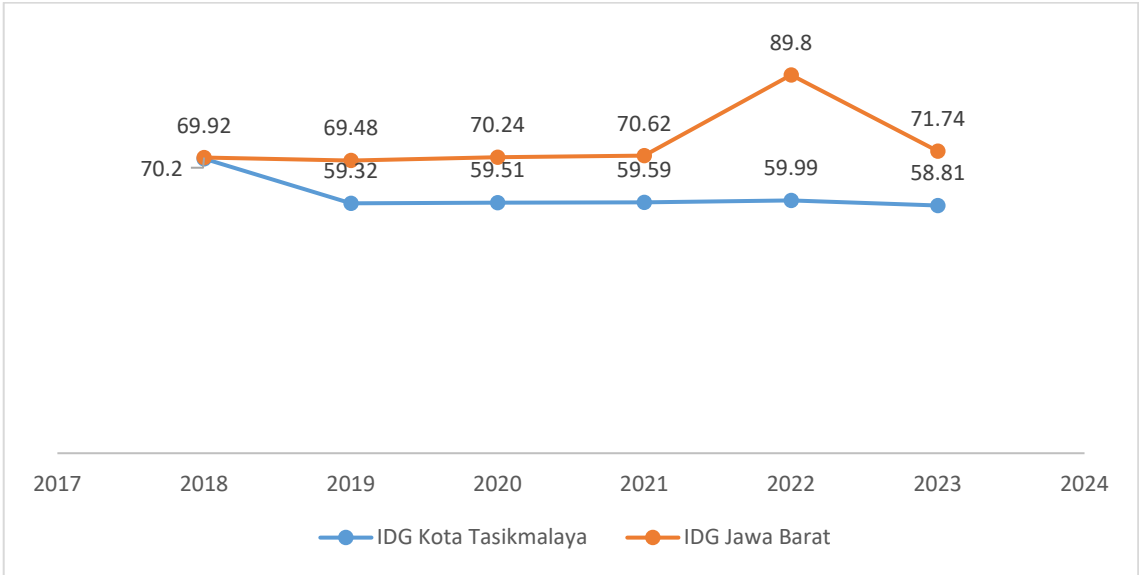


Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024.

Indikator lainnya yang mengukur kesetaraan dan keadilan gender adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Dilihat dari perkembangan tahun 2018-2023, IDG Kota Tasikmalaya menunjukkan tren meningkat namun masih di bawah angka Provinsi Jawa Barat. Peningkatan IDG di Kota Tasikmalaya

diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan dan keterlibatan perempuan sebagai anggota legislatif.

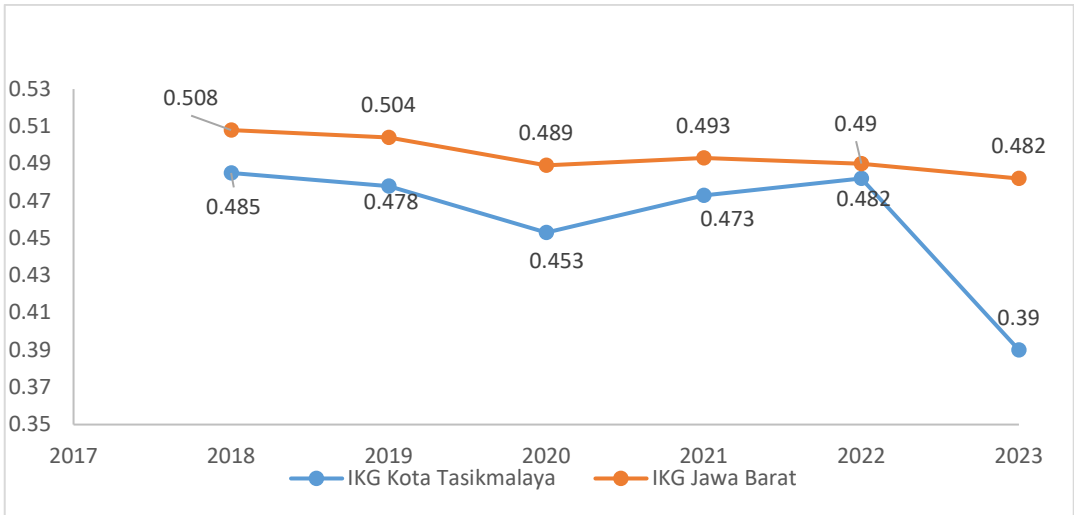
Gambar 2. 22 IDG Kota Tasikmalaya dan Jawa Barat Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang mengacu pada perhitungan *Gender Empowerment Measurement* (GEM) di tingkat global, dan terdapat perubahan indikator menjadi *Gender Inequality Index* (GII) yang diimplementasikan di Indonesia dengan Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Capaian IDG dan IPG berkolerasi terhadap perhitungan pembangunan gender, yakni IPG rendah menunjukkan ketimpangan atau IKG yang semakin tinggi. Perkembangan IKG Kota Tasikmalaya mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dan tahun 2023 tercatat sebesar 0,390, atau ketimpangan meningkat sebesar 0,092 dari tahun sebelumnya.

Gambar 2. 23 IKG Kota Tasikmalaya dan Jawa Barat Tahun 2018-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024.

2.2.2.6. Pembangunan Pemuda dan Olahraga

Masa depan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas generasi muda, karena pemuda merupakan ujung tombak kemajuan dan pembangunan bangsa. Pemuda merupakan salah satu aktor dalam pembangunan dengan fisiknya yang kuat, pengetahuan yang inovatif, adaptif, serta kreativitasnya yang tinggi. Namun demikian, keberadaan pemuda dapat menjadi potensi dan tantangan bagi pembangunan. Apabila dapat dikelola dengan baik maka potensi tersebut dapat menjadi salah satu modal dasar pembangunan.

Pembangunan kepemudaan di Kota Tasikmalaya dilaksanakan melalui pembinaan organisasi kepemudaan, serta pembinaan terhadap atlet di di berbagai cabang olahraga di Kota Tasikmalaya. Tabel berikut menunjukkan perkembangan persentase pembinaan Organisasi Kepemudaan serta persentase prestasi olahraga Kota Tasikmalaya di tingkat provinsi.

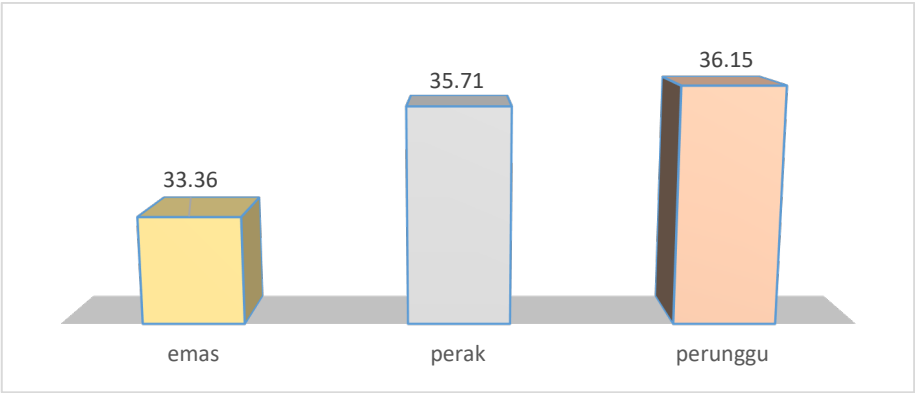
Tabel 2. 33 Persentase Pembinaan OKP dan Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi

No.	Indikator	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Persentase OKP yang dibina	28,57	30,77	31,87
2	Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi	60	85,71	52,38

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya, 2024.

Hasil pembinaan terhadap atlet berbagai cabang olahraga di Kota Tasikmalaya tergambar dalam persentase kenaikan perolehan medali d di Kota Tasikmalaya pada gambar berikut ini:

Gambar 2. 24 Rata-Rata Perentase Kenaikan Perolehan Medali Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2023



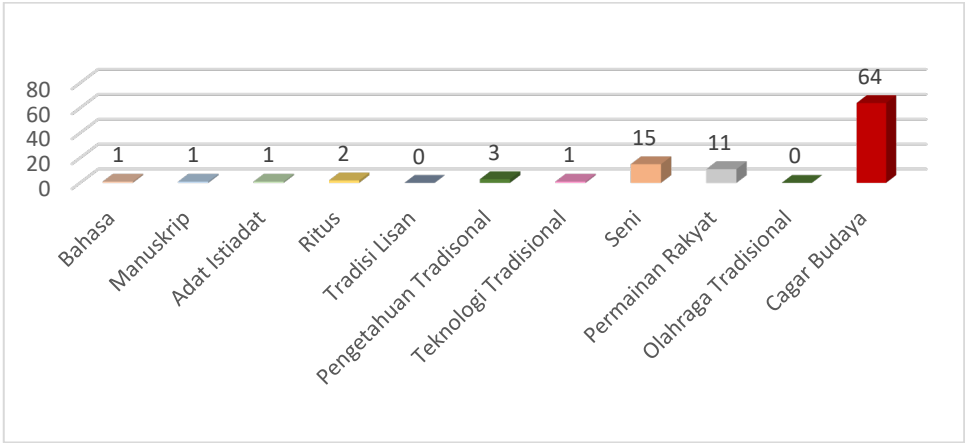
Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya, 2024 (data diolah).

2.2.2.7. Pembangunan Kebudayaan

Kebudayaan daerah adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-kebudayaan yang hidup dan berkembang di daerah kota. Upaya pelestarian kebudayaan Kota Tasikmalaya dilakukan melalui pemajuan kebudayaan daerah, yakni meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya daerah di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Kota Tasikmalaya memiliki berbagai jenis objek

pemajuan kebudayaan daerah kota dan cagar budaya yang tersaji dalam gambar berikut ini:

Gambar 2. 25 Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota Tasikmalaya Dan Cagar Budaya



Sumber: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, 2024 (data diolah).

2.3. Aspek Daya Saing

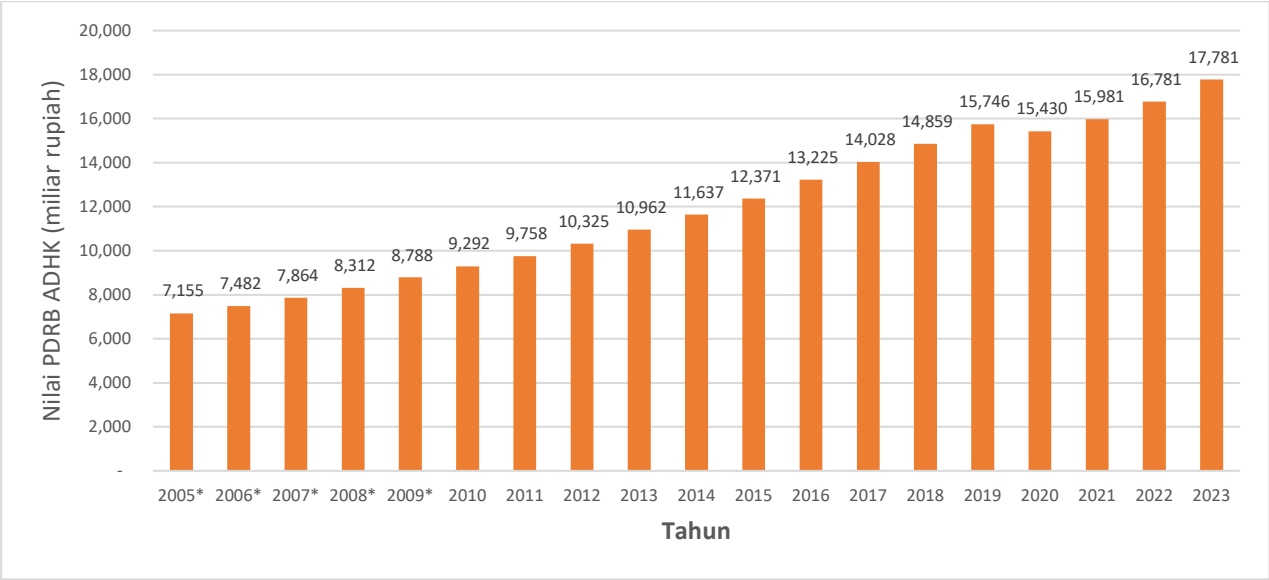
2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1. Lapangan Usaha Unggulan dan Potensial

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Pengukuran terhadap PDRB dapat dilakukan dengan mengacu pada harga berlaku (PDRB ADHB) ataupun pada harga konstan (PDRB ADHK). Pengukuran dengan menggunakan harga berlaku didasarkan pada harga barang dan jasa di tahun pengukuran tersebut dilakukan, sedangkan pengukuran dengan harga konstan didasarkan pada harga tahun tertentu sebagai acuan. Oleh karenanya, pengukuran PDRB dengan harga konstan dapat memberikan gambaran perubahan output ekonomi yang lebih akurat karena telah mengoreksi faktor inflasi terhadap harga dari tahun ke tahun dengan mengacu pada harga di tahun dasar tertentu.

Berdasarkan data BPS, nilai PDRB Kota Tasikmalaya pada tahun 2005 hingga 2023 dapat disajikan melalui grafik berikut.

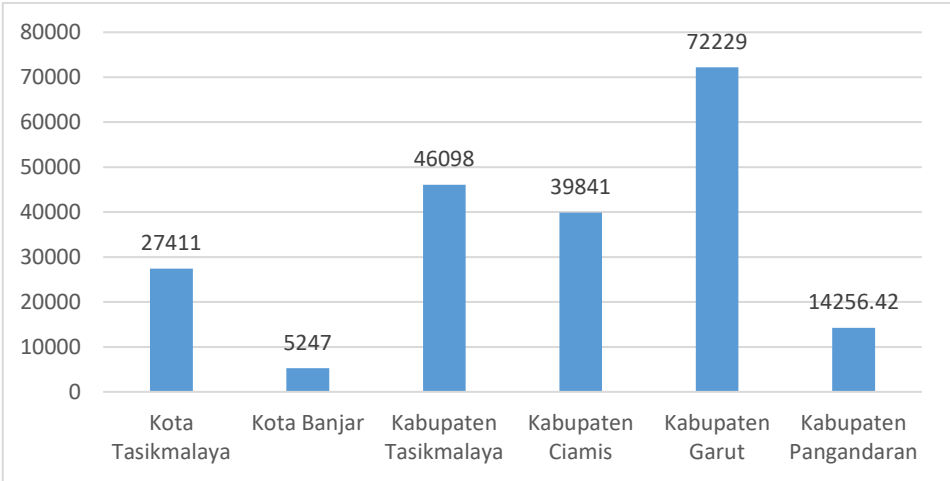
**Gambar 2. 26 Nilai PDRB ADHK Kota Tasikmalaya
Tahun 2005-2023**



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2010-2024

Grafik di atas menampilkan data BPS untuk nilai PDRB pada periode 2010 sampai dengan 2022, sedangkan nilai PDRB pada periode 2005 sampai dengan 2009 merupakan hasil ekstrapolasi menggunakan besaran Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada tahun-tahun tersebut dan nilai PDRB pada tahun 2010 sebagai basis perhitungan. Berdasarkan data BPS dan olahan tersebut, diketahui bahwa nilai PDRB di tahun 2005 diperkirakan sebesar Rp7,155 triliun (berdasarkan harga dasar tahun 2010 sebagai basis perhitungan), sedangkan nilai PDRB di tahun 2023 adalah sebesar Rp17,781 triliun. Berdasarkan grafik, juga dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu 17 tahun, nilai PDRB hampir secara konsisten mengalami pertumbuhan positif, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan nilai PDRB dari tahun sebelumnya akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2023, nilai PDRB Atas Harga Berlaku (ADHB) di Kota Tasikmalaya mencapai Rp.27.411 Miliar. PDRB ADHB tersebut merupakan terbesar ketiga di Priangan Timur dan berkontribusi sebesar 1,04 persen dari total PDRB Provinsi Jawa Barat.

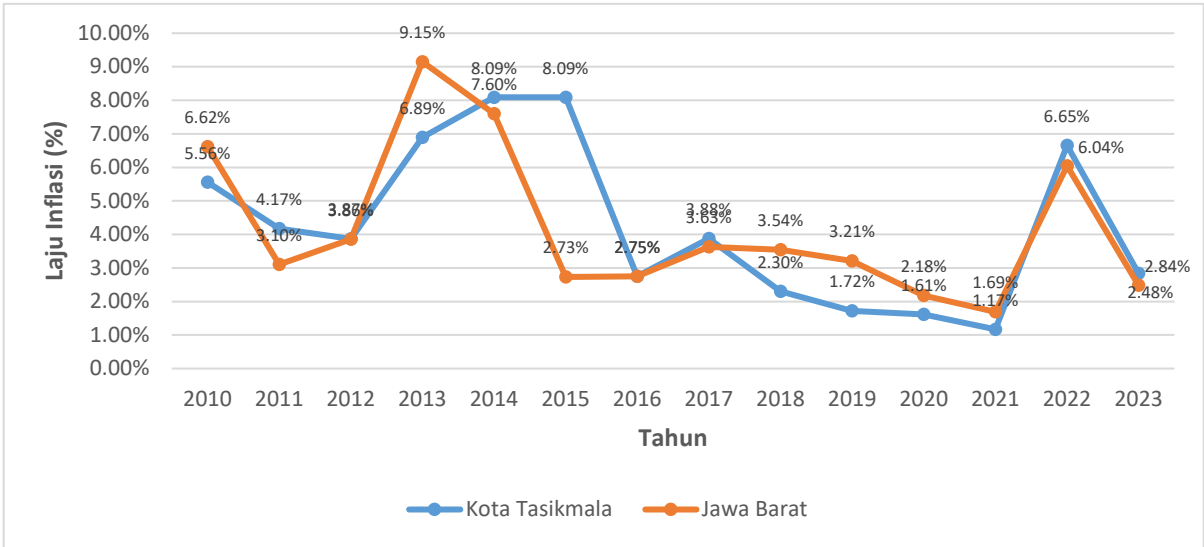
**Gambar 2. 27 Perbandingan PDRB ADHB Kabupaten/Kota
se-Priangan Timur**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024.

Di lain pihak perkembangan laju inflasi Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu tahun 2010-2023 disajikan melalui grafik berikut.

Gambar 2. 28 Perkembangan Laju Inflasi Kota Tasikmalaya Tahun 2010-2023



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2010-2024

Grafik tersebut menunjukkan bahwa laju inflasi cenderung fluktuatif. Jika disandingkan seperti pada grafik, pola fluktuasi yang terjadi di tingkat kota memiliki sedikit kemiripan dengan pola fluktuasi yang terjadi di tingkat provinsi. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa jika laju inflasi di kedua tingkatan tersebut dirata-ratakan selama kurun waktu 12 tahun menjadi sebuah laju inflasi tahunan, keduanya tidak menunjukkan perbedaan yang besar. Laju inflasi tahunan kota adalah sebesar 3,91% per tahun, sedangkan laju inflasi tahunan provinsi adalah sebesar 3,78% per tahun.

Lima sektor yang memiliki rata-rata kontribusi terbesar terhadap PDRB secara berturut-turut adalah: 1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (23,95%); 2) Industri Pengolahan (14,31%); 3) Konstruksi (14,31%); 4) Jasa Keuangan dan Asuransi (9,91%); serta 5) Transportasi dan Pergudangan (9,81%).

Merujuk pada hasil analisis tipologi Klassen berdasarkan Sektor Ekonomi terhadap Provinsi, sektor ekonomi yang menjadi unggulan di Kota Tasikmalaya adalah sektor Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib. Kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap perekonomian Kota Tasikmalaya cenderung signifikan dibandingkan dengan kontribusinya terhadap perekonomian Provinsi Jawa Barat secara umum. Selain itu, sektor-sektor tersebut juga memiliki laju pertumbuhan yang lebih tinggi di Kota Tasikmalaya dibandingkan dengan pertumbuhannya di tingkat provinsi.

Sektor Ekonomi unggulan Kota Tasikmalaya terhadap Priangan Timur adalah Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa dibandingkan dengan analisis sebelumnya (i.e.

dalam konteks Jawa Barat), sektor-sektor jasa di Kota Tasikmalaya secara umum menunjukkan signifikansi yang lebih besar terhadap konteks Priangan Timur.

Selain mempunyai sektor unggulan, pada hasil analisis tipologi klassen Kota Tasikmalaya mempunyai beberapa sektor yang memiliki potensi. Sektor potensial ini adalah 1) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; 2) Transportasi dan Pergudangan; 3) Jasa Keuangan dan Asuransi; 4) Real Estate; 5) Jasa Perusahaan; dan 6) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Dari 6 (enam) sektor potensial di atas, selama 12 tahun terakhir, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang memiliki Laju Pertumbuhan Rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya yaitu mencapai 7,23 persen disusul sektor Real Estate mencapai 6,18 persen, dan sektor Jasa Perusahaan 5,51 persen

Analisis tipologi Klassen yang dilakukan selanjutnya mengklasifikasikan posisi Kota Tasikmalaya berdasarkan wilayah acuan yaitu Provinsi Jawa Barat. Pengklasifikasian dilakukan dengan meninjau rasio antara PDRB per kapita di seluruh kabupaten/kota di wilayah acuan dengan rata-rata PDRB per kapita seluruh kabupaten/kota tersebut dan rasio antara LPE tahunan rata-rata dari seluruh kabupaten/kota dengan rata-rata dari nilai LPE tahunannya. Pengklasifikasian juga akan mengelompokkan kabupaten/kota ke dalam empat kelompok seperti sebelumnya, yaitu wilayah maju (rasio PDRB per kapita ≥ 1 dan rasio LPE ≥ 1), wilayah maju-tertekan (rasio PDRB per kapita ≥ 1 dan rasio LPE < 1), wilayah berkembang (rasio PDRB per kapita < 1 dan rasio LPE ≥ 1), serta wilayah tertinggal (rasio PDRB per kapita < 1 dan rasio LPE < 1). Hasil klasifikasi Tipologi Klassen berdasarkan Wilayah menempatkan Kota Tasikmalaya sebagai wilayah berkembang relatif terhadap wilayah lain di Jawa Barat. Sementara itu dari enam kabupaten/kota yang menyusun wilayah Priangan Timur, secara umum Kota Tasikmalaya masih memegang pengaruh yang signifikan untuk dapat berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Priangan Timur dengan mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi yang dimiliki—baik itu yang berada dalam lingkup Kota Tasikmalaya maupun dalam lingkup wilayah Priangan Timur secara keseluruhan.

Potensi koperasi dan UMKM di Kota Tasikmalaya cukup besar baik dari jumlah koperasi, pelaku usaha mikro kecil maupun peredaran uang di sektor ini. Sampai dengan tahun 2023 jumlah koperasi di Kota Tasikmalaya sebanyak 641 buah koperasi dengan jumlah anggota koperasi 97.948 orang.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 21/Per/M/KUKM/IX/2025 tentang Peningkatan Koperasi menyatakan Koperasi Berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dan badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial. Koperasi berkualitas dinilai dari koperasi aktif (yang melaksanakan RAT) yang meningkat volume usaha dan assetnya. Koperasi berkualitas di Kota Tasikmalaya pada tahun 2023 baru mencapai 45 koperasi atau 37,50 persen dari koperasi yang melaksanakan RAT Tahun 2023. Berikut adalah sebaran koperasi yang berkualitas di Kota Tasikmalaya Tahun 2023.

Tabel 2. 34 Sebaran Koperasi Berkualitas di Kota Tasikmalaya Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Koperasi Yang Meningkatkan Kualitasnya Berdasarkan Rat				Jumlah Koperasi Berkualitas
		RAT	Volume Usaha	Asset	Jumlah	
1	Cihideung	16	23.150.409.100,56	33.147.657.723,61	56.298.066.824,71	5
2	Cipedes	16	20.916.360.390,58	52.424.150.140,36	73.340.510.530,94	6
3	Tawang	30	60.688.558.828,84	93.810.860.527,44	154.499.419.356,28	15
4	Indihiang	17	12.325.004.156,00	18.560.872.749,33	30.885.876.905,33	6
5	Kawalu	3	6.834.283.735,00	11.339.725.040,00	18.174.008.775,00	0
6	Cibeureum	10	6.188.569.522,00	8.651.097.778,00	14.839.667.300,00	3
7	Tamansari	8	3.042.709.476,00	5.310.023.540,80	8.352.733.016,80	3
8	Mangkubumi	8	15.838.988.475,00	25.813.404.171,06	41.652.392.646,76	3
9	Bungursari	6	14.028.186.772,00	15.898.657.917,50	29.926.844.689,50	2
10	Purbaratu	6	5.027.705.584,00	7.864.622.818,00	12.892.328.402,00	2
Jumlah		120	168.040.776.039,98	272.821.072.406,10	440.861.848.447,32	45

Sumber: Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2024

Kementerian Koperasi UKM memberlakukan Nomor Induk Koperasi (NIK) kepada Koperasi Aktif seluruh Indonesia. Pada tahun 2023 koperasi yang telah mendapatkan Nomor Induk Koperasi di Kota Tasikmalaya sebanyak 207 koperasi bertambah 10 koperasi dari tahun 2022 yang sebanyak 197 koperasi. Hasil penilaian kesehatan koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kota Tasikmalaya Tahun 2023 mencapai 11,2 persen.

Usaha ekonomi produktif di Kota Tasikmalaya, didominasi oleh jenis usaha mikro. Pada tahun 2023 jumlah usaha mikro di Kota Tasikmalaya yang sudah mendapatkan perizinan mencapai 17.512 pelaku usaha meningkat tajam dari data tahun 2022 yang mencapai 6.370 pelaku usaha. Hal ini terjadi karena adanya program *self declare* sertifikasi halal dari Kemeterian Agama RI untuk pelaku usaha mikro yang mana kehalalan produk didasari pada pernyataan pelaku usaha kemudian diverifikasi oleh pendamping PPH dari organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga keagamaan Islam, maupun perguruan tinggi (BPJPH 2021). Program *self declare* sertifikasi halal hanya mensyaratkan usaha mikro untuk mempunyai izin. Berbeda dengan program sertifikasi halal reguler, sertifikasi halal membutuhkan pengujian kehalalan produk oleh LPH. Hal ini menyebabkan pelaku usaha mikro berbondong-bondong mengajukan izin yang dapat dilakukan secara *online*. Menurut data OSS Kota Tasikmalaya pada tahun 2023 jumlah usaha mikro di Kota Tasikmalaya sebanyak 17.512 unit usaha.

Usaha mikro di Kota Tasikmalaya menyerap tenaga kerja cukup banyak. Pada tahun 2023 usaha mikro menyerap tenaga kerja sebanyak 16.562 orang yang terdiri dari 13.791 orang laki-laki dan 2.771 orang perempuan. Artinya usaha mikro ini mampu membayar buruh tetap dalam melaksanakan usahanya. Kalau jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap dibandingkan dengan total angkatan kerja akan membentuk rasio kewirausahaan. Pada tahun 2023 dengan angkatan kerja sebanyak 369.778 maka rasio kewirausahaan di Kota Tasikmalaya mencapai 4,47 persen.

Pengembangan lapangan usaha unggulan dan potensial Kota Tasikmalaya perlu terus ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan generasi mendatang. Untuk itu pengembangan lapangan usaha unggulan dan potensial serta pembangunan pada umumnya harus memperhatikan dan tidak merusak lingkungan. Pembangunan harus berkelanjutan dengan menciptakan keseimbangan antara aktivitas manusia dan alam.

Saat ini proses pengembangan usaha mikro di Kota Tasikmalaya masih menghasilkan limbah yang belum tertangani dengan baik seperti dari usaha industri batik, tahu, kulit dan usaha pengolahan lainnya. Pembangunan di sektor pertanian, perikanan dan peternakan juga masih banyak menggunakan bahan anorganik dalam proses produksi yang berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca.

Ekonomi hijau adalah model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, kapital dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Indeks ekonom ditujukan sebagai alat untuk mengukur progres dan capaian transformasi ekonomi menuju Ekonomi Hijau secara tangible, representatif, dan akurat. Indeks Ekonomi Hijau Daerah terdiri dari 16 indikator terpilih yang mewakili 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) yaitu pilar ekonomi (6 indikator), pilar sosial (4 indikator), dan pilar lingkungan (6 indikator). Indikator dari pilar ekonomi terdiri dari 6 (enam) indikator yaitu intensitas emisi, intensitas energi, GNI per kapita, produktivitas pertanian, produktivitas tenaga kerja industri dan jasa. Indikator pilar sosial terdiri dari 4 (empat) indikator: rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran. Indikator pilar lingkungan terdiri dari 6 (enam) indikator yaitu tutupan hutan, energi baru terbarukan, kualitas air permukaan, kualitas udara, penurunan emisi, dan lahan gambut terdegradasi.

Indeks Ekonomi Hijau Daerah pada prinsipnya terdapat tiga pilar namun, dengan menyesuaikan dengan kapasitas, kewenangan, akses data, dan rencana pelaporan kedepan di tingkat kabupaten/kota maka Indeks Ekonomi Hijau yang diturunkan ke kabupaten/kota adalah “Indeks Ekonomi Hijau Daerah Pada Pilar Ekonomi” artinya untuk tingkatan kabupaten/kota cukup diukur sampai dengan pilar ekonomi dengan parameter yang ditentukan oleh provinsi. Terkait pilar sosial dan pilar lingkungan tidak menjadi pilar yang dievaluasi di tingkat kabupaten/kota sehubungan hampir seluruh parameter pada 2 pilar tersebut sudah tergambarkan pada indikator tersendiri/terpisah pada dokumen perencanaan kabupaten/kota sebagai turunan indikator juga dari provinsi. Terkait “Indeks Ekonomi Hijau Daerah pada pilar ekonomi” ini yang menjadi parameter perhitungan diantaranya adalah produktivitas akuakultur dengan sumber data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat; produktivitas padi dengan sumber data Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat; produktivitas tenaga kerja industri, produktivitas tenaga kerja jasa serta PDRB Perkapita dengan sumber data BPS Provinsi Jawa Barat.

Pada tahun 2023 Indeks Ekonomi Hijau Kota Tasikmalaya pada pilar ekonomi mencapai 58,46 poin yang diklasifikasi dalam kategori Baik Tier 1. Nilai indikator pembentuk Indeks Ekonomi Hijau Kota Tasikmalaya pada pilar ekonomi adalah:

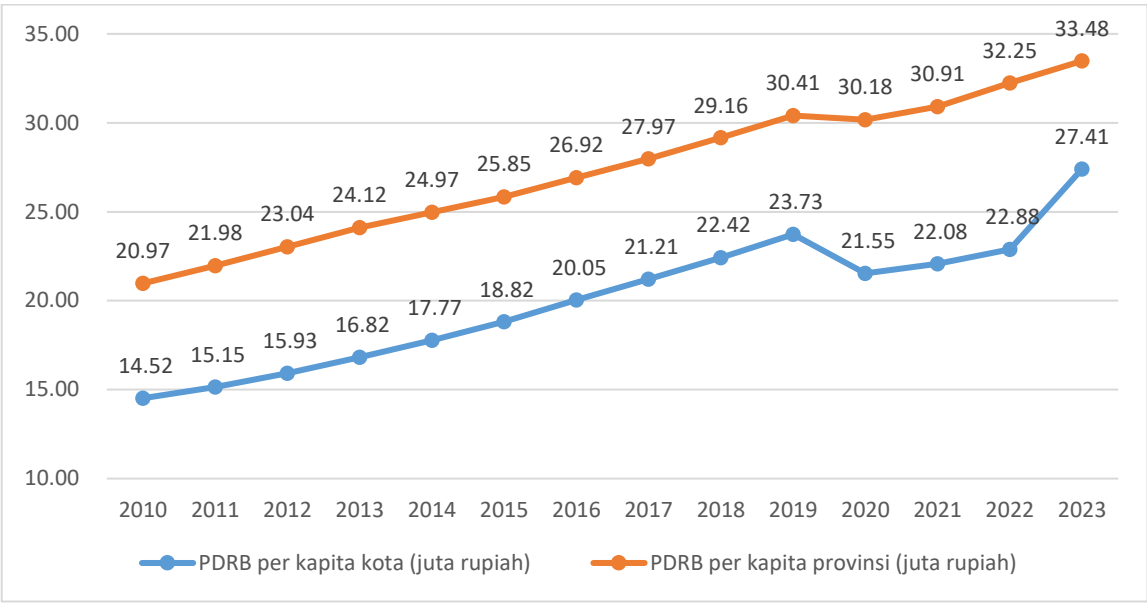
- a. Produktivitas Akuakultur mencapai 14,82 ton/hektar.
- b. Produktivitas Padi mencapai 5,19 ton/hektar.
- c. Produktivitas Tenaga Kerja Industri mencapai Rp.32.906.121,64 per kapita.
- d. Produktivitas Tenaga Kerja Jasa mencapai Rp.82.527.576,28 per kapita.
- e. PDRB Perkapita mencapai 2.393,92 USD.

2.3.1.2. PDRB Perkapita

PDRB per kapita merepresentasikan rata-rata “pendapatan” yang diperoleh satu individu dari keseluruhan aktivitas ekonomi di wilayah tertentu. Oleh

karenanya, PDRB per kapita umumnya digunakan sebagai pendekatan untuk mengindikasikan standar hidup di wilayah tertentu. Data PDRB per kapita Kota Tasikmalaya disajikan melalui grafik berikut.

Gambar 2. 29 PDRB per Kapita Kota Tasikmalaya ADHK Tahun 2010-2023



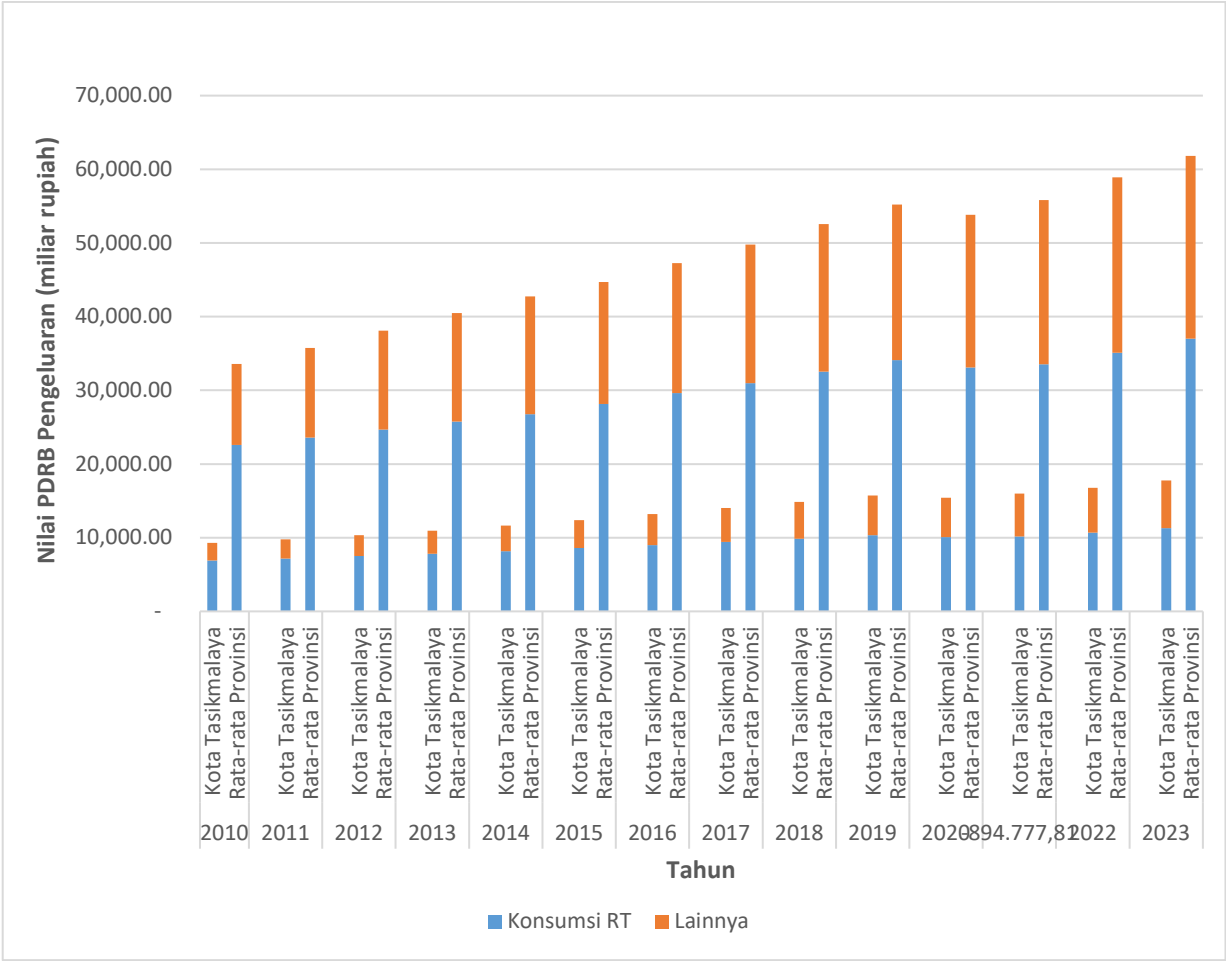
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2011-2024.

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa sepanjang kurun waktu tahun 2010 hingga 2023, PDRB per kapita Kota Tasikmalaya masih berada di bawah PDRB per kapita provinsi.

2.3.1.3. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga merupakan pengeluaran atas beberapa barang dan jasa tertentu oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Nilai konsumsi rumah tangga Kota Tasikmalaya yang diperoleh dari data PDRB ADHK 2010 berdasarkan pengeluaran disajikan dalam grafik berikut.

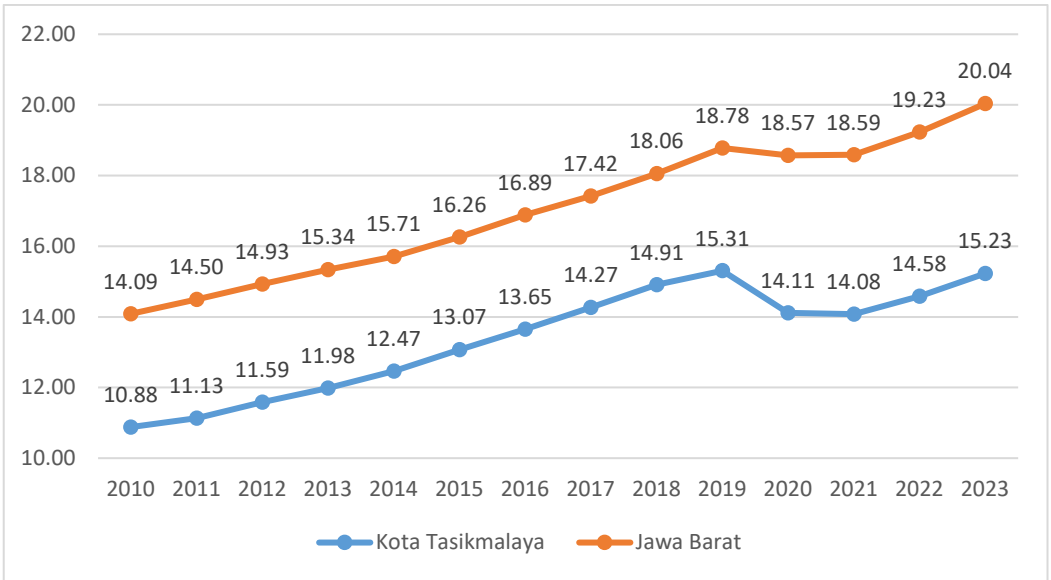
Gambar 2. 30 Nilai Konsumsi Rumah Tangga Kota Tasikmalaya Tahun 2010-2023



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2011-2024.

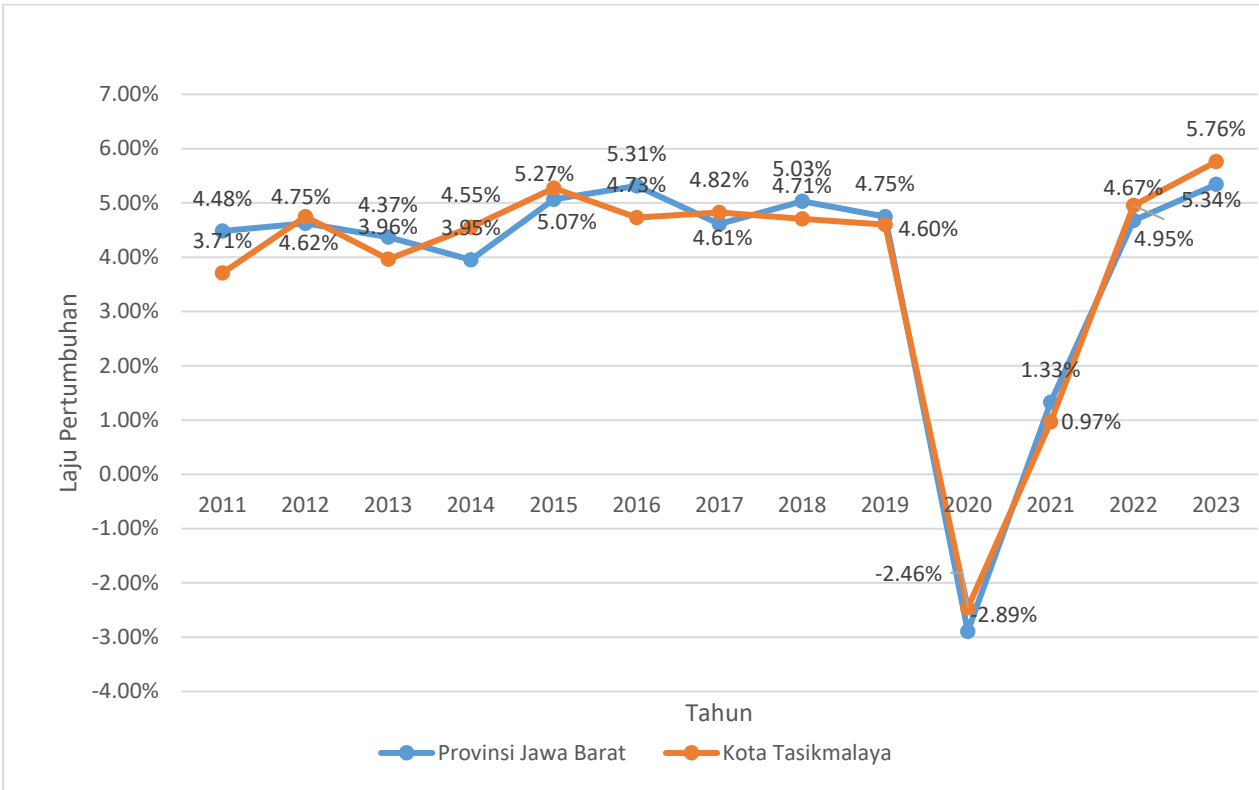
Data tersebut menunjukkan bahwa nilai konsumsi rumah tangga di Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2010 hingga 2023, di mana nilai konsumsi pada tahun 2010 tercatat sebesar Rp6,914 triliun dan pada tahun 2023 sebesar Rp11,296 triliun. Jika dibandingkan dengan keseluruhan *output* PDRB, kontribusi konsumsi rumah tangga cenderung menurun dari 74,41 persen di tahun 2010 menjadi 70,99 persen di tahun 2023. Dibandingkan dengan rata-rata provinsi, proporsi komponen konsumsi rumah tangga dalam PDRB Kota Tasikmalaya lebih signifikan, dengan rata-rata proporsi sebesar 68,59 persen dibandingkan dengan 62,85 persen. Adapun nilai konsumsi rumah tangga per kapita pada periode tersebut, diikuti oleh laju pertumbuhannya pada periode tahun 2011-2023 disajikan dalam dua grafik berikut.

Gambar 2. 31 Nilai Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kota Tasikmalaya



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2011-2024.

Gambar 2. 32 Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga per Kapita



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2012-2024.

Berdasarkan grafik pada Gambar 2.12, diketahui bahwa nilai konsumsi rumah tangga per kapita di Kota Tasikmalaya pada tahun 2010 adalah sebesar Rp10,88 juta dan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp15,23 juta. Angka ini masih berada di bawah rata-rata provinsi (Rp14,09 juta pada tahun 2010 dan Rp20,04 juta pada tahun 2023). Di samping data tersebut, data konsumsi bulanan rumah tangga memberikan informasi tambahan terkait pola konsumsi rumah tangga di Kota Tasikmalaya. Pada tahun 2018, rata-rata rumah tangga

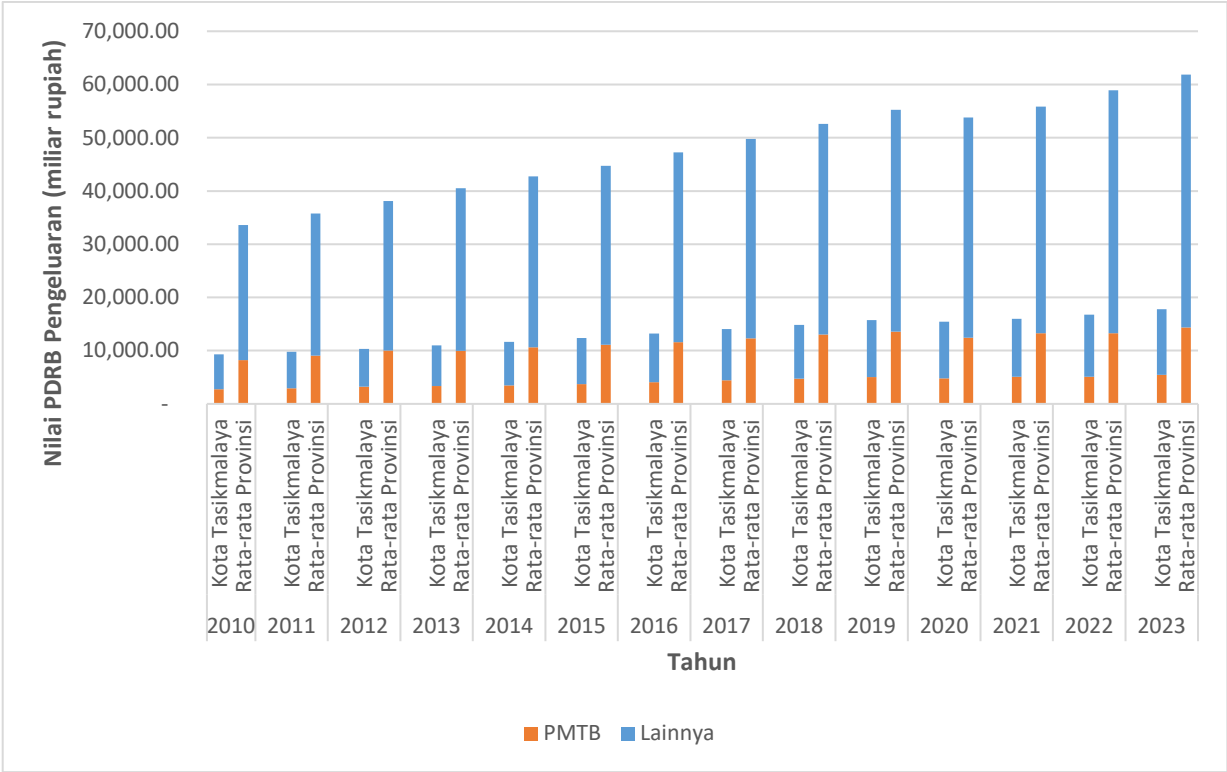
mengalokasikan 53,9% pengeluaran bulannya untuk konsumsi makanan, sedangkan pada tahun 2021 alokasi konsumsi makanan pada pengeluaran bulanan rumah tangga adalah sebesar 49,93%. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa rumah tangga cenderung mengalami peningkatan kesejahteraan karena alokasi pengeluaran bulanan yang digunakan untuk konsumsi non-makanan mengalami peningkatan signifikan—terutama jika dilihat perubahan nominalnya.

Adapun dari segi pertumbuhan konsumsi rumah tangga per kapita, laju pertumbuhan cenderung stabil dan mengalami sedikit peningkatan hingga tahun 2019 sebelum kemudian mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 yang mengakibatkan tren secara keseluruhan menjadi negatif. Meskipun demikian, laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga per kapita pasca pandemi telah menunjukkan indikasi pemulihan. Tren tersebut secara garis besar serupa dengan tren laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga di tingkat provinsi. Jika dirata-ratakan, laju pertumbuhan dalam kurun waktu 12 tahun adalah sebesar 2,52 persen per tahun di tingkat kota dan sebesar 2,31 persen per tahun di tingkat provinsi.

2.3.1.4. Investasi

Gambaran umum investasi di Kota Tasikmalaya dapat diilustrasikan dengan meninjau salah satu komponen PDRB pengeluaran yaitu Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) maupun dengan meninjau penanaman modal langsung yang bersumber dari Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Komponen PMTB merepresentasikan pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi, mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan produksi. Berdasarkan data BPS, besaran nilai PMTB Kota Tasikmalaya dibandingkan dengan rata-rata provinsi disajikan melalui grafik berikut.

Gambar 2. 33 Nilai PMTB dalam PDRB Kota Tasikmalaya 2010-2022



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2011-2024.

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa komponen PMTB dalam PDRB Pengeluaran Kota Tasikmalaya menunjukkan peningkatan secara nominal dalam kurun waktu tersebut, di mana pada tahun 2010 nilai komponen PMTB yang tercatat adalah sebesar Rp2,753 triliun, sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp5,477 triliun. Adapun secara proporsi, komponen PMTB cenderung stagnan dengan rata-rata 30,91% yang juga mengindikasikan signifikansinya yang lebih besar dibandingkan dengan rata-rata provinsi sebesar 24,51%. Adapun dari segi penanaman modal, pencapaian Kota Tasikmalaya dalam lima tahun ke belakang diketahui cenderung meningkat dengan pengecualian pada tahun 2020. Selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 35 Realisasi Investasi Kota Tasikmalaya

	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Jumlah nilai investasi PMA/PMDN (dalam miliar rupiah)	520	1.233	422,6	1.630	4.777,36	18.702

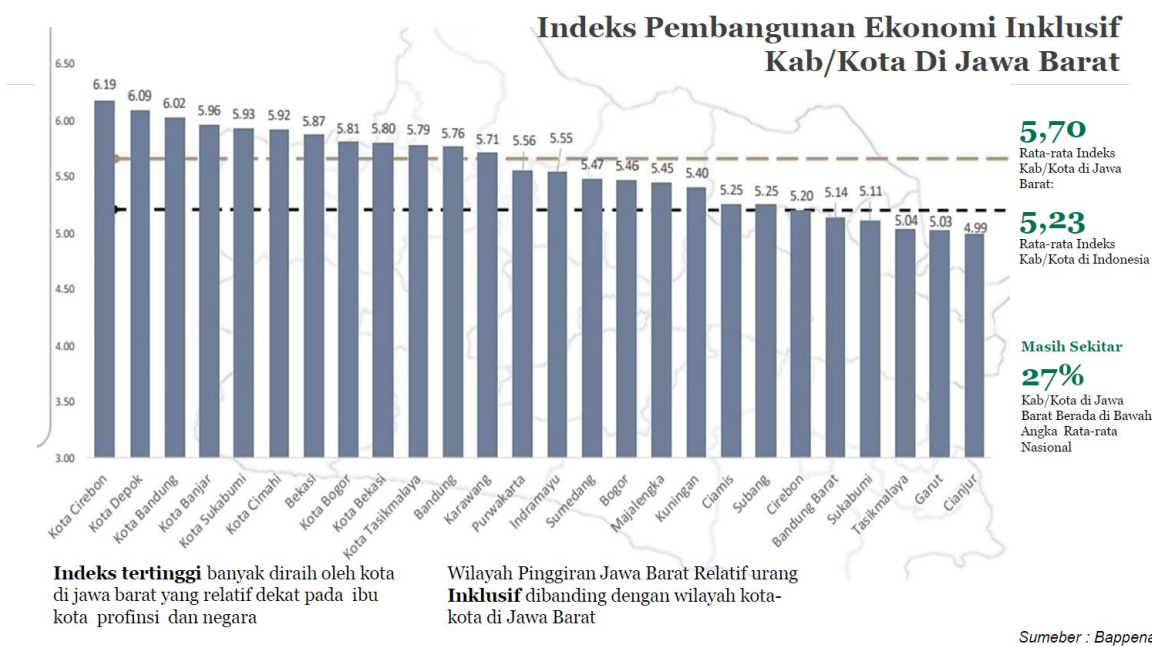
Sumber: DPMPSTSP Kota Tasikmalaya, 2024.

2.3.1.5. Ekonomi Inklusif

Pembangunan ekonomi inklusif merupakan pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antarkelompok dan antar wilayah. *World Economic Forum* (WEF) mendefinisikan ekonomi inklusif merupakan suatu strategi untuk meningkatkan kinerja perekonomian dengan perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi, serta memberi akses yang luas pada seluruh lapisan masyarakat.

Kemajuan pembangunan ekonomi inklusif di Kota Tasikmalaya ditunjukkan dengan Indeks Ekonomi Inklusif tahun 2019 menunjukan angka yang cukup memuaskan. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kota Tasikmalaya tahun 2019 sebesar 5,79 poin di atas rata-rata Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif kabupaten kota di Indonesia.

Gambar 2. 34 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota di Jawa Barat



Sumber: BPS, 2024.

Indeks Ekonomi Inklusif Kota Tasikmalaya perlu untuk ditingkatkan ke depannya, terutama pada pilar pemerataan pembangunan dan pengurangan kemiskinan.

2.3.1.6. Daya Saing Digital

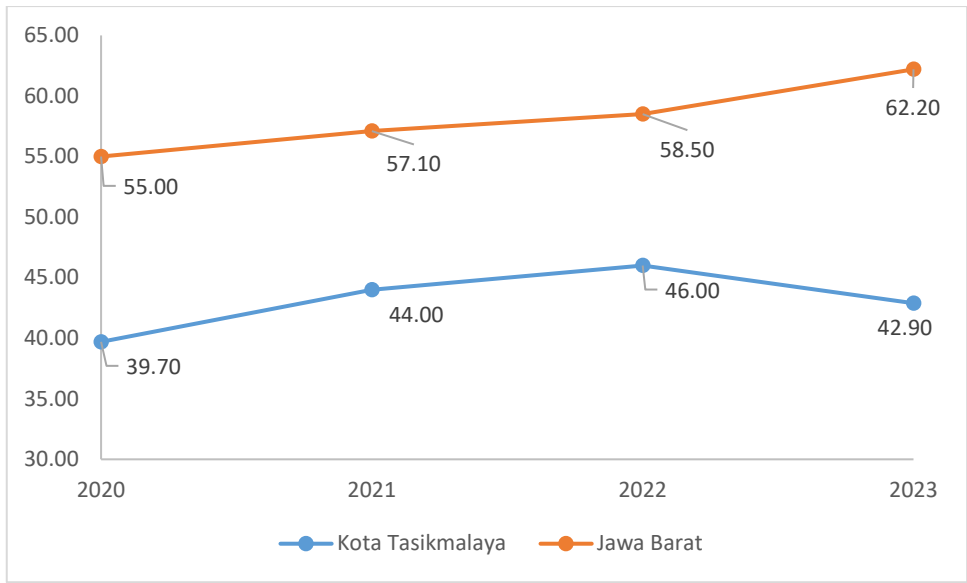
Demografis Kota Tasikmalaya pada tahun 2023 didominasi oleh generasi produktif sebesar 68,4 persen, hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat semakin akrab dengan teknologi dan kreativitas. Salah satu indikator yang menjadi cerminan masyarakat yang melek teknologi dan kreativitas adalah Indeks Daya Saing Digital yang dikeluarkan oleh *East Ventures* (lembaga independen yang melakukan riset di bidang teknologi digital). *East Venture* mengukur daya saing digital daerah berdasarkan 3 sub-indeks yang berisi 9 pilar dan penilaian, yaitu:

1. Input berupa sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengeluaran TIK;
2. Output berupa perekonomian, kewirausahaan dan produktivitas, ketenagakerjaan; serta
3. Penunjang berupa infrastruktur, keuangan, regulasi dan kapasitas pemerintah daerah.

Secara keseluruhan pada tahun 2023, Kota Tasikmalaya berada pada posisi ke-64 dari 157 Kota/Kabupaten yang menjadi sampel dalam penilaian

Indeks Daya Saing Digital dengan nilai sebesar 42,9. Berikut perbandingan Indeks Daya Saing Digital Kota Tasikmalaya dengan Provinsi Jawa Barat.

Gambar 2. 35 Indeks Daya Saing Digital Tahun 2020-2023



Sumber: East Ventures, 2023.

Gambar di atas menunjukkan bahwa perkembangan daya saing digital di Kota Tasikmalaya meningkat meskipun di tahun 2023 mengalami penurunan, tapi jika dibandingkan dengan tahun 2020 nilai Indeks Daya Saing Kota Tasikmalaya meningkat sebesar 3,2 poin.

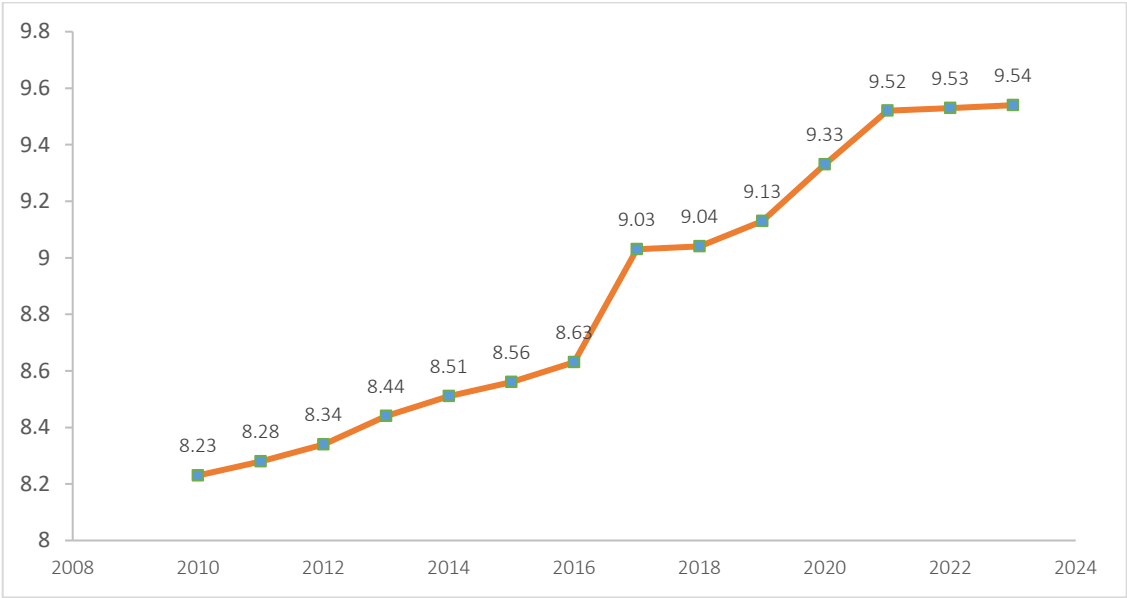
2.3.2. Daya Saing SDM

2.3.2.1. Pendidikan

A. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Capaian angka rata-rata lama sekolah (RLS) di Kota Tasikmalaya dari tahun 2010 hingga 2023 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2010 capaian rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun keatas di Kota Tasikmalaya sebesar 8,23 tahun meningkat perlahan setiap tahun hingga mencapai 9,54 tahun pada tahun 2023 artinya bahwa secara rata-rata penduduk Kota Tasikmalaya usia 15 tahun ke atas telah bersekolah selama 9,53 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas I SMA. Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2010-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 36 Capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah

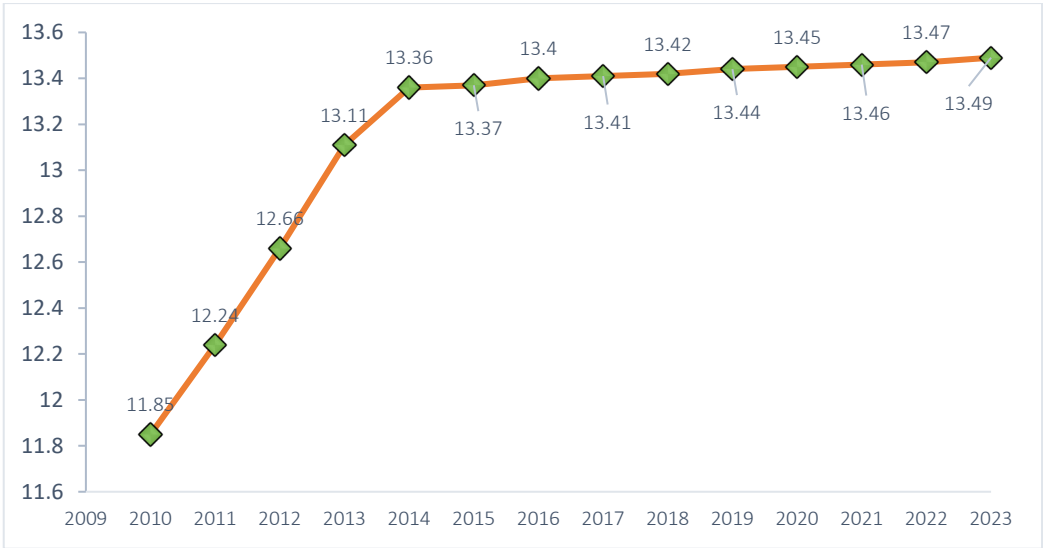


Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2024.

B. Harapan Lama Sekolah

Sesuai dengan metode penghitungan baru IPM pada Tahun 2010, ada pergantian indikator bidang pendidikan yang semula Angka Melek Huruf (AMH) menjadi Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS Kota Tasikmalaya pada tahun 2010-2023 terus mengalami peningkatan. Angka HLS Kota Tasikmalaya pada tahun 2010 adalah 11,85 dan meningkat hingga pada tahun 2023 angka HLS ada pada angka 13,49 tahun. Dengan kata lain lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun) di masa mendatang memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga Diploma 1 atau Diploma 2. Secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 39 Capaian Harapan Lama Sekolah



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2024.

2.3.2.2. Pembangunan Literasi Masyarakat

Literasi merupakan salah satu hal paling penting dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, oleh karena itu penyediaan pelayanan terbaik untuk akses literasi sangat diperlukan. Indikator untuk melihat perkembangan pembangunan literasi yakni Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang terdiri dari Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1), Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (UPLM2), Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3), Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari (UPLM4), Perpustakaan ber-SNP (UPLM5), Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi (UPLM6), Anggota Perpustakaan (UPLM7). Pengukuran IPLM dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional RI dan mulai dihitung pada tahun 2021 dan menghasilkan nilai IPLM pada tahun 2022, Kota Tasikmalaya tercatat sebesar 79,68 poin dan berada di atas posisi Jawa Barat sebesar 72,73 poin. Pada tahun 2023, IPLM di seluruh Kota Kabupaten dan Provinsi di Indonesia mengalami penurunan, namun demikian IPLM Kota Tasikmalaya masih di atas provinsi Jawa Barat dengan nilai 76,45 poin dan provinsi Jawa Barat sebesar 60,02 poin.

Tabel 2. 36 IPLM Kota Tasikmalaya dan Jawa Barat Tahun 2022 dan 2023

Tahun	IPLM Kota Tasikmalaya	IPLM Jawa Barat
2022	79,68	72,73
2023	76,45	60,02

Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2024.

2.3.2.3. Literasi Digital

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. Survey IMDI mulai dilaksanakan pada tahun 2022 dan kembali dilaksanakan di tahun 2023 menghasilkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia tahun 2023 mencapai 43,18 poin meningkat dari tahun 2022 yaitu sebesar 37,80 poin.

Indeks Masyarakat Digital Indonesia terdiri dari Pilar Indeks Masyarakat Digital Indonesia, mencakup:

a. Infrastruktur dan Ekosistem

Infrastruktur digital merupakan fondasi utama dalam menentukan kualitas ekosistem dan lingkungan dalam masyarakat digital. Pilar ini menggaris bawahi pentingnya kesetaraan akses infrastruktur digital. Terbentuk dari 3 subpilar, yaitu:

- 1) Akses dan Adopsi Teknologi Digital
- 2) Ekosistem Pembelajaran
- 3) Digitalisasi Pemerintah

b. Keterampilan Digital

Keterampilan digital adalah rangkaian kemampuan menggunakan perangkat digital, aplikasi komunikasi dan internet untuk mengakses dan mengelola informasi (UNESCO, 2018). Pilar ini terbentuk dari 3 subpillar, yaitu:

- 1) Komplementaritas
- 2) Pengenalan TIK
- 3) Keamanan

c. Pemberdayaan

Kegiatan yang mencerminkan kemampuan digital masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup mereka (pemberdayaan ekonomi) atau aktivitas digital masyarakat yang menghasilkan pendapatan. Kegiatan yang mencerminkan kemampuan digital masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup mereka (pemberdayaan ekonomi) atau aktivitas digital masyarakat yang menghasilkan pendapatan. Pilar ini merepresentasikan operasionalisasi dari tingkat literasi dan tingkat keterampilan digital yang ditujukan dengan keterlibatan individu dalam aktivitas digital. Pilar ini menyoroti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan peranan *sharing economy* dalam proses digitalisasi. Pilar ini terbentuk dari 2 subpillar, mengacu pada dimensi *people-participatory* yang dapat mencerminkan pengembangan *digital skill* dan diperoleh dari tingkat intensitas aktivitas digital responden dalam menggunakan layanan keuangan, *e-commerce*, *marketplace*, media sosial, dan *platform e-learning* sesuai dengan peran penggunaannya. Kedua subpillar terdiri dari: **Pengguna/Konsumen** dan **Penyedia/Penjual**.

d. Pekerjaan

Pilar pekerjaan berfokus pada keahlian digital terkait pekerjaan, dimana digitalisasi akan menciptakan tugas-tugas dan jenis pekerjaan baru yang menuntut keahlian baru. Pilar pekerjaan terdiri dari 2 subpillar, yaitu:

- 1) Permintaan
- 2) Penawaran

Adapun Pilar Indeks Masyarakat Digital Indonesia jika dibandingkan antara Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 37 Pilar Indeks Masyarakat Digital Indonesia

No.	Pilar Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Nasional		Prov. Jawa Barat		Kota Tasikmalaya	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Infrastruktur & Ekosistem	40,24	57,09	49,48	64,73	49,69	63,82
2.	Keterampilan Digital	49,35	56,59	50,11	55,48	60,96	64,60
3.	Pemberdayaan	22,06	26,19	26,52	26,29	31,19	28,10
4.	Pekerjaan	40,35	32,14	48,64	33,42	49,15	34,75

Sumber: Puslitbang Aptika IKP, BPSDM Kominfo, 2024.

2.3.2.4. Angkatan Kerja

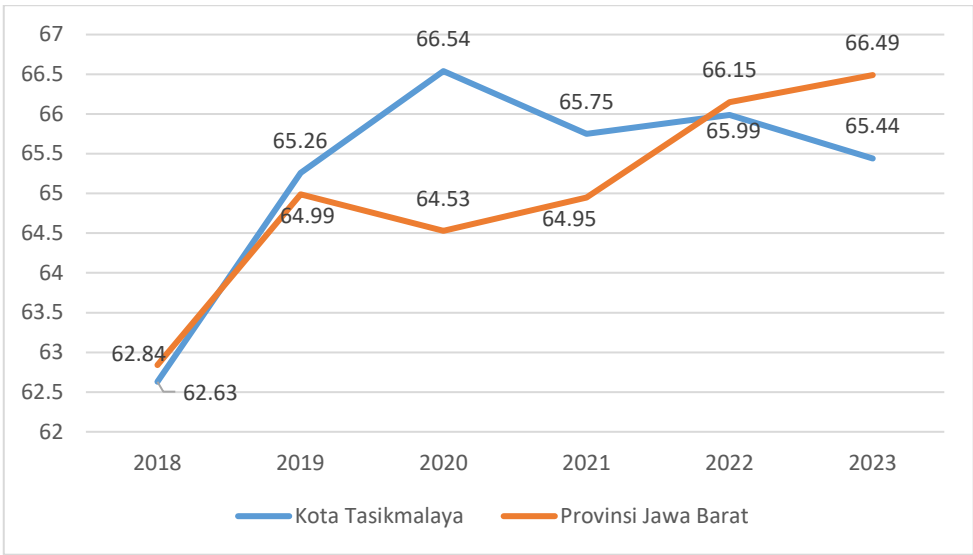
Jumlah penduduk yang makin besar berkorelasi pada jumlah angkatan kerja yang makin besar pula. Ini berarti makin besar pula jumlah orang yang mencari pekerjaan atau menganggur. Agar dapat dicapai keadaan yang seimbang maka seyogyanya mereka semua dapat tertampung dalam suatu pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan keterampilan mereka. Ini akan membawa konsekuensi bahwa perekonomian harus selalu menyediakan lapangan-lapangan pekerjaan bagi angkatan baru.

Jumlah penduduk usia kerja di Kota Tasikmalaya pada tahun 2023 adalah 565.093 orang meningkat sebesar 39.121 orang dari tahun 2022. Dari 565.093 orang penduduk usia kerja ini, sebanyak 369.778 orang (65,44 persen) merupakan angkatan kerja, sedangkan sisanya sebesar 195.315 (34,56 persen)

tergolong bukan angkatan kerja. Memperhatikan komposisi angkatan kerja Kota Tasikmalaya, sebagian besar didominasi oleh penduduk bekerja dengan persentase 93,45 persen atau 345.544 orang terdiri dari 213.722 orang laki-laki dan 131.822 orang perempuan. Sisanya adalah pengangguran dengan persentase sebesar 6,55 persen atau 24.234 orang terdiri dari 16.383 orang laki-laki dan 7.851 orang perempuan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Tasikmalaya selama 3 (tiga) tahun terakhir cenderung menurun. Penurunan TPAK Kota Tasikmalaya didorong oleh belum pulihnya ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan sulitnya mencari pekerjaan.

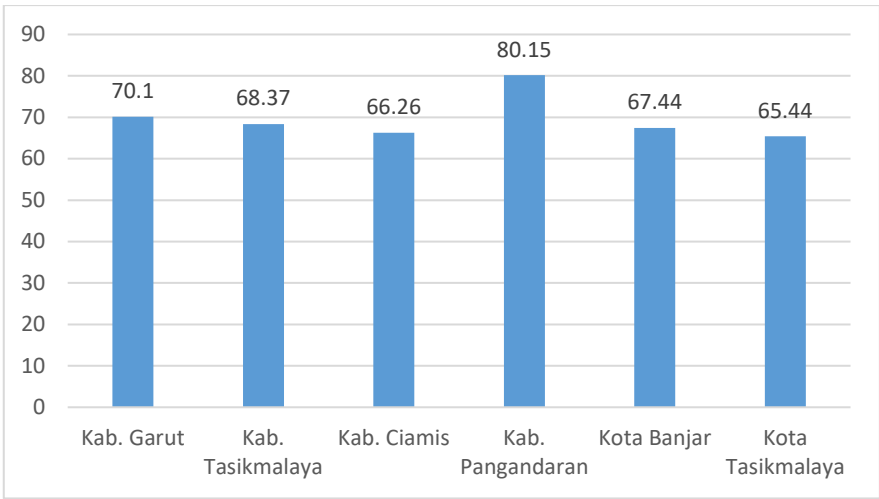
Gambar 2. 37 TPAK Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024.

TPAK Kota Tasikmalaya tahun 2023 berada di bawah TPAK Provinsi Jawa Barat dan terendah di Priangan Timur.

Gambar 2. 38 Perbandingan TPAK Kota Tasikmalaya dengan Kab/Kota se-Priangan Timur Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024.

Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki pada tahun 2023 mencapai 80,63 persen, sedangkan TPAK perempuan adalah 49,94 persen. Perkembangan TPAK berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 38 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun	TPAK Laki-Laki (%)	TPAK Perempuan (%)
2021	79,84	51,65
2022	83,72	48,25
2023	80,63	49,94

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2024

Pada tahun 2023 sebagian besar pekerja di Kota Tasikmalaya bekerja di sektor jasa sebanyak 217.125 orang (62,84 persen), kemudian di sektor manufaktur sebanyak 111.506 orang (32,27 persen) serta sisanya sebanyak 16.913 orang (4,89 persen) bekerja di sektor pertanian. Produktivitas tenaga kerja sektor industri/manufaktur Rp.32,91 juta/orang/tahun dan produktivitas tenaga kerja sektor jasa sebesar Rp.82,53 juta/orang/tahun

Dari 345.544 penduduk yang bekerja didominasi lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama 165.473 orang disusul lulusan sekolah menengah atas sebanyak 121.921 orang dan 58.150 orang lulusan perguruan tinggi. Dominasi lapangan pekerjaan utama di sektor jasa dan manufaktur sangat rentan terhadap kondisi ekonomi apalagi dengan tingkat pendidikan yang rendah.

Peningkatan kualitas pekerja dan pencari kerja merupakan pekerjaan rumah yang berat, salahsatunya disebabkan oleh belum tersedianya Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah Kota Tasikmalaya ataupun perguruan tinggi lokal yang mempunyai program vokasi. Untuk meningkatkan kapasitas calon tenaga kerja atau pencari kerja, Pemerintah Kota Tasikmalaya memberikan pelatihan baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan 58 LPK (Lembaga Pendidikan dan Latihan) yang ada di Kota Tasikmalaya. Selain itu menjaga stabilitas ekonomi untuk menciptakan kondusifitas usaha mikro dan kecil sangatlah penting supaya tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Tabel 2. 39 Penduduk 15 tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kota Tasikmalaya Tahun 2023

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja								Bukan Angkatan Kerja		Persentase Angkatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja	
	Bekerja		Pengangguran		Jumlah Angkatan Kerja		Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja					
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
≤ Sekolah Menengah Pertama	167.830	165.473	5.767	8.797	173.597	174.270	96,17	94,95	113.405	115.513	59,1	60,14
Sekolah Menengah Atas	111.226	121.921	14.692	13.420	125.918	135.341	88,33	90,08	54.727	64.854	69,70	67,60
Perguruan Tinggi	45.043	58.150	2.505	NA*	47.548	NA*	94,73	NA*	10.777	14.948	81,52	NA*

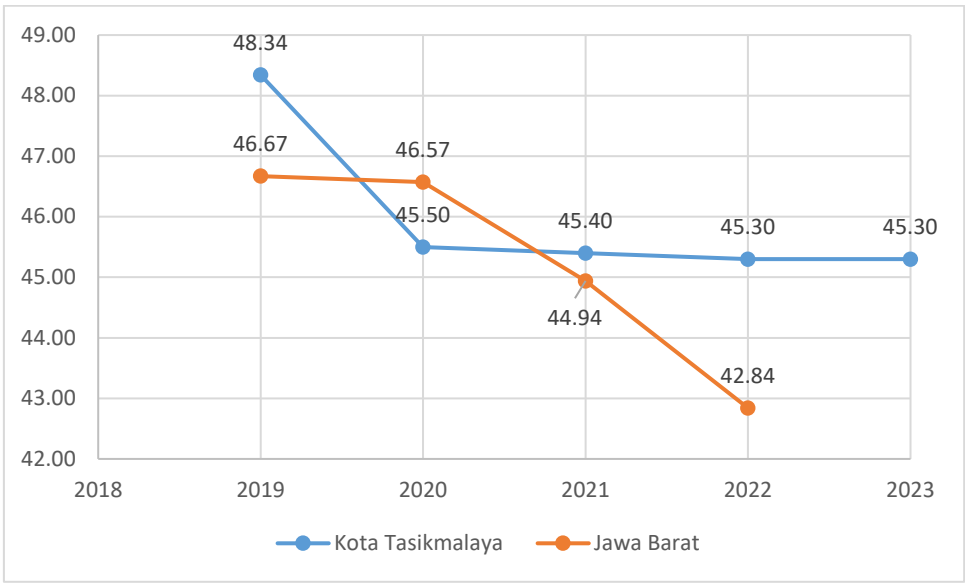
Keterangan:
NA* = Data tidak dapat ditampilkan karena nilai Relative Standard Error (RSE) terlalu tinggi.

2.3.2.5. Ketergantungan Penduduk

Rasio ketergantungan sangat erat dengan produktivitas penduduk suatu wilayah. Rasio ini bisa digunakan untuk mencari tahu tingkat beban ketergantungan penduduk. Apabila rasio ketergantungannya tinggi, maka beban ketergantungan penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, terhadap usia produktif akan semakin tinggi. Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong maju atau sedang berkembang.

Kota Tasikmalaya yang memiliki jumlah penduduk besar, tentunya akan semakin memiliki daya saing SDM yang baik jika rasio ketergantungannya rendah. Jika dilihat tren dalam beberapa tahun terakhir, angka ketergantungan Kota Tasikmalaya cenderung membaik dan masih di bawah angka nasional. Pada tahun 2023, angka ketergantungannya sebesar 45,30, artinya setiap 100 orang yang berusia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 45 orang yang belum produktif atau tidak produktif lagi.

Gambar 2. 39 Angka Ketergantungan Kota Tasikmalaya
Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2024

2.3.2.6. Religi

Dalam perwujudan Misi “Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal”, dalam hasil evaluasi RPJPD 2005-2025, kerukunan antar suku, agama, ras dan antargolongan di Kota Tasikmalaya sudah terjalin dengan baik. Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) di Kota Tasikmalaya yang terdiri dari 18 etnis menjadi paling toleran di Priangan Timur (mediaindonesia.com,2023). Untuk menghitung indicator kerukunan beragama menggunakan Indeks Kerukunan Umat Beragama. Sampai saat ini, penghitungannya hanya dilakukan pada tingkat provinsi, sedangkan untuk kabupaten/kota belum dilakukan penghitungan.

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) Prov. Jabar sebesar 72,7 poin berada di atas angka Indeks KUB nasional yaitu sebesar 72,39 poin.

Dalam rangka mendukung masyarakat yang religius di Kota Tasikmalaya adalah adanya Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya.

Jumlah penduduk menurut agama dan Kecamatan di wilayah Kota Tasikmalaya pada tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 40 Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kecamatan di Kota Tasikmalaya Tahun 2019-2023

Wilayah Kecamatan	Tahun/Agama											
	2019						2020					
	Islam	Protes- tan	Katolik	Hindu	Budha	Lain nya	Islam	Protes- tan	Katolik	Hindu	Budha	Lain nya
Kawalu	96840	56	38	0	4	4	68354	3430	724	8	476	73
Tamansari	75656	268	43	0	3	0	81361	790	187	2	51	12
Cibeureum	68350	216	30	4	4	0	61294	1500	468	1	155	45
Purbaratu	44988	45	13	1	0	1	57979	261	83	0	4	0
Tawang	61831	1561	495	1	175	51	97993	54	32	0	5	4
Cihideung	68463	3543	753	8	524	81	69101	243	26	4	5	0
Mangkubumi	96065	581	147	4	37	0	77557	290	51	0	3	0
Indihiang	57476	269	77	0	4	0	97140	577	145	5	34	0
Bungursari	58337	623	97	0	6	1	59194	661	114	0	6	1
Cipedes	81052	792	183	2	64	15	44993	51	12	1	0	1
Jumlah	709058	7954	1876	20	821	153	714966	7857	1842	21	739	136

Wilayah Kecamatan	TAHUN / AGAMA											
	2021						2022					
	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lain nya	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lain nya
Kawalu	99058	53	34	0	5	3	101.176	69	37	0	5	2
Tamansari	79041	298	50	0	3	0	80.953	293	61	0	3	0
Cibeureum	69877	280	28	4	5	0	71.637	296	34	3	4	0
Purbaratu	45357	52	16	1	0	0	46.181	63	16	1	0	0
Tawang	61048	1481	478	6	150	42	62.099	1.457	468	7	149	42
Cihideung	68349	3357	729	4	461	67	69.404	3.347	719	5	448	68
Mangkubumi	98018	575	147	0	34	0	99.863	591	131	0	37	0
Indihiang	58636	266	86	0	5	0	59.986	256	85	0	5	0
Bungursari	60238	696	119	0	7	0	62.035	783	132	0	7	0
Cipedes	81412	791	177	2	49	11	82.723	787	182	2	48	11
Jumlah	721034	7849	1864	17	719	123	736.057	7.942	1.865	18	705	123

Wilayah Kecamatan	TAHUN / AGAMA					
	2023					
	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Kawalu	13.072	69	34	0	8	2
Tamansari	82.682	307	69	0	3	0
Cibeureum	72.659	323	34	1	4	0
Purbaratu	46.810	64	16	1	0	0

Wilayah Kecamatan	TAHUN / AGAMA					
	2023					
	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Tawang	62.402	1.446	480	3	149	37
Cihideung	70.079	3.306	705	9	438	73
Mangkubumi	101.456	608	135	0	38	0
Indihiang	61.091	260	79	4	5	1
Bungursari	63.314	815.	141	0	6	0
Cipedes	83.558	790	176	2	42	9
Jumlah	747.123	7.988	1.869	20	693	122

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2024.

Jumlah sarana ibadah menurut agama dan Kecamatan di wilayah Kota Tasikmalaya pada tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 41 Sarana Ibadah Menurut Agama dan Kecamatan di Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2023

Wilayah Kecamatan	2020						2021					
	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katholik	Pura	Vihara/Kelenteng	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katholik	Pura	Vihara/Keleteng
Kawalu	231	1	0	0	0	0	233	2	0	0	0	0
Tamansari	172	1	0	0	0	0	215	40	0	0	0	0
Cibeureum	115	1	0	0	0	0	128	1	0	0	0	0
Purbaratu	96	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
Tawang	122	72	9	1	0	1	128	71	9	1	0	1
Cihideung	97	28	7	0	0	0	103	28	7	0	0	0
Mangkubumi	137	12	0	0	0	0	240	12	0	0	0	0
Indihiang	77	99	0	0	0	0	81	99	0	0	0	0
Bungursari	166	3	0	0	0	0	120	3	0	0	0	0
Cipedes	112	0	0	0	0	0	136	0	0	0	0	0

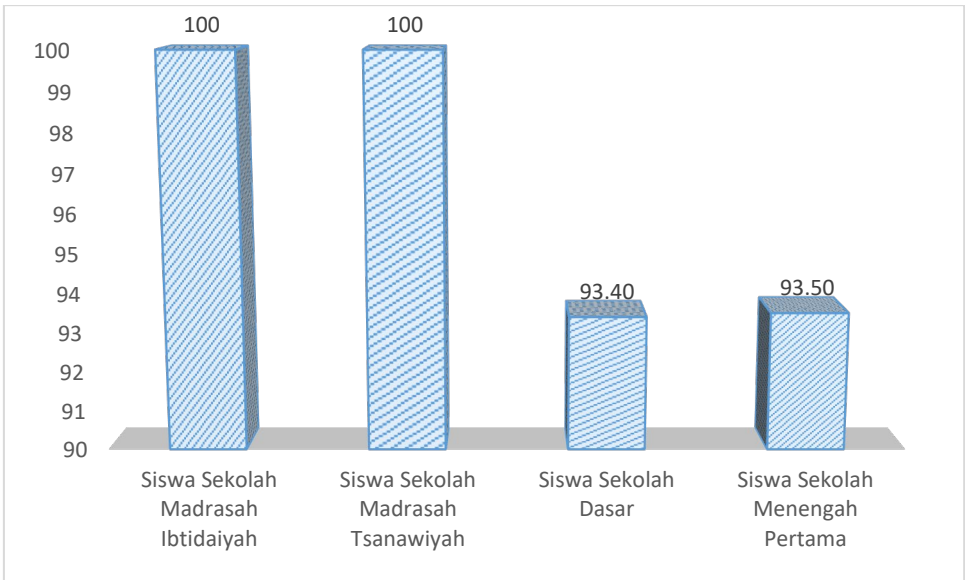
Wilayah Kecamatan	2022						2023					
	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katholik	Pura	Vihara/Kelenteng	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katholik	Pura	Vihara/Kelenteng
Kawalu	234	3	0	0	0	0	236	111	0	0	0	0
Tamansari	216	46	0	0	0	0	216	106	0	0	0	0
Cibeureum	129	1	0	0	0	0	134	192	0	0	0	0
Purbaratu	101	101	0	0	0	0	105	114	0	0	0	0
Tawang	128	71	9	1	0	1	131	71	9	1	0	1

Wilayah Kecamatan	2022						2023					
	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katholik	Pura	Vihara/Kelen- teng	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katholik	Pura	Vihara/Kelen- teng
Cihideung	104	29	7	0	0	0	106	77	7	0	0	0
Mangkubumi	241	12	0	0	0	0	242	68	0	0	0	0
Indihiang	81	99	0	0	0	0	83	99	0	0	0	0
Bungursari	123	3	0	0	0	0	126	3	0	0	0	0
Cipedes	138	0	0	0	0	0	137	33	0	0	0	0

Sumber: Open Data Kota Tasikmalaya, 2023.

Religiusitas merupakan suatu bentuk kepercayaan kodrati di mana terdapat penghayatan dalam kehidupan sehari-hari dengan menginternalisasikan ke dalamnya. Religiusitas dibagi menjadi lima dimensi, yakni dimensi keyakinan, peribadatan dan praktek, penghayatan, pengetahuan agama, serta dimensi efek atau pengalaman. Salah satu pengamalan peribadatan dan praktek pada bidang pendidikan adalah persentase siswa yang dapat membaca Al Qur'an pada jenjang pendidikan dasar yang disajikan pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. 40 Persentase Siswa yang Bisa Membaca Al Qur'an Tahun 2023



Sumber: Kementerian Agama Kota Tasikmalaya & Dinas Pendidikan (Data Diolah), 2024.

Berdasarkan data di atas literasi Al-Qur'an pada jenjang pendidikan dasar untuk MI dan MTs mencapai 100 persen, sedangkan untuk siswa SD dan SMP sebesar 93,40 persen dan 93,50 persen. Hal ini menunjukkan bahwa di Kota Tasikmalaya khususnya untuk tingkat SD dan SMP masih perlu peningkatan dalam literasi Al-Qur'an.

2.3.3. Daya Saing Infrastruktur Wilayah

2.3.3.1. Kemantapan Jalan

Berdasarkan Keputusan Walikota Tasikmalaya nomor 541.03/Kep.136-DPUPR/2017 tentang Penetapan Status Ruas Jalan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai Jalan Kota, dinyatakan bahwa panjang jalan kota di Kota Tasikmalaya adalah 450,742 km dengan 560 ruas jalan yang tersebar di seluruh wilayah Kota Tasikmalaya. Sampai dengan tahun 2023, kondisi jalan kota dalam kondisi baik sebesar 67,69 persen atau 305,107 km. Adapun kondisi jalan kota dalam kondisi baik selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2. 42 Jalan Kota dalam Kondisi Baik Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Panjang Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	km	411,302	379,525	397,157	402,332	305,107*
Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	%	91,25	84,2	88,11	89,28	67,69*
Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	%	90,08	84,44	88,10	89,23	89,29

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2023.

*) ada perubahan definisi operasional.

Melihat kondisi jalan dalam kondisi baik di Kota Tasikmalaya yang tiap tahun mengalami penurunan terutama pada tahun 2023 lebih disebabkan adanya perubahan definisi operasional mengenai kondisi jalan dalam keadaan baik. Panjang jalan dalam kondisi mantap di Kota Tasikmalaya tahun 2019-2023 mengalami fluktuatif, terutama pada tahun 2019 berada pada 90,08 persen, kemudian menurun pada tahun 2020 sebesar 84,44 persen selanjutnya mengalami peningkatan ditahun 2021 sampai dengan 2023 sebesar 88,10 persen dan 89,29 persen.

Perbandingan jumlah kendaraan yang ada di Kota Tasikmalaya dengan panjang jalan maka dapat dilihat bahwa rasio panjang jalan per jumlah kendaraan pada tahun 2022 sebesar 0,0018, sehingga dapat dikatakan bahwa kapasitas jalan masih memadai untuk penduduk Kota Tasikmalaya. Berikut Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Tasikmalaya dari Tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Tabel 2. 43 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Tahun	Panjang Jalan (km)	Jumlah Kendaraan Bermotor (unit)	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
2019	450,74	278.870	0,001616309
2020	450,74	327.480	0,013763894
2021	450,74	239.366	0,001883058
2022	450,74	237.742	0,001895921
2023	450,74	314.115	0,000971000

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya, 2023* diolah

2.3.3.2. Tingkat Konektivitas Antar Wilayah

Peningkatan konektivitas antarwilayah merupakan salah satu strategi yang ditempuh dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi dan merupakan aspek penting dalam perkembangan suatu wilayah. Tingkat konektivitas antarwilayah adalah capaian tingkat kemantapan jalan, aksesibilitas menuju kawasan potensial dan pusat-pusat kegiatan yang dibangun/ditingkatkan atau yang merepresentasikan infrastruktur jalan, dan ketersediaan sarana, prasarana perhubungan darat dan fasilitas perlengkapan jalan, ketersediaan prasarana perhubungan udara dan ketersediaan prasarana transportasi.

Pelayanan urusan perhubungan merupakan aspek penting yang berkaitan erat dengan mobilitas masyarakat, tidak hanya terkait dengan penyediaan moda transportasi, tetapi juga meliputi infrastruktur dan fasilitas yang mendukung kelancaran pergerakan mereka. Mobilitas ini tidak hanya terbatas pada pergerakan individu, tetapi juga mencakup aktivitas bisnis, distribusi barang, serta aspek penting lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang pelayanan urusan perhubungan menjadi krusial dalam memahami dinamika dan kebutuhan masyarakat dalam mengakses transportasi dan segala fasilitas yang terkait.

Salah satu indikator yang menentukan sektor perhubungan dikatakan berhasil adalah tingkat kenyamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya tingkat kenyamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas di Kota Tasikmalaya dari Tahun 2019-2023 menunjukkan adanya peningkatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 44 Ruas Jalan yang Memenuhi Standar Keselamatan di Kota Tasikmalaya Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	%	70,98	88,21	70,8	86,48	99,46

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2024.

Secara umum, Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dari tahun 2019 sampai 2023 mengalami kenaikan yang cukup baik, hanya pada tahun 2021 mengalami penurunan pada angka 70,8 persen, nilai tersebut dipengaruhi oleh dampak pandemik covid-19 yang masih mempengaruhi terhadap kondisi secara keseluruhan di Kota Tasikmalaya.

Salah satu indikator pendukung tingkat kenyamanan berlalu lintas adalah pelengkap jalan. Berikut data jumlah pelengkap jalan dari tahun

2019 sampai dengan tahun 2023 dari Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya.

Tabel 2. 45 Jumlah pelengkap jalan di Kota Tasikmalaya Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Satuan	Capaian Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Rambu terpasang	Unit	1.877	2002	2006	2036	2.063
2.	Jumlah Marka Jalan terpasang	m ²	1.571,2	3.051,2	3.622,2	4.123	4.123
3.	Jumlah traffic light terpasang	Lokasi	20	21	21	21	21
4.	Jumlah Warning Light terpasang	Lokasi	49	49	49	49	49
5.	Jumlah PJU terpasang	Unit	9.749	10.099	11.030	11.624	12.057
6.	Jumlah Halte/shelter terbangun	Unit	33	33	33	33	33
7.	Jumlah Guardrail terbangun	m ²	261	261	261	261	261
8.	Jumlah ATCS terpasang	Unit	23	24	24	24	24
9.	Jumlah Terminal terbangun	Buah	5	5	5	5	5

Keterangan: *Pembongkaran

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2023.

Prasarana terminal angkutan penumpang menjadi fondasi utama dalam memastikan konektivitas yang efisien dan aman bagi pengguna transportasi publik. Penjelasan mengenai kondisi prasarana terminal angkutan penumpang menjadi krusial dalam mengevaluasi tingkat kelayakan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan akses bagi para penumpang. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam terhadap kondisi infrastruktur tersebut sangat penting dalam menyusun rencana perbaikan, pengembangan, serta peningkatan layanan bagi pengguna transportasi umum.

Kota Tasikmalaya memiliki Prasarana terminal angkutan penumpang pada tahun 2023 sebanyak 5 terminal, 1 terminal tipe A dan 4 terminal tipe C. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 2. 46 Terminal Angkutan Penumpang Tahun 2023

No.	Nama Terminal	Tipe	Luas (Ha)	Instansi Pengelola
1.	Terminal Indihiang	A	7,50	Kementerian
2.	Terminal Pancasila	C	0,30	PHB
3.	Terminal Padayungan	C	0,23	Dishub
4.	Terminal Cikurubuk	C	0,29	Dishub
5.	Terminal Awipari	C	1,49	Dishub

No.	Nama Terminal	Tipe	Luas (Ha)	Instansi Pengelola
				Dishub

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2023.

Terkait dengan sarana yang dibutuhkan dalam transportasi yaitu adanya alat transportasi yang baik. Alat transportasi yang terdapat di Kota Tasikmalaya diantaranya angkutan umum berupa angkutan kota (angkot), angkutan perbatasan (angtas), angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), serta Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP). Adapun jumlah trayek angkutan umum di Kota Tasikmalaya pada tahun 2023 dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 47 Jumlah Trayek Angkutan Umum Tahun 2023

No	No/ kode trayek	Panja ng trayek (km)	2022					2023				
			Jumlah armada (unit) Mobil Penumpang Umum					Jumlah armada (unit) Mobil Penumpang Umum				
			Alokasi	Realis asi	Alokasi		Sisa	Alokasi	Realis asi	Status		Sisa
					Aktif	Non Aktif				Aktif	Non Aktif	
1	01	27	91	91	49	42	0	91	91	22	69	0
2	02	16	52	49	10	39	3	52	49	7	42	3
3	03	19,5	125	122	50	72	3	125	122	34	88	3
4	04	23	100	92	53	39	8	100	92	38	54	8
5	05	23,5	150	141	59	82	9	150	141	33	108	9
6	06	23	33	21	14	7	12	33	21	9	12	12
7	07	23	70	63	32	31	7	70	63	23	40	7
8	08	23	70	60	11	49	10	70	60	4	56	10
9	09	25	56	27	11	16	29	56	27	6	21	29
10	09 A	30	35	32	21	11	3	35	32	12	20	3
11	010	34,5	71	67	31	36	4	71	67	6	61	4
12	011	16	19	19	10	9	0	19	19	10	9	0
13	012	15	28	23	15	8	5	28	23	11	12	5
14	012 A	20	4	2	0	2	2	4	2	0	2	2
15	013	26	50	47	20	27	3	50	47	9	38	3
16	014	33	20	16	9	7	4	20	16	4	12	4
17	015	44	35	31	11	20	4	35	31	9	22	4
18	016	28	35	21	7	14	14	35	21	0	21	14
19	017	13	35	35	23	12	0	35	35	12	23	0
20	018	19,5	40	25	12	13	15	40	25	8	17	15
21	019	28	19	18	8	10	1	19	18	5	13	1
Jumlah			1.138	1.002	456	546	136	1138	1002	262	740	136

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2023.

2.3.3.3. Sumber Daya Air

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2004 tentang Irigasi dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Daerah Irigasi terdapat 35 Daerah Irigasi yang berada di Kota Tasikmalaya dengan luas 5.321 Hektar terdiri dari 29 Daerah Irigasi merupakan kewenangan Kota (luas 1.749 Hektar, total panjang 332,53

Km), 5 Daerah Irigasi merupakan kewenangan Provinsi (luas 1.445 Hektar, total panjang 81,35 Km) dan 1 Daerah Irigasi Kewenangan Pusat (luas 2.128 Hektar, total panjang 196 Km).

Kondisi capaian indikator Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) di Kota Tasikmalaya pada tahun 2023 sebesar 25,94 persen, hal ini masih menunjukkan kinerja layanan irigasi yang masih dibawah standar. Faktor yang menyebabkan masih rendahnya kinerja layanan irigasi tersebut adalah sistem operasi dan pemeliharaan belum maksimal sehingga fungsi layanan irigasi tidak berfungsi secara optimal.

Tabel 2. 48 Indeks Kondisi Sistem Irigasi Kota Tasikmalaya Tahun 2023

No.	Nomeklatur/ Nama Daerah Irigasi	Luas Daerah Irigasi Sesuai Permen 14/2015 (Ha)	Indeks Kondisi Sistem Irigasi (%)						
			Prasarana Fisik	Produktivitas	Sarana Penujang	Organisasi Personalia	Dokumentasi	P3A/GP3A /I P3A	Jumlah
			Nilai Maks 45%	Nilai Maks 15%	Nilai Maks 10%	Nilai Maks 15%	Nilai Maks 5%	Nilai Maks 10%	Nilai Maks 100%
1	2	3	9	10	11	12	13	14	15
1	D.I CIDONGKOL	192	20,69136	9,69	5	6,89	1,5	3	46,77136
2	D.I CITANDUY	335	18,22	7,44	6,99	7,33	2,34	5,26	47,58
3	D.I SITU GEDE	223	25	10	7	5	1	0	48
4	D.I BENGKOK	300	18	10	6	5	1	0	40
5	D.I GUNUNG MINDI	13	0	0	0	0	0	0	0
6	D.I LEUWIMUNDING	25	0	0	0	0	0	0	0
7	D.I SITU CIBEUREUM	30	0	0	0	0	0	0	0
8	D.I SUKAMANDI	344	0	0	0	0	0	0	0
9	D.I CIBANGBAY	50	20	8	6	5	2	0	41
10	D.I CIBEAS	40	22	8	6	5	1	0	42
11	D.I CICANGRI	65	28	8	7	5	0	0	48
12	D.I CIDUKUH	194	20	7	6	5	1	0	39
13	D.I CIKADU	45	35	10	7	5	1	0	58
14	D.I CIMANGGALA	40	15	8	6	5	1	0	35
15	D.I CINANGKA	50	26	10	7	5	1	0	49
16	D.I CITALAGA	65	20	8	7	5	1	0	41
17	D.I CITEREWES	50	18,13	14,83	3,7	9,57	2,9	3	52,13
18	D.I CIPAJAJARAN	40	22	8	6	5	1	0	42
19	D.I CIPAMUTIH	35	25	8	6	5	0	0	44
20	D.I CIKURANTUNG	40	15	8	6	5	0	0	34
21	D.I Cipangebak	0	0	0	0	0	0	0	0
22	D.I Cibadodon	0	0	0	0	0	0	0	0
23	D.I Cikalang	0	0	0	0	0	0	0	0
24	D.I Bantarsari	0	0	0	0	0	0	0	0
25	D.I Batu Budug	192	21	10	5	7	2	3	47
26	D.I Situ Bojong	335	18	7	7	7	2	5	48
27	D.I Amsid	223	25	10	7	5	1	0	48
28	D.I Situ Malingping	300	18	10	6	5	1	0	40
29	D.I Leuwibudah	13	0	0	0	0	0	0	0
30	D.I SINGKUP	25	0	0	0	0	0	0	0
31	D.I DAM AMSID	30	0	0	0	0	0	0	0
32	D.I EYONG	344	0	0	0	0	0	0	0
33	D.I GN. EURIH	50	20	8	6	5	2	0	41
34	D.I GN. HEULANG	40	22	8	6	5	1	0	42
35	D.I GN. TARAJE	65	28	8	7	5	0	0	48

No.	Nomeklatur/ Nama Daerah Irigasi	Luas Daerah Irigasi Sesuai Permen 14/2015 (Ha)	Indeks Kondisi Sistem Irigasi (%)						
			Prasarana Fisik	Produktivitas	Sarana Penujang	Organisasi Personalia	Dokumentasi	P3A/GP3A /I P3A	Jumlah
			Nilai Maks 45%	Nilai Maks 15%	Nilai Maks 10%	Nilai Maks 15%	Nilai Maks 5%	Nilai Maks 10%	Nilai Maks 100%
36	D.I JANGKUNG	194	20	7	6	5	1	0	39
37	D.I KUBANG BULEUD	45	35	10	7	5	1	0	58
38	D.I MALINGPING	40	15	8	6	5	1	0	35
39	D.I LOMBANG	50	26	10	7	5	1	0	49
40	D.I PAMEONGAN	65	20	8	7	5	1	0	41
41	D.I PASENDA	50	18	15	4	10	3	3	52
42	D.I PURBASARI	40	22	8	6	5	1	0	42
43	D.I DALEM SUBA	35	25	8	6	5	0	0	44
44	D.I SITU KALAPA	40	15	8	6	5	0	0	34
45	D.I TONGGOK LONDOK	50	0	0	0	0	0	0	0
46	D.I CADAS BOLONG	45	0	0	0	0	0	0	0
47	D.I CIJERUK	45	0	0	0	0	0	0	0
48	D.I BUNGURSARI	130	0	0	0	0	0	0	0
49	D.I CIBEUREUM	25	0	0	0	0	0	0	0
50	D.I CIBOGO	35	30	8	7	5	0	0	50
51	D.I CIBUNIGEULIS	200	0	0	0	0	0	0	0
52	D.I CIEURIH	75	25	5	5	5	1	0	41
53	D.I CIGUGUR	25	20	5	6	5	0	0	36
54	D.I CIHASEM	40	0	0	0	0	0	0	0
55	D.I CIKARAG	75	0	0	0	0	0	0	0
56	D.I CILAMAJANG	50	0	0	0	0	0	0	0
57	D.I CINUTUT	45	0	0	0	0	0	0	0
58	D.I CIPEUCANG	30	0	5	5	5	0	0	15
59	D.I CISALAK	45	0	0	0	0	0	0	0
60	D.I CISEUPAN	73	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2024.

Potensi sumber daya air selain potensi air permukaan, Kota Tasikmalaya pun memiliki potensi kandungan air tanah yang relatif dangkal. Kondisi geohidrologi Kota Tasikmalaya yang terdiri dari air permukaan. Air permukaan dapat diartikan sebagai aliran air yang mengalir permukaan Kota Tasikmalaya maupun dalam bentuk genangan yang cukup luas, bentuknya meliputi sungai dan air dalam cekungan (danau/situ).

1. Air sungai dan air waduk

Sungai-sungai yang mengalir Kota Tasikmalaya adalah Citanduy, Ciloseh, Ciwulan serta Cibanjaran. Sedangkan anak sungainya yaitu beberapa anak sungai dari Sungai Cibanjaran yang meliputi Sungai Cihideung/Dalem Suba, Cipedes, Ciromban, Cidukuh, Cicacaban, Cibadodon, Cikalang, Tonggong Londok, Cibeureum dan Cimulu. Sungai-sungai tersebut mengalir sepanjang tahun dan bermuara di Sungai Citanduy, kecuali Sungai Ciwulan. Kota Tasikmalaya termasuk ke dalam 2 (dua) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Citanduy dan DAS Ciwulan. DAS Citanduy memiliki limpasan air sungai rata-rata bulanan sebesar 17 m³/detik atau rata-rata harian sekitar 5,5 m³/detik, sedangkan DAS Ciwulan memiliki limpasan air sungai rata-rata harian sebesar 13,7 m³/detik. Jumlah kedua limpasan adalah 1.658.880 m³/hari.

Tabel 2. 49 DAS dan Sub DAS di Kota Tasikmalaya

No.	Nama DAS	Sub DAS	Luas (km ²)
1	Ciwulan	Cikunir, Cilumajang	1.165 km ²
2	Citanduy	Cipedes, Ciloseh, Cikalang, Cibadodon, Cimulu, Cikunten II, Leuwimunding, Cihideung, Ciromban	

Sumber : Masterplan Drainase Kota Tasikmalaya

Sedangkan waduk/situ di Kota Tasikmalaya mempunyai potensi menyediakan air sebesar 1.646.750 m³. Situ-situ tersebut adalah Situ Gede di Kecamatan Mangkubumi (6.000 m³/detik), Situ Cibeureum, Situ Cibanjuran, Situ Malingping, Situ Bojong dan Situ Cicangri di Kecamatan Tamansari (1.000 m³/detik).

Tabel 2. 50 Danau, Rawa, Situ, Telaga dan Waduk Kota Tasikmalaya

No.	Nama Perairan	Luas (Ha)	Lokasi	
			Kelurahan	Kecamatan
1	Situ Gede	48	Mangkubumi	Mangkubumi
2	Situ Cicangri	2,5	Tamanjaya	Tamansari
3	Situ Rusdi	1,5	Tamanjaya	Tamansari
4	Situ Cibeureum	7	Tamanjaya	Tamansari
5	Situ Cipajaran	5	Tamanjaya	Tamansari
6	Situ Malingping	2	Tamanjaya	Tamansari
7	Situ Bojong	2	Tamanjaya	Tamansari

Sumber : RTRW Kota Tasikmalaya, 2011

2. Air Tanah

Selain potensi air permukaan, Kota Tasikmalaya memiliki potensi kandungan air tanah yang relatif dangkal, karena air tanah dapat diperoleh dari sumur dengan kedalaman antara 3,00-10,00 m. Kedalaman sumur gali untuk bisa keluar air cukup dangkal, antara 1,50-7,00 m. Sumber air tanah dalam bentuk mata air yang terdapat di Kecamatan Bungursari (mata air Cibunigeulis), Kecamatan Tamansari (mata air Cibangbay) serta Kecamatan Mangkubumi (mata air Cianjur II). Salah satu sumber air tanah dalam bentuk mata air yang terdapat di Kecamatan Indihiang – mata air Cibunigeulis – memiliki kapasitas produksi / debit sebesar 15,00 liter perdetik sampai 60,00 liter per detik.

Tabel 2. 51 Kawasan Sekitar Mata Air di Kota Tasikmalaya

No.	Nama Mata Air	Debit (L/Dtk)		Lokasi		Keterangan
		Maks	Min	Desa	Kecamatan	

1.	Cibunigeulis	60	15	Cibunigeulis	Indihiang	Dimanfaatkan PDAM (sebagai air baku)
2.	Cibangbay	81	50	Setiawangi	Tamansari	Belum dimanfaatkan
3.	Cianjur II	65	18	Linggajaya	Mangkubumi	Lahan milik perorangan

Sumber : RTRW Kota Tasikmalaya, 2011.

Tabel 2. 52 Daftar Cekungan Air Tanah di Kota Tasikmalaya

Cekungan Air Tanah (Cat)			Wilayah Administrasi		Litologi Akuifer	Peringkat Penyelidikan	Jumlah Air Tanah (Juta M ³ /Th)	
No.	Nama	Luas (Km ²)	Kota/Kota	Provinsi			Bebas (Q ₁)	Tertekan (Q ₂)
1.	Cekungan Air Tanah Tasikmalaya		Kab. Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kab. Garut, Kab. Majalengka, Kab. Ciamis	Jawa Barat	-	-	731.400.000	-

Sumber: Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi Kota Tasikmalaya, 2010.

3. Air hujan

Air permukaan jenis air hujan yang dapat dimanfaatkan untuk sumber daya air setempat cukup besar. Di Kecamatan Tamansari potensi air tersebut mencapai 49-416 juta m³/hari, sementara di Kecamatan Mangkubumi mencapai 59-501 juta m³/hari.

2.3.3.4. Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

Infrastruktur perumahan dan permukiman menjadi sektor yang perlu mendapat perhatian karena menjadi urusan wajib pelayanan dasar dan bersifat konkuren dalam rangka penyediaan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar (air minum, sanitasi dan perumahan) untuk pemenuhan kebutuhan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sebelum tahun 2021, penyelenggaraan infrastruktur permukiman diukur dengan dengan indikator cakupan pelayanan air minum, cakupan pelayanan air limbah, dan cakupan pelayanan persampahan. Namun sejak tahun 2021 indikator penyelenggaraan infrastruktur permukiman diubah untuk menyesuaikan dengan dengan sasaran Sustainable Development Goals (SDGs) serta RPJMN Tahun 2020-2024 sehingga menjadi Akses Air Minum layak, Akses Sanitasi Layak dan Akses Penanganan Sampah di Perkotaan.

Secara keseluruhan, ketiga indikator tersebut belum mencapai target sebagaimana yang direncanakan terutama sebagai akibat dari minimnya intervensi pembangunan yang disebabkan adanya keterbatasan anggaran (pemerintah, swasta dan masyarakat) terutama dampak COVID-19. Hal lain yang menjadi permasalahan adalah masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, belum tersedianya perencanaan yang komprehensif dalam rangka peningkatan akses infrastruktur permukiman, dan manajemen pengelolaan yang masih kurang baik serta masih kurangnya dukungan pendanaan diluar APBN dan APBD.

Pengukuran akses air limbah dan air minum mengacu kepada jumlah Kepala Keluarga (KK) pada saat tahun dasar yaitu 180.442 KK.

Akses masyarakat terhadap Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) di Kota Tasikmalaya dari tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2. 53 Capaian Realisasi KK yang Berakses SPAL
Tahun 2019 – 2023**

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Realisasi rumah tangga bersanitasi	KK	109.023	109.242	_*	_*	_*
Persentase rumah tangga bersanitasi	%	60,42	60,54	_*	_*	_*
Realisasi KK berakses SPAL	KK	_*	_*	110.423	111.348	113.317
Capaian KK berakses SPAL	%	_*	_*	61,20	61,71	62,80

Ket : * = Perubahan indikator
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2024.

Seperti halnya capaian akses SPAL, capaian akses air minum juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 54 Capaian Realisasi KK yang berakses Air Minum Tahun
2019 – 2023**

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Realisasi KK berakses Air Minum	KK	100.163	100.290	101.454	102.512	103.380
Capaian KK berakses Air Minum	%	55,51	55,58	56,23	56,81	57,57

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2024

Kinerja sektor perumahan rakyat dan kawasan permukiman secara umum mengalami peningkatan setiap tahunnya. Capaian indikator urusan perumahan dan kawasan permukiman tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 55 Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 – 2023

Indikator	Satuan	Tahun					
		2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	47,59	54,15	51,59	60,38	-	-
Persentase penanganan kawasan kumuh	%	99,23	99,23	100	100	2,42	12,69
Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani	Unit	1000	1320	1000	780	-	-
Persentase PSU yang diverifikasi	%	30,11	28,62	37,55	38,28	-	-
Persentase PSU yang diserahterimakan	%	17,84	18,58	21,56	24,16	25	44,44
Persentase rumah korban bencana yang ditangani	%	100	100	100	100	-	-
Persentase fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	20	100	20
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	-	-	-	-	-	9,24	12,02
Persentase Pengelolaan PSU Perumahan	-	-	-	-	-	25	50
Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	-	-	-	20	23,6
Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	-	-	-	8,56	16,27
Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	-	-	-	1,36	7,76

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya, 2024.

Persentase penanganan kawasan kumuh di tahun 2022 sudah 100 persen terhadap target yang telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 050.13/Kep.374.Bappeda/2014 tentang Penetapan Sasaran Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Kumuh di Kota Tasikmalaya pada Tahun 2014 yang terdiri dari

18 (delapan belas) lokasi dengan luas total 276,17 hektar. Berdasarkan hasil identifikasi di tahun 2021, terdapat kawasan kumuh seluas 168,49 Hektar yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan Walikota Nomor 648/Kep.733.1-Disperwaskim/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Tasikmalaya. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 56 Kawasan Kumuh di Kota Tasikmalaya Berdasarkan SK Wali Kota Tahun 2021

No.	Nama Lokasi	Kelurahan	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Argasari	Argasari	Cihideung	3,78
2	Cipalayung	Cipedes-	Cipedes	15,40
3	Cipanyir	Cipedes-	Cipedes-	16,31
4	Indihiang	Indihiang	Indihiang	1,59
5	Parakanyasag	Parakanyasag	Indihiang	1,31
6	Sukamaju kaler	Sukamaju Kaler	Indihiang	2,14
7	Tuguraja	Tuguraja	Cihideung	3,90
8	Cikalang	Cikalang	Tawang	2,80
9	Purbaratu	Purbaratu	Purbaratu	9,30
10	Sukajaya	Sukajaya	Purbaratu	14,00
11	Sukamenak	Sukamenak	Purbaratu	9,23
12	Mugarsari	Mugarsari	Tamansari	4,73
13	Setiawargi	Setiawargi	Tamansari	2,25
14	Sumerang	Sumelap-Ciherang	Tamansari-	17,00
15	Ciakar	Ciakar	Cibeureum	11,60
16	Kotabaru	Kotabaru	Cibeureum	6,05
17	Setiajaya	Setiajaya	Cibeureum	9,77
18	Margabakti	Margabakti	Cibeureum	4,36
19	Bungursari	Bungursari	Bungursari	3,22
20	Sukajaya	Sukajaya	Bungursari	1,22
21	Cibeuti	Cibeuti	Kawalu	5,00
22	Urug	Urug	Kawalu	11,50
23	Leuwiliang	Leuwiliang	Kawalu	2,80
24	Tanjung	Tanjung	Kawalu	3,47
25	Cigantang	Cigantang	Mangkubumi	0,45
26	Karikil	Karikil	Mangkubumi	5,31
JUMLAH				168,49

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya, 2024.

- Penanganan kawasan kumuh diatas dibagi menjadi 3 kewenangan yaitu:
- Luas kawasan diatas 15 Hektar yang merupakan kewenangan Pusat seluas 48,71 Hektar;
 - Luas kawasan 10 sampai dengan 15 Hektar yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi seluas 37,10 Hektar;
 - Luas kawasan dibawah 10 Hektar yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota seluas 82,68 Hektar.

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

Beberapa indikator dapat ditinjau untuk memberikan gambaran situasi yang menunjang proses dan kondisi investasi di daerah tersebut. Untuk itu, dilakukan tinjauan terhadap Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). IDSD merupakan suatu metrik pengukuran yang diharapkan

dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah, tersusun atas empat komponen yang lebih lanjut terbagi atas 12 pilar. Keempat komponen beserta pilar-pilar penyusunnya adalah sebagai berikut.

- **Lingkungan Pendukung**, mencakup empat pilar yaitu institusi, infrastruktur, adopsi TIK, dan stabilitas ekonomi makro.
- **Sumber Daya Manusia**, mencakup dua pilar yaitu keseharan dan keterampilan.
- **Pasar**, mencakup empat pilar yaitu pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, dan ukuran pasar.
- **Ekosistem Inovasi**, mencakup dua pilar yaitu dinamisme bisnis dan kapabilitas inovasi.

Nilai IDSD Kota Tasikmalaya dibandingkan dengan nilai IDSD Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022-2023 berdasarkan komponen penyusunnya disajikan melalui tabel berikut.

Tabel 2. 57 Nilai IDSD Kota Tasikmalaya dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2023

Komponen		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Kota Tasikmalaya	Provinsi Jawa Barat	Kota Tasikmalaya	Provinsi Jawa Barat
Lingkungan Pendukung	Pilar 1	4,45	4,50	4,46	3,61
	Pilar 2	1,39	3,29	2,78	4,05
	Pilar 3	3,33	4,15	4,61	4,13
	Pilar 4	2,62	3,43	2,80	3,09
SDM	Pilar 5	4,00	4,00	4,05	4,05
	Pilar 6	3,34	3,40	3,71	3,34
Pasar	Pilar 7	4,30	1,80	3,69	1,83
	Pilar 8	3,24	3,59	3,26	3,79
	Pilar 9	3,19	2,78	3,69	3,61
	Pilar 10	1,05	3,17	4,33	5,00
Ekosistem Inovasi	Pilar 11	5,00	5,00	3,64	4,21
	Pilar 12	2,46	4,60	3,02	4,40
Nilai IDSD		3,20	3,64	3,67	3,76

Sumber: BRIN, 2024.

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa IDSD Kota Tasikmalaya pada tahun 2023 naik 0,47 poin dari tahun 2022 yaitu dari 3,20 menjadi 3,67 dengan skor maksimum 5. Jika dikonversi menjadi skala 100, skor IDSD Kota Tasikmalaya sekitar 73,4 persen. Kenaikan tersebut di seluruh komponen IDSD (lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar dan ekosistem inovasi). Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan dan dinilai lebih siap untuk berdaya saing dengan kabupaten kota di Indonesia bahkan mancanegara.

Nilai pilar yang paling tinggi di pilar yaitu pilar 1, 3, 5 dan 10 yaitu dengan nilai lebih dari 4 poin. Pilar tersebut antara lain: Institusi yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum dan aspek keamanan mempengaruhi secara positif aktivitas perekonomian daerah, adopsi TIK yang merupakan faktor determinan kemajuan industri 4.0, pasar produk yang mendorong efisiensi di dalam sistem produksi dan keterampilan yang erat keterkaitannya dengan penciptaan tenaga kerja produktif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Keempat pilar

tersebut harus terus dipertahankan dan ditingkatkan kembali agar mendekati nilai optimal.

Sedangkan pilar yang memiliki nilai cukup rendah yaitu pilar 2 dan 4 di komponen Pendukung yaitu: infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas perekonomian daerah yang bernilai tambah dan stabilitas ekonomi makro yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja perekonomian, serta tingkat biaya hidup. Kedua pilar tersebut perlu upaya lebih ekstra untuk meningkatkan kualitas infrastruktur serta memperbaiki capaian indikator makro salah satunya seperti inflasi dan peningkatan nilai tambah produk yang lebih berdaya saing.

Selain itu 5 pilar lainnya 6, 7, 8, 9, 11 dan 12 yaitu: komponen pasar, sumber daya manusia dan ekosistem inovasi memiliki rentang nilai yang baik di atas 3 poin. Pilar tersebut diantaranya pasar tenaga kerja yang mampu menekan angka pengangguran dengan merangsang terciptanya kesempatan kerja, sistem keuangan yang merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan nonperbankan di daerah untuk memediasi aktivitas perekonomian, ukuran pasar yang menguatkan struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah hasil dari perkembangan iptek.

Diharapkan 25 tahun ke depan Kota Tasikmalaya akan lebih siap serta mampu untuk berdaya saing dengan kabupaten/kota di Indonesia bahkan mancanegara dengan diiringi komitmen dan kinerja optimal dari semua pihak untuk menciptakan ekosisten daya saing daerah yang optimal.

2.3.4.1. Iklim Demokrasi

Iklim demokrasi yang kondusif sangat mempengaruhi daya saing daerah sehingga menjadi pertimbangan investor untuk melakukan investasi. Iklim demokrasi di Kota Tasikmalaya dapat diukur dari tingkat partisipasi pemilih pada pemilu. Tingkat partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator penerimaan masyarakat atas penerapan sistem demokrasi, keberhasilan suatu pemilihan, menilai kesadaran politik. Berikut data partisipasi pemilih di Kota Tasikmalaya dalam pemilu:

Tabel 2. 58 Persentase Pemilih pada Pemilu di Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2024

No.	Pemilu	Partisipasi Pemilu (%)
1.	Pemilu Legislatif 2014	82,82
2.	Pemilu Presiden 2014	81,05
3.	Pilkada Kota Tasikmalaya	81,65
4.	Pemilu Jabar 2017	81,05
5.	Pemilu Tahun 2019	87,49
6.	Pemilu Tahun 2024	86,94

Sumber: Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik, 2024.

Data di atas menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat dalam memberikan suaranya pada pemilu di Kota Tasikmalaya dapat

dikatakan sangat baik, walaupun terjadi penurunan dari pemilu tahun pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2019 yakni sebesar 0,55 persen.

2.3.4.2. Ketenteraman dan Ketertiban
A. Angka Kriminalitas

Investasi dipengaruhi oleh kondisi keamanan dan ketertiban umum suatu daerah yang salah satu indikatornya adalah jumlah kriminalitas yang terjadi. Jumlah tindakan kriminalitas di Kota Tasikmalaya dari tahun 2017-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 59 Jumlah Kasus Kriminalitas di Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2023

No .	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kasus Narkoba	59	0	0	5	87	72	87
2.	Kasus Pembunuhan	1	0	1	3	1	2	2
3.	Kejahatan Seksual	30	35	26	35	32	1	68
4.	Kasus Penganiayaan	31	57	43	39	4	38	109
5.	Kasus Pencurian	74	108	77	69	70	4	90
6.	Kasus Penipuan	84	132	96	105	67	88	207
7.	Kasus Pemalsuan Uang	0	0	1	0	1	0	0
8.	Pidana Lainnya	0	98	122	120	109	0	484
Jumlah Tindak Kriminal selama 1 tahun		319	430	366	376	327	246	1079

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya, 2024 (diolah).

B. Jumlah Demonstrasi

Selain tingkat kriminalitas, kondisi keamanan dan ketertiban yang dapat mempengaruhi investasi daerah adalah banyaknya demonstrasi yang terjadi disuatu daerah. Jumlah demonstrasi di Kota Tasikmalaya pada tahun 2017-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 60 Jumlah Demonstrasi di Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2023

No .	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Bidang Politik	3	1	9	10	6	7	-
2.	Ekonomi	12	3	7	19	6	8	2
3.	Lainnya	32	9	19	20	8	13	20
	Jumlah	47	13	35	49	20	28	22

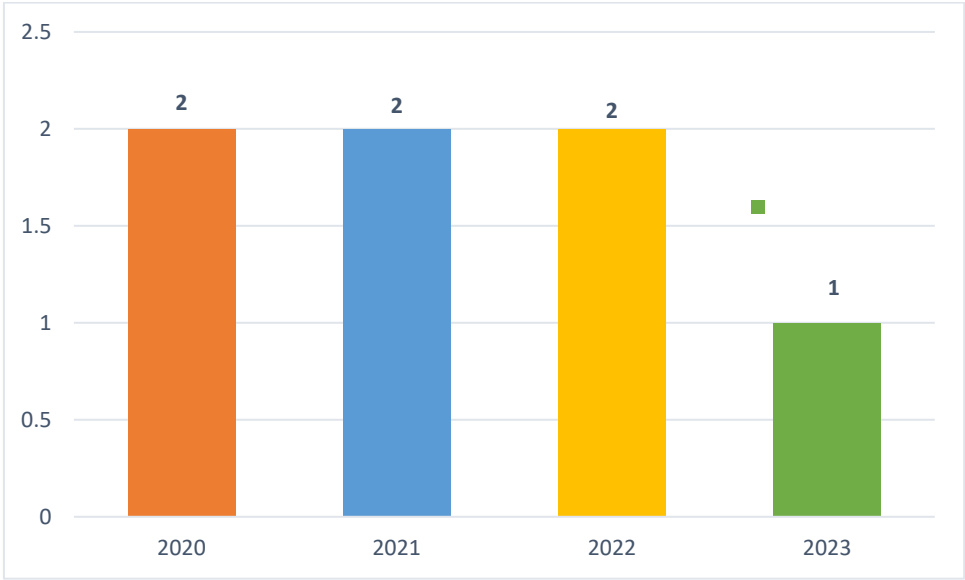
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya, 2024 (diolah).

2.3.4.3. Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan antar umat beragama dapat diwujudkan dengan saling tenggang rasa, menghargai, toleransi antar umat beragama, tidak

memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu, melaksanakan ibadah sesuai agamanya, mematuhi peraturan keagamaam baik dalam agamanya maupun peraturan negara atau pemerintah. Kerukunan umat beragama di Kota Tasikmalaya tergambar dengan banyaknya koordinasi antar umat beragama diantaranya melalui rapat korodinasi kegiatan forum kerukunan antar umat beragama, sebagaimana data di bawah ini:

Gambar 2. 41 Jumlah Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama



Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2024.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi dilaksanakan untuk terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Kunci dari reformasi birokrasi yaitu perubahan *mindset* (pola pikir), *culture set* (budaya kerja), serta komitmen bersama untuk menjadi lebih baik.

Tata kelola pemerintahan di Kota Tasikmalaya menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang terus meningkat seperti tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 61 Nilai Reformasi Birokrasi Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2023

Uraian	Nilai Reformasi Birokrasi					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Reformasi Birokrasi	54,40 (CC)	57,81 (CC)	57,58 (CC)	60,04 (B)	61,70 (B)	78,74 (BB)

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya, 2023 (diolah).

2.4.2. Pelayanan Publik

Pelayanan publik merujuk pada beragam layanan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Pelayanan publik meliputi proses, ketersediaan,

kualitas, dan aksesibilitas layanan yang memengaruhi kesejahteraan dan kepuasan masyarakat. Memahami esensi pelayanan publik menjadi penting dalam upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, serta responsivitas instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan harapan warga negara. Pelayanan publik di Kota Tasikmalaya terus mengalami perbaikan, hal ini dapat dilihat dari capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 62
Indeks Pelayanan Publik Kota Tasikmalaya Tahun 2019-2023

Indeks	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pelayanan Publik	3,22	3,63	3,67	4,18	3,47

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya, 2023 (diolah).

IPP Kota Tasikmalaya menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2019 hingga 2022, namun menurun di tahun 2023. Hal ini menunjukkan masih perlunya perbaikan dalam beberapa aspek pelayanan publik seperti kebijakan pelayanan, profesionalisme Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi dalam layanan sesuai standar pelayanan publik yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2.4.3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah serangkaian langkah yang dirancang untuk mengamankan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. SAKIP berfungsi sebagai alat penilaian kinerja yang mendorong transparansi dan pertanggungjawaban dari kinerja serta fungsi Pemerintah Kota Tasikmalaya kepada masyarakat. Ini tercermin dalam laporan yang disampaikan, menjadi salah satu bentuk keterbukaan atas pencapaian dan pelaksanaan tugas.

Tabel 2.63 Nilai SAKIP Kota Tasikmalaya Tahun 2018 – 2023

Uraian	Nilai SAKIP					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
SAKIP	70,21 (BB)	71,30 (BB)	70,84 (BB)	71,63 (BB)	70,73 (BB)	71,83 (BB)

Sumber: Setda Kota Tasikmalaya, 2023.

Kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya dievaluasi berdasarkan indikator Kinerja Utama (IKU), yang mencerminkan keberhasilan dalam mencapai target pembangunan sesuai yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Secara umum, hasil penilaian Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKIP) atau SAKIP Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020, dimana terjadi penurunan. Pada tahun 2018, nilai SAKIP Kota Tasikmalaya mencapai 70,21 poin dan dikategorikan dalam kriteria BB, sementara pada tahun 2021, nilai SAKIP Kota Tasikmalaya meningkat menjadi 71,63 poin yang juga tetap berada dalam kriteria BB.

2.4.4. Sistem Merit

Anugerah Meritokrasi merupakan penghargaan yang digelar dalam rangka mengapresiasi Instansi Pemerintah yang berhasil menerapkan sistem merit dengan baik. Pemerintah Kota Tasikmalaya terus konsisten dan berkomitmen dalam menerapkan sistem merit sesuai peraturan perundang-undangan dalam menerapkan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Komitmen yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dibuktikan dengan predikat penghargaan Anugerah Meritokrasi yang terus meningkat setiap tahunnya dan di tahun 2023 Pemerintah Kota Tasikmalaya meraih Indeks Sistem Merit sebesar 327 dengan Predikat Sangat Baik.

Tabel 2.64 Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penunjang Bidang Kepegawaian Tahun 2021-2023

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun					
		2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	78	63,26	78	63,26	-	-
Kesesuaian Kompetensi Aparatur dengan Jabatannya	%	78	78,01	78	78,01	-	-
Tingkat disiplin aparatur perangkat daerah	%	99	99,84	99	99,84	-	-
Capaian implementasi SIMPEG	%	70	80,37	70	80,37	-	-
Capaian pembinaan disiplin aparatur	%	100	100,00	100	100,00	-	-
Capaian layanan kepegawaian	%	100	114,37	100	114,37	-	-
Capaian pendidikan dan pelatihan aparatur	%	100	100,54	100	100,54	-	-

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun					
		2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Merit Sistem	Poin	-	-	-	-	175/ Kurang	327/ Sangat Baik
Persentase ASN yang diangkat sesuai dengan formasi	%	-	-	-	-	100	100
Persentase capaian pelayanan kepegawaian	%	-	-	-	-	100	100
Persentase PNS yang terpetakan kompetensinya	%	-	-	-	-	12	12
Persentase penyelesaian evaluasi kinerja dan penanganan disiplin	%	-	-	-	-	100	100
Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	%	-	-	-	-	17	??

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya, 2023.

2.4.5. Tranparansi Pengelolaan Keuangan

Transparansi Informasi APBD dalam rangka transparansi pengelolaan keuangan merupakan salah satu indikator utama yang ditekankan oleh pemerintah untuk mencegah tindak pidana korupsi serta dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Government*). Dalam upaya mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan setiap badan publik menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Kinerja penyelenggaran keuangna pemerintah daerah ditunjukkan oleh penilaian Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan yang disajikan. Pemerintah Kota Tasikmalaya telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut, artinya bahwa Laporan Keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Berikut ini disajikan dasta Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.65
Capaian Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Uraian	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2024

2.4.6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pemerintah Kota Tasikmalaya terus berupaya untuk meningkatkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Penerapan SPBE di Kota Tasikmalaya meningkat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yang ditunjukkan dengan Indeks SPBE Kota Tasikmalaya yang terus mengalami peningkatan.

Pada tahun 2023 Indeks SPBE Kota Tasikmalaya mencapai 3,25 poin dengan predikat baik berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023. Indeks SPBE Kota Tasikmalaya tahun 2021 sampai tahun 2023 tersaji pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.66 Indeks SPBE Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2023

Uraian	Nilai SPBE		
	2021	2022	2023
Indeks SPBE	2,68 (B)	2,80 (B)	3,25 (B)

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya, 2024.

2.4.3. Inovasi Daerah

Kinerja urusan penelitian dan pengembangan di Kota Tasikmalaya sampai dengan tahun 2023 menunjukkan peningkatan cukup signifikan yang ditunjukkan dengan peningkatan Indeks Inovasi Daerah (IID) dari kategori daerah yang tidak inovatif pada tahun 2019 menjadi daerah yang inovatif pada tahun 2022 dan 2023. Sebagai informasi, terdapat perbedaan metode penghitungan IID yang mengakibatkan terdapat perubahan nilai IID tahun 2019-2020 dengan nilai IID tahun 2021-2023 seperti disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 67 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Inovasi Daerah (IID)	Poin (Kategori)	200 (Tidak Inovatif)	387 (Tidak Inovatif)	36,43 (Kurang Inovatif)	38,70 (Inovatif)	46,70 (Inovatif)

Sumber: Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2024.

Inovasi Kota Tasikmalaya yang tercatat dalam aplikasi Innovative Government Award (IGA) pada tahun 2022 sebanyak 22 inovasi dan pada tahun 2023 sebanyak 18 inovasi. Inovasi Kota Tasikmalaya merupakan salah satu upaya menjawab permasalahan:

1. Kemiskinan, melalui inovasi:
 - 1) TASI K BAGEUR (2023) merupakan program janji berbuat baik. Program ini dilaksanakan sebagai upaya membantu masyarakat miskin khususnya PMKS/PPKS yang belum tersentuh program bantuan apapun di masyarakat.
 - 2) LAYAR KUSUMAH (Layanan Antar Sampai Ke Rumah, 2021). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas mutu pelayanan khususnya bagi masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan orang terlantar. Pelayanan Layar Kusumah meliputi bantuan sosial kesehatan, terapi disabilitas, layanan rujukan, dan penanganan orang terlantar.
2. Peningkatan pendapatan dan ekonomi sirkuler, melalui inovasi:
 - 1) KATASIK (Kawasan Wisata Tematik, 2023) merupakan upaya untuk membentuk lingkungan permukiman tematik fungsional yang mampu menarik minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi meningkatkan potensi ekonomi lokal berbasis perumahan dan permukiman yang dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan terkait.
 - 2) Pasar Tani Kelompok Wanita Tani (KWT) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Kecamatan Cihideng (2022), merupakan pemberdayaan kelembagaan masyarakat berorientasi pemasaran hasil pertanian dan olahan hasil pertanian, dan produk olahan lainnya yang berskala rumahan. Program ini merupakan upaya untuk mendorong terciptanya ekonomi sirkuler.
 - 3) GEDONG RESIK (Gerakan Donasi Sampah dan Jelantah Ngarah Resik Kota Tasikmalaya, 2022), merupakan program berkelanjutan penanganan sampah berbasis peran aktif masyarakat dengan cara mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk berdonasi melalui sampah terpilah dari sumbernya, serta jelantah guna membangun Kota Tasikmalaya.
 - 4) KOMPOS JUARA *Recycle Faecal Waste* menggunakan *Smart Machine Compost* sebagai Solusi Alternatif Penanganan Limbah Terpadu di IPLT Singkup (2021), bertujuan untuk mengurangi akumulasi lumpur tinja hasil olahan IPLT yang belum termanfaatkan, meningkatkan nilai manfaat lumpur tinja, dan menjamin keamanan dari sisi kesehatan serta lingkungan dalam pemanfaatan kompos hasil dari olahan lumpur tinja. Produksi

Kompos Juara menggunakan bahan lumpur tinja hasil olahan IPLT dengan campuran beberapa bahan dari limbah padat lainnya yang diolah dengan metode *mixing* dan *heating* menggunakan alat BCM-100 GEC *Composting Machine* dengan variasi komposisi campuran bahan, pengaturan waktu dan suhu.

- 5) MUSAPAHAH (Makan-Makan Upload Struk Dapat Hadiah, 2023) merupakan upaya peningkatan penerimaan pajak daerah khususnya dari sektor pajak restoran dan rumah makan.
3. Stunting dan Kesehatan Ibu dan Anak melalui inovasi:
 - 1) RANTING DELIMA (Rawat Anak Stunting Dengan Lingkungan dan Masyarakat, 2022), merupakan program penanganan stunting melalui edukasi peningkatan gizi anak stunting dengan melibatkan petugas gizi yang berkolaborasi dengan lintas sektor. Inovasi ini dilakukan dalam bentuk kelas ibu balita stunting untuk meningkatkan edukasi kesehatan pada ibu balita stunting serta pemantauan kesehatan berkala setiap bulan.
 - 2) KAPAL SIDORA (Kelurahan Panglayungan Siap Donor Darah, 2022), bertujuan untuk memuat bank data calon pendonor darah sehingga masyarakat khususnya ibu hamil yang membutuhkan donor darah dapat mudah menemukan pendonor darah. Pendataan calon pendonor darah dilakukan dengan *google form* sehingga data calon pendonor dapat tersipkan dan diakses dengan mudah oleh yang membutuhkan.

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2025-2025

Capaian pembangunan Kota Tasikmalaya dalam upaya mewujudkan Visi “*Dengan Iman dan Takwa Kota Tasikmalaya sebagai Pusat Perdagangan dan Industri Termaju di Jawa Barat*” telah menunjukkan kemajuan. Keberhasilan pembangunan ini tidak terlepas dari arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 yang berhasil diterjemahkan dalam pembangunan lima tahunan di dokumen RPJMD dan dioperasionalkan dalam pembangunan tahunan di dokumen RKPD. Adapun kemajuan dan keberhasilan pembangunan Kota Tasikmalaya direfleksikan dengan indikator-indikator terpilih sebagaimana berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Secara umum peningkatan pembangunan manusia di Kota Tasikmalaya cenderung positif, mengalami peningkatan pada akhir periode RPJPD. Hal ini dapat dilihat dari IPM pada akhir periode 2022 mengalami peningkatan 0,48 poin dari periode awal RPJPD atau tahun 2008 sebesar 73,35 poin menjadi 73,83 poin. Perubahan metode perhitungan IPM mengakibatkan pada rendahnya peningkatan capaian IPM. Peningkatan IPM ini terutama dikontibusi oleh Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan, sedangkan untuk Indeks daya beli belum mencapai perkembangan yang optimal dikarenakan adanya daya beli yang belum pulih pasca pandemi Covid-19.

2. Angka Kemiskinan

Kemiskinan Kota Tasikmalaya mengalami penurunan pada akhir periode RPJPD, jumlah penduduk miskin Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 tercatat 87.130 orang, atau mengalami penurunan sebesar 43,62 persen (67.410 orang), dibandingkan dengan tahun 2008 yang mencapai 154.540 orang. Begitu pula dengan persentase penduduk miskin Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 tercatat 12,72 persen, atau mengalami penurunan sebesar 13,36 persen dibandingkan dengan tahun 2008 yang mencapai 26,08 persen.

3. Angka Pengangguran

Angka pengangguran pada tahun 2008 mencapai 10,87 persen, turun menjadi 6,62 persen pada tahun 2022. Rata-rata selama 15 tahun angka pengangguran dikisaran 7,4 persen, meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, namun demikian angka pengangguran Kota Tasikmalaya telah mencapai di angka terendah pada tahun 2023.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,73 persen yang dihitung menggunakan tahun dasar 2000, sedangkan pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01 persen dihitung menggunakan tahun dasar 2010. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi sampai dengan tahun 2016 terus mengalami peningkatan hingga mencapai angka 6,91 persen, namun demikian terjadi perlambatan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 hingga terjadi kontraksi sebesar -2,01 persen sebagai dampak pandemi Covid-19. Pasca pemulihan ekonomi nasional, laju pertumbuhan ekonomi kembali mengalami percepatan mencapai angka 5,01 persen. Sehingga dapat dikatakan secara umum Kota Tasikmalaya mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

5. PDRB Per Kapita

Pendapatan per kapita dari tahun 2008 sebesar Rp.11,62 juta sampai dengan tahun 2022 terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp.34,05 juta atau sebesar 200 persen selama kurun waktu 14 tahun. Perubahan tahun dasar dan sektor lapangan usaha tidak berdampak terhadap pendapatan per kapita Kota Tasikmalaya.

6. Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)

Ketimpangan pendapatan masyarakat dihitung mulai tahun 2009 yaitu sebesar 0,370 poin, dan pada tahun 2022 mencapai angka sebesar 0,405 poin. Perubahan ketimpangan pendapatan masyarakat Kota Tasikmalaya yang fluktuatif sejalan dengan kondisi perekonomian Kota Tasikmalaya yang terkategori perkotaan. Selain itu, Indeks Gini terkoreksi akibat adanya pandemi Covid-19 yang sangat signifikan mempengaruhi tingkat pendapatan warga Kota Tasikmalaya.

7. Kondisi Infrastruktur Kota Tasikmalaya pada akhir RPJPD mengalami perbaikan bila dibandingkan dengan pada awal RPJPD. Infrastruktur tersebut antara lain dapat dilihat pada persentase panjang jalan dalam kondisi baik, dengan realisasi pada akhir tahun periode perencanaan sebesar 89,28 persen, persentase Kepala Keluarga/Rumah Tangga (KK/RT) yang berakses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), dengan capaian sebesar 61,71 persen,

persentase penduduk berakses air minum, dengan realisasi penduduk berakses air minum sebesar 56,81 persen.

Tabel 2. 68 Capaian Kinerja Indikator Makro Daerah

No.	Indikator Makro	Tahun															
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	IPM (poin)	73,3	73,9	66,5	67,1	67,8	68,6	69,0	69,9	70,5	71,5	72,0	72,8	73,0	74,3	74,8	74,47
2.	Persentase Penduduk miskin (%)	26,0	23,5	20,7	19,9	18,9	17,1	15,9	16,2	15,6	14,8	12,7	11,6	12,9	13,1	12,7	11,5
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	10,87	8,41	8,16	7,03	7,03	7,04	7,38	5,46	-	6,89	6,85	6,75	7,99	7,66	6,62	6,55
4.	LPE (persen)	5,7	5,72	5,73	5,81	5,89	6,17	6,16	6,3	6,91	6,07	5,93	5,97	-2,01	3,57	5,01	5,96
5.	PDRB/kapita (juta)	11,62	12,42	13,32	14,23	17,1	18,87	20,81	23,18	25,39	27,62	30,14	32,21	30,22	31,56	34,05	36,95
6.	Indeks Gini (poin)	-	0,37	0,33	0,37	0,40	0,39	0,37	0,49	0,42	0,42	0,39	0,36	0,36	0,41	0,40	0,428

Sumber: Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2023.

Dari kesimpulan di atas, maka direkomendasikan tindak lanjut, berikut ini:

1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan untuk mendukung pencapaian Harapan Lama Sekolah melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pemenuhan dan pemerataan SDM pendidik dan Tenaga Kependidikan serta peningkatan peran masyarakat dalam bidang pendidikan.
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, pemenuhan dan pemerataan SDM Tenaga Kesehatan, pemenuhan jaminan sosial kesehatan bagi seluruh masyarakat/*Universal Health Coverage* (UHC), penurunan prevalensi stunting, Angka kematian Ibu dan Bayi serta peningkatan peran masyarakat dalam bidang kesehatan.
3. Meningkatkan pelayanan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang didukung dengan pengelolaan data yang terintegrasi dan termutakhirkan.
4. Meningkatkan program penanggulangan kemiskinan.
5. Meningkatkan sektor ekonomi unggulan seperti industri, perdagangan dan jasa, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta pembinaan pelaku usaha terutama pelaku UMKM.
6. Menjamin ketahanan pangan dengan mendorong produktivitas sektor pertanian dan perikanan, serta pengendalian harga bahan pokok dan penting (bapokting) dengan menjaga ketersediaan pasokan, distribusi, dan keamanan pangan.
7. Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan penyediaan lapangan kerja serta lapangan berusaha.
8. Meningkatkan investasi daerah melalui regulasi yang mendukung kemudahan investasi, insentif dan disinsentif, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung investasi, serta ketersediaan tenaga kerja lokal yang kompeten.
9. Meningkatkan infrastruktur perkotaan diantaranya melalui peningkatan kapasitas jalan dan menjaga kualitas jalan, peningkatan pemenuhan SPM bidang pekerjaan umum yang meliputi pelayanan air minum dan air limbah domestik.
10. Meningkatkan pengelolaan persampahan melalui optimalisasi pengurangan sampah dari sumber ke TPA dan peningkatan kinerja TPA.
11. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui percepatan implementasi Reformasi Birokrasi meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan manajemen SDM aparatur (penerapan sistem merit).
12. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan meningkatkan pendapatan daerah, diantaranya melalui penggalan potensi penerimaan pendapatan asli daerah.
13. Menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui kerukunan kehidupan bermasyarakat, peningkatan penegakan

Peraturan Daerah, dan kesadaran masyarakat dalam ketaatan terhadap peraturan daerah.

14. Meningkatkan infrastruktur perkotaan diantaranya melalui peningkatan kapasitas jalan dan menjaga kualitas jalan, peningkatan pemenuhan SPM bidang pekerjaan umum yang meliputi pelayanan air minum dan air limbah domestik.
15. Meningkatkan pengelolaan persampahan melalui optimalisasi pengurangan sampah dari sumber ke TPA dan peningkatan kinerja TPA.

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

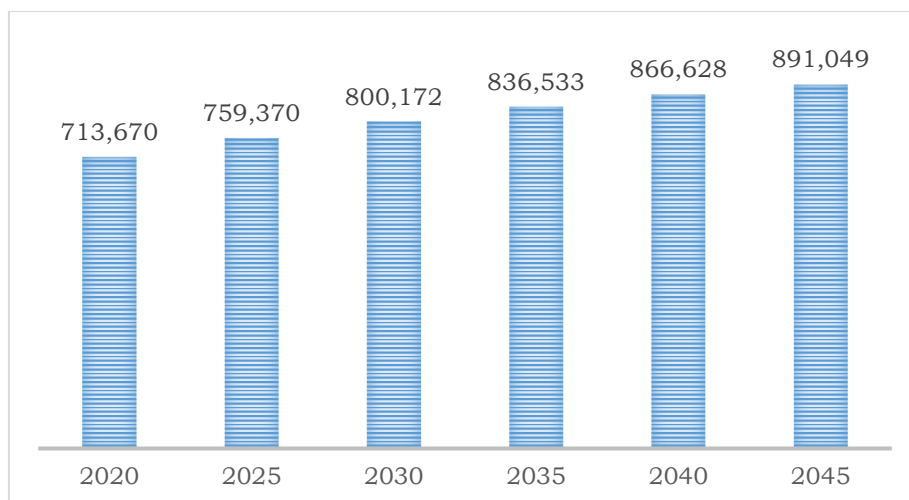
2.6.1. Tren Demografi

2.6.1.1. Tren Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Proyeksi penduduk merupakan suatu penghitungan ilmiah yang didasarkan pada komponen yang berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk dimasa mendatang. Komponen-komponen tersebut menentukan besaran jumlah penduduk dan struktur penduduk. Proyeksi penduduk perlu dilakukan karena dinamika struktur penduduk yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan struktur penduduk umumnya terjadi pada distribusi umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, serta kondisi penduduk di perkotaan dan perdesaan.

Berdasarkan hasil perhitungan BPS, jumlah penduduk Kota Tasikmalaya pada tahun 2020 sebesar 713.670 jiwa dan diproyeksikan mengalami peningkatan/pertumbuhan penduduk, hingga pada tahun 2045 proyeksi maksimum mencapai 891.049 jiwa, sebagaimana tampak pada gambar berikut ini.

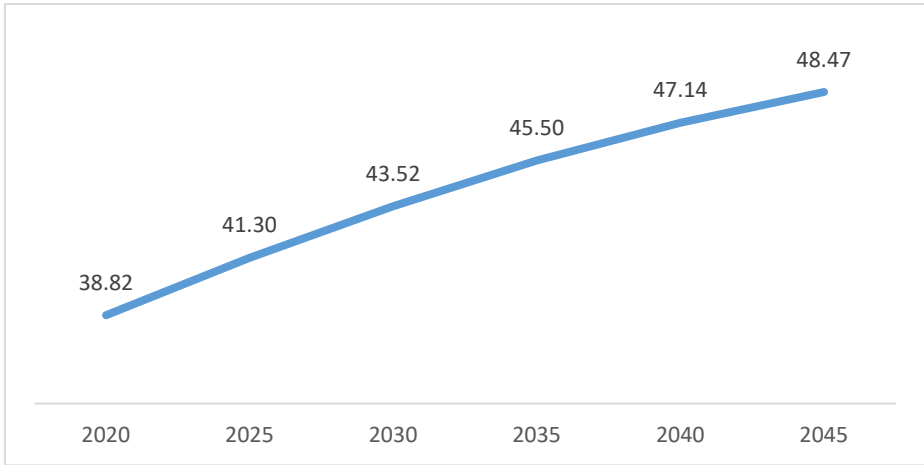
Gambar 2. 42 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2045



Sumber: Hasil Pengolahan Data Long Form SP 2020, BPS.

Berdasarkan proyeksi, kepadatan penduduk Kota Tasikmalaya akan mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Hal ini menjelaskan bahwa daya tampung di Kota Tasikmalaya yang tetap, sedangkan kebutuhan lahan sendiri terus bertambah seiring dengan bertambahnya penduduk hingga tahun 2045.

Gambar 2. 43 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2045



Sumber: Hasil Pengolahan Data Long Form SP 2020, BPS.

Perhitungan perkembangan penduduk baik dari segi jumlah dan penambahan dan/atau perubahan penduduk sesuai dengan faktor pengaruhnya menggunakan indikator masing-masing. Untuk angka kelahiran digunakan indikator *Total Fertility Rate* (TFR), angka kematian menggunakan indikator *Infant Mortality Rate* (IMR) dan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, serta angka migrasi menggunakan indicator migrasi seumur hidup dan migrasi risen.

Di sisi lain, terjadi peningkatan pada aspek mortalitas di Kota Tasikmalaya hingga tahun 2045, yaitu penurunan pada proyeksi kematian bayi berusia kurang dari 1 (satu) tahun, sebesar 6,36 angka kelahiran/1.000 penduduk.

Tabel 2. 69 Proyeksi Indikator Fertilitas dan Mortalitas Kota Tasikmalaya Tahun 2020 dan 2045

No.	Indikator	Satuan	Proyeksi Capaian	
			2020	2045
Aspek Kelahiran (Fertilitas)				
1.	Total Fertility Rate (TFR)	Angka Kelahiran/ 1000 penduduk	2,19	1,86
2.	Crude Birth Rate (CBR)		16,91	
3.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,34	79,18
Aspek Kematian (Mortalitas)				

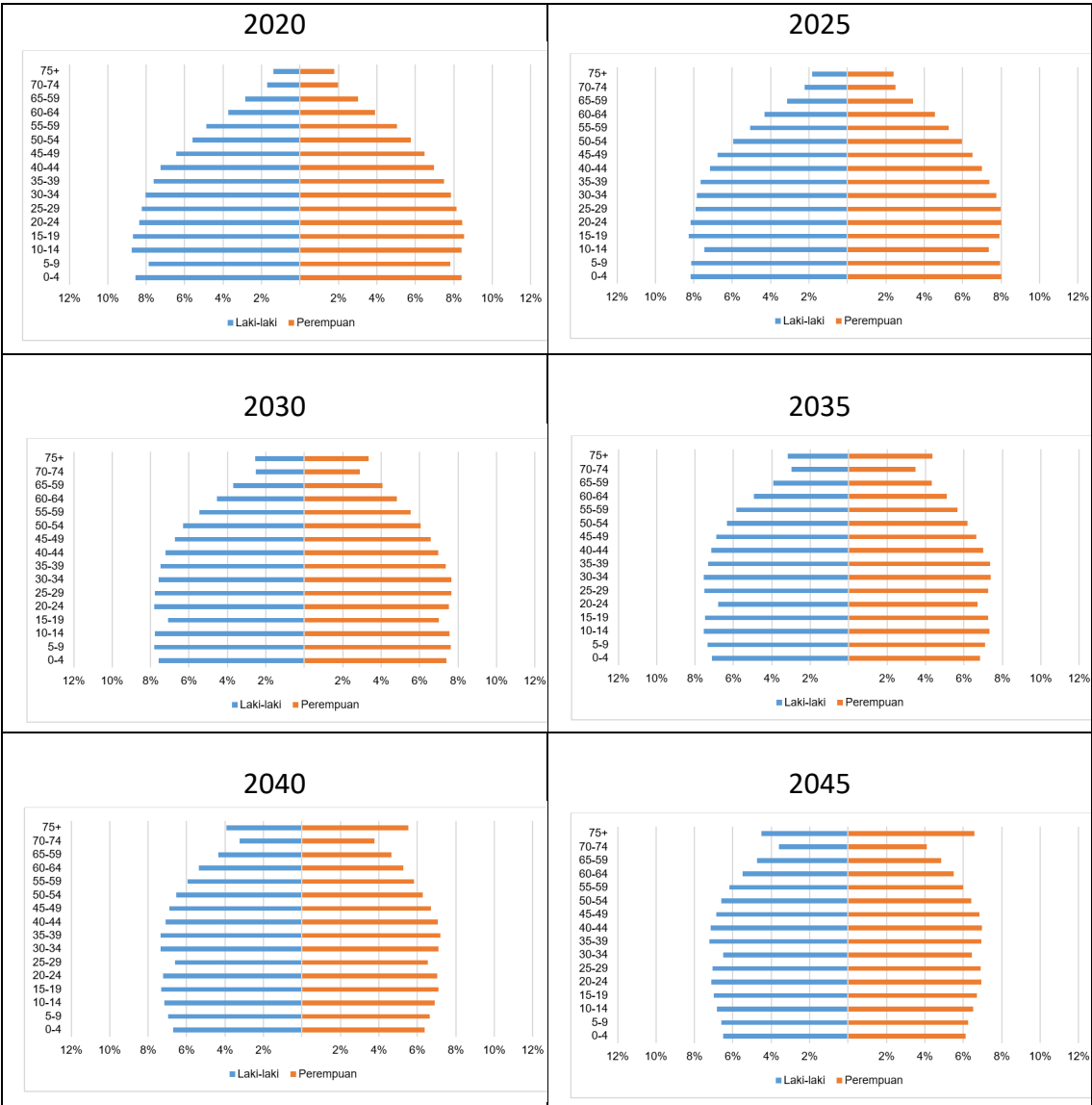
No.	Indikator	Satuan	Proyeksi Capaian	
			2020	2045
1.	Infant Mortality Rate (IMR)	Angka Kelahiran/1000 penduduk	12,97	6,61
Aspek Migrasi				
1.	Migrasi Seumur Hidup	Angka	13,55	
2.	Migrasi Risen	Angka	3,27	

Sumber : Hasil Pengolahan Data Long Form SP 2020, BPS Kota Tasikmalaya

2.6.1.2. Tren Struktur Penduduk

Berdasarkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, sejak tahun 2020 sampai dengan tahun proyeksi 2035, laki-laki lebih mendominasi dibandingkan perempuan dengan sex ratio 103 pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2040 dan 2045, jumlah penduduk perempuan diproyeksikan lebih mendominasi, dengan sex ratio 98.5 pada tahun 2040.

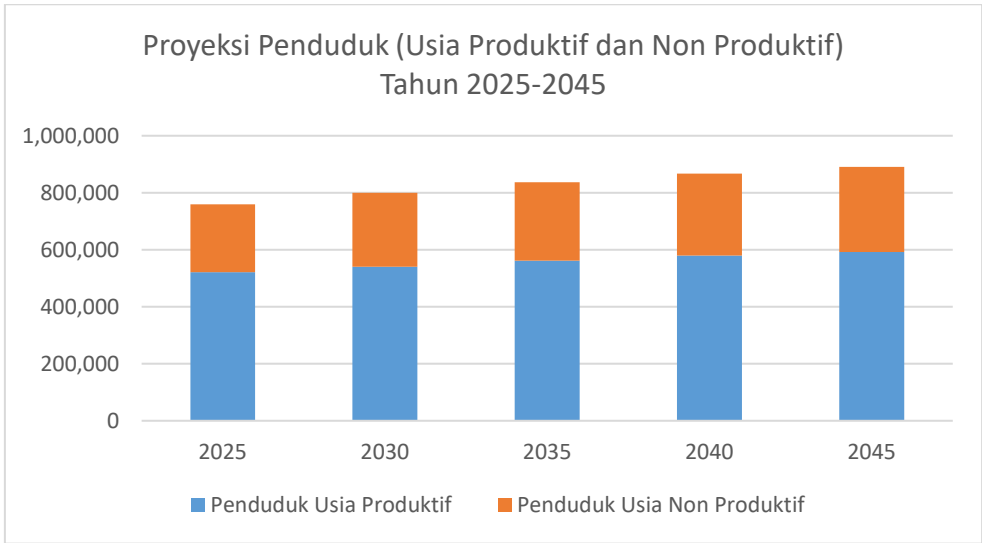
Gambar 2. 44 Proyeksi Struktur Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2045



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2023, diolah.

Di lihat dari klasifikasi berdasarkan kelompok usia, maka proyeksi komposisi penduduk Kota Tasikmalaya tahun 2045 akan didominasi oleh kelompok usia produktif yakni usia 15-59 tahun (66,40 persen), disusul oleh kelompok usia non produktif (33,60 persen) yang terdiri dari usia lanjut yakni usia 60 tahun ke atas dan kelompok usia muda/belum produktif dengan rentang usia 0-14 tahun.

Gambar 2. 45 Proyeksi Penduduk (Usia Produktif dan Non Produktif) Kota Tasikmalaya Tahun 2045



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2023, diolah.

Proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa tren rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan di Kota Tasikmalaya sampai dengan tahun 2045 cenderung seimbang, kecuali pada kelompok usia lanjut >75 tahun, lebih didominasi oleh perempuan.

Berdasarkan kondisi tersebut, pembangunan yang dilaksanakan di Kota Tasikmalaya ke depannya harus memberikan kesetaraan aksesibilitas terhadap layanan dasar dan infrastruktur dasar bagi seluruh penduduk khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan, lansia, termasuk disabilitas dan anak-anak (*safety, security, health as human needs*).

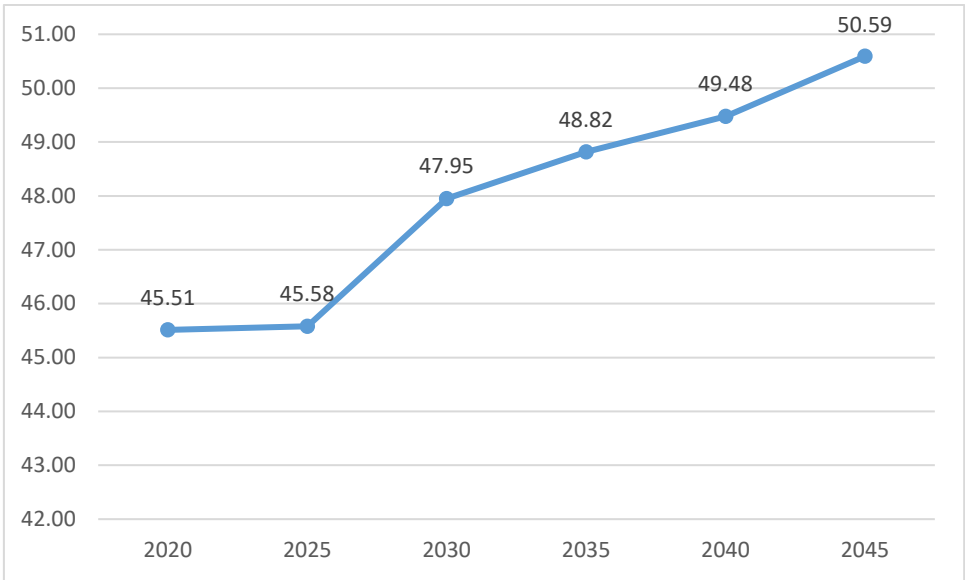
Potensi bonus demografi perlu didukung oleh kebijakan dan upaya yang tepat dalam bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan ekonomi secara menyeluruh. Dalam bonus demografi, jumlah tenaga kerja produktif akan meningkat signifikan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja baru, membantu meningkatkan standar hidup penduduk dan mengurangi kemiskinan.

2.6.1.3 Tren Rasio Ketergantungan dan Bonus Demografi

Rasio ketergantungan diartikan sebagai perbandingan jumlah penduduk usia 0-14 tahun dan >65 tahun dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan umumnya diartikan sebagai

ukuran demografi dari rasio jumlah tanggungan terhadap total penduduk angkatan kerja di suatu wilayah. Dampak yang terjadi jika suatu wilayah memiliki rasio ketergantungan yang besar antara lain dapat mengurangi pertumbuhan produktivitas wilayah, karena banyaknya penduduk yang berada di luar umur angkatan kerja. Selain itu, wilayah yang memiliki rasio ketergantungan tinggi akan sulit untuk berkembang, karena beban tanggungan terhadap penduduk yang tidak produktif juga tinggi. Akibatnya pertumbuhan ekonomi jangka Panjang cenderung lebih rendah.

Gambar 2. 46 Proyeksi Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2045



Sumber: BPS, 2023 (diolah).

Rasio ketergantungan penduduk Kota Tasikmalaya hingga tahun 2040 masih di bawah 50 persen, yang artinya penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia belum produktif dan tidak produktif. Hal ini menjadi kesempatan bagi Kota Tasikmalaya untuk dapat mengoptimalkan penduduk usia produktif dalam pembangunan. Proyeksi pada tahun 2045 mencapai lebih dari 50 persen, hal ini menjadi tantangan bagi Kota Tasikmalaya untuk mendorong kualitas penduduk usia belum produktif sehingga nantinya akan menghasilkan penduduk usia produktif sebagai pelaku pembangunan yang berkualitas.

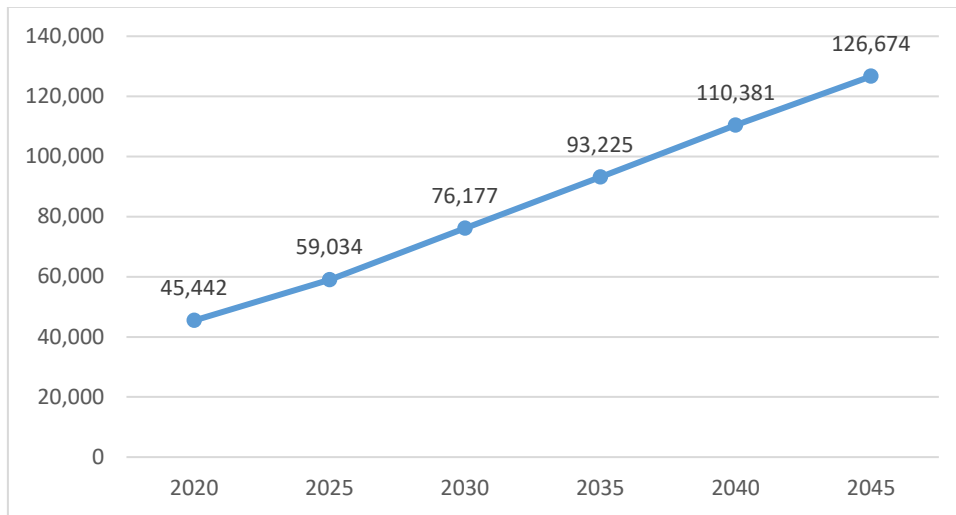
Rasio ketergantungan seperti diuraikan di atas, erat kaitannya dengan bonus demografi. Bonus demografi merupakan peluang yang dapat dinikmati sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Bonus demografi tentunya merupakan sebuah modalitas yang dapat mendukung upaya untuk mencapai target generasi emas di tahun 2045.

2.6.1.4. Penduduk Usia Tua

Penduduk usia tua (*aging population*) adalah fenomena yang terjadi saat umur median penduduk suatu wilayah atau negara mengalami peningkatan. Penuaan penduduk atau *aging population* disebabkan oleh meningkatnya angka harapan hidup serta menurunnya tingkat fertilitas

atau kesuburan penduduk di suatu wilayah atau negara. Fenomena *aging population* terjadi dengan diiringi peningkatan usia harapan hidup, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, serta adanya perbaikan di bidang pelayanan kesehatan. Para ahli demografi menjelaskan bahwa suatu negara atau wilayah dapat dikatakan mengalami fenomena *aging population*, jika jumlah penduduk berusia lanjut mengalami peningkatan.

Gambar 2. 47 Proyeksi Penduduk Usia Tua Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2045



Sumber: BPS, 2023 (diolah).

2.6.2. Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Standar kebutuhan sarana dan prasarana yang dipakai dalam perumusan proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana adalah SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Standar ini juga ditambah dengan standar dari WHO tentang rasio jumlah penduduk dengan jumlah tempat tidur di rumah sakit. Selain itu, untuk menghitung proyeksi timbunan sampah diambil dari Lampiran A Spesifikasi Teknis Sektor Persampahan Kementerian PUPR dan proyeksi kebutuhan air minum diambil dari Permenkes No. 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia. Semua perhitungan proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana diasumsikan berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk.

Kebutuhan sarana dan prasarana dihitung berdasarkan proyeksi jumlah penduduk Kota Tasikmalaya hingga tahun 2045. Jumlah penduduk Kota Tasikmalaya pada akhir tahun perencanaan, yaitu 891.049 jiwa. Dengan memperhatikan jumlah penduduk tersebut, proyeksi sarana prasarana dilakukan dengan menggunakan pedoman tersebut. Berikut adalah hasil proyeksi kebutuhan sarana prasarana dengan pentahapan tiap lima tahun hingga tahun 2045.

2.6.2.1. Rumah/tempat tinggal dan permukiman

Proyeksi kebutuhan rumah tinggal di Kota Tasikmalaya Tahun 2045 berdasarkan data baseline jumlah penduduk di tahun 2022 sebesar

733.467 orang sebanyak 151.874 unit pada tahun 2025 dan 178.210 di tahun 2045.

Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2023 jumlah rumah yang ada di Kota Tasikmalaya sebanyak 216.594 unit yang terdiri dari rumah komersial sebanyak 38.465 unit, rumah khusus 3 unit, rumah swadaya 177.309 unit dan rumah negara sebanyak 817 unit.

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah rumah saat ini sudah dapat memenuhi kebutuhan rumah untuk penduduk di Kota Tasikmalaya 20 (dua puluh) tahun kedepan.

Tabel 2. 70 Proyeksi Kebutuhan Rumah Tinggal

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Rumah Tinggal (unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	733.467	759.370	800.172	836.533	866.628	891.049
Proyeksi Rumah Tinggal		151.874	160.034	167.307	173.326	178.210

Sumber: Hasil Analisis, 2023.

Tabel tersebut menunjukkan proyeksi kebutuhan rumah tinggal di Kota Tasikmalaya, dengan data baseline jumlah penduduk di tahun 2022 sebesar 733.467 orang. Kebutuhan rumah sebanyak 151.874 unit pada 2025, serta memprediksi peningkatan kebutuhan unit rumah dari 160.034 di tahun 2025 menjadi 178.210 di tahun 2045.

2.6.2.2. Kebutuhan Air Bersih/Minum

Proyeksi kebutuhan air bersih/minum ini diperhitungkan berdasarkan kebutuhan air per kapita, pertumbuhan dan pengembangan penduduk, dan pengklasifikasian jenis kebutuhan. Kebutuhan air terdiri dari domestik dan non domestik. Kebutuhan domestik adalah kebutuhan yang berdasarkan jumlah penduduk dan pemakaian air per orang. Kebutuhan non domestik adalah kebutuhan air untuk kegiatan penunjang kota, yang terdiri dari kegiatan komersial yang berupa industri, perkantoran, dan lain-lain, maupun kegiatan sosial seperti sekolah, rumah sakit dan tempat ibadah.

Untuk menghitung proyeksi kebutuhan air minum di Kota Tasikmalaya dimulai dengan mengetahui jumlah penduduk pada tahun 2025 sebanyak 759.370 orang dengan asumsi 1 (satu) orang membutuhkan 1,73 liter maka pada tahun 2025 kebutuhan air minum sebanyak 1.312.918,37 liter per hari, dan diperkirakan akan meningkat hingga sebanyak 1.539.096,97 liter per hari pada tahun 2045 seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk menjadi 891.049 orang.

Tabel 2. 71 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih/Minum

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih/Minum (liter/hari)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	733.467	759.370	800.172	836.533	866.628	891.049
Air Bersih/Minum		1312918,37	1383308,71	1446005,65	1497860,55	1539906,97

Sumber: Hasil Analisis, 2023.

2.6.2.3. Proyeksi Kebutuhan Listrik

Proyeksi kebutuhan listrik di Kota Tasikmalaya yang diukur dalam kilovolt-ampere (kV), dimulai dengan jumlah penduduk tahun 2022 sebesar 733.467 orang. Pada tahun 2025, kebutuhan listrik sebesar 3.417.716,50 kV, dan diperkirakan meningkat menjadi 4.097.025 kV pada tahun 2045 sesuai dengan peningkatan jumlah penduduk menjadi 891.049 orang. kebutuhan air 1,312,918.37 liter per hari, dan diperkirakan akan meningkat hingga 1,539,096.97 liter per hari pada tahun 2045 seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk menjadi 891,049 orang.

Tabel 2. 72 Proyeksi Kebutuhan Listrik

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Listrik (kV)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	733.467	759.370	800.172	836.533	866.628	891.049
Kebutuhan Listrik		341.716,50	360.077,40	376.439,85	389.982,60	400.972,05

Sumber: Hasil Analisis, 2023.

2.6.2.4. Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Perkembangan pengelolaan sampah yang terjadi akhir-akhir ini memperlihatkan munculnya paradigma baru yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, dimana pendekatannya berkembang menjadi “kumpul – pilah – olah – angkut – buang”. Paradigma ini memperhatikan keberadaan proses pemilahan dan pengolahan untuk menghasilkan buangan yang sudah sangat minim untuk mengurangi risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan. Salah satu ciri penerapan paradigma ini antara lain melalui perkembangan prasarana dan sarana persampahan, termasuk dalam aspek keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi Tempat Pemrosesan/Pengelolaan Akhir Sampah (TPAS).

Dalam menghadapi pertumbuhan penduduk yang pesat di Kota Tasikmalaya, perencanaan infrastruktur persampahan menjadi sangat penting. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan actual dan kapasitas pengelolaan sampah yang ada. Karena itu, kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya perlu difokuskan pada penanganan sampah di hulu sehingga tidak ada penambahan TPA.

Proyeksi timbunan sampah harian di Kota Tasikmalaya pada tahun 2025 sebesar 2.278.110 liter per hari dan pada 2045 jumlah timbunan sampah 2.673.147 liter per hari dengan asumsi per orang menghasilkan sampah sebanyak 3 liter per hari.

Tabel 2. 73 Proyeksi Timbunan Sampah

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Timbunan Sampah (liter/hari)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	733.467	759.370	800.172	836.533	866.628	891.049
Timbunan Sampah menurut jumlah penduduk	90.361.889	2.278.110	2.400.516	2.509.599	2.599.884	2.673.147
Timbunan Sampah menurut tren	90.361.889	935.523.698	985.790.679	1.030.586.467	1.067.662.708	1.097.748.733

Sumber: Hasil Analisis, 2023.

2.6.2.5. Kebutuhan Infrastruktur Kesehatan

Tabel 2.43 menunjukkan proyeksi kebutuhan sarana kesehatan untuk Kota Tasikmalaya dari tahun 2025 hingga 2045 berdasarkan jumlah penduduk. Data menunjukkan bahwa dengan jumlah penduduk 733.467 pada tahun 2022, kebutuhan sarana kesehatan akan meningkat secara bertahap termasuk posyandu, balai pengobatan warga, klinik bersalin, puskesmas, tempat praktik dokter, dan apotek, sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang diperkirakan mencapai 891.049 pada tahun 2045. Jumlah tempat tidur rumah sakit juga diproyeksikan meningkat dari 759 unit pada tahun 2025 menjadi 891 unit pada tahun 2045.

Tabel 2. 74 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan (unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	733.467	759.370	800.172	836.533	866.628	891.049
Proyeksi Kebutuhan Klinik Bersalin	8	25	27	28	29	30
Proyeksi Kebutuhan Puskesmas Pembantu	22	25	27	28	29	30
Proyeksi Kebutuhan Puskesmas	22	25	27	28	29	30
Proyeksi Kebutuhan Tempat Praktik Dokter	76	152	160	167	173	178
Proyeksi Kebutuhan Apotek	240	265	267	268	269	270
Proyeksi Kebutuhan Jumlah tempat tidur rumah sakit	1,359	2,118	2,918	3,755	4,622	5,513
Proyeksi Kebutuhan Posyandu	-	607	640	669	693	713
Proyeksi Kebutuhan Balai Pengobatan Warga	-	3.037	3.201	3.346	3.467	3.564
Proyeksi Kebutuhan Klinik Bersalin	-	25	27	28	29	30

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan (unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Proyeksi Kebutuhan Puskesmas Pembantu	-	25	27	28	29	30
Proyeksi Kebutuhan Puskesmas	-	6	7	7	7	7
Proyeksi Kebutuhan Tempat Praktik Dokter	-	152	160	167	173	178
Proyeksi Kebutuhan Apotek	-	25	27	28	29	30
Proyeksi Kebutuhan Jumlah tempat tidur rumah sakit	-	759	800	837	867	891

Sumber: Hasil Analisis, 2023.

2.6.2.6. Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Pendidikan

Tabel 2.44 ini merangkum proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan di Kota Tasikmalaya dari tahun 2025 sampai 2045, dengan jumlah penduduk tahun 2022 sebesar 733.467. Data menunjukkan kebutuhan unit untuk Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/MA/SMK), dengan proyeksi meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk yang diperkirakan mencapai 891.049 pada tahun 2045.

Tabel 2. 75 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan (unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	733.467	759.370	800.172	836.533	866.628	891.049
Proyeksi Kebutuhan TK	236	607	640	669	693	713
Proyeksi Kebutuhan SD/MI	284	475	500	523	542	557
Proyeksi Kebutuhan SMP/MTs	141	158	167	174	181	186
Proyeksi Kebutuhan SMA/MA/SMK	115	158	167	174	181	186

Sumber: Hasil Analisis, 2023.

Di bawah ini merupakan metode lain yang digunakan untuk memproyeksikan kebutuhan sarana pendidikan dengan melihat jumlah penduduk usia sekolah. Penduduk usia sekolah dipecah dari proyeksi penduduk BPS dengan menggunakan pengali Sprague.

Tabel 2. 76 Proyeksi Kebutuhan TK Berdasarkan Penduduk Usia TK

TK		
Tahun	Jumlah Penduduk Usia TK (jiwa)	Kebutuhan Jumlah TK (unit)
2025	12.431	104
2030	12.334	103

TK		
Tahun	Jumlah Penduduk Usia TK (jiwa)	Kebutuhan Jumlah TK (unit)
2035	11.992	100
2040	11.696	97
2045	11.342	95

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 2. 77 Proyeksi Kebutuhan SD Berdasarkan Penduduk Usia SD

SD/MI/Sederajat				
Tahun	Jumlah Penduduk Usia SD	Kebutuhan Jumlah Tipe A	Kebutuhan Jumlah Tipe B	Kebutuhan Jumlah Tipe C
2025	69.607	145	193	290
2030	74.604	155	207	311
2035	73.831	154	205	308
2040	71.897	150	200	300
2045	69.844	146	194	291

Sumber: Hasil Analisis, 2023.

Tabel 2. 78 Proyeksi Kebutuhan SMP Berdasarkan Penduduk Usia SMP

SMP/MTs/Sederajat				
Tahun	Jumlah Penduduk Usia SMP	Kebutuhan Jumlah SMP	Kebutuhan Jumlah Tipe B	Kebutuhan Jumlah Tipe C
2025	34.549	32	48	96
2030	35.541	33	49	99
2035	37.542	35	52	104
2040	37.034	34	51	103
2045	36.072	33	50	100

Sumber: Hasil Analisis, 2023.

Tabel 2. 79 Proyeksi Kebutuhan SMA Berdasarkan Penduduk Usia SMA

SMA/MA/SMK/Sederajat				
Tahun	Jumlah Penduduk Usia SMA/MA/SMK	Kebutuhan Jumlah SMA/MA/SMK	Kebutuhan Jumlah Tipe B	Kebutuhan Jumlah Tipe C
2025	35.399	33	49	98
2030	31.616	29	44	88
2035	35.586	33	49	99
2040	35.790	33	50	99
2045	34.851	32	48	97

Sumber: Hasil Analisis, 2023.

2.6.2.7. Proyeksi Kebutuhan Jalan

Penduduk akan melakukan mobilitas setiap waktu. Mobilitas yang dimaksud lebih ditekankan pada pergerakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan hidup. Pertambahan penduduk, tentunya akan meningkatkan kebutuhan akan alat transportasi yang secara tidak langsung dapat menyebabkan kemacetan. Terlebih apabila kapasitas jalan yang ada tidak mencakup jumlah kendaraan yang melewati jalan.

Kota Tasikmalaya yang diproyeksikan pada tahun 2045 memiliki jumlah penduduk sebanyak 891.049 jiwa. Kondisi ini tentunya memerlukan dukungan prasarana jalan yang memadai agar dapat mengimbangi peningkatan jumlah penduduk sehingga mobilitas pergerakan barang maupun jasa dapat tetap terlayani. Pada saat ini, panjang jalan di Kota Tasikmalaya yaitu 450,742 km dengan rata-rata kondisi jalan dalam kondisi baik berada diangka 67,69 persen.

Mobilitas menjadi alat ukur untuk mengimbangi pertambahan jumlah penduduk terhadap pelayan infrastruktur jalan yang ada di Kota Tasikmalaya. Untuk kebutuhan mobilitas sendiri akan direduksi menjadi jalan yang memiliki peran penunjang menuju ke pusat-pusat kegiatan di Kota Tasikmalaya.

Dengan panjang jalan yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya maka angka mobilitas menunjukkan angka menunjang ke pusat kegiatan tersebut sepanjang 12.183,59 km. Untuk itu, Angka Mobilitas Provinsi Jawa Barat menunjukkan angka 2,86 km/10.000 jiwa.

Kepadatan penduduk Kota Tasikmalaya tahun 2045 akan mencapai 4.844 (jiwa/km²). Angka ini termasuk kedalam kategori IV sesuai dengan angka mobilitas berdasarkan kepadatan penduduk yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2010.

Pada kategori ini angka mobilitas yang ditunjukkan oleh panjang jalan dibagi 10.000 jiwa adalah pada angka 3,00. Memperhatikan angka perolehan mobilitas pada tahun 2045 senilai 2,86 km/10.000 jiwa maka pencapaian mobilitas dengan target senilai 95,32 persen. Untuk pencapaian persentase mobilitas 100 persen, dengan prediksi jumlah penduduk akhir tahun 2045 sebesar 56.805.776 jiwa, maka untuk angka mobilitas 3,00 diperlukan penambahan panjang jalan kurang lebih 812,19 km.

2.6.2.8. Kebutuhan Pengolahan Limbah

Sarana dan prasarana air limbah domestik Kota Tasikmalaya direncanakan melalui kegiatan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017.

Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik, terdiri dari SPALD Setempat (SPALD-S) dan SPALD Terpusat (SPALD-T), Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD).

Pengukuran akses SPAL dan air minum mengacu kepada jumlah Kepala Keluarga (KK) pada saat penyusunan RPJMD yaitu 180.442 KK. Akses masyarakat terhadap Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) di Kota Tasikmalaya dari tahun 2020 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 80 Capaian Realisasi KK yang Berakses SPAL Tahun 2020–2023

Indikator	Satuan	Tahun							
		2020		2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Realisasi rumah tangga bersanitasi	KK	109.149	109.242	—*	—*	—*	—*	—*	—*
Persentase rumah tangga bersanitasi	%	60,49	60,54	—*	—*	—*	—*	—*	—*
Realisasi KK berakses SPAL	KK	—*	—*	110.142	110.423	111.134	111.348	111.188	113.317
Capaian KK berakses SPAL	%	—*	—*	61,04	61,20	61,59	61,71	61,62	62,8

Ket : * = Perubahan indikator
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2023.

Penyelenggaraan air limbah domestik Kota Tasikmalaya masih difokuskan pada pemenuhan akses layak yang identik dengan tersedianya kloset leher angsa dilengkapi dengan Septik Tank. Tren ke depan, air limbah domestik (*blackwater*, *greywater*, dan lumpur tinja) dikelola secara aman sesuai dengan proxy SDGs 2030 yang identik dengan adanya kegiatan penyedotan tinja secara berkala pada septik tank atau IPAL Komunal (SPALDS) dan dibuang ke IPLT atau sanitasi yang dikelola dalam sarana prasarana SPALD-T berupa Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat.

Proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana air limbah domestik tersebut diperhitungkan berdasarkan proyeksi penduduk dan disesuaikan dengan kebutuhan pemenuhan akses akses aman sesuai dengan tahapan yang diarahkan pemerintah pusat. Adapun jumlah proyeksi kebutuhannya antara lain: pembangunan IPALD sebanyak 22.000 unit, Optimalisasi IPLT Singkup, pengadaaan sarana dan prasarana pengangkutan air limbah (8 truk tinja, 4 motor tinja).

Penyelenggaraan air limbah domestik/sanitasi merupakan suatu sistem terintegrasi untuk peningkatan kesehatan lingkungan. Penyediaan sarana dan prasarana air limbah domestik harus didukung dengan perubahan Perilaku Masyarakat Untuk Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui dukungan kegiatan pemicuan oleh tenaga kesehatan serta tata kelola serta dan penciptaan ekosistem yang mendorong penyelenggaraan SPALD yang berkelanjutan.

2.6.2.9. Proyeksi Kebutuhan Internet

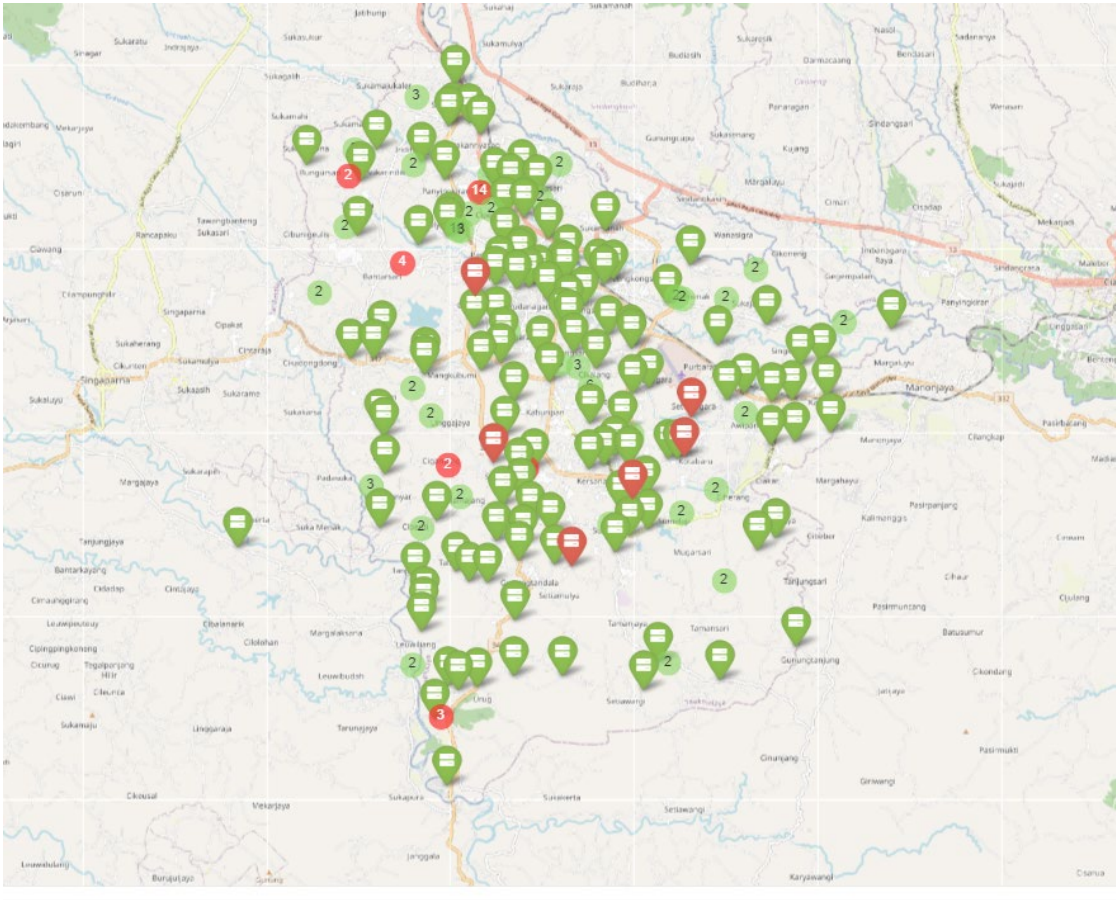
Kebutuhan pelayanan publik akan semakin meningkat pada tahun 2045 seiring bertambahnya penduduk Kota Tasikmalaya. Dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, Kota Tasikmalaya terus berinovasi melalui pelayanan publik berbasis digital sehingga seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik.

Pelayanan publik berbasis digital harus ditunjang dengan ketersediaan internet, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan publik berbasis digital dengan cepat. Digitalisasi pelayanan publik akan berdampak signifikan apabila cakupan internet (*internet covarage*) sebagai akses untuk mendapatkan pelayanan menjangkau seluruh masyarakat. Kota Tasikmalaya telah memiliki 300 (tiga ratus) titik site

jaringan internet Pemerintah Kota Tasikmalaya yang tersebar di kantor pemerintahan dan ruang publik.

Berikut cakupan internet di Kota Tasikmalaya sampai dengan tahun 2023.

Gambar 2. 48 Site Jaringan Internet Kota Tasikmalaya



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya, 2024.

2.6.2.10. Proyeksi Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Jasa

Proyeksi kebutuhan sarana perdagangan dan jasa untuk Kota Tasikmalaya, dimulai dengan jumlah penduduk tahun 2022 sebesar 733.467 orang dan 10 unit pasar rakyat. Proyeksi menunjukkan peningkatan kebutuhan pasar rakyat menjadi 12 unit pada tahun 2025 dan tetap konstan hingga tahun 2045, meskipun jumlah penduduk diperkirakan akan meningkat menjadi 891.049 orang.

Tabel 2. 81 Proyeksi Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Jasa

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Jasa (unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	733.467	759.370	800.172	836.533	866.628	891.049
Pasar Rakyat	10	12	12	12	12	12

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.6.2.11. Proyeksi Kebutuhan Sarana Pemerintahan

Proyeksi kebutuhan sarana pemerintahan di Kota Tasikmalaya sampai dengan tahun 2045 khususnya pada tingkat kecamatan dan kelurahan diantaranya kantor kecamatan, kantor kelurahan, kantor polisi tingkat kecamatan dan kelurahan dan kantor pemadam kebakaran tingkat kecamatan dan kelurahan. Dalam kajian pemekaran kelurahan tahun 2021 bahwa ada 4 (empat) kelurahan yang direncanakan akan dimekarkan diantaranya : Kelurahan Sukamanah, Kelurahan Linggajaya, Kelurahan Sukamenak dan Kelurahan Kotabaru.

Tabel 2. 82 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pemerintah dan Pelayanan Umum

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Sarana Pemerintah dan Pelayanan Umum (unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	733.467	759.370	800.172	836.533	866.628	891.049
Proyeksi Kebutuhan Kantor Kelurahan		69	69	69	69	69
Proyeksi Kebutuhan Kantor Kecamatan		10	10	10	10	10
Proyeksi Kebutuhan Kantor Polisi		10	10	10	10	10
Proyeksi Kebutuhan Pos Pemadam Kebakaran Kelurahan		69	69	69	69	69
Proyeksi Kebutuhan Pos Pemadam Kebakaran Kecamatan		10	10	10	10	10

Sumber: Hasil Analisis, 2023.

2.6.2.12. Proyeksi Kebutuhan Sarana Rekreasi

Proyeksi kebutuhan sarana rekreasi di Kota Tasikmalaya sampai dengan tahun 2045 khususnya pada tingkat kecamatan, kelurahan, rukun warga dan rukun tetangga diantaranya balai warga, balai serbaguna, gedung serbaguna, taman RT, taman RW, lapangan olahraga tingkat kelurahan dan lapangan olahraga tingkat kecamatan.

Tabel 2. 83 Proyeksi Kebutuhan Sarana Rekreasi

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Sarana Rekreasi (unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	733.467	759.370	800.172	836.533	866.628	891.049
Proyeksi Kebutuhan Balai Warga		304	320	335	347	356

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Sarana Rekreasi (unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Proyeksi Kebutuhan Balai Serbaguna		25	27	28	29	30
Proyeksi Kebutuhan Gedung Serbaguna		6	7	7	7	7
Proyeksi Kebutuhan Taman RT		3.037	3.201	3.346	3.467	3.564
Proyeksi Kebutuhan Taman RW		304	320	335	347	356
Proyeksi Kebutuhan Lapangan Olahraga Kelurahan		25	27	28	29	30
Proyeksi Kebutuhan Lapangan Olahraga Kecamatan		6	7	7	7	7

Sumber: Hasil Analisis, 2023.

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

2.7.1. Tinjauan RTRW Provinsi Jawa Barat

2.7.1.1. Kedudukan Kota Tasikmalaya dalam Konteks Regional

Kota Tasikmalaya merupakan salah satu dari enam kabupaten/kota yang menyusun Wilayah Pengembangan (WP) Priatim-Pangandaran. WP Priatim-Pangandaran merupakan wilayah pengembangan yang memiliki kesetaraan fungsi dan peran sebagai penjabaran dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Pangandaran-Kalipucang-Segara Anakan. Fokus pengembangan dari WP ini diantaranya adalah untuk mendorong perkembangan PKW Tasikmalaya dan PKW Pangandaran, pengembangan secara terbatas di kawasan bagian selatan WP, serta pengembangan kegiatan budidaya tanpa mengabaikan fungsi lingkungan yang merupakan karakteristik khusus WP Priatim-Pangandaran.

2.7.1.2. Kedudukan Kota Tasikmalaya dalam Rencana Struktur Ruang Jawa Barat

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Kota Tasikmalaya diarahkan sebagai bagian dari PKW Tasikmalaya dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, serta pusat pengembangan industri kerajinan, perdagangan dan jasa. Dalam hal tersebut, Kota Tasikmalaya sebagai penyusun PKW Tasikmalaya memiliki kaitan dengan pusat-pusat pelayanan lainnya, khususnya yang berada didalam satu lingkup WP Priatim-Pangandaran. Beberapa pusat-pusat pelayanan lainnya tersebut, yaitu:

PKW Pangandaran, dengan arahan mencakup kegiatan tanaman pangan dan hortikultura serta destinasi tujuan wisata nasional maupun internasional. Dalam konteks regional, PKW Tasikmalaya dan Pangandaran memiliki signifikansi sebagai dua pusat pelayanan utama yang memiliki peran sebagai pusat koleksi dan distribusi skala nasional.

PKL Kabupaten Garut, dengan arahan mencakup pengembangan kegiatan di sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura,

agroindustri dan lainnya), wisata alam, serta kegiatan di sektor pertambangan.

PKL Kabupaten Tasikmalaya, dengan arahan mencakup kegiatan di sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, agroindustri dan lainnya), pengembangan industri kerajinan, wisata alam, serta kegiatan di sektor pertambangan.

PKL Kota Banjar, dengan arahan mencakup kegiatan tanaman pangan, perdagangan, jasa dan peran sebagai pintu gerbang daerah.

2.7.1.3. Kedudukan Kota Tasikmalaya dalam Rencana Pola Ruang Jawa Barat

Sebagaimana wilayah lainnya, arahan rencana pola ruang Kota Tasikmalaya mencakup kawasan lindung dan budidaya. Muatan RTRW Provinsi Jawa Barat mengindikasikan beberapa jenis pola ruang pada Kota Tasikmalaya yang memiliki signifikansi di tingkat provinsi, yang seluruhnya tergolong kedalam kawasan budidaya. Diantara jenis pola ruang pada kelompok kawasan budidaya yang mencakup Kota Tasikmalaya yaitu:

- Kawasan hutan produksi.
- Kawasan pertanian.
- Kawasan pertambangan dan energi.
- Kawasan pariwisata, secara spesifik dikategorikan sebagai Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi dalam bentuk Kawasan Pariwisata Kriya dan Budaya Tasikmalaya.

2.7.2. Tinjauan RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2022-2042

2.7.2.1. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya

Tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- b. Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- c. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- d. Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
- f. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- g. Keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah;
- h. Keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; serta

- i. Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Selanjutnya, dengan merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka perumusan tujuan harus mempertimbangkan visi dan misi pembangunan kota bersangkutan. Dengan memperhatikan visi pembangunan Kota Tasikmalaya adalah “Kota Tasikmalaya yang Religius, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”, maka tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Ruang Kota Tasikmalaya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Priangan Timur-Pangandaran, yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan Guna Mendukung Terwujudnya Visi Kota Tasikmalaya.”

2.7.2.2. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

Kebijakan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya meliputi:

- a. pemantapan fungsi pusat pelayanan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa;
- b. peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan;
- c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- d. peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
- e. pelestarian kawasan cagar budaya;
- f. penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota;
- g. pengaturan pengembangan Kawasan Budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- h. pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
- i. pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup; dan
- j. pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.

2.7.2.3. Strategi Penataan Ruang Kota Tasikmalaya

Penataan ruang Kota Tasikmalaya dilakukan strategi sebagai berikut:

- (1) Strategi untuk kebijakan pemantapan fungsi pusat pelayanan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
 - a. memantapkan fungsi perdagangan dan jasa Kota sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan WP Priangan Timur-Pangandaran;
 - b. menetapkan hierarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang; dan
 - c. mengembangkan pusat perdagangan berskala regional;
- (2) Strategi untuk kebijakan peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar pusat-pusat pelayanan;
 - b. mengembangkan jalan lingkar dalam dan jalan lingkar luar;
 - c. meningkatkan pelayanan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat pelayanan;
 - d. mengembangkan sistem transportasi massal;
 - e. meningkatkan fungsi terminal angkutan umum; dan
 - f. meningkatkan integrasi sistem antar moda transportasi.
- (3) Strategi untuk kebijakan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
- a. mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat pelayanan sesuai fungsi Kawasan dan hierarki pelayanan;
 - b. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi pada Kawasan pertumbuhan ekonomi;
 - c. mengembangkan prasarana sumber daya air;
 - d. meningkatkan sistem pengelolaan persampahan dengan teknik-teknik yang berwawasan lingkungan;
 - e. meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah; dan
 - f. mengembangkan sistem prasarana drainase secara terpadu.
- (4) Strategi untuk kebijakan peningkatan pengelolaan Kawasan yang berfungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:
- a. menetapkan Kawasan yang berfungsi lindung;
 - b. mengembalikan fungsi Kawasan yang berfungsi lindung yang telah menurun; dan
 - c. meningkatkan konservasi Kawasan yang berfungsi lindung.
- (5) Strategi untuk kebijakan pelestarian Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:
- a. menetapkan Kawasan yang memiliki nilai sejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi sebagai Kawasan ba; dan
 - b. memelihara kelestarian Kawasan cagar budaya.
- (6) Strategi untuk kebijakan penyediaan Ruang Terbuka Hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Kota kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi:
- a. melakukan pembebasan lahan-lahan yang berfungsi sebagai resapan air dan menetapkan sebagai Ruang Terbuka Hijau;
 - b. mempertahankan fungsi dan menata Ruang Terbuka Hijau yang telah ada;
 - c. menetapkan objek ruang yang berfungsi Ruang Terbuka Hijau meliputi Ruang Terbuka Hijau pada bangunan dan Ruang Terbuka Hijau pada kavling;
 - d. mengembalikan Ruang Terbuka Hijau yang telah beralih fungsi;

- e. menyediakan jalur hijau (greenbelt) sepanjang jalur pejalan kaki, pulau jalan, dan median jalan;
 - f. menetapkan sempadan Sungai dan Situ; dan
 - g. mengembangkan pola-pola kemitraan dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, dan Masyarakat/swasta dalam penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
- (7) Strategi untuk kebijakan pengaturan pengembangan Kawasan Budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, meliputi:
- a. mengarahkan Kawasan terbangun kepadatan rendah di Kawasan-Kawasan yang memiliki satuan kemampuan lahan rendah; dan
 - b. mengoptimalkan pengembangan Kawasan pusat kota.
- (8) Strategi untuk kebijakan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, meliputi:
- a. menetapkan Kawasan pusat kota sebagai Kawasan bisnis dengan kegiatan utama perdagangan jasa skala regional;
 - b. pengembangan Kawasan peruntukan industri skala menengah dan besar;
 - c. pengembangan sentra bisnis baru; dan
 - d. pengembangan dan penataan sentra-sentra produksi pertanian dan industri kecil dan menengah.
- (9) Strategi untuk kebijakan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, meliputi:
- a. mengatur pemanfaatan Kawasan konservasi dengan memadukan perlindungan lingkungan hidup dan pengembangan Kawasan; dan
 - b. mengintegrasikan fungsi pelestarian lingkungan hidup dengan fungsi-fungsi lainnya tanpa mengganggu fungsi utama Kawasan.
- (10) Strategi untuk kebijakan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, meliputi:
- a. menetapkan Kawasan strategis pendidikan; dan
 - b. mengintegrasikan kegiatan sosial budaya dengan fungsi-fungsi penunjangnya dan/atau fungsi-fungsi lain yang terkait.

2.7.2.4. Rencana Struktur Ruang Kota Tasikmalaya

Rencana Sistem Pusat Pelayanan

a. Pusat Pelayanan Kota (PPK)

PPK merupakan pusat pelayanan umum, perdagangan dan jasa, Kawasan Peruntukan Industri, dan pendidikan yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional. Kota Tasikmalaya memiliki PPK dengan nama PPK Cihideung yang berpusat di kelurahan-kelurahan di Kecamatan Cihideung dan Kecamatan Tawang.

b. Sub-Pelayanan Kota (SPK)

- 1) SPK di Kota Tasikmalaya merupakan pusat pelayanan umum, perdagangan, dan jasa skala SPK, adapun di Kota Tasikmalaya terdapat 6 SPK diantaranya:
- 2) SPK Indihiang, terletak di Kelurahan Sirnagalih, melayani wilayah-wilayah di Kecamatan Indihiang dan Kecamatan Bungursari.
- 3) SPK Tamansari, terletak di Kelurahan Mulyasari, melayani wilayah di Kecamatan Tamansari;
- 4) SPK Cibeureum, terletak di Kelurahan Setiajaya, melayani wilayah-wilayah di Kecamatan Cibeureum dan Kecamatan Purbaratu;
- 5) SPK Kawalu, terletak di Kelurahan Karsamenak, melayani wilayah-wilayah di Kecamatan Kawalu;
- 6) SPK Mangkubumi, terletak di Kelurahan Linggajaya, melayani wilayah-wilayah di Kecamatan Mangkubumi;
- 7) SPK Cipedes, terletak di Kelurahan Cipedes, melayani wilayah-wilayah di Kecamatan Cipedes.

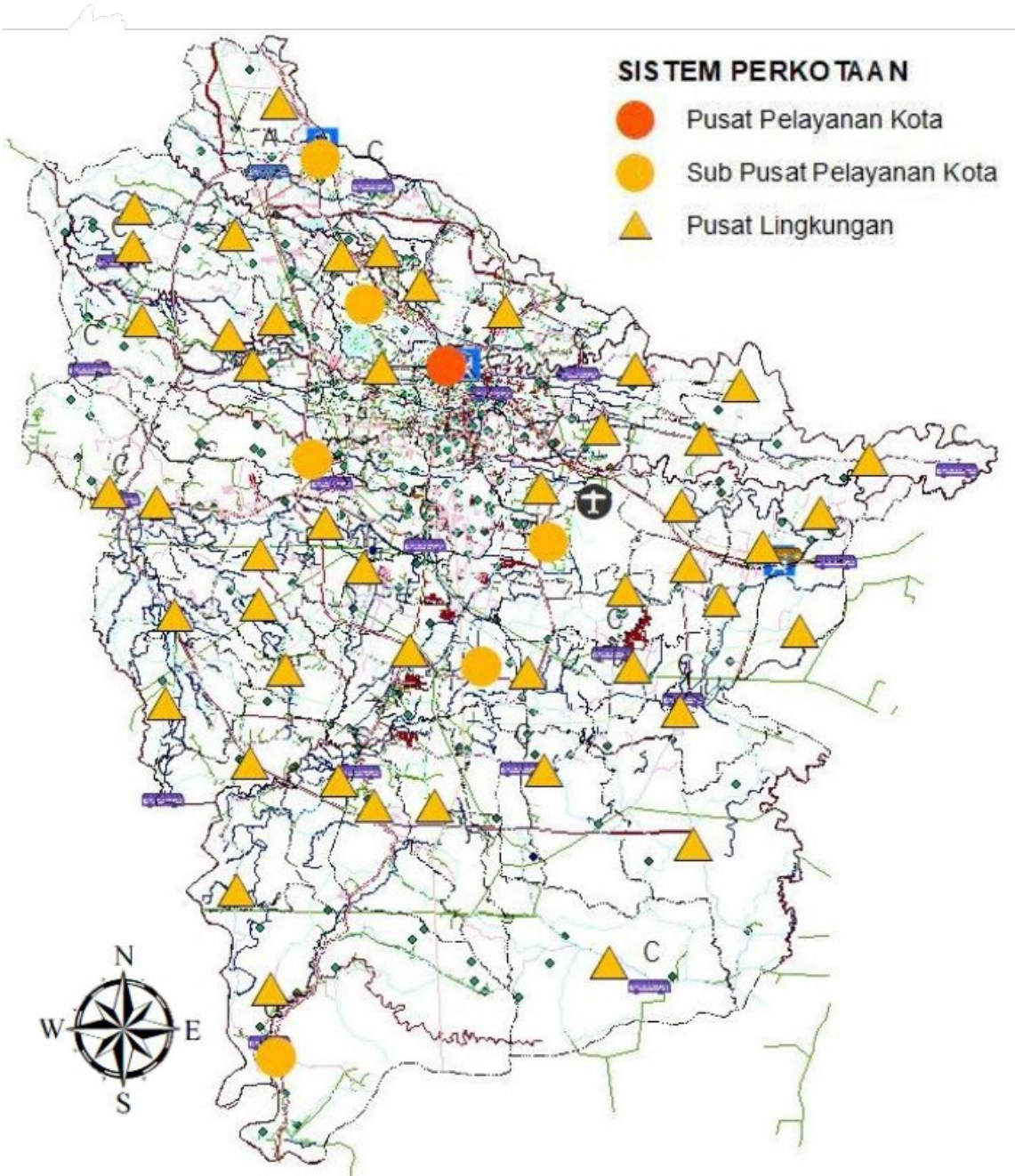
c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Merupakan pusat pelayanan umum perdagangan dan jasa skala Kecamatan, Kelurahan dan/atau lingkungan. Terdapat 48 PPL yang terletak di Kelurahan yang tersebar di seluruh Kota Tasikmalaya diantaranya:

- 1) PL Panyingkiran, terletak di Kelurahan Panyingkiran;
- 2) PL Parakannyasag, terletak di Kelurahan Parakannyasag;
- 3) PL Sukamajukaler, terletak di Kelurahan Sukamajukaler;
- 4) PL Sukamulya, terletak di Kelurahan Sukamulya;
- 5) PL Sukarindik, terletak di Kelurahan Sukarindik;
- 6) PL Bungursari, terletak di Kelurahan Bungursari;
- 7) PL Sukajaya, terletak di Kelurahan Sukajaya;
- 8) PL Cibunigeulis, terletak di Kelurahan Cibunigeulis;
- 9) PL Bantarsari, terletak di Kelurahan Bantarsari;
- 10) PL Sukalaksana, terletak di Kelurahan Sukalaksana;
- 11) PL Setiawargi, terletak di Kelurahan Setiawargi;
- 12) PL Tamansari terletak di Kelurahan Tamansari;
- 13) PL Tamanjaya, terletak di Kelurahan Tamanjaya;
- 14) PL Sukahurip, terletak di Kelurahan Sukahurip;
- 15) PL Mugarsari, terletak di Kelurahan Mugarsari;
- 16) PL Sumelap, terletak di Kelurahan Sumelap;
- 17) PL Ciherang, terletak di Kelurahan Ciherang;
- 18) PL Ciakar, terletak di Kelurahan Ciakar;
- 19) PL Margabakti, terletak di Kelurahan Margabakti;
- 20) PL Awipari, terletak di Kelurahan Awipari;
- 21) PL Kotabaru, terletak di Kelurahan Kotabaru;
- 22) PL Kersanagara, terletak di Kelurahan Kersanagara;
- 23) PL Setiaratu, terletak di Kelurahan Setiaratu;
- 24) PL Setianagara, terletak di Kelurahan Setianagara;
- 25) PL Sukanagara, terletak di Kelurahan Sukanagara;

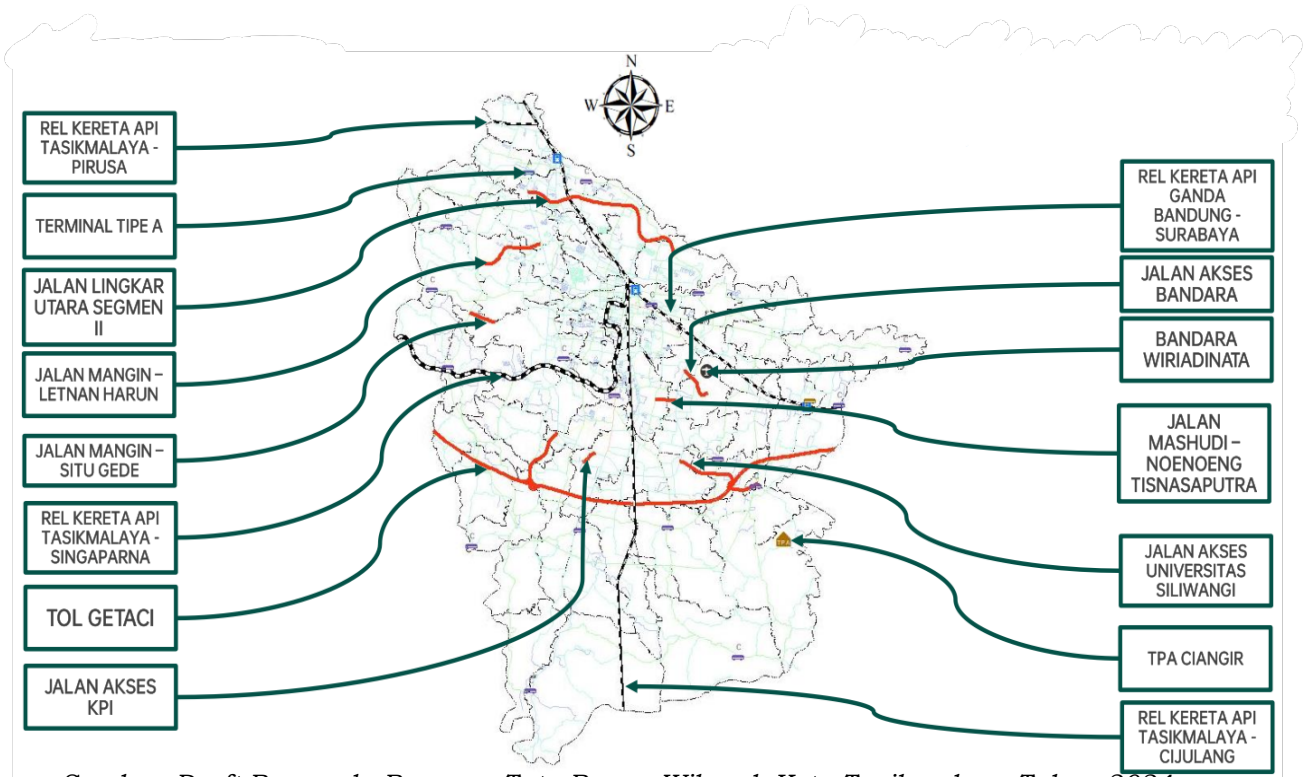
- 26) PL Purbaratu, terletak di Kelurahan Purbaratu;
- 27) PL Sukaasih, terletak di Kelurahan Sukaasih;
- 28) PL Sukajaya, terletak di Kelurahan Sukajaya;
- 29) PL Singkup, terletak di Kelurahan Singkup;
- 30) PL Leuwiliang, terletak di Kelurahan Leuwiliang;
- 31) PL Urug, terletak di Kelurahan Urug;
- 32) PL Gunung Tandala, terletak di Kelurahan Gunung Tandala;
- 33) PL Gunung Gede, terletak di Kelurahan Gunung Gede;
- 34) PL Talaga Sari, terletak di Kelurahan Talaga Sari;
- 35) PL Tanjung, terletak di Kelurahan Tanjung;
- 36) PL Cibeuti, terletak di Kelurahan Cibeuti;
- 37) PL Karanganyar, terletak di Kelurahan Karanganyar;
- 38) PL Cilamajang, terletak di Kelurahan Cilamajang;
- 39) PL Sambongjaya, terletak di Kelurahan Sambongjaya;
- 40) PL Sambongpari, terletak di Kelurahan Sambongpari;
- 41) PL Mangkubumi, terletak di Kelurahan Mangkubumi;
- 42) PL Cipari, terletak di Kelurahan Cipari;
- 43) PL Karikil, terletak di Kelurahan Karikil;
- 44) PL Cipawitra, terletak di Kelurahan Cipawitra;
- 45) PL Cigantang, terletak di Kelurahan Cigantang;
- 46) PL Panglayungan, terletak di Kelurahan Panglayungan;
- 47) PL Nagarasari, terletak di Kelurahan Nagarasari; dan
- 48) PL Sukamanah, terletak di Kelurahan Sukamanah.

Gambar 2. 49 Rencana Sistem Pusat Pelayanan



Sumber: Draft Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2024-2044.

Gambar 2. 50 Rencana Pengembangan



Sumber: Draft Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2024-2044.

Rencana Pola Ruang

Dalam paparan draft RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2022-2042, dapat dilihat bahwa terdapat 38 kawasan yang tertuang dalam Rencana Pola Ruang. 38 kawasan tersebut beserta dengan luasannya dapat dilihat pada tabel berikut.

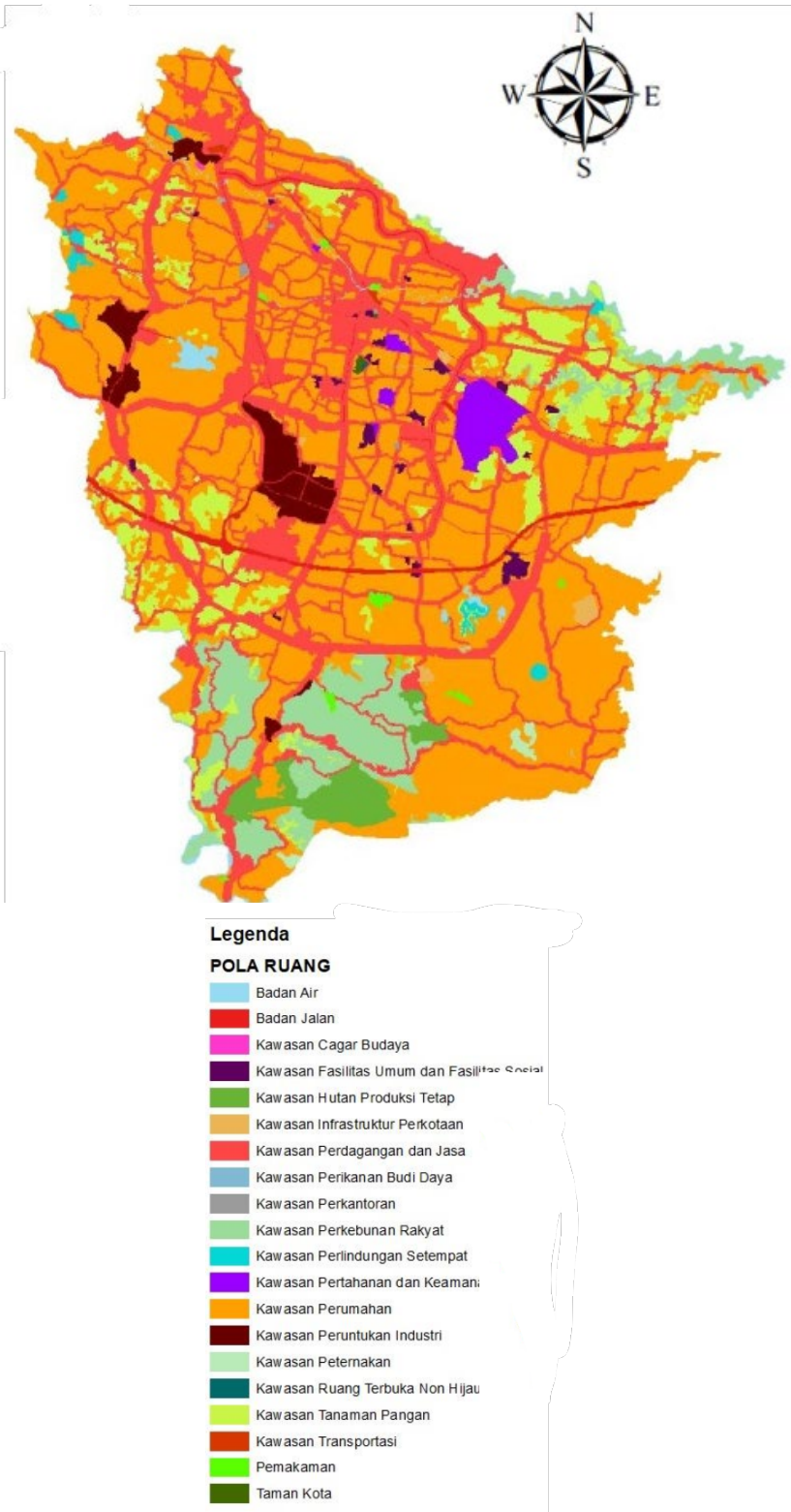
Tabel 2. 84 Neraca Pola Ruang

No	Peruntukan Pola Ruang	Perda RTRW		Revisi Pola 2023 (Batas Baru)	
		Luas (ha)	%	Luas (Ha)	%
1	Resapan air	35,82	0,20		
2	Sempadan Sungai	153,74	0,84		
3	Sempadan Situ	87,97	0,48		
4	Kawasan Perlindungan Setempat			125,912	0,69
5	Aliran Lahar	697,82	3,81		
6	Rawan Gerakan Tanah	1.581,87	8,63		
7	Cagar budaya			3,097	0,02
8	TPU	18,37	0,10	45,036	0,25
9	Sempadan Rel	47,59	0,26		
10	Sempadan SUTET	55,36	0,30		
11	Badan Air			192,948	1,06
12	Taman Kota			7,964	0,04
	Total Kawasan Lindung	2.678,55	14,71	374,956	2,06
13	Hutan Produksi	372,61	2,03	371,955	2,04
14	Hutan Rakyat	819,88	4,47		
15	Kawasan Pertanian	491,48	2,68		
16	Pertanian Lainnya	2.246,09	12,25		
17	Kawasan Perkebunan Rakyat			1.427,955	7,83
18	Kawasan Tanaman Pangan			1.407,486	7,72
19	Kawasan Peternakan			43,554	0,24
20	Kawasan Perikanan Budidaya	336,13	1,83	3,374	0,02
21	Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	213,55	1,16	57,331	0,31
22	Kawasan Perumahan	9.092,37	49,59	8.968,513	49,17
23	Kawasan Peruntukan Industri	258,09	1,41	443,578	2,43
24	Kawasan Perdagangan dan Jasa	1.322,65	7,21	4.510,572	24,73
25	Kawasan Perkantoran	12,12	0,07	11,222	0,06
26	Kawasan Terpadu	292,89	1,60		
27	Pertahanan dan Keamanan	9,54	0,05	264,825	1,45
28	Kawasan Transportasi			11,765	0,06
29	Kawasan Pariwisata	20,12	0,11		
30	Kawasan Evakuasi	124,38	0,68		
31	Gardu induk	8,67	0,05		
32	TPPAS	8,43	0,05		
33	PT. PERTAMINA	6,89	0,04		
34	Danau/Situ	21,44	0,12		
35	Badan Jalan			228,930	1,26
36	Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial			114,645	0,63
37	Kawasan Infrastruktur Perkotaan			53,609	0,29
38	Kawasan Ruang Terbuka Non-Hijau			2,110	0,01
	Total Luasan Kawasan Budidaya	15.675,73	85,49	17.864,083	97,94
	Kota Tasikmalaya	18.335,91	100,00	18.239,039	100,00

Sumber: Draft Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2024-2044.

Sedangkan, untuk alokasi ruang pada setiap kawasannya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2. 51 Rencana Pola Ruang



Sumber: Draft Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2024-2044.

Rencana Kawasan Strategis

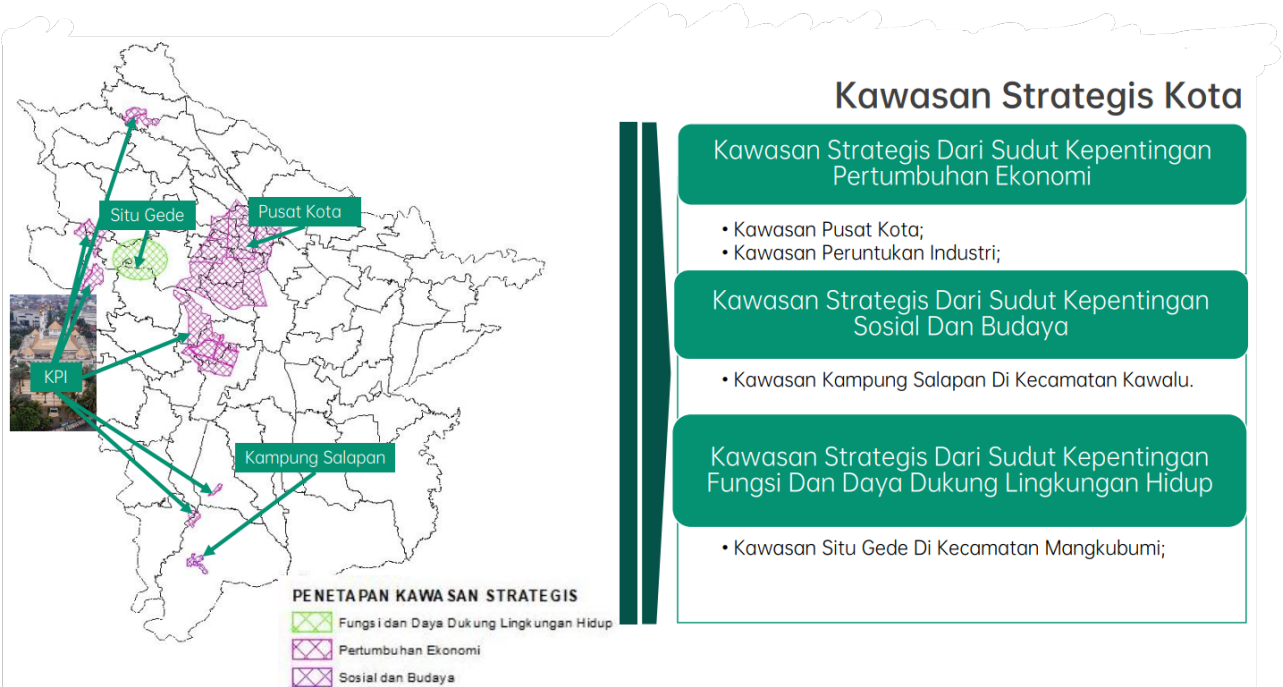
Berdasarkan Draft Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2022-2042, terdapat 4 Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Kota dengan 3 sudut kepentingan, yaitu:

Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri dari:

- Kawasan pusat kota sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya yaitu Kawasan Kampung Salapan; dan
- Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu Kawasan Situ Gede.

Area dari setiap kawasan tersebut dapat dilihat selengkapnya pada gambar berikut ini.

Gambar 2. 52 Rencana Kawasan Strategis Kota



Sumber: Draft Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2024-2044.

No.		Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							
				PJM I					PJM II (2029- 2034)	PJM III (2034- 2039)	PJM IV (2039- 2044)
				Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5			
	a	Pengembangan Pusat Pelayanan Pemerintahan Kota Tasikmalaya	Kec. Cipedes	√					√	√	√
	b	Pengembangan Pusat Pelayanan Kegiatan Perdagangan dan Jasa	Kec. Cihideung dan Kec. Tawang	√					√	√	√
2		Sistem Jaringan Transportasi									
2.1		Sistem Jaringan Transportasi									
	a	Pembangunan Jalan	Ruas Rencana Jalan bebas hambatan Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap Ruas Rencana Jalan KPI Ruas Rencana Jalan Universitas Siliwangi Ruas Rencana Jalan Noenoeng - Jalan Mashudi Ruas Rencana Jalan Akses Bandara Ruas Rencana Jalan Lingkar Utara yang menghubungkan Jalan Letjen Mashudi - Jalan DR. Moch Hatta - Jalan Letjen Ibrahim Adjie - Jalan Brigjen Wasita Kusumah	√	√	√	√	√	√	√	√

No.		Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							
				PJM I					PJM II (2029-2034)	PJM III (2034-2039)	PJM IV (2039-2044)
				Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5			
			Ruas Rencana Jalan Mangin - Jalan Letnan Harun Ruas Rencana Jalan Mangin - Situ Gede								
	b	Optimalisasi Sistem Terminal Tipe C									
		Rencana Pembangunan Terminal Tipe C									
	1	Terminal Asta	Kelurahan Cibauti, Kecamatan Kawalu	√	√	√	√	√	√	√	√
	2	Terminal Bungursari	Kelurahan Bungursari, Kecamatan Bungursari	√					√	√	√
	3	Terminal Cibunigeulis	Kelurahan Cibunigeulis, Kecamatan Bungursari	√					√	√	√
	4	Terminal Kotabaru	Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Cibeureum.	√					√	√	√
	5	Terminal Mugarsari	Kelurahan Sumelap, Kecamatan Tamansari;	√					√	√	√
	6	Terminal Setiawargi	Kelurahan Setiawargi, Kecamatan Tamansari	√					√	√	√
	7	Terminal Singkup/Gobang	Kelurahan Singkup, Kecamatan Purbaratu	√					√	√	√
	8	Terminal Sirnagalih	Kelurahan Sirnagalih, Kecamatan Indihiang	√					√	√	√

No.		Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							
				PJM I					PJM II (2029-2034)	PJM III (2034-2039)	PJM IV (2039-2044)
				Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5			
	9	Terminal Sukaasih	Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Purbaratu	√					√	√	√
	10	Terminal Urug	Kelurahan Urug, Kecamatan Kawalu.	√					√	√	√
	c	Pengembangan Angkutan Umum									
		Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal	Kota Tasikmalaya, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis	√					√	√	√
	d	Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Kereta Api									
		Pembangunan Jalur Ganda dan Elektrifikasi Lintas Selatan Bandung – Surabaya	Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Purbaratu, Kecamatan Tawang, Kecamatan Cipedes, Kecamatan Indihiang	√					√	√	√
		Pembangunan dan Peningkatan Sistem Jaringan Kereta Api Lintas Utara – Selatan antara Galunggung – Tasikmalaya	Kecamatan Indihiang	√					√	√	√
		Pembangunan rel jalan	a. Rel Kereta Api Lintas Selatan Bandung–Surabaya; b. Rel kereta api lintas Tasikmalaya–Singaparna; c. Rel kereta api lintas Tasikmalaya–Pirusa; dan		√	√	√	√	√	√	√

No.		Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							
				PJM I					PJM II (2029-2034)	PJM III (2034-2039)	PJM IV (2039-2044)
				Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5			
			d. Rel kereta api lintas Tasikmalaya- Cijulang.								
	e	Rencana Sistem Transportasi Udara									
		Pengembangan Bandar Udara Wiriadinata	Bandar Udara Wiriadinata	√					√	√	√
2.2		Sistem Jaringan Energi									
	a	Pengembangan Sistem Jaringan listrik	Seluruh Kecamatan	√					√	√	√
	b	Penyediaan Penerangan Jalan Umum	Kota Tasikmalaya	√					√	√	√
2.3		Sistem Jaringan Telekomunikasi									
		Penyediaan Akses Internet di Ruang Publik	Wilayah Kota Tasikmalaya	√					√	√	√
2.4		Sistem Jaringan Sumber Daya Air									
	a	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Wilayah Kota Tasikmalaya	√	√	√	√	√	√	√	√
	b	Pengembangan Rawa-Situ sebagai Sumber Air Baku	Situ Gede, Situ Cibeureum, Situ Cipajaran, Situ Malingping, Situ Rusdi, Situ Bojong, Situ Ciangir. (Kecamatan Mangkubumi	√	√	√	√	√	√	√	√

No.		Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							
				PJM I					PJM II (2029- 2034)	PJM III (2034- 2039)	PJM IV (2039- 2044)
				Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5			
			& Kecamatan Tamansari)								
2.5		Sistem Jaringan Infrastruktur Perkotaan									
	a	Program Sistem Penyediaan Air Minum									
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kecamatan Tamansari	√	√	√	√	√			
			Kecamatan Purbaratu	√	√	√	√	√			
			Kecamatan Kawalu	√	√	√	√	√			
			Kecamatan Indihiang	√	√	√	√	√			
			Kecamatan Cibeureum	√	√	√	√	√			
		Perlindungan dan pemanfaatan mata air (Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	tersebar	√	√	√	√	√			
	b	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah									
		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Kota Tasikmalaya	√	√	√	√	√			
		Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Kota Tasikmalaya	√	√	√	√	√			

No.		Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							
				PJM I					PJM II (2029-2034)	PJM III (2034-2039)	PJM IV (2039-2044)
				Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5			
		Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kel. Singkup, Kec. Purbaratu	√	√	√	√	√			
		Pembuatan IPAL	Kota Tasikmalaya	√					√	√	√
		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Kota Tasikmalaya	√					√	√	√
		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kec. Kawalu, Kec. Bungursari	√					√	√	√
	c	Pengelolaan Persampahan									
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kota Tasikmalaya	√	√	√	√	√			
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Tasikmalaya	√	√	√	√	√			
		Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS									
		Penyediaan Sarana Persampahan									
		Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Kelurahan Tawangsari Kecamatan Tawang								
		Pengadaan Pewadahan Sampah									
		Pengadaan Alat Transportasi dan Kendaraan Operasional									
2.6		Sistem Jaringan Evakuasi Bencana									
	a	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Wilayah Kota Tasikmalaya		√	√	√	√			

No.	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							
			PJM I					PJM II (2029-2034)	PJM III (2034-2039)	PJM IV (2039-2044)
			Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5			
	b	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Wilayah Kota Tasikmalaya		√	√	√	√		
	c	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Wilayah Kota Tasikmalaya		√	√	√	√		
	d	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Wilayah Kota Tasikmalaya		√	√	√	√		
	e	Pengadaan Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran								
	l	Pengadaan Alat-alat Pemadam Kebakaran								
2.7		Sistem Jaringan Drainase								
	a	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Kota Tasikmalaya	√	√	√	√	√		
	b	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								
B		Perwujudan Pola Ruang								
1		Perwujudan Kawasan Lindung								
1.1		Program Kawasan Perlindungan Setempat								
	a	Pengembangan Sempadan Sungai		√	√	√	√	√	√	√

No.		Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							
				PJM I					PJM II (2029-2034)	PJM III (2034-2039)	PJM IV (2039-2044)
				Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5			
	b	Pengembangan Sempadan Danau	- Situ Gede di Kecamatan Mangkubumi - Situ Cibeureum di Kecamatan Tamansari - Situ Malingping di Kecamatan Tamansari - Situ Bojong di Kecamatan Tamansari - Situ Cipajaran di Kecamatan Tamansari - Situ Cicangri di Kecamatan Tamansari	√					√	√	√
	c	Pengembangan Sempadan Mata Air	Rancabungur Gn. Kokosan Gn. Putri Jambore Ciwetan Rancabuluh Jubung Lestari Cipari Sumur Kaler Gn. Mara Cibugeulan Ciawi Cibinong Sumur Jami Cilulumpang	√					√	√	√

No.	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							
			PJM I					PJM II (2029- 2034)	PJM III (2034- 2039)	PJM IV (2039- 2044)
			Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5			
1.2		Pengembangan Ruang Terbuka Hijau								
	a	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		√	√	√	√			
	b	Pengembangan RTH Pekarangan								
	c	Pengembangan RTH Taman								
	d	Pengembangan RTH Jalur Hijau Jalan								
	e	Pengembangan RTH Fungsi Tertentu								
1.3		Kawasan Cagar Budaya	√					√	√	√
	a	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		√	√	√	√			
	b	Pelindungan Cagar Budaya		√	√	√	√			
	c	Revitalisasi Kawasan Situs Bangunan Ziarah	√					√	√	√
	d	Revitalisasi Kawasan Situs Bangunan Bersejarah	√					√	√	√
1.4	a	Pengembangan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	√					√	√	√
2		Perwujudan Kawasan Budidaya								
2.1		Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi								
	a	Pengembangan Hutan Produksi	√					√	√	√
2.2		Kawasan Permukiman								

No.		Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							
				PJM I					PJM II (2029-2034)	PJM III (2034-2039)	PJM IV (2039-2044)
				Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5			
	a	Pengembangan Kawasan Permukiman	Kota Tasikmalaya yang terbagi menjadi perumahan kepadatan tinggi, kepadatan sedang dan kepadatan rendah	√					√	√	√
	b	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Tasikmalaya						√	√	√
	c	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Tasikmalaya						√	√	√
2.3		Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa									
	a	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Wilayah Kota Tasikmalaya		√	√	√	√			
	b	Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala Perumahan	Perumahan	√					√	√	√
	c	Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala Lingkungan/Kelurahan	Koridor di Pusat Kota Tasikmalaya	√					√	√	√
	d	Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala Kecamatan	Koridor di pusat kecamatan	√					√	√	√

[illegible]

No.		Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							
				PJM I					PJM II (2029-2034)	PJM III (2034-2039)	PJM IV (2039-2044)
				Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5			
	a	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kota	Kota Tasikmalaya		√	√	√				
	b	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Kota Tasikmalaya				√				
	c	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kota Tasikmalaya			√	√	√			
	d	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kota Tasikmalaya			√	√	√			
	e	Penetapan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan	Kota Tasikmalaya						√	√	√
	f	Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan	Kota Tasikmalaya						√	√	√
	g	Pengembangan Kawasan Perikanan	Kota Tasikmalaya						√	√	√
	h	Pengembangan Kawasan Peternakan	Kota Tasikmalaya						√	√	√
2.8		Pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi									
	a	Penetapan Kawasan Pertambangan	Kecamatan Bungursari Kecamatan Mangkubumi								
	b	Pengelolaan Kawasan Pertambangan	Kecamatan Bungursari Kecamatan Mangkubumi	√	√	√	√	√	√	√	√
	c	Pengawasan dan Penertiban Usaha Pertambangan	Kota Tasikmalaya	√	√	√	√	√	√	√	√
2.9		Pengembangan Pelayanan Umum									
	a	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Kota Tasikmalaya	√	√	√	√	√			

No.		Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							
				PJM I					PJM II (2029-2034)	PJM III (2034-2039)	PJM IV (2039-2044)
				Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5			
	b	Pengembangan Kawasan Pendidikan	- Kelurahan Sukamanah, - Kelurahan Lengkongsari, - Kelurahan Cikalang, - Kelurahan Tamansari, - Kelurahan Sambong, - Kelurahan Nagarasari, - Kelurahan Panglayungan	√					√	√	√
	c	Penyediaan Sarana Pendidikan Perguruan Tinggi	Kecamatan Tamansari								
	d	Pengembangan Kawasan Kesehatan	- Kelurahan Empangsari - Kelurahan Ciherang - Kelurahan Mugarsari - Kelurahan Kersamenak - Kelurahan Mangkubumi - Kelurahan Sukamaju Kidul	√					√	√	√
	e	Pengembangan Sarana Peribadatan	- Kelurahan Ciherang - Kelurahan Mugarsari - Kelurahan Kersamenak - Kelurahan Mangkubumi - Kelurahan Sukamaju Kidul	√					√	√	√

No.		Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							
				PJM I					PJM II (2029- 2034)	PJM III (2034- 2039)	PJM IV (2039- 2044)
				Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5			
	f	Pengembangan Fasilitas Umum Lainnya		√					√	√	√
2.10		Pengembangan Infrastruktur									
	a	Pengembangan TPPAS	Kelurahan Tamansari	√					√	√	√
	b	Pengembangan Terminal Pengisian Bahan Bakar	Kelurahan Indihiang	√					√	√	√
	c	Pengembangan Rumah Sakit	Kota Tasikmalaya	√	√	√	√	√			
C		Kawasan Strategis									
	a	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kota Tasikmalaya		√	√	√	√			
	b	Penataan Kawasan Peruntukan Industri	Kecamatan Kawalu	√					√	√	√

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2022.

BAB III

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Selain itu, identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan melalui pendekatan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum yang menggambarkan permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya serta aspek daya saing. Hal ini dimaksudkan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab pemerintah daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

3.1.1.Aspek Geografi dan Demografi

3.1.1.1.Aspek Geografi

Permasalahan pembangunan pada aspek geografi dan demografi yaitu:

1. Perubahan tata guna lahan di kawasan daerah aliran sungai (DAS) mengakibatkan berkurangnya fungsi resapan air, meningkatnya perbedaan debit maksimum-minimum, erosi, dan juga sedimentasi.
2. Daya tampung dan debit air situ kurang optimal, terutama pada musim kemarau beberapa situ berkurang debit airnya. Sedangkan pada musim hujan menimbulkan banjir.
3. Risiko bencana terutama bencana hidrometeorologi yaitu (banjir (1.642 Ha), cuaca ekstrim (12.537 Ha), kekeringan (17.161 Ha), dan longsor (2.887 Ha) serta bahaya gempa bumi (15.131 Ha).
4. Proporsi Ruang Terbuka Hijau yang belum terpenuhi.
5. Kualitas lingkungan hidup belum optimal.
6. Penurunan emisi GRK yang belum optimal.
7. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang belum optimal.

3.1.1.2.Aspek Demografi

Permasalahan pembangunan pada aspek demografi yaitu:

1. Antisipasi pertumbuhan jumlah penduduk.
2. Arus urbanisasi yang terus meningkat.

3.1.2.Aspek Kesejahteraan Ekonomi dan Sosial Budaya

3.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Permasalahan pada kesejahteraan ekonomi antara lain:

1. Angka kemiskinan masih tinggi.
2. Pendapatan masyarakat masih rendah.
3. Kesenjangan pendapatan masih tinggi.
4. Ketahanan pangan daerah masih rendah.

3.1.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

Permasalahan pada kesejahteraan sosial antara lain:

1. Belum optimalnya capaian rata-rata lama sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), APK dan APM.
2. Terjadinya degradasi moral dan pemahaman nilai-nilai keagamaan.
3. Pembangunan kepemudaan dan olahraga masih belum optimal.
4. Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat, antara lain masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi, prevalensi stunting, dan jumlah kasus tuberkulosis paru.
5. Layanan sosial yang belum optimal.
6. Ketimpangan gender masih tinggi.
7. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak belum optimal.
8. Ketahanan keluarga masih belum optimal.
9. Upaya pemajuan kesenian dan kebudayaan masih belum optimal.
10. Sarana dan prasarana kesenian dan olahraga masih kurang.

3.1.3.Aspek Daya Saing Daerah

3.1.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

Permasalahan pada kemampuan ekonomi daerah antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi yang belum berkualitas dan rentan terhadap guncangan eksternal.
2. Kontribusi sektor-sektor unggulan belum optimal.
3. Daya saing UMKM/IKM masih rendah.
4. Sarana dan prasarana perdagangan belum optimal.
5. Sektor pariwisata belum optimal.
6. Digitalisasi aktivitas ekonomi belum optimal.
7. Tingkat kewirausahaan (*entrepreneurship*) masih rendah.

3.1.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Permasalahan pada daya saing sumber daya manusia antara lain:

1. Kualitas tenaga kerja baik dari segi pendidikan maupun keahlian

masih rendah.

2. Angka partisipasi angkatan kerja masih rendah.
3. *Link and match* antara dunia pendidikan dengan dunia kerja belum optimal.
4. Angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) masih tinggi.
5. Literasi digital dan pemanfaatan TIK masih rendah.
6. Terjadinya degradasi moral dan pemahaman nilai-nilai keagamaan.

3.1.3.3. Daya Saing Infrastruktur Wilayah

Permasalahan pada Daya saing infrastruktur antara lain:

1. Pembangunan dan kualitas infrastruktur belum merata.
2. Konektivitas dan kemantapan jalan belum merata.
3. Infrastruktur jaringan irigasi belum optimal.
4. Pelayanan transportasi umum belum optimal.
5. Infrastruktur teknologi digital belum merata.
6. Akses masyarakat terhadap layanan air minum dan sanitasi belum merata.
7. Pengelolaan persampahan belum efektif dan efisien.
8. Pembangunan perumahan dan permukiman yang terjangkau masyarakat belum merata.
9. Rehabilitasi rumah tidak layak huni belum optimal.
10. Masih adanya rumah tangga yang belum terlayani aliran listrik.

3.1.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

Permasalahan pada daya saing iklim investasi antara lain:

1. Iklim dan promosi investasi belum optimal.
2. Implementasi regulasi yang mendukung iklim usaha belum optimal.
3. Pemanfaatan ruang untuk investasi belum optimal.
4. Pelayanan dan pengendalian penanaman modal belum optimal.
5. Masih adanya gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum.
6. Penegakan peraturan daerah belum optimal.
7. Kehidupan demokrasi daerah belum optimal.
8. Masih terjadinya fluktuasi harga kebutuhan pokok.
9. Kapasitas fiskal daerah masih rendah.

3.1.4. Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan pada pelayanan umum antara lain:

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan

berintegritas masih belum optimal.

2. Pelayanan publik yang adaptif dan responsif masih belum optimal.
3. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) masih belum optimal.
4. Inovasi daerah belum optimal.

3.2. Isu dalam konteks

3.2.1. Isu Global

Perubahan iklim. Tantangan pemanasan global akibat perubahan iklim berdampak pada peningkatan suhu global yang terus meningkat hingga 3,5°C pada skenario *intermediate*, jika tidak ada penurunan emisi GRK yang tinggi pada durasi tahun 2020-2050. Dampak perubahan iklim ini yang kemudian melahirkan kesepakatan kebijakan global dalam pembangunan rendah karbon untuk menurunkan intensitas emisi pada sektor-sektor tertentu. Keikutsertaan Indonesia dalam penandatanganan Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim dinyatakan melalui *Nationally Determined Contribution* (NDC). Komitmen ini menjadi dasar bagi Indonesia dalam merancang berbagai kebijakan nasional dalam menurunkan intensitas emisi karbon dalam pembangunan nasional. Terlebih lagi laporan dari *World Meteorological Organization* (WMO) dalam *State of The Climate 2022* menyebutkan bahwa tahun 2022 menempati peringkat ke-6 tahun terpanas (peringkat ke-1). Tahun 2015-2022 menjadi 8 (delapan) tahun terpanas dalam catatan WMO, sehingga perubahan iklim ini menjadi 1 (satu) isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan kedepan.

Geopolitik dan geoekonomi. Rivalitas dan dominasi negara-negara besar dalam perekonomian dan politik global memberikan dampak terhadap stabilitas perekonomian negara-negara lain dunia. Konflik yang saat ini berlangsung di kawasan Timur Tengah, Eropa Timur, dan Laut Cina Selatan – Indo Pasifik, efeknya dapat merambat secara langsung dan tidak langsung dalam skala global. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong deglobalisasi dimana setiap negara membangun kemandirian dan ketahanan dalam memitigasi risiko keterpaparan dampak potensi krisis yang merambat melalui jalur perdagangan dan keuangan internasional, serta komoditas dalam rantai pasok global. Di tengah tensi geopolitik yang ada, kawasan Indo – Pasifik yang diprediksi akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berpotensi membuka berbagai peluang yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan luar negeri, menjadi *windows of opportunity* sebagai bagian dari rantai pasok produksi dan perdagangan global.

Demografi global. Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2030 dan 2045 masing-masing tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua (*aging population*) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan. Menurut UNDP, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di

negara *emerging economies*. Di Asia dalam 4 (empat) dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Sebanyak 25–30 persen penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai.

Disrupsi teknologi. Saat ini, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) bahkan bisa melakukan tugas-tugas berpikir yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia, seperti menulis artikel dan membuat karya seni grafis. Ke depan, akan banyak pekerjaan yang dapat tergantikan oleh adanya interkoneksi di setiap tahapan/proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mendorong penataan regulasi, memetakan berbagai regulasi yang berpotensi tumpang tindih secara vertikal maupun horizontal, mengkaji regulasi yang inkonsisten, meningkatkan partisipasi publik dalam semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta membantu menganalisis dan evaluasi pelaksanaan regulasi.

Perdagangan internasional. Meningkatnya jumlah kelas menengah masyarakat global akan mendorong sisi permintaan produk dan peningkatan perdagangan internasional. Kondisi tersebut menjadi tantangan peluang pasar ekspor produk dari Provinsi Jawa Barat ke negara-negara potensial. Produk yang berdaya saing serta penguatan sistem logistik yang efisien diperlukan dalam meningkatkan kinerja ekspor Jawa Barat.

Urbanisasi dunia. Menurut data *World Population Prospects* (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Porsi lansia di Asia juga meningkat yaitu sebesar 55 persen. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Kebutuhan pangan, energi, dan air akan semakin meningkat pula seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Selain itu, urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyebar ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa.

3.2.2. Isu Nasional

Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan diperkirakan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta baik dari sisi konsumsi, impor ekspor perdagangan antar daerah, serta belanja pemerintah pusat di wilayah tersebut. Potensi kehilangan belanja pemerintah pusat ke wilayah DKI diperkirakan mencapai 90 persen dari total keseluruhan belanja. Keterkaitan aktivitas perekonomian yang erat menjadikan perpindahan IKN akan berdampak langsung terhadap kinerja perekonomian Provinsi Jawa Barat. Dampak yang diakibatkan berupa penurunan PDRB sebesar 0,06 persen, serta upah nyata di sektor pertanian turun sebesar 0,49 persen, sehingga dampaknya perlu diantisipasi karena dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan yang telah menjadi permasalahan di Provinsi Jawa Barat saat ini dan khususnya pada Kota Tasikmalaya.

Bonus demografi Indonesia. Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah penduduk ke 4 (empat) terbesar di dunia yaitu sebesar 277 juta jiwa dan diproyeksikan pada tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai sekitar 324,05 juta jiwa. Dengan besarnya jumlah penduduk dapat menjadikan potensi sumber daya pembangunan yang besar jika memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. Selain itu, besarnya jumlah penduduk dapat memberikan potensi tenaga kerja yang besar untuk menunjang sektor-sektor ekonomi potensial menghasilkan lapangan kerja yang besar seperti sektor industri, pertanian dan pariwisata. Namun dengan besarnya penduduk Indonesia saat ini masih terdapat tantangan yaitu kualitas pendidikan yang masih rendah yang dilihat dari capaian rata-rata nilai PISA siswa Indonesia tahun 2018 untuk semua aspek (membaca, matematika dan sains) yaitu sebesar 382,00 dimana capaian tersebut masih di bawah siswa dari negara-negara OECD yaitu sebesar 488,33. Selain itu produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010 – 2022 masih relatif tertinggal yaitu sebesar 7.274,9 USD dimana angka tersebut berada di bawah rata-rata kawasan ASEAN. Komposisi struktur penduduk Indonesia masih dapat dioptimalkan, dimana rasio ketergantungan di bawah 50 persen yang diproyeksikan akan berlangsung sekitar 15 (lima belas) tahun ke depan. Dengan penduduk usia produktif yang dominan akan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi apabila adanya peningkatan kualitas penduduk usia produktif melalui peningkatan produktivitasnya.

Ekonomi hijau dan ekonomi biru. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka transformasi ekonomi dengan ekonomi hijau sebagai salah satu strategi yang dipersiapkan tidak hanya dalam rangka pemulihan dari pandemi COVID-19 namun juga untuk membawa Indonesia mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Visi Indonesia Emas 2045. Ekonomi hijau merupakan model pembangunan yang mensinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan dengan pembangunan rendah karbon sebagai “tulang punggung”nya.

Penerapan ekonomi hijau dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau.

Sementara itu, paradigma ekonomi biru merupakan kerangka pembangunan berkelanjutan untuk membantu menangani isu-isu seperti kesenjangan pembangunan, pengembangan, dan pemerataan kesejahteraan dari sumber daya laut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang kelautan, serta pertumbuhan ekonomi.

Konektivitas dan infrastruktur dasar. Terbatasnya sistem angkutan umum massal perkotaan terutama di wilayah metropolitan dan kota-kota, konektivitas hinterland (intra pulau) yang terdiri dari jaringan jalan, kereta api, serta angkutan perairan danau dan sungai masih perlu ditingkatkan. Rendahnya jangkauan jaringan serat optic sebagai layanan digital yang berkualitas, dan masih belum meratanya jangkauan jaringan internet seluler di daerah terpencil menjadi tantangan nasional.

Ke depannya, selain permasalahan tersebut, terdapat beberapa masalah lain yang perlu diatasi seperti lemahnya tata kelola dan koordinasi antar lembaga, kurangnya pendanaan untuk pembangunan

infrastruktur termasuk untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun.

Dalam pemenuhan infrastruktur dasar, tantangan utama yang dihadapi adalah belum terpenuhinya kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau, terbatasnya rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan, dan masih tingginya rumah tangga yang mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS), serta sarana dan prasarana dasar belum berketahanan bencana. Selain itu, pelayanan tenaga listrik belum optimal dan belum berkelanjutan.

Perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta ketahanan bencana. Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan dan mengakibatkan 319 kabupaten/kota memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan. Kerugian ekonomi akibat bencana perubahan iklim diperkirakan mencapai rata-rata Rp22,8 triliun per tahunnya. Di Indonesia terdapat 18.000 km garis pantai berkategori rentan dan sangat rentan, sehingga mengancam hilangnya ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, peningkatan musim kemarau yang menyebabkan beberapa wilayah mengalami penurunan intensitas cuaca curah hujan juga berdampak pada meningkatnya potensi kekeringan, ketersediaan air, dan penurunan produksi padi.

Kondisi tersebut diperparah dengan daya dukung hutan dan lahan sawah yang diperkirakan akan terus menurun. Selain itu, daya dukung ketersediaan air juga menunjukkan tren menuju kelangkaan khususnya di wilayah Jawa. Adapun, daya dukung ekosistem laut diprediksi akan mengalami kerentanan seiring dengan kerusakan fisik ekosistem pesisir dan laut yang diakibatkan pengelolaan yang tidak berkelanjutan.

Desentralisasi dan otonomi daerah. Reformasi sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi, menimbulkan tren pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah diharapkan dapat menggali dan memanfaatkan peluang yang lebih besar dari potensi daerah yang ada. Tujuan pemekaran wilayah pada dasarnya untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan umum dan daya saing daerah. Tren pemekaran wilayah juga dipengaruhi oleh jumlah alokasi transfer ke daerah yang memiliki peranan stimulan yang lebih besar terhadap belanja daerah dibandingkan dengan PAD. Alokasi transfer ke daerah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap sektor-sektor terkait pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar. Di samping itu perlu adanya peningkatan kualitas belanja yang dilakukan pemerintah daerah dimana kualitas belanja daerah sangat mempengaruhi terhadap pencapaian indikator makro daerah.

3.2.3. Isu Provinsi Jawa Barat

Isu strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 – 2045 dirumuskan berdasarkan permasalahan yang dihadapi sampai dengan tahun 2023, isu pembangunan dalam WJDF, serta tuntutan dan tantangan yang akan dihadapi dalam periode 2025 – 2045 yang meliputi isu global, nasional, dan regional Jawa Bali.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka isu strategis Provinsi Jawa Barat untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan, adalah sebagai berikut:

1. **Green dan blue economy serta pembangunan inklusif**

Perekonomian yang berkelanjutan mencakup pergeseran sektor-sektor perekonomian menjadi lebih bersih, pengarusutamaan *green economy* dan *blue economy*. Perekonomian yang bersih atau "*clean economy*" mengacu pada sistem ekonomi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, mempromosikan penggunaan sumber daya yang terbarukan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi. Ekonomi biru atau "*blue economy*" mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut dan kelautan secara berkelanjutan. Ini mencakup pemanfaatan laut, samudra, dan sumber daya yang terkait, sambil mempertimbangkan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Sedangkan pembangunan inklusif adalah pembangunan yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan antarkelompok dan wilayah.

2. **Kualitas dan daya saing sumber daya manusia**

Pada tahun 2045, proyeksi jumlah penduduk dan penduduk usia produktif di Provinsi Jawa Barat masih menjadi yang terbesar di Indonesia. Demikian halnya, rasio ketergantungan dan jumlah penduduk usia lanjut cenderung meningkat.

Kondisi di atas merupakan tantangan besar bagi Provinsi Jawa Barat untuk dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusia melalui perbaikan kualitas kehidupan, penyiapan sumber daya manusia yang produktif (usia dini, anak-anak, dan remaja) serta pelayanan sosial bagi penduduk lanjut usia untuk menyediakan pelayanan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mendukung pembangunan inklusif diperlukan karakter sosial budaya yang inklusif. Karakter sosial budaya yang inklusif adalah sosial budaya yang terbuka dan ramah serta saling menghargai. Sosial budaya yang inklusif memiliki peran penting untuk membentuk identitas suatu masyarakat dan individu, serta berperan dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

3. **Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar**

Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur dasar antara wilayah utara dan selatan Jawa Barat serta antara perkotaan dan perdesaan mengakibatkan ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan akses layanan dasar masyarakat di wilayah tersebut.

Percepatan pembangunan infrastruktur dasar di Provinsi Jawa Barat bagian selatan seperti infrastruktur jalan, sumberdaya air dan irigasi, kesehatan, pendidikan, dan digital akan meningkatkan pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah Jawa Barat. Untuk mengurangi kesenjangan wilayah perkotaan dan perdesaan, dibutuhkan akselerasi pembangunan infrastruktur layanan dasar dan pengembangan ekonomi lokal di wilayah perdesaan. Sementara di wilayah perkotaan, pertumbuhan yang pesat dalam jangka panjang perlu diimbangi dengan layanan

infrastruktur fasilitas perkotaan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

4. Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan

Selain mempercepat aspek pertumbuhan, penyelenggaraan pembangunan daerah dalam jangka panjang juga lebih mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan dari daya dukung dan daya tampung lingkungan. Penggunaan bahan baku yang lebih efisien dan terbarukan, serta mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya perekonomian, sehingga meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya.

Inovasi teknologi yang lebih efisien dalam pemanfaatan sumber daya serta kehidupan sosial budaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam meningkatkan batas-batas pertumbuhan serta mewujudkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam pembangunan jangka panjang.

5. Keberlanjutan Penataan Ruang

Pertumbuhan penduduk dan perekonomian wilayah dalam jangka panjang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan wilayah perkotaan dengan sarana dan prasarannya, peningkatan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, serta energi dan pangan. Pemanfaatan sumber daya alam dan lahan yang meningkat untuk memenuhi kebutuhan hal tersebut di atas akan berpotensi meningkatkan tekanan terhadap sumber daya alam dan lahan. Pemanfaatan ruang serta upaya pengendaliannya menjadi tantangan dalam memastikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat menopang pembangunan secara berkelanjutan.

6. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Wilayah Provinsi Jawa Barat yang luas dan jumlah penduduk yang besar merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam pengelolaan daerah yang semakin kompleks. Birokrasi yang terikat dengan seperangkat regulasi juga dihadapkan dengan tuntutan perubahan yang cepat dan responsif terhadap pelayanan kepada masyarakat. Kolaborasi dan partisipasi akan menjadi keharusan dalam pengelolaan daerah seiring dengan meningkatnya pendidikan masyarakat.

3.2.4. Isu Strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025 – 2045

Isu strategis pada kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RPJPD Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 11: Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, dengan isu strategis:
 - a. Kurangnya akses terhadap hunian layak dan terjangkau.
 - b. Belum optimalnya upaya pengurangan timbulan sampah.
 - c. Kurangnya proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH).
2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 1: Tanpa kemiskinan dengan isu strategis:

- a. Meningkatnya angka kemiskinan dan masyarakat rentan di Kota Tasikmalaya.
 - b. Belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan.
3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 6: Air bersih dan sanitasi layak dengan isu strategis: Belum optimal dan meratanya akses terhadap pelayanan air bersih dan sanitasi layak serta aman.
4. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 3: Kehidupan sehat dan sejahtera dengan isu strategis: Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat khususnya kesehatan ibu dan bayi.
5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 13: Penanganan perubahan iklim dengan isu strategis:
 - a. Belum optimalnya upaya mitigasi dan adaptasi terhadap bahaya bencana dan perubahan iklim.
 - b. Belum optimalnya upaya pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
6. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 8: Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dengan isu strategis:
 - a. Belum optimalnya produktivitas ekonomi dan daya saing daerah.
 - b. Tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT).

3.2.5. Isu Strategis Kota Tasikmalaya

Isu strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2045 dirumuskan berdasarkan permasalahan yang dihadapi sampai dengan tahun 2023, serta tuntutan dan tantangan yang akan dihadapi dalam periode 2025-2045 yang meliputi isu global, nasional, dan Provinsi Jawa Barat serta isu strategis KLHS RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2045.

Berdasarkan hal tersebut, isu strategis Kota Tasikmalaya tahun 2025-2045 dapat dipetakan sebagai berikut.

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan	Isu sesuai Konteks				Isu Strategis Kota Tasikmalaya
	Global	Nasional	Jawa Barat	KLHS RPJPD	
Aspek Geografi dan Demografi					
Aspek Geografi 1. Perubahan tata guna lahan di kawasan daerah aliran sungai (DAS) mengakibatkan berkurangnya fungsi resapan air, meningkatnya perbedaan debit maksimum-minimum, erosi, dan juga sedimentasi. 2. Daya tampung dan debit air situ kurang optimal, terutama pada musim kemarau beberapa situ berkurang debit airnya. Sedangkan pada musim hujan menimbulkan banjir. 3. Risiko bencana terutama bencana hidrometeorologi yaitu (banjir (1.642 Ha), cuaca ekstrim (12.537 Ha), kekeringan (17.161 Ha), dan longsor (2.887 Ha) serta bahaya gempa bumi (15.131 Ha). 4. Proporsi Ruang Terbuka Hijau yang belum terpenuhi. 5. Kualitas lingkungan hidup belum optimal.	Penanganan perubahan iklim	Megatrust di Laut Selatan Jawa	1. Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan 2. Keberlanjutan Penataan Ruang	1. Belum optimalnya upaya mitigasi dan adaptasi terhadap bahaya bencana dan perubahan iklim 2. Belum optimalnya upaya pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup secara berkelanjutan 3. Kurangnya proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Penataan ruang, daya dukung dan daya tampung lingkungan

Permasalahan	Isu sesuai Konteks				Isu Strategis Kota Tasikmalaya
	Global	Nasional	Jawa Barat	KLHS RPJPD	
6. Penurunan emisi GRK yang belum optimal. 7. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang belum optimal.					
Aspek Demografi 1. Antisipasi pertumbuhan jumlah penduduk. 2. Arus urbanisasi yang terus meningkat.	Bonus Demografi	Bonus Demografi	Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	1. Belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan 2. Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat khususnya kesehatan ibu dan bayi	Sumber Daya Manusia yang Religius, berkualitas dan berkarakter
Aspek Kesejahteraan Ekonomi dan Sosial Budaya					
Kesejahteraan Ekonomi 1. Angka kemiskinan masih tinggi 2. Pendapatan masyarakat masih rendah 3. Kesenjangan pendapatan masih tinggi	1. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi 3. Berkurangnya kesenjangan 4. Kehidupan sehat dan sejahtera	Ekonomi hijau dan ekonomi biru	Green and blue economy serta pembangunan inklusif	Belum optimalnya produktivitas ekonomi dan daya saing daerah	Perekonomian tangguh, berdaya saing dan inklusif

Permasalahan	Isu sesuai Konteks				Isu Strategis Kota Tasikmalaya
	Global	Nasional	Jawa Barat	KLHS RPJPD	
4. Ketahanan pangan daerah masih rendah	5. Tanpa kemiskinan 6. Tanpa kelaparan				
Kesejahteraan Sosial Budaya 1. Belum optimalnya capaian rata-rata lama sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), APK dan APM. 2. Terjadinya degradasi moral dan pemahaman nilai-nilai keagamaan. 3. Pembangunan kepemudaan dan olahraga masih belum optimal. 4. Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat, antara lain masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi, prevalensi stunting, dan jumlah kasus tuberkulosis paru. 5. Layanan sosial yang belum optimal. 6. Ketimpangan gender masih tinggi. 7. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak belum optimal.	1. Tanpa kelaparan 2. Tanpa kemiskinan 3. Kehidupan sehat dan sejahtera 4. Kesenjangan gender 5. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh 6. Kemitraan untuk mencapai tujuan	Konflik sosial	Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	1. Meningkatnya angka kemiskinan dan masyarakat rentan di Kota Tasikmalaya 2. Belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan 3. Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat khususnya kesehatan ibu dan bayi	Sumber Daya Manusia yang Religius, berkualitas dan berkarakter

Permasalahan	Isu sesuai Konteks				Isu Strategis Kota Tasikmalaya
	Global	Nasional	Jawa Barat	KLHS RPJPD	
8. Ketahanan keluarga masih belum optimal. 9. Upaya pemajuan kesenian dan kebudayaan masih belum optimal. 10. Sarana dan prasarana kesenian dan olahraga masih kurang.					
Aspek Daya Saing Daerah					
Daya Saing Ekonomi Daerah 1. Pertumbuhan ekonomi yang belum berkualitas dan rentan terhadap guncangan eksternal. 2. Kontribusi sektor-sektor unggulan belum optimal. 3. Daya saing UMKM/IKM masih rendah. 4. Sarana dan prasarana perdagangan belum optimal. 5. Sektor pariwisata belum optimal. 6. Digitalisasi aktivitas ekonomi belum optimal. 7. Tingkat kewirausahaan (<i>entrepreneurship</i>) masih rendah.	1. Industri, inovasi dan infrastruktur 2. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	Perpindahan IKN	<i>Green dan blue economy</i> serta pembangunan inklusif	Belum optimalnya produktivitas ekonomi dan daya saing daerah	Perekonomian tangguh, berdayasaing dan inklusif

Permasalahan	Isu sesuai Konteks				Isu Strategis Kota Tasikmalaya
	Global	Nasional	Jawa Barat	KLHS RPJPD	
Daya Saing SDM 1. Kualitas tenaga kerja baik dari segi pendidikan maupun keahlian masih rendah. 2. Angka partisipasi angkatan kerja masih rendah. 3. <i>Link and match</i> antara dunia pendidikan dengan dunia kerja belum optimal. 4. Angka beban ketergantungan (<i>dependency ratio</i>) masih tinggi. 5. Literasi digital dan pemanfaatan TIK masih rendah. 6. Terjadinya degradasi moral dan pemahaman nilai-nilai keagamaan.	Pendidikan Berkualitas	Daya saing SDM	SDM yang berkualitas dan inklusif	Tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Sumber Daya Manusia yang Religius, berkualitas dan berkarakter
Daya Saing Infrastruktur Wilayah 1. Pembangunan dan kualitas infrastruktur belum merata. 2. Konektivitas dan kemantapan jalan. 3. Infrastruktur jaringan irigasi belum optimal.	1. Air bersih dan sanitasi layak 2. kota dan pemukiman berkelanjutan	Konektivitas dan infrastruktur dasar	Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar	Belum optimalnya produktivitas ekonomi dan daya saing daerah	Infrastruktur perkotaan yang merata, dan berkualitas

Permasalahan	Isu sesuai Konteks				Isu Strategis Kota Tasikmalaya
	Global	Nasional	Jawa Barat	KLHS RPJPD	
4. Pelayanan transportasi umum belum optimal. 5. Infrastruktur teknologi digital belum optimal.					
1. Akses masyarakat terhadap layanan air minum dan sanitasi belum optimal. 2. Pengelolaan persampahan belum optimal. 3. Pembangunan perumahan dan permukiman yang terjangkau masyarakat belum optimal. 4. Rehabilitasi rumah tidak layak huni belum optimal. 5. Masih adanya rumah tangga yang belum terlayani aliran listrik.	Air bersih dan sanitasi layak kota dan permukiman berkelanjutan	Konektivitas dan infrastruktur dasar	Pemerataan akses dan penyediaan infrastruktur dasar	1. Kurangnya akses terhadap hunian layak dan terjangkau 2. Belum optimalnya upaya pengurangan timbulan sampah 3. Belum optimal dan meratanya akses terhadap pelayanan air bersih dan sanitasi layak serta aman	Sarana dan prasarana permukiman yang berkualitas dan inklusif
Daya Saing Iklim Investasi 1. Iklim dan promosi investasi belum optimal. 2. Implementasi regulasi yang mendukung iklim usaha belum optimal. 3. Pemanfaatan ruang untuk investasi belum optimal.	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Ekonomi hijau dan ekonomi biru	Perekonomian kerakyatan yang kokoh, berdayasaing dan berkelanjutan	Belum optimalnya produktivitas ekonomi dan daya saing daerah	Perekonomian tangguh, berdayasaing dan inklusif

Permasalahan	Isu sesuai Konteks				Isu Strategis Kota Tasikmalaya
	Global	Nasional	Jawa Barat	KLHS RPJPD	
4. Pelayanan dan pengendalian penanaman modal belum optimal. 5. Masih adanya gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum. 6. Penegakan peraturan daerah belum optimal. 7. Kehidupan demokrasi daerah belum optimal. 8. Masih terjadinya fluktuasi harga kebutuhan pokok. 9. Kapasitas fiskal daerah masih rendah.					
Aspek Pelayanan Umum 1. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berintegritas masih belum optimal. 2. Pelayanan publik yang adaptif dan responsif masih belum optimal. 3. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) masih belum optimal. 4. Inovasi daerah belum optimal.	1. Perdamaian, Keadilan Dan Kelembagaan Yang Tangguh 2. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan adaptif

Permasalahan	Isu sesuai Konteks				Isu Strategis Kota Tasikmalaya
	Global	Nasional	Jawa Barat	KLHS RPJPD	
5. Gangguan keamanan, ketenteraman ketertiban umum 6. Belum optimlanya penegakan peraturan daerah 7. Belum optimalnya kehidupan demokrasi daerah					Keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum serta demokrasi

Sumber: Hasil Analisis, 2024.

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka Isu Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia yang religius, berkualitas dan berkarakter

Pertambahan penduduk yang diproyeksikan pada tahun 2045 akan berimplikasi terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam dan ruang. Kondisi di atas merupakan tantangan besar bagi Kota Tasikmalaya untuk dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusia melalui perbaikan kualitas kehidupan, penyiapan sumber daya manusia, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta pelayanan sosial bagi penduduk untuk menyediakan pelayanan yang inklusif. Untuk mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan diperlukan karakter sosial budaya yang terbuka, ramah dan saling menghargai, religius serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Sosial budaya yang inklusif memiliki peran penting untuk membentuk identitas suatu masyarakat dan individu, serta berperan dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

2. Perekonomian tangguh, berdayasaing dan inklusif

Perekonomian yang tangguh dan berdayasaing merupakan perekonomian daerah yang dapat bertahan dari hambatan dan tantangan ekonomi global dan nasional serta dapat bersaing dengan daerah lainnya. Selain itu perekonomian harus memperhatikan keberlanjutan mencakup pergeseran sektor-sektor perekonomian menjadi lebih bersih dan pengarusutamaan green economy. Perekonomian yang bersih atau "clean economy" mengacu pada sistem ekonomi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, mempromosikan penggunaan sumber daya yang terbarukan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi. Sedangkan pembangunan ekonomi yang inklusif adalah pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan antarkelompok dan wilayah.

3. Infrastruktur perkotaan yang merata dan berkualitas

Pembangunan infrastruktur dasar di Kota Tasikmalaya seperti infrastruktur jalan, sumberdaya air dan irigasi, energi dan digital akan meningkatkan pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi. Untuk pemerataan pembangunan, dibutuhkan akselerasi pembangunan infrastruktur layanan dasar terutama di wilayah sub urban. Sementara di wilayah perkotaan, pertumbuhan yang pesat dalam jangka panjang perlu diimbangi dengan layanan infrastruktur fasilitas perkotaan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

4. Sarana dan prasarana permukiman yang berkualitas dan inklusif

Pembangunan infrastruktur permukiman yang berkualitas dan inklusif di Kota Tasikmalaya meliputi pembangunan infrastruktur air minum, sanitasi dan penataan kawasan kumuh serta rumah tidak layak huni dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi. Pelayanan infrastruktur air minum, sanitasi termasuk didalamnya air limbah

domestik dan persampahan, penataan kawasan kumuh serta rumah tidak layak huni belum optimal sehingga masih menjadi sektor yang harus mendapatkan perhatian untuk pembangunan secara berkelanjutan.

5. Penataan ruang, daya dukung dan daya tampung lingkungan

Pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan wilayah dalam jangka panjang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan wilayah perkotaan dengan sarana dan prasarananya, peningkatan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, serta energi dan pangan. Pemanfaatan sumber daya alam dan meningkatnya kebutuhan lahan akan berpotensi meningkatkan tekanan terhadap sumber daya alam dan lahan. Pemanfaatan ruang serta upaya pengendaliannya menjadi tantangan dalam memastikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat menopang pembangunan secara berkelanjutan.

6. Keamanan, ketenteraman, ketertiban umum dan demokrasi

Masyarakat Kota Tasikmalaya dengan karakter masyarakat yang heterogen dan berbagai latar belakang sosial budaya, apabila tidak dikelola dengan baik dapat menghambat pada pelaksanaan pembangunan. Pembangunan dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh kondusivitas daerah melalui terciptanya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Selain itu, kehidupan masyarakat yang rukun dan toleran serta demokrasi yang mapan akan mendukung kelancaran proses pembangunan dan perekonomian daerah.

7. Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan adaptif.

Perkembangan zaman dan perubahan sosial ekonomi serta budaya masyarakat, merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam pengelolaan daerah yang semakin kompleks. Birokrasi yang terikat dengan seperangkat regulasi juga dihadapkan dengan tuntutan perubahan yang cepat, adaptif dan responsif terhadap pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV
VISI DAN MISI

4.1. Visi

4.1.1.Visi Indonesia Emas 2045

Penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah acuan utama dalam setiap pembangunan yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatren global, perubahan iklim, daya dukung, dan daya tampung, serta pencapaian pembangunan sebelumnya.

Cita-cita besar bangsa Indonesia adalah membangun Indonesia Emas 2045 sebagaimana tercermin dalam RPJPN Tahun 2025-2045. Visi, 5 (lima) Sasaran Visi, 8 (delapan) Misi (Agenda), 17 (tujuh belas) arah (tujuan), dan 45 indikator utama pembangunan, secara utuh mencerminkan semangat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang berlandaskan Pancasila.

Visi abadi Indonesia diterjemahkan kedalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 sebagai:

Gambar 4.1 Visi Indonesia Emas 2045

“Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.”



Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045, 2023.

4.1.2.Visi Provinsi Jawa Barat 2045

Rumusan mengenai keadaan atau kondisi Provinsi Jawa Barat yang diinginkan pada tahun 2045 sebagai hasil pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun ke depan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan, dan isu strategis Provinsi Jawa Barat serta penjabaran visi Indonesia Emas 2045.

Secara spesifik Provinsi Jawa Barat pada tahun 2045 diarahkan sebagai pusat cutting-edge industry, inovasi dan pendidikan Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics (STEAM) bertaraf global serta penumpu ketahanan pangan nasional. Sebagai pusat *cutting-edge*

industry harus memiliki pusat industri yang bertaraf global sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang didukung dengan kawasan sains dan teknologi. Sebagai pusat inovasi dan pendidikan *Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics* (STEAM) bertaraf global harus mengintegrasikan sistem dan standar kualitas pendidikan internasional dengan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif, sehingga mampu menghadapi tantangan masa depan dan mampu bersaing secara global. Sebagai penunjang ketahanan pangan nasional harus memiliki sistem produksi pertanian, keanekaragaman pangan, keamanan pangan, keamanan lahan dan hak petani, infrastruktur yang maju, kawasan strategis agrikultur, serta kemitraan dan kolaborasi. Ketiga peran tersebut harus didukung infrastruktur yang berkualitas dan modern, terintegrasi dan handal; sistem pendidikan, kesehatan, dan pertanian yang maju dengan standar kualitas tinggi; serta pemerintahan yang kredibel, adaptif dan inovatif.

Berdasarkan uraian di atas, Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2045 adalah **Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan**. Rumusan visi tersebut diharapkan dapat menjadi komitmen, kesepakatan, dan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

4.1.3.Visi Kota Tasikmalaya 2045

Visi memberikan pandangan jangka panjang tentang tujuan utama dan arah pembangunan kota, sehingga penetapan prioritas dan arah pembangunan dapat lebih terarah. Selain itu, visi juga mencerminkan kondisi yang diinginkan pada tahun 2045 sebagai hasil pembangunan selama 20 tahun ke depan dengan mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan dan isu strategis Kota Tasikmalaya pada saat ini. Rumusan kondisi ini diharapkan menjadi perekat bagi semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkannya.

Visi yang jelas memberikan landasan bagi pemimpin kota untuk mengembangkan kebijakan dan strategi. Selain itu, visi yang kuat dapat memotivasi partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan kota. Visi kota dapat berperan dalam menarik investasi dan pengembangan ekonomi. Visi yang menekankan pada perkembangan ekonomi dan keberlanjutan dapat meningkatkan daya tarik kota bagi investasi. Hal ini menciptakan peluang untuk pertumbuhan sektor perdagangan dan industri, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Isu strategis pembangunan Kota Tasikmalaya sebagaimana diuraikan pada Bab III yaitu:

1. Sumber Daya Manusia yang religius, berkualitas dan berkarakter.
2. Perekonomian yang tangguh dan berdayasaing.
3. Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan adaptif.
4. Keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta demokrasi.
5. Penataan ruang, daya dukung dan daya tampung lingkungan.
6. Infrastruktur perkotaan yang merata dan berkualitas.
7. Sarana dan prasarana permukiman yang berkualitas dan inklusif.

Selain mempertimbangkan Isu Startegis, Visi Kota Tasikmalaya disusun dengan mempertimbangkan rencana tata ruang, dokumen Rencana Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat. Visi Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2045 yaitu **Kota Tasikmalaya yang Religius, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan**. Visi tersebut telah selaras dengan Visi Nasional dan Visi Provinsi Jawa Barat sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.2 Penyelarasan Visi Kota Tasikmalaya dengan Visi Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Emas 2045



Sumber: RPJPN, Ranperda RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045, diolah.

Visi Kota Tasikmalaya memiliki makna:

Tabel 4.1 Penyusunan Penjelasan Visi

Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Religius	Masyarakat Kota Tasikmalaya terkondisikan secara psikologis dan sosiologis, dengan dasar nilai keagamaan, moral, dan budaya dalam kehidupan sehari-hari yang ditunjukkan dalam pembangunan secara fisik yang terintegrasi dengan pembangunan kesehatan mental dan ketangguhan karakter.
Maju	Kota Tasikmalaya yang berdaya, modern, tangguh, inovatif dan adil dalam aspek ekonomi, infrastruktur, teknologi, maupun kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, serta mampu bersaing dalam aspek-aspek tersebut dalam wilayah yang lebih luas dan ditunjang oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya.
Sejahtera	Masyarakat Kota Tasikmalaya dengan kondisi yang aman, damai, sentosa, makmur, bahagia dan memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan layanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Berkelanjutan	Kota Tasikmalaya memenuhi kebutuhan masyarakatnya tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya, serta memanfaatkan sumber daya dengan memperhatikan pelestarian lingkungan, keseimbangan ekonomi, sosial, dan budaya secara bijak.

Sumber: Hasil Analisis, 2024.

Kota Tasikmalaya yang religius merupakan cerminan dari identitas berakar masyarakat Kota Tasikmalaya yang merupakan bagian dari pembentuk inklusifitas kotanya, dalam bentuk derajat ketaatan beragama atau intensitas perasaan beragama (pengejawantahan Pasal 29 UUD 1945). Hal ini akan ditunjukkan dalam bentuk ekspresi lahiriah dari iman seseorang. Di sisi lain dalam konteks pembangunan daerah, melalui kata kunci ini, harapan warga kota untuk 20 (dua puluh) tahun mendatang dapat terkondisikan secara psikologi dan sosiologis dengan dasar nilai keagamaan, moral, dan budaya yang nantinya ditunjukkan dalam pembangunan secara fisik yang terintegrasi dengan pembangunan kesehatan mental dan ketangguhan karakter warganya.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya, bahwa dalam kehidupan bermasyarakatnya, senantiasa berlandaskan nilai-nilai keimanan dan ketaatan terhadap Tuhan YME. Karakter religius yang diartikan sebagai perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleransi dalam pelaksanaan ibadah dan interaksi dengan sesamanya. Secara singkat, menurut Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014, komponen pembentuk nilai religius adalah: 1) Pengamalan ibadah; 2) Pembangunan akhlak melalui pendidikan; 3) Perekonomian syariah; dan 4) Kerukunan umat beragama.

Kota Tasikmalaya yang maju merepresentasikan dinamika isu dan pembangunan kota menuju kondisi kota yang lebih baik dipandang dari sisi keberlanjutan, keadilan, serta dinamika kondisi lokal dan regional. Istilah ini pun berhubungan dengan terciptanya solusi atas isu perkotaan dalam hal adanya kebijakan pembangunan terintegrasi, mendorong keberagaman dan kesetaraan, layanan dasar perkotaan yang prima, pemerataan pembangunan, juga adanya kerja sama serta kolaborasi antar para pemangku kepentingan. Kota Tasikmalaya diharapkan menjadi kota yang berdaya, modern, tangguh, inovatif dan adil dalam aspek ekonomi, infrastruktur, teknologi, maupun kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, serta mampu bersaing dengan daerah lainnya dan ditunjang oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya. Berdaya saing mengacu pada proses transformasi kota yang berhasil menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

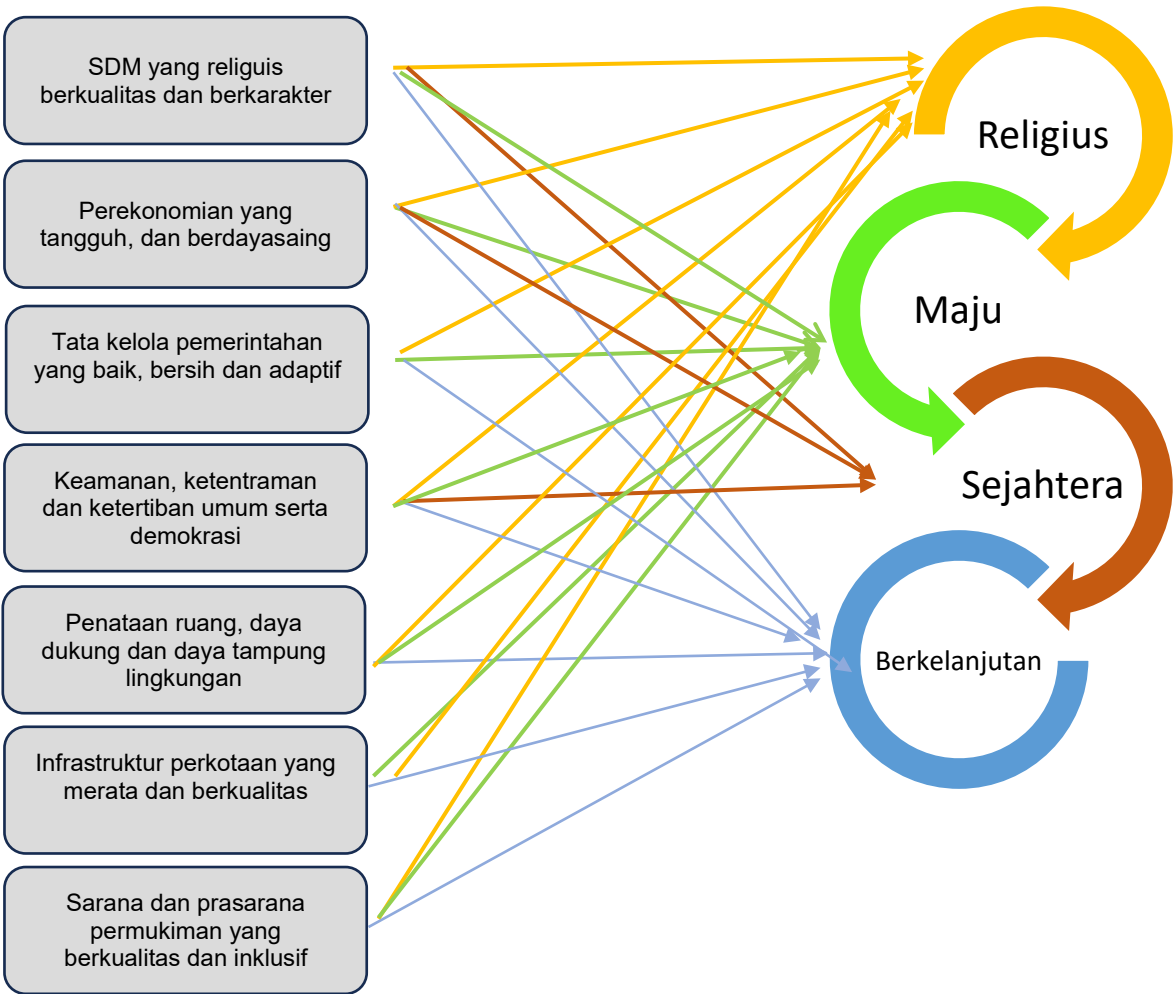
Kota Tasikmalaya yang sejahtera mengacu kepada terwujudnya masyarakat Kota Tasikmalaya yang aman, damai, sentosa, makmur, bahagia dan memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan layanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemajuan Kota

Tasikmalaya termanifestasi pada pendapatan per kapita masyarakat yang tinggi, tingkat kemiskinan rendah, dan ketimpangan pendapatan masyarakat rendah serta terciptanya rasa aman dan damai masyarakatnya.

Pembangunan perkotaan berkelanjutan merupakan sebuah konsep yang mengutamakan keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan sosial untuk memenuhi kebutuhan suatu masyarakat tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya serta memanfaatkan sumber daya dengan memperhatikan pelestarian lingkungan, keseimbangan ekonomi, sosial, dan budaya secara bijak. Hal ini melibatkan pendekatan terpadu terhadap perencanaan kota yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat lokal dan lingkungan alam. Kota berkelanjutan berfokus pada peningkatan kelangsungan kota dalam jangka panjang dengan mengurangi konsumsi, limbah, dan dampak berbahaya terhadap manusia dan lingkungan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

Dengan menggabungkan semua elemen di atas, visi Kota Tasikmalaya menggambarkan kota yang berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan, moral, dan budaya untuk mencapai kota yang modern, tangguh dan inovatif, dengan kondisi masyarakat yang aman, sentosa, adil, dan makmur serta pembangunan yang memanfaatkan sumber daya secara bijak, pelestarian lingkungan, dan keseimbangan ekonomi-sosial yang ditopang oleh tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan adaptif.

Gambar 4.3 Keterkaitan Isu Strategis dan Visi



Sumber: Hasil Analisis, 2024.

Pada tahun 2045, Kota Tasikmalaya memiliki visi yang jelas untuk menjadi daerah yang maju, sejahtera dan berkelanjutan dengan dasar nilai-nilai religius masyarakatnya. Visi ini tidak hanya sekedar impian, tetapi juga sebuah rencana konkret yang akan diwujudkan melalui kerja keras, inovasi, dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Visi ini akan berhasil dicapai melalui kepemimpinan yang visioner, partisipasi aktif masyarakat, serta kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Ketercapaian Visi Kota Tasikmalaya Religius, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan akan ditunjukkan 5 (lima) sasaran visi yaitu:

- 1) Peningkatan Pendapatan per kapita;
- 2) Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan;
- 3) Peningkatan Daya Saing Daerah;
- 4) Peningkatan daya saing sumber daya manusia;
- 5) Penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*.

Tabel 4.2 Penyelarasan Sasaran Visi RPJPD Kota Tasikmalaya dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat dan RPJPN 2045

No	RPJPN 2025-2045				RPJPD PROVINSI 2025-2045				RPJPD KAB/KOTA 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1	Pendapatan per kapita setara negara maju	a. GNI Per Kapita (US\$)	5.500	30.300	Peningkatan Pendapatan per kapita	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	57,14-57,77	273,17-325,25	Peningkatan Pendapatan per kapita	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	38,99-39,35	60,96-113,04
		b. Kontribusi PDB Maritim (%)	7,6	15		b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	48,19	186,06		b. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	13,03	11,69
		c. Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28		c. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	41,15–42,00	46,43–47,60				
2	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	a. Tingkat Kemiskinan (%)	6,0-7,0	0,5-0,8	Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang	a. Tingkat Kemiskinan (%)	5,85–6,46	0,09-0,59	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	9,20-10,16	0,14-0,92
		b. Rasio Gini (indeks)	0,379-0,382	0,377-0,320		b. Rasio gini (Indeks)	0,383–0,390	0,357–0,380		b. Rasio Gini (Indeks)	0,418-0,425	0,393-0,416
		c. Kontribusi PDRB KTI (%)	21,5 (2022)	28,5		c. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	12,72	10,77		c. Kontribusi PDRB Kota (%)	1,03	1,07
										d. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,43-6,17	5,29-6,49
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	15 besar	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat				Peningkatan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,87	5,00
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,54 (2022)	0,73	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	0,55	0,72	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,86	81,37
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	6,61	75,84	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton CO ² eq/2010 IDR Milyar)	2,17	5,67
						Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	64,06	72,08		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	61,62	65,04

Sumber: Analisis Bappelitbangda dan SE Gubernur Jawa Barat, 2024.

4.2. Misi

4.2.1.Misi Pembangunan Nasional

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan yang terdiri atas: transformasi sosial; transformasi ekonomi; dan transformasi tata kelola yang ditopang oleh 2 (dua) agenda landasan transformasi, yaitu: supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia; dan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 (tiga) agenda kerangka implementasi transformasi, yaitu: pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan serta kesinambungan pembangunan.

Delapan misi (agenda) pembangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Misi 1: Transformasi Sosial

Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.

Misi 2: Transformasi Ekonomi

Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Misi 3: Transformasi Tata Kelola

Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.

Misi 4: Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.

Misi 5: Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi

Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Misi 6: Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan

kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

Misi 7: Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan.

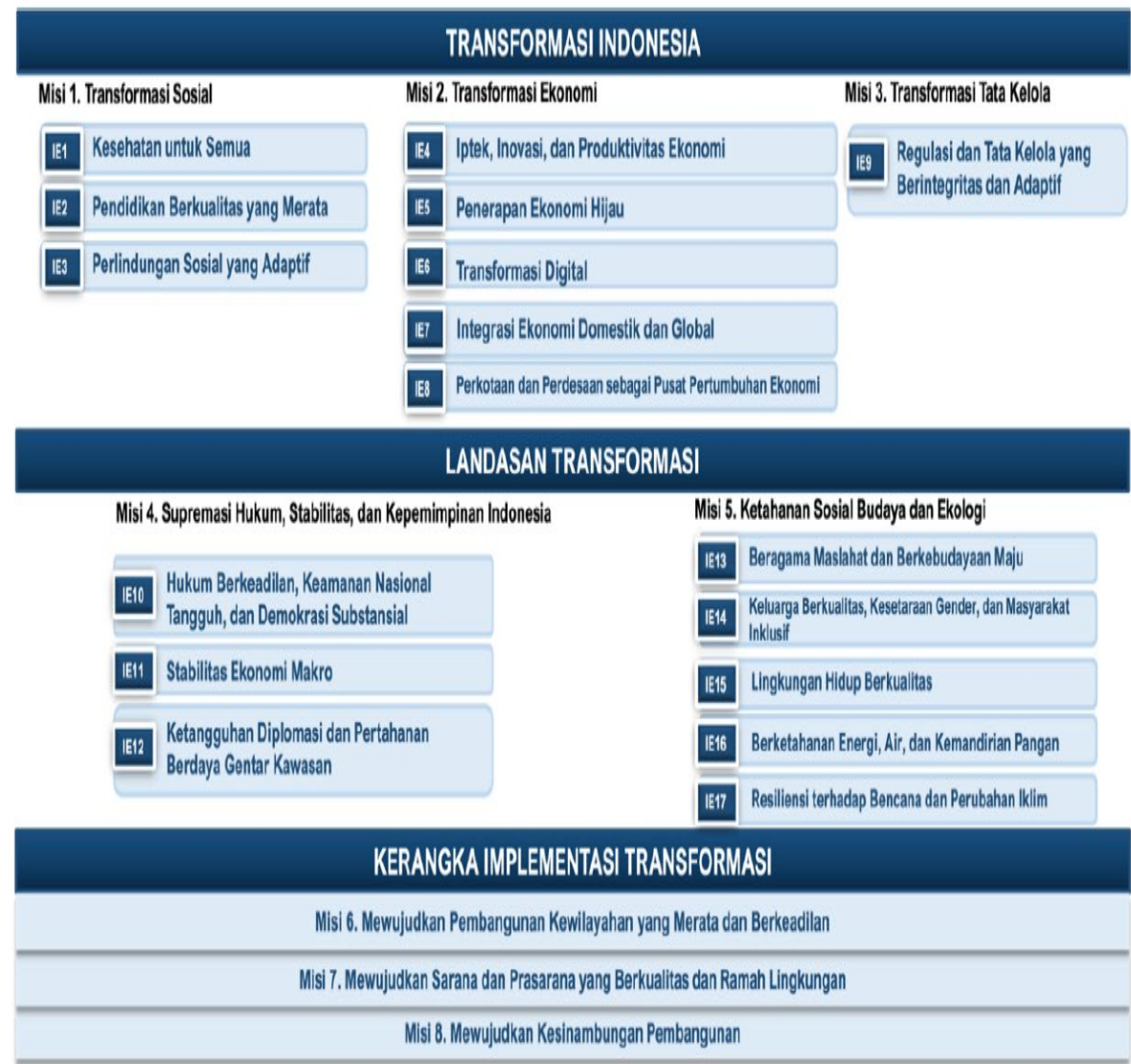
Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi; dan

Misi 8: Kestinambungan Pembangunan.

Kestinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pendanaan pembangunan

Kedelapan misi (agenda) tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan, sebagaimana gambar berikut.

Gambar 4.4. Tujuh Belas Arah Tujuan Pembangunan



Sumber: UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045.

Dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, RPJPN sebagai pedoman yang memuat seluruh aspek pembangunan, terdapat upaya transformatif super prioritas (*Game Changers*), yaitu:

Transformasi Sosial:

1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) serta efektivitas pengalokasian dan pemanfaatan anggaran wajib pendidikan.
2. Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan.
3. Restrukturisasi kewenangan pengelolaan pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan.
4. Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan sunting, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta).
5. Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.

Transformasi Ekonomi:

6. Peningkatan anggaran IPTEKIN Nasional menuju komersialisasi oleh industri.
7. Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor.
8. Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau.
9. Superplatform untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital.
10. Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi.
11. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Transformasi Tata Kelola:

12. Transformasi manajemen ASN (terutama sistem penggajian tunggal dan pensiun), pemberantasan korupsi, dan pembentukan lembaga pengelola tunggal regulasi.
13. Penguatan tata kelola partai politik.

Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepempinan Indonesia:

14. Transformasi sistem penuntutan melalui *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *advocat general*.
15. Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional.
16. Transformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif, reformasi APBN; serta transformasi perencanaan dan fiskal.
17. Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi:

- 18. Penguatan karakter dan jati diri bangsa.
- 19. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.
- 20. Ketahanan energi dan air serta kemandirian menuju kedaulatan pangan dengan pendekatan terpadu FEW nexus (*food, energy, water*).

Gambar 4.5 Kerangka Upaya Transformasi Super Prioritas (Game Changers)



Sumber: UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045.

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, Indonesia harus mengubah pendekatan pembangunan yang digunakan di masa lalu. Tidak cukup langkah reformasi saja, melainkan perlu diperkuat dengan transformasi menyeluruh di berbagai bidang pembangunan.

Gambar 4.6. Transformasi Menuju Indonesia Emas 2045



Sumber: UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045.

4.2.2.Misi Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan visi tahun 2045. Rumusan umum dalam bentuk pernyataan misi tersebut untuk memastikan aktivitas yang ditentukan mengarah pada terwujudnya kondisi-kondisi yang ingin dicapai. Karena itu, misi Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan Provinsi Jawa Barat Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- Misi 1: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Berdaya Saing.
- Misi 2: Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif.
- Misi 3: Memperkuat Tata Kelola yang Dinamis, Berkualitas, Akuntabel dan Inovatif.
- Misi 4: Mewujudkan Provinsi yang Aman dan Tertib serta Menjaga Stabilitas Ekonomi Daerah
- Misi 5: Mewujudkan Masyarakat Madani, Berbudaya, Maju, dan Peduli Lingkungan.
- Misi 6: Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang Merata dan Inklusif.
- Misi 7: Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas.
- Misi 8: Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan.

RPJPD sebagai pedoman memuat seluruh aspek pembangunan untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045, terdapat upaya transformatif super prioritas (*Game Changer*), yaitu:

Transformasi Sosial

1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
2. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*).
3. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
4. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.
5. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
6. Percepatan penuntasan *stunting* dan pencegahan *stunting*.
7. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.

Transformasi Ekonomi

8. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global.
9. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi tepat guna.
10. Pembangunan akses infrastruktur ketenagalistrikan berbasis pengembangan energi baru dan terbarukan
11. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital.
12. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas *intraregion and interregion* pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).

Transformasi Tata Kelola

13. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
14. Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN Pemerintah Daerah Jawa Barat, menuju penyelenggaraan Pemerintah Daerah Jawa Barat yang profesional dan bebas korupsi.
15. Penguatan integritas partai politik.

Landasan Transformasi

Mewujudkan Provinsi yang aman dan tertib serta menjaga stabilitas ekonomi daerah

16. Peningkatan Keadilan Hukum dan Demokrasi yang Berkualitas Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.
17. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah.
18. Pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.

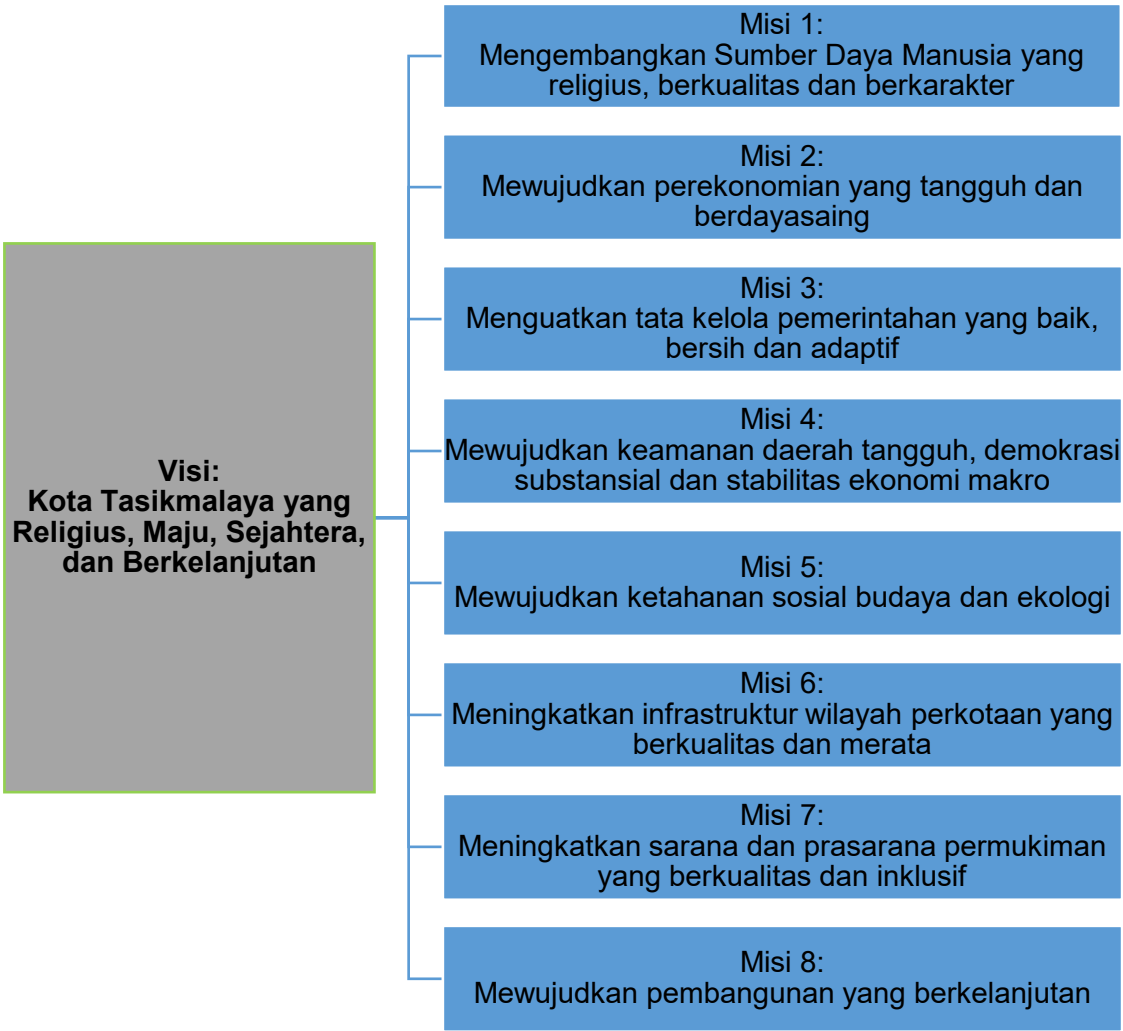
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

19. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.
20. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, serta integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*.
21. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan dan *water prosperity* melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Citarum-Cimanuk-Cisanggarung dan Citanduy.
22. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
23. Pengembangan industri hijau seperti industri kimia hijau (*green chemistry*), dan teknologi nano hijau (*green nanotechnology*), didukung dengan pengembangan energi terbarukan (*renewable energy*).
24. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.

4.2.3.Misi Pembangunan Kota Tasikmalaya

Misi dalam RPJPD Tahun 2025-2045 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan Misi Pembangunan Nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045. Misi merinci langkah-langkah konkret dan rencana tindakan untuk mencapai visi serta memberikan petunjuk operasional kepada pemerintah dan lembaga terkait dalam melaksanakan kebijakan dan program. Rumusan misi memastikan upaya yang ditentukan agar mengarah pada terwujudnya kondisi yang ingin dicapai. Oleh karena itu, untuk mencapai Visi **Kota Tasikmalaya yang Religius, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan** ditetapkan misi sebagai berikut:

Gambar 4.4 Alur Perumusan Misi



Sumber: Hasil Analisis, 2023

Penjelasan misi RPJPD Kota Tasikmalaya 2025-2045 adalah sebagai berikut.

1. Mengembangkan SDM yang religius, berkualitas dan berkarakter.

Mengembangkan sumberdaya manusia yang religius, berkualitas dan berkarakter dilakukan untuk membentuk masyarakat Kota Tasikmalaya yang menggabungkan aspek profesional dan moralitas dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitasnya. Masyarakat Kota Tasikmalaya diharapkan memiliki karakter, etika yang baik, pemahaman yang luas terhadap nilai-nilai religi dan budaya, menghormati perbedaan, memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang relevan serta mutakhir sesuai perkembangan zaman. Misi ini mencakup penyediaan pendidikan dan pelatihan yang memadukan keahlian teknis dengan pembentukan karakter etis berdasarkan nilai-nilai religi dan budaya, pemeliharaan kesehatan fisik dan mental, serta peningkatan pelayanan sosial yang inklusif. Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang relevan dan

mutakhir, serta sehat jasmani dan rohani. Sehingga dapat bersaing di pasar kerja dan mampu menghadapi tantangan global.

Sumber daya manusia yang berkarakter adalah individu yang memiliki moralitas dan etika yang baik berbasis nilai religi, hukum dan kebudayaan lokal dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.

2. Mewujudkan perekonomian yang tangguh dan berdaya saing.

Misi kedua ini bermaksud untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memantapkan posisi Kota Tasikmalaya sebagai pusat pertumbuhan di Kawasan Priangan Timur dengan berbasis pada perdagangan dan jasa. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melibatkan upaya seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan serapan tenaga kerja. Pemantapan posisi ekonomi Kota Tasikmalaya akan melibatkan pengembangan sektor-sektor unggulan, peningkatan KUMKM, pengembangan pariwisata, peningkatan industri, perdagangan dan peningkatan sektor jasa serta peningkatan investasi dengan dorongan inovasi dan peningkatan efisiensi di berbagai sektor, hingga upaya untuk menginternalisasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi.

Perekonomian yang tangguh dan berdaya saing merupakan kondisi ekonomi yang kuat, serta mampu bersaing secara regional, nasional, dan global. Pembangunan ekonomi berbasis pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi lokal yang ditunjang oleh lembaga pembiayaan mikro termasuk koperasi, penerapan ekonomi syariah serta peningkatan investasi daerah serta kerja sama dan kolaborasi dengan sektor swasta dan mendorong kewirausahaan lokal untuk mewujudkan Kota Tasikmalaya sebagai pusat jasa dan perdagangan di wilayah Priangan Timur.

3. Memperkuat Tata Kelola pemerintahan yang Baik, Bersih dan Adaptif.

Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan adaptif ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Misi ini mengandung arti bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih merupakan sistem pemerintahan yang menerapkan prinsip profesionalisme, transparansi, akuntabel, efektif dan efisien serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Tata kelola pemerintahan yang adaptif mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan dalam lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi, serta dituntut untuk terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi dan informasi. Dengan dijalankannya tugas pemerintahan dengan baik kondusivitas daerah yang diukur melalui ketenteraman dan ketertiban akan terjaga.

Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan adaptif sangat penting dalam menghadapi dinamika masyarakat yang kompleks serta mampu beradaptasi dengan cepat sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat dan investor, dalam upaya percepatan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan jangka panjang.

4. Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro.

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan stabilitas sosial dan ekonomi yang didukung oleh ketangguhan keamanan daerah untuk meningkatkan daya saing daerah terutama berkaitan dengan iklim investasi yang kondusif melalui optimalisasi koordinasi antar instansi yang berkaitan dengan demokrasi dan stabilitas keamanan daerah, dengan tidak melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku.

Ketangguhan daerah merupakan kemampuan Kota Tasikmalaya untuk merespon ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, serta dapat memanfaatkan peluang baru, dan menerapkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Demokrasi substansial adalah upaya Kota Tasikmalaya menjamin penggunaan prinsip-prinsip demokrasi diantaranya kebebasan individu dan pengakuan atas hak sipil untuk kesejahteraan masyarakat.

Stabilitas ekonomi makro merupakan upaya Kota Tasikmalaya dalam rangka mewujudkan kinerja perekonomian daerah untuk menjamin pertumbuhan ekonomi berlangsung secara signifikan dan berkelanjutan.

5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi merupakan suatu upaya untuk membentuk masyarakat yang memperhatikan nilai-nilai keadilan, keragaman sosial budaya, kemajuan, dan peduli akan keberlanjutan lingkungan hidup. Upaya yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan kerukunan umat beragama, pengembangan budaya, peningkatan kualitas keluarga dan pemuda, peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan pangan, air, energi serta meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Dengan demikian, perlu dilakukan upaya untuk mengembangkan pendidikan yang berkualitas, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia agar masyarakat Kota Tasikmalaya tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi, tetapi juga memiliki nilai-nilai etika dan moral yang positif sehingga terwujud masyarakat yang memegang nilai keadilan dan keberagaman sosial budaya. Selain itu, kepedulian lingkungan ditunjukkan dengan menjaga keseimbangan ekosistem alam; memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam; mengurangi dan mencegah pencemaran lingkungan dan emisi gas rumah kaca serta dampak perubahan iklim; pengelolaan air yang

efisien; pelestarian hutan; serta penggunaan energi baru terbarukan. Penerapan sirkular ekonomi dalam pengelolaan limbah perlu ditingkatkan untuk meminimalkan dampak sampah terhadap lingkungan. Penanaman pohon, restorasi habitat, dan perlindungan keanekaragaman hayati menjadi fokus untuk memperkuat ekosistem alam dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

6. Meningkatkan infrastruktur wilayah perkotaan yang berkualitas dan merata.

Meningkatkan infrastruktur wilayah perkotaan yang berkualitas dan merata merupakan suatu upaya untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur merata ke seluruh wilayah dengan memperhatikan keberagaman dan kebutuhan masyarakat. Manfaat pembangunan infrastruktur diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah dan dapat dinikmati semua lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah yang kurang berkembang. Pemerataan infrastruktur wilayah yang inklusif menjadi salah satu kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur wilayah yang berkualitas juga menjadi investasi masa depan yang penting bagi masyarakat Kota Tasikmalaya. Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah yang mencakup jalan, sumber daya air dan irigasi, serta transportasi. Selain ketersediaan infrastruktur juga dilakukan pemerataan pembangunan infrastruktur sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah Kota Tasikmalaya.

7. Meningkatkan sarana dan prasarana permukiman yang berkualitas dan inklusif.

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan penyediaan infrastruktur permukiman yang berkualitas dan inklusif melalui pemenuhan layanan dasar yang meliputi air minum, sanitasi, perumahan dan permukiman, serta pengelolaan persampahan. Pengembangan ini adalah untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai dan berkualitas terhadap layanan dasar yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari.

8. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Mewujudkan pembangunan berkelanjutan merupakan komitmen untuk menciptakan suatu sistem yang menggabungkan pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, pelestarian lingkungan alam, pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, dan tata ruang yang efisien serta agar pembangunan per tahapan periode pembangunan dapat dilakukan secara berkesinambungan serta adanya kesinambungan dengan pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini melibatkan serangkaian langkah dan kebijakan yang dirancang untuk mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan dan memastikan penggunaan sumber daya alam

secara bijaksana. Perwujudan lingkungan hidup berkelanjutan juga memperhatikan tata ruang yang efisien, melalui perencanaan penggunaan lahan dan infrastruktur yang dilakukan dengan cermat.

Perencanaan pembangunan dilakukan lebih terarah, sehingga dapat mengurai kepadatan populasi dan meminimalkan konversi lahan produktif menjadi lahan non-pertanian. Hal ini melibatkan identifikasi zona-zona yang sesuai untuk pertanian, pemukiman, dan kawasan industri. Pengembangan perkotaan yang terencana dengan baik juga menjadi bagian dari tata ruang efisien, dengan fokus pada penciptaan *Transit Oriented Development (TOD)* berbasis transportasi massal, sehingga mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan mengurangi kemacetan serta emisi karbon.

Tabel 4.3 Penyeragaman Misi RPJPD Kota Tasikmalaya dengan Misi RPJPD Provinsi Jawa Barat dan Misi RPJPN Tahun 2045

No	RPJPN 2025-2045		RPJPD PROVINSI 2025-2045	RPJPD KAB/KOTA 2025-2045
	Kelompok Agenda/Misi	Agenda/Misi	Misi	Misi
1	Transformasi Indonesia	Transformasi sosial	Mengembangkan sumber daya manusia yang berakhlak dan berdaya saing	Mengembangkan SDM yang religius, berkualitas dan berkarakter
2		Transformasi ekonomi	Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan inklusif	Mewujudkan perekonomian yang inklusif, tangguh dan berdaya saing
3		Transformasi tata Kelola	Menguatkan tata kelola yang dinamis, berkualitas, akuntabel dan inovatif	Menguatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan adaptif
4	Landasan Transformasi	Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia	Mewujudkan provinsi yang aman dan tertib serta menjaga stabilitas ekonomi daerah	Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro
5		Ketahanan sosial budaya dan ekologi	Mewujudkan masyarakat madani, berbudaya, maju, dan peduli lingkungan	Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi
6	Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Meningkatkan infrastruktur wilayah yang merata dan inklusif	Meningkatkan infrastruktur wilayah perkotaan yang berkualitas dan merata
7		Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas	Meningkatkan sarana dan prasarana permukiman yang berkualitas dan inklusif
8		Kesinambungan pembangunan	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

Sumber: Analisis Bappelitbangda, 2024.

4.3. Upaya Transformasi Super Prioritas

Dalam upaya mewujudkan Kota Tasikmalaya yang Religius, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan, RPJPD sebagai pedoman yang memuat seluruh aspek pembangunan, terdapat upaya transformatif super prioritas (*Game Changer*), yaitu:

Transformasi Sosial

1. Peningkatkan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) dan penguatan karakter berbasis nilai religi dan budaya.
2. Penguatan sekolah terbuka dan fasilitasi pendidikan keagamaan dan pesantren.
3. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan
4. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
5. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
6. Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.
7. Penguatan penyediaan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat berbasis sistem basis data terpadu yang terintegrasi pada bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, perumahan dan sanitasi terutama bagi kelompok marjinal dan rentan.

Tranformasi Ekonomi

8. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) nasional yang berdaya saing di tataran global.
9. Peningkatan kuantitas dan kualitas UMKM melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan termasuk koperasi, serta adopsi teknologi.
10. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha sektor industri, perdagangan dan jasa terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.
11. Peningkatan konektivitas antar wilayah dengan memperhatikan RTRW Kota Tasikmalaya, serta pembangunan perumahan dan permukiman yang aman dan ramah lingkungan.

Transformasi Tata Kelola

12. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur daerah yang adaptif, sesuai dengan kebutuhan daerah.
13. Penguatan tata kelola pemerintah daerah menuju penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang profesional dan bebas korupsi.

Meningkatnya jaminan penegakan hukum secara demokratis dan berkualitas

14. Peningkatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta koordinasi kelembagaan sektor ideologi, politik, hukum dan keamanan daerah untuk menopang stabilitas ekonomi daerah.
15. Percepatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah (pinjaman daerah, Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) Daerah, *Corporate Social Responsibility* (CSR), jasa ekosistem, perdagangan karbon dalam upaya menurunkan tingkat emisi karbon, ekonomi dan keuangan syariah, dan lain sebagainya), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan transfer ke daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

16. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat berbasis religi dan jati diri bangsa, serta berasaskan kepada Pancasila.
17. Pengintegrasian pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dan pengembangan instrumen *circular economy*.
18. Peningkatan produktivitas, kualitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan pangan.
19. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
20. Pengembangan industri hijau yang didukung dengan pengembangan energi terbarukan (*renewable energy*).
21. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.

BAB V
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1. Arah Kebijakan Daerah

Visi dan misi yang telah dicantumkan pada bab sebelumnya, menjadi dasar bagi perumusan arah kebijakan daerah selama 20 (dua puluh) tahun ke depan. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah merupakan pedoman untuk melaksanakan misi yang sesuai dengan isu strategis dan dibagi dalam empat tahapan. Setiap tahapan memiliki tema pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pokok yang menggambarkan terwujudnya visi daerah. Rumusan kerangka kerja dalam melaksanakan misi RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2045 ditempuh melalui empat tahapan dengan tema besar pada masing-masing tahapan pembangunan sejalan dengan pentahapan pembangunan yang termuat dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045, sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar 5.1
Tema Pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2045



Secara garis besar, arah kebijakan pembangunan Kota Tasikmalaya untuk dua puluh tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- Tahap I Penguatan Transformasi/Fondasi
- Tahap ini merupakan penguatan sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pembangunan yang akan datang. Penguatan tahap ini dilakukan dengan menjaga kesinambungan pembangunan yang telah dihasilkan dan meningkatkan capaian kinerja yang belum optimal. Upaya penguatan transformasi ini meliputi:
- 1) Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial.
 - 2) Penguatan tata kelola sumber daya alam, pembentukan SDM tenaga kerja yang kompeten, serta penciptaan dan perluasan lapangan pekerjaan.
 - 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan adaptif.
 - 4) Penyelenggaraan transformasi kelembagaan dan tata kelola ideologi, politik, hukum dan keamanan daerah.

- 5) Perlindungan kebudayaan lokal dan optimalisasi tata kelola perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup.
- 6) Peningkatan pemerataan infrastruktur wilayah.
- 7) Penyediaan sarana dan prasarana permukiman secara merata.
- 8) Penguatan ketahanan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

➤ Tahap II Akselerasi

Tahap ini merupakan akselerasi pembangunan yang difokuskan pada aspek/sektor yang telah berhasil dan aspek/sektor yang berpotensi pada pencapaian keberhasilan pembangunan sehingga dapat menggerakkan aspek/sektor lainnya. Upaya akselerasi pembangunan ini, meliputi:

- 1) Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter berbasis nilai religi didukung oleh perlindungan sosial adaptif.
- 2) Peningkatan produktivitas, kualitas dan daya saing produk barang dan jasa, serta perluasan pertumbuhan ekonomi baru.
- 3) Peningkatan fungsi kelembagaan kolaboratif dan regulasi berbasis teknologi informasi.
- 4) Penguatan implementasi kebijakan daerah untuk mewujudkan stabilitas daerah.
- 5) Penguatan karakter masyarakat berbudaya religi sesuai jati diri, serta pemulihan dan perlindungan lingkungan hidup.
- 6) Akselerasi pemerataan infrastruktur wilayah.
- 7) Akselerasi penyediaan sarana dan prasarana permukiman.
- 8) Peningkatan ketahanan sosial, ekonomi lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

➤ Tahap III Pemantapan

Pemantapan pembangunan merupakan percepatan pembangunan pada semua aspek/sektor sehingga semakin mendekatkan pada perwujudan Kota Tasikmalaya yang Religius, Maju Sejahtera, dan Berkelanjutan. Upaya yang dilakukan dalam pemantapan pembangunan ini, antara lain:

- 1) Penguatan daya saing sumber daya manusia dan kesejahteraan yang meningkat.
- 2) Peningkatan sinergitas sektor investasi dan jasa serta perdagangan.
- 3) Penguatan tata kelola pemerintahan baik, bersih dan adaptif.
- 4) Penguatan kelembagaan dan pranata sosial yang bersih dan akuntabel untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban umum.
- 5) Pemajuan karakter berbasis nilai religi dan jati diri bangsa, pengarusutamaan gender, serta penguatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara konsisten.
- 6) Pemantapan infrastruktur wilayah secara inklusif.
- 7) Pemantapan sarana dan prasarana permukiman.
- 8) Pemantapan ketahanan sosial, ekonomi lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

➤ Tahap IV Perwujudan

Tahap ini merupakan perwujudan Kota Tasikmalaya yang Religius, Maju Sejahtera, dan Berkelanjutan dengan tetap melakukan percepatan pembangunan di segala aspek/sektor. Upaya perwujudan pembangunan ini, meliputi:

- 1) Perwujudan sumber daya manusia berkualitas dan berkarakter.
- 2) Pembangunan ekonomi inklusif yang berkelanjutan.
- 3) Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan adaptif.
- 4) Perwujudan supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan daerah.
- 5) Perwujudan masyarakat yang berbudaya, maju, dan peduli lingkungan untuk meningkatkan ketahanan sosial budaya dan ekologi.
- 6) Perwujudan infrastruktur wilayah secara merata dan inklusif.
- 7) Perwujudan sarana dan prasarana permukiman yang berkualitas.
- 8) Perwujudan ketahanan sosial, ekonomi lingkungan dan tata kelola pemerintahan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Mengacu kepada Visi dan Misi Kota Tasikmalaya 20 (dua puluh) tahun mendatang, serta prioritas pembangunan pada setiap tahap, maka arahan umum kebijakan pembangunan Kota Tasikmalaya untuk setiap misi adalah sebagai berikut:

Misi 1: Mengembangkan SDM yang religius, berkualitas dan berkarakter

Untuk mengembangkan sumber daya manusia yang religius, berkualitas dan berkarakter Kota Tasikmalaya, diperlukan arah kebijakan sebagai berikut:

Tahap 1: Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial

Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial meliputi upaya: Pertama, Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan. Kedua, Penyiapan dan peningkatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting. Ketiga, Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. Keempat, Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. Kelima, Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.

Keenam, Peningkatkan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) dan penguatan karakter berbasis nilai religi dan budaya. Ketujuh, Penguatan sekolah terbuka dan fasilitasi pendidikan keagamaan dan pesantren. Kedelapan, Peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang memenuhi standar serta didukung oleh sarana prasarana yang memadai. Kesembilan, Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Kesepuluh, Penguatan kurikulum pendidikan anak usia

dini dan pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter, serta literasi digital. Kesebelas, Peningkatan penyediaan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat berbasis sistem basis data terpadu yang terintegrasi pada bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, perumahan dan sanitasi terutama bagi kelompok marjinal dan rentan. Keduabelas, Pemberdayaan dan peningkatan usaha bagi masyarakat berbasis sistem basis data terpadu yang terintegrasi.

Tahap 2: Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter berbasis nilai religi didukung oleh perlindungan sosial adaptif

Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter berbasis nilai religi didukung oleh perlindungan sosial adaptif, meliputi upaya: Pertama, Akselerasi kesehatan masyarakat dengan penerapan upaya promotif-preventif dan pemberdayaan masyarakat melalui pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat, kesehatan ibu dan anak, serta kesehatan lingkungan. Kedua, Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting. Ketiga, Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan, keamanan dan ketahanan kesehatan termasuk pengembangan ekosistem halal. Keempat, Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan pemerataan tenaga medis serta pemerataan tenaga kesehatan. Kelima, Akselerasi pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya. Keenam, Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) dan penguatan karakter berbasis nilai religi dan budaya. Ketujuh, Akselerasi sekolah terbuka dan fasilitasi pendidikan keagamaan dan pesantren. Kedelapan, Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang memenuhi standar serta didukung oleh sarana prasarana yang memadai. Kesembilan, Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan. Kesepuluh, Percepatan implementasi kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter, serta literasi digital. Kesebelas, Penguatan penyediaan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat berbasis sistem basis data terpadu yang terintegrasi pada bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, perumahan dan sanitasi terutama bagi kelompok marjinal dan rentan. Keduabelas, Penguatan pemberdayaan dan peningkatan usaha bagi masyarakat berbasis sistem basis data terpadu yang terintegrasi.

Tahap 3: Penguatan daya saing sumber daya manusia dan kesejahteraan yang meningkat

Penguatan daya saing sumber daya manusia dan kesejahteraan yang meningkat, meliputi upaya: Pertama, Pemantapan kesehatan masyarakat dengan penerapan upaya promotif-preventif dan pemberdayaan masyarakat melalui pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat, kesehatan ibu dan anak, serta kesehatan lingkungan. Kedua, Pemantapan gizi ibu hamil dan anak balita. Ketiga, Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal. Keempat, Penguatan sistem kesehatan daerah. Kelima, Percepatan eliminasi penyakit menular, tidak menular dan penyakit tropis yang terabaikan. Keenam, Pemantapan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) dan penguatan karakter

berbasis nilai religi dan budaya. Ketujuh, Pemantapan sekolah terbuka dan fasilitasi pendidikan keagamaan dan pesantren. Kedelapan, Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang memenuhi standar dan aman bencana. Kesembilan, Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan. Kesepuluh, Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter, serta literasi digital. Kesebelas, Percepatan sistem perlindungan dan jaminan sosial yang adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan. Keduabelas, Percepatan pemberdayaan dan peningkatan usaha bagi masyarakat berbasis sistem basis data terpadu yang terintegrasi.

Tahap 4: Perwujudan sumber daya manusia berkualitas dan berkarakter berbasis nilai religi

Perwujudan sumber daya manusia berkualitas dan berkarakter berbasis nilai religi, meliputi upaya: Pertama, Perwujudan masyarakat yang sehat dan mandiri. Kedua, Perwujudan Keluarga Sehat dan Sadar Gizi. Ketiga, Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. Keempat, Perwujudan sistem kesehatan daerah yang tangguh dan responsif. Kelima, Perwujudan keluarga sehat dan tangguh terhadap penyakit. Keenam, Perwujudan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) dan penguatan karakter berbasis nilai religi dan budaya. Ketujuh, Perwujudan sekolah terbuka dan fasilitasi pendidikan keagamaan dan pesantren. Kedelapan, Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Kesembilan, Terwujudnya kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan. Kesepuluh, Terwujudnya kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter, serta literasi digital. Kesebelas, Perwujudan sistem perlindungan dan jaminan sosial yang adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan. Keduabelas, Perwujudan pemberdayaan dan peningkatan usaha bagi masyarakat berbasis sistem basis data terpadu yang terintegrasi.

Misi 2: Mewujudkan perekonomian yang tangguh dan berdaya saing

Pembangunan ekonomi Kota Tasikmalaya selama 20 (dua puluh) tahun ke depan akan menghadapi perubahan besar yang menuntut dilakukannya transformasi ekonomi, seperti halnya pembangunan ekonomi Jawa Barat. Beberapa perubahan tersebut adalah perubahan struktur penduduk, kemajuan teknologi, perubahan iklim, serta pergeseran geoekonomi dan geopolitik. Untuk mewujudkan perekonomian yang tangguh dan berdaya saing diperlukan arah kebijakan sebagai berikut:

Tahap 1: Penguatan Tata Kelola Sumber Daya Alam, Pembentukan SDM Tenaga Kerja yang Kompeten, serta Penciptaan dan Perluasan Lapangan Pekerjaan

Penguatan tatakelola sumber daya alam, pembentukan SDM tenaga kerja yang kompeten, serta penciptaan dan perluasan lapangan kerja meliputi: Pertama, Peningkatan kualitas dan optimalisasi sumber daya lokal untuk industri unggulan daerah. Kedua, Penguatan tata kelola perdagangan pada aspek sarana perdagangan, dukungan terhadap

produk unggulan serta perlindungan konsumen. Ketiga, Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik untuk mendukung tumbuhnya sektor industri pengolahan. Keempat, Pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil yang inklusif dan berbasis kerakyatan. Kelima, Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. Keenam, Pengembangan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan yang dapat diimplementasikan oleh petani baik dari aspek budidaya maupun pasca panen. Ketujuh, Penyediaan infrastruktur esensial yang terintegrasi bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian, kualitas serta daya saing produk pertanian. Kedelapan, Pembentukan, Penataan dan restrukturisasi BUMD. Kesembilan, Peningkatan kuantitas dan kualitas koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan serta adopsi teknologi tepat guna. Kesepuluh, Penataan dan penyiapan kelembagaan, pembiayaan koperasi bagi petani serta penguatan kolaborasi dengan market, bank, dan asuransi pertanian dan perikanan. Kesebelas, Penataan dan penguatan daya tarik wisata halal secara kolaboratif dan partisipatif. Keduabelas, Penyiapan, pemetaan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada usia produktif dan angkatan kerja terutama bagi masyarakat umum baik melalui *upskilling* maupun *reskilling*. Ketigabelas, Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan, teknologi, serta akses terhadap layanan keuangan dan permodalan. Keempatbelas, Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) daerah yang berdaya saing di tataran global. Kelimabelas, Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang mempertimbangkan *link and match* industri besar dengan IKM/UMKM. Keenambelas, Pengembangan industri pengolahan berbasis keunggulan daerah termasuk industri kriya dan ekonomi kreatif, serta industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan yang halal dan ramah lingkungan. Ketujuhbelas, Pemberian deregulasi dan kemudahan perizinan, akses ke *green/low-cost financing*, bantuan/ subsidi operasional dan ketenagakerjaan dan insentif fiskal/non fiskal lainnya terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan industri) serta sektor ekonomi hijau. Kedelapanbelas, Penyiapan infrastruktur industri pengolahan terpadu ramah lingkungan, industri kriya dan ekonomi kreatif, rintisan *green industry*. Kesembilanbelas, Penyediaan instrumen pengendali hama, obat dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis dalam aktivitas budidaya pertanian dan perikanan. Keduapuluh, Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan, teknologi, serta akses terhadap layanan keuangan dan permodalan. Keduapuluhsatu, Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. Keduapuluhdua, Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang mempertimbangkan *link and match* industri besar dengan IKM/UMKM. Keduapuluh tiga, Peningkatan kualitas dan optimalisasi sumber daya lokal untuk industri. Keduapuluh empat, Penguatan tata kelola perdagangan pada aspek sarana perdagangan, dukungan terhadap produk unggulan serta perlindungan konsumen. Keduapuluh lima, peningkatan industri

pengolahan terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan daerah termasuk industri kriya dan ekonomi kreatif, industri pengolahan pertanian dan perikanan. Keduapuluhenam, Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan; Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum di kawasan perkotaan; Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju *zero solid waste city* dan mendukung *circular economy* di kawasan perkotaan; Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid (green and grey infrastructure)* di kawasan perkotaan. Keduapuluh tujuh, Pengembangan kawasan strategis ekonomi perkotaan. Keduapuluh delapan, Pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah. Keduapuluh sembilan, Penataan dan pengembangan sistem kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah. Ketiga puluh, Peningkatan tata kelola sektor jasa dalam mendukung aktivitas perekonomian.

Tahap 2: Peningkatan Produktivitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Barang dan Jasa, serta Perluasan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru

Peningkatan produktivitas, kualitas dan daya saing produk barang dan jasa serta perluasan sumber pertumbuhan ekonomi baru meliputi: Pertama, Peningkatan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan. Kedua, Ekspansi pasar perdagangan dalam dan luar negeri. Ketiga, Peningkatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik untuk mendukung tumbuhnya sektor industri pengolahan. Keempat, Pengembangan ekonomi mikro dan kecil yang inklusif dan berbasis kerakyatan. Kelima, Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif, penerapan teknologi dan kemitraan usaha. Keenam, Penguatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan yang dapat diimplementasikan oleh petani baik dari aspek budidaya maupun pasca panen. Ketujuh, Penyediaan infrastruktur esensial terintegrasi bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian, kualitas dan daya saing produk pertanian. Kedelapan, Peningkatan produktivitas BUMD. Kesembilan, Peningkatan daya saing koperasi serta adopsi teknologi tepat guna dalam rangka mewujudkan modernisasi koperasi. Kesepuluh, Pengembangan *closed loop model* pertanian melalui penyiapan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian. Kesebelas, Pengembangan Pariwisata Halal dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan aspek 6A (*attraction, accessibility, amenity, ancillary service, activity, available packages*); Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha; Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif. Keduabelas, Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui *upskilling* maupun *reskilling* dan peningkatan akses terhadap kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja sesuai kebutuhan di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dan *green job*, pelayanan kesehatan dan pendidikan tenaga kerja bersertifikat. Ketigabelas, Pengembangan pusat-pusat inkubasi, pusat

kreatif, infrastruktur dasar dan digital serta perluasan akses terhadap layanan keuangan dan permodalan. Keempatbelas, Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI yang berdaya saing di tataran global; Penguatan riset terkait sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas peneliti, peningkatan pembiayaan dan penguatan kolaborasi riset sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat baik dalam maupun luar negeri. Kelimabelas, Percepatan investasi, diversifikasi sektor dan pemerataan lokasi investasi. Keenambelas, Peningkatan industri pengolahan terpadu berbasis keunggulan daerah yang bernilai tambah tinggi, halal dan ramah lingkungan. Ketujuhbelas, Akselerasi implementasi kemudahan perizinan, akses ke *green/low-cost financing* bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif bantuan/subsidi operasional dan ketenagakerjaan dan insentif fiskal/non fiskal lainnya. Kedelapanbelas, Penerapan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan ekonomi kreatif serta rintisan *green industry*. Kesembilanbelas, Percepatan pengembangan instrumen pengendali hama, obat dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis dalam aktivitas budidaya pertanian dan perikanan. Keduapuluh, Pengembangan pusat-pusat inkubasi, pusat kreatif, infrastruktur dasar dan digital serta perluasan akses terhadap layanan keuangan dan permodalan. Keduapuluh satu, Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif, penerapan teknologi dan kemitraan usaha. Keduapuluh dua, Percepatan investasi, diversifikasi sektor dan pemerataan lokasi investasi. Keduapuluh tiga, Peningkatan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan. Keduapuluh empat, Ekspansi pasar perdagangan dalam dan luar negeri. Keduapuluh lima, Pengembangan industri pengolahan terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan daerah termasuk industri kriya dan ekonomi kreatif, industri pengolahan pertanian dan perikanan. Keduapuluh enam, Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan. Keduapuluh tujuh, Akselerasi pengembangan kawasan strategis ekonomi perkotaan. Keduapuluh delapan, Peningkatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan. Keduapuluh sembilan, Percepatan dan perluasan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah. Ketigapuluh, Penguatan tata kelola sektor jasa dalam mendukung aktivitas perekonomian.

Tahap 3: Peningkatan sinergitas sektor investasi dan jasa serta perdagangan

Peningkatan sinergitas sektor investasi dan jasa serta perdagangan meliputi:

Pertama, Peningkatan diversifikasi produk dan bernilai tambah untuk ekspansi global. Kedua, Penguatan sistem jejaring perdagangan pada tingkat global. Ketiga, Pemantapan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik untuk mendukung tumbuhnya sektor industri pengolahan. Keempat, Pemantapan ekonomi mikro dan kecil yang inklusif dan berbasis kerakyatan. Kelima, Peningkatan dan pemantapan UMKM pada rantai nilai industri melalui skema-skema kerja sama regional maupun internasional. Keenam, Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui penyiapan modernisasi pertanian

dan implementasi teknologi pertanian. Ketujuh, Pemeliharaan infrastruktur esensial terintegrasi bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian, kualitas dan daya saing produk pertanian. Kedelapan, Pemantapan pengembangan bisnis BUMD yang berdaya saing. Kesembilan, Peningkatan keterkaitan koperasi pada rantai nilai pasok domestik dan global. Kesepuluh, Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian. Kesebelas, Pemantapan daya saing pariwisata halal dan berkelanjutan. Keduabelas, Pemantapan kualitas dan daya saing tenaga kerja bersertifikat. Ketigabelas, Pemantapan pusat-pusat inkubasi dan pusat kreatif. Keempatbelas, Perluasan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah untuk mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI yang berdaya saing di tataran global. Kelimabelas, Pemantapan integrasi ekonomi dan konektivitas global. Keenambelas, Pemantapan industri pengolahan bernilai tambah tinggi serta penguatan ekosistem ekonomi syariah dan industri halal. Ketujuhbelas, Optimalisasi kemudahan perizinan, akses ke *green/low-cost financing* bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif bantuan/subsidi operasional dan ketenagakerjaan dan insentif fiskal/non fiskal lainnya. Kedelapanbelas, Percepatan penerapan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan, industri kriya dan ekonomi kreatif, rintisan *green industry*. Kesembilanbelas, Perluasan pemanfaatan instrumen pengendali hama, obat dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis dalam aktivitas budidaya pertanian dan perikanan. Keduapuluh, pemantapan pusat-pusat inkubasi dan pusat kreatif. Keduapuluh satu, Peningkatan dan pemantapan UMKM pada rantai industri melalui skema-skema kerja sama regional maupun internasional. Keduapuluh dua, pemantapan integrasi ekonomi dan konektivitas global. Keduapuluh tiga, peningkatan diversifikasi produk dan bernilai tambah untuk ekspansi global. Keduapuluh empat, Penguatan sistem jejaring perdagangan pada tingkat global. Keduapuluh lima, Pemantapan industri pengolahan bernilai tambah tinggi serta penguatan ekosistem ekonomi syariah dan industri halal. Keduapuluh enam, Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan dan berketahanan. Keduapuluh tujuh, Pemantapan pengembangan kawasan strategis ekonomi perkotaan. Keduapuluh delapan, Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah. Keduapuluh sembilan, Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah. Ketigapuluh, Pemantapan sistem jejaring jasa pada tingkat global.

Tahap 4: Pembangunan ekonomi inklusif yang berkelanjutan

Pembangunan ekonomi inklusif yang berkelanjutan meliputi:

Pertama, Kota Tasikmalaya menjadi pilar utama Jawa Barat dengan produk berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing di tingkat global.

Kedua, Sistem perdagangan yang andal dan menjadikan Kota Tasikmalaya sebagai pusat perdagangan di Priangan Timur. Ketiga, Perwujudan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik untuk

mendukung tumbuhnya sektor industri pengolahan. Keempat, Perwujudan ekonomi mikro dan kecil yang inklusif dan berbasis kerakyatan. Kelima, Terwujudnya UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok global. Keenam, Perwujudan produktivitas pertanian yang berkelanjutan dan adaptif terhadap teknologi serta perubahan iklim untuk ketahanan pangan daerah. Ketujuh, Pemeliharaan infrastruktur esensial terintegrasi bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian, kualitas dan daya saing produk pertanian. Kedelapan, Optimalisasi BUMD yang berdaya saing. Kesembilan, Perwujudan koperasi sebagai soko guru ekonomi kerakyatan. Kesepuluh, Penerapan *closed loop* model pertanian. Kesebelas, Perwujudan Kota Tasikmalaya menjadi pusat pariwisata halal dan berkelanjutan. Keduabelas, Perwujudan tenaga kerja yang bersertifikat dan berdaya saing global. Ketiga belas, Perwujudan kewirausahaan yang berdaya saing. Keempat belas, Perwujudan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah untuk mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI yang berdaya saing di tataran global. Kelima belas, Perwujudan Kota Tasikmalaya sebagai pusat dan destinasi investasi di Wilayah Priangan Timur. Keenam belas, Perwujudan Kota Tasikmalaya menjadi pusat industri pengolahan yang berdaya saing, ramah lingkungan dan halal. Ketujuh belas, Perwujudan investasi yang efisien pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif serta sektor ekonomi hijau. Kedelapan belas, Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan. Kesembilan belas, Penerapan instrumen pengendali hama, obat dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis dalam aktivitas budidaya pertanian dan perikanan. Keduapuluh, Perwujudan kewirausahaan yang berdaya saing. Keduapuluh satu, Terwujudnya UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok global. Keduapuluh dua, Perwujudan Kota Tasikmalaya sebagai pusat dan destinasi investasi di Wilayah Priangan Timur. Keduapuluh tiga, Kota Tasikmalaya menjadi pilar utama Jawa Barat dengan produk berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing di tingkat global. Keduapuluh empat, Perwujudan sistem perdagangan yang andal dan menjadikan Tasikmalaya sebagai pusat perdagangan di Priangan Timur. Keduapuluh lima, Perwujudan Kota Tasikmalaya menjadi pusat industri pengolahan yang berdaya saing, ramah lingkungan dan halal. Keduapuluh enam, Perwujudan *city beautification* dalam rangka membangun citra, karakter dan *dignity* kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata *urban tourism*. Keduapuluh tujuh, Perwujudan kawasan strategis ekonomi perkotaan. Keduapuluh delapan, Penerapan pengelolaan kawasan perkotaan yang terintegrasi. Keduapuluh Sembilan, Penerapan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah. Ketigapuluh, Perwujudan tata kelola sektor jasa dalam mendukung aktivitas perekonomian.

Misi 3: Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan adaptif

Untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan adaptif, diperlukan arah kebijakan sebagai berikut:

Tahap 1: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan adaptif

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan adaptif, meliputi upaya: Pertama, Peningkatan pelayanan publik berbasis ekosistem digital dalam rangka perwujudan *smart city*. Kedua,

Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sektor pemerintahan. Ketiga, Penataan kelembagaan dan regulasi sistem riset dan inovasi daerah. Keempat, Peningkatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko. Kelima, Peningkatan tata kelola keuangan dan barang milik daerah yang transparan dan akuntabel. Keenam, Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah yang adaptif, sesuai dengan kebutuhan daerah, dan berintegritas dalam upaya pencegahan korupsi; Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, *reward and punishment*, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja. Ketujuh, Penataan dan peningkatan kualitas regulasi daerah.

Tahap 2: Peningkatan fungsi kelembagaan kolaboratif dan regulasi berbasis teknologi informasi

Peningkatan fungsi kelembagaan kolaboratif dan regulasi berbasis teknologi informasi, meliputi upaya: Pertama, Percepatan digitalisasi pelayanan publik dalam rangka perwujudan *smart city* dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat. Kedua, Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk penguatan aspek pemerintahan digital. Ketiga, Percepatan pengembangan dan penerapan riset dan inovasi daerah. Keempat, Penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko. Kelima, Penguatan tata kelola keuangan dan barang milik daerah yang transparan dan akuntabel. Keenam, Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas dari korupsi. Ketujuh, Peningkatan kualitas kelembagaan regulasi dan tata kelola pembentukan regulasi berbasis teknologi informasi.

Tahap 3: Penguatan tata kelola pemerintahan baik, bersih dan adaptif

Penguatan tata kelola pemerintahan baik, bersih dan adaptif, meliputi upaya: Pertama, Pemantapan digitalisasi pelayanan publik dalam rangka perwujudan *smart city* dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat. Kedua, Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital. Ketiga, Pemantapan pengembangan dan penerapan riset dan inovasi daerah. Keempat, Pemantapan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko. Kelima, Pemantapan tata kelola keuangan dan barang milik daerah yang transparan dan akuntabel. Keenam, Pemantapan tata kelola kelembagaan pemerintah daerah dan manajemen ASN yang inklusif, tepat fungsi, berbasis digital, dan berorientasi pada peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Ketujuh, Pemantapan kualitas kelembagaan regulasi dan tata kelola pembentukan regulasi berbasis teknologi informasi.

Tahap 4: Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan adaptif

Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan adaptif, meliputi upaya: Pertama, Perwujudan transformasi tata kelola dan pelayanan publik berbasis digital dalam rangka perwujudan *smart city*. Kedua, Perwujudan layanan publik yang berkualitas dan inklusif. Ketiga,

Perwujudan ekosistem riset dan inovasi daerah yang unggul dan berdaya saing. Keempat, Perwujudan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko. Kelima, Perwujudan tata kelola keuangan dan barang milik daerah yang transparan dan akuntabel. Keenam, Perwujudan tata kelola pemerintahan daerah berkelas dunia. Ketujuh, Perwujudan regulasi yang adaptif dan taat asas.

Misi 4: Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro

Untuk mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro, diperlukan arah kebijakan sebagai berikut:

Tahap 1: Penyelenggaraan transformasi kelembagaan dan tata kelola ideologi, politik, hukum dan keamanan daerah

Penyelenggaraan transformasi kelembagaan dan tata kelola ideologi, politik, hukum dan keamanan daerah meliputi: Pertama, Meningkatkan jaminan keadilan dan penegakan hukum secara demokratis dan berkualitas, serta keamanan daerah dan penguatan pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Kedua, Penguatan kelembagaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Ketiga, Penguatan pengendalian inflasi daerah. Keempat, Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah (pinjaman daerah, Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) Daerah, *Corporate Social Responsibility* (CSR), jasa ekosistem, perdagangan karbon dalam upaya menurunkan tingkat emisi karbon, ekonomi dan keuangan syariah, dan lain sebagainya), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan transfer ke daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. Kelima, Pengembangan pembiayaan inovatif termasuk KPBU dan *blended finance*. Keenam, Peningkatan kerja sama daerah, regional dan internasional.

Tahap 2: Penguatan implementasi kebijakan daerah untuk mewujudkan stabilitas daerah

Penguatan Implementasi Kebijakan daerah untuk mewujudkan stabilitas daerah meliputi : Pertama, Peningkatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta koordinasi kelembagaan sektor ideologi, politik, hukum dan keamanan daerah untuk menopang stabilitas ekonomi daerah. Kedua, Optimalisasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Ketiga, Penguatan pengendalian inflasi daerah. Keempat, Percepatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan pembiayaan alternatif dan kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan transfer ke daerah serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. Kelima, Percepatan pembiayaan inovatif termasuk KPBU dan *blended finance*. Keenam, Percepatan kerja sama daerah, regional dan internasional.

Tahap 3: Penguatan implementasi kebijakan daerah untuk mewujudkan stabilitas daerah

Penguatan kelembagaan dan pranata sosial yang bersih dan akuntabel untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban umum meliputi: Pertama, Pemantapan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta

koordinasi kelembagaan sektor ideologi, politik, hukum dan keamanan daerah untuk menopang stabilitas ekonomi daerah. Kedua, Pemantapan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Ketiga, Penguatan pengendalian inflasi daerah. Keempat, Pemantapan kapasitas fiskal daerah yang optimal/berkualitas, serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. Kelima, Pemantapan pembiayaan inovatif termasuk KPBU dan *blended finance*. Keenam, Penguatan kerja sama daerah, regional dan internasional.

Tahap 4: Penguatan implementasi kebijakan daerah untuk mewujudkan stabilitas daerah

Perwujudan supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan daerah meliputi: Pertama, Perwujudan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai Pancasila dan tujuan pembangunan nasional. Kedua, Perwujudan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Ketiga, Perwujudan sistem pengendalian inflasi daerah (produksi, distribusi, dan akses pangan). Keempat, Perwujudan kapasitas fiskal daerah yang optimal/berkualitas serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. Kelima, Perwujudan pembiayaan inovatif termasuk KPBU dan *blended finance*. Keenam, Perwujudan kerja sama daerah.

Misi 5: Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi

Tahap 1: Perlindungan kebudayaan lokal dan optimalisasi tata kelola perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup

Perlindungan kebudayaan lokal dan optimalisasi tata kelola perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup meliputi: Pertama, Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat berbasis religi dan jati diri bangsa, serta berasaskan kepada Pancasila. Kedua, Peningkatan komitmen seluruh lapisan masyarakat dalam membangun integritas, persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, Pemenuhan akses informasi, edukasi, sosialisasi, dan pelayanan ketahanan keluarga. Keempat, Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang dalam rangka pemenuhan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam Pembangunan; Pemberdayaan perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan dalam rangka pemenuhan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam Pembangunan; Penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kelima, Peningkatan pembinaan dan fasilitasi terhadap pemuda dan olahraga. Keenam, Pengendalian pencemaran dan kerusakan serta konservasi lingkungan hidup. Ketujuh, Implementasi Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Kedelapan, Peningkatan prasarana dalam penanganan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di rumah tangga. Kesembilan, Peningkatan pengelolaan sampah terpadu di hulu. Kesepuluh, Pemanfaatan dan pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dan penganekaragaman produksi pangan dalam rangka ketahanan pangan. Kesebelas, Pengelolaan susut dan sisa pangan dalam rangka ketahanan pangan. Kedua belas, peningkatan

infrastruktur jaringan irigasi meliputi pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kewenangan kota. Ketiga belas, Perencanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan skala kecil.

Keempat belas, Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. Kelima belas, Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.

Tahap 2: Penguatan karakter masyarakat berbasis religi, jati diri, dan toleransi, serta pemulihan dan perlindungan lingkungan hidup

Penguatan karakter masyarakat berbasis religi, jati diri, dan toleransi, serta pemulihan dan perlindungan lingkungan hidup meliputi : Pertama, Penguatan karakter masyarakat berbasis religi dan jati diri bangsa, kearifan lokal, nilai budaya, dan tradisi masyarakat. Kedua, Percepatan implementasi kebijakan yang tegas dan konkret dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal masyarakat. Keempat, Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan. Kelima, Penguatan pembinaan dan fasilitasi terhadap pemuda dan olah raga yang berdaya saing dan berprestasi. Keenam, Akselerasi pengendalian pencemaran dan kerusakan serta konservasi lingkungan hidup. Ketujuh, Perluasan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Kedelapan, Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga. Kesembilan, Percepatan pengelolaan sampah terpadu di hulu. Kesepuluh, Peningkatan produktivitas, kualitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan pangan. Kesebelas, Pengelolaan susut dan sisa pangan dalam rangka ketahanan pangan. Kedua belas, Akselerasi infrastruktur jaringan irigasi meliputi pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kewenangan kota. Ketiga belas, Akselerasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan skala kecil. Keempat belas, Percepatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. Kelima belas, Akselerasi pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kapasitas masyarakat, pendidikan aman bencana dan budaya tanggap bencana serta peningkatan sistem peringatan dini, mitigasi struktural dan non struktural.

Tahap 3: Pemajuan karakter masyarakat berbasis religi dan jati diri bangsa, pengarusutamaan gender, serta penguatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara konsisten

Pemajuan karakter masyarakat berbasis religi dan jati diri bangsa, pengarusutamaan gender, serta penguatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara konsisten meliputi: Pertama, Pelestarian kebudayaan lokal dan revitalisasi kearifan lokal, nilai budaya dan tradisi masyarakat. Kedua, Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan. Ketiga, Penguatan kualitas keluarga secara utuh dalam berbagai bidang. Keempat, Pemantapan pembangunan responsif gender. Kelima, penguatan pembinaan dan fasilitasi terhadap pemuda

dan olah raga yang berdaya saing dan berprestasi. Keenam, Pemantapan pengendalian pencemaran dan kerusakan serta konservasi lingkungan hidup. Ketujuh, Peningkatan kerjasama internasional untuk mengembangkan teknologi *clean energy* dan memperluas akses ke pasar global. Kedelapan, Penguatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga. Kesembilan, Pengintegrasian pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, serta pengembangan *instrument circular economy*. Kesepuluh, Penguatan akses, distribusi dan pemanfaatan pangan. Kesebelas, Pengendalian susut dan sisa pangan dalam rangka ketahanan pangan. Kedua belas, Pemantapan infrastruktur jaringan irigasi meliputi pemantapan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kewenangan kota. Ketiga belas, Pemantapan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan skala kecil. Keempat belas, Pemantapan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. Kelima belas, Pemantapan pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kapasitas masyarakat, pendidikan aman bencana dan budaya tanggap bencana serta peningkatan sistem peringatan dini, mitigasi struktural dan non struktural.

Tahap 4: Perwujudan masyarakat yang berbudaya, maju, dan peduli lingkungan untuk meningkatkan ketahanan sosial budaya dan ekologi

Perwujudan masyarakat yang berbudaya, maju, dan peduli lingkungan untuk meningkatkan ketahanan sosial budaya dan ekologi meliputi: Pertama, Pemajuan kebudayaan dan penguatan pengembangan diplomasi kebudayaan di kancah nasional. Kedua, Perwujudan stabilitas keamanan yang kondusif, mantap dan dinamis. Ketiga, Perwujudan kualitas keluarga yang bahagia, tentram, dan mandiri. Keempat, Perwujudan kesetaraan gender dan inklusi sosial. Kelima, Perwujudan generasi muda yang berkualitas dan berkarakter. Keenam, Perwujudan pengendalian pencemaran dan kerusakan serta konservasi lingkungan hidup. Ketujuh, Pengembangan industri hijau seperti industri kimia hijau (*green chemistry*), dan teknologi nano hijau (*green nanotechnology*), didukung dengan pengembangan energi terbarukan (*renewable energy*). Kedelapan, Pencapaian target nol persen praktik eliminasi Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga. Kesembilan, Perwujudan pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, serta integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*. Kesepuluh, Perwujudan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan. Kesebelas, Pengendalian susut dan sisa pangan dalam rangka ketahanan pangan. Kedua belas, Perwujudan infrastruktur jaringan irigasi meliputi peningkatan, akselerasi, dan pemantapan sistem jaringan irigasi kewenangan kota. Ketiga belas, Perwujudan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan skala kecil. Keempat belas, Perwujudan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. Kelima belas, Perwujudan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana.

Misi 6: Meningkatkan infrastruktur wilayah perkotaan yang berkualitas dan merata

Untuk meningkatkan infrastruktur wilayah perkotaan yang berkualitas dan merata diperlukan arah kebijakan sebagai berikut:

Tahap 1: Peningkatan pemerataan infrastruktur wilayah

Peningkatan pemerataan infrastruktur wilayah meliputi: Pertama, peningkatan konektivitas antar wilayah dengan memperhatikan RTRW Kota Tasikmalaya berupa: peningkatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan kewenangan kota; perencanaan pembangunan jalan kewenangan kota antara lain: (1) ruas jalan Kawasan Peruntukan Industri (KPI); (2) ruas jalan menuju kawasan wisata; (3) ruas jalan yang menghubungkan pusat lingkungan di Kecamatan Tamansari; (4) ruas jalan Noenoeng - Jalan Mashudi; (5) ruas jalan Akses Bandara; (6) ruas jalan yang menghubungkan pusat lingkungan di Kecamatan Bungursari; (7) peningkatan ruas jalan lingkaran luar wilayah selatan Kota Tasikmalaya; (8) ruas jalan lingkaran utara yang menghubungkan Jalan DR. Moch Hatta - Jalan Letjen Ibrahim Adjie - Jalan Brigjen Wasita Kusumah; serta mendukung realisasi rencana pembangunan Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap (GETACI). Kedua, peningkatan infrastruktur sumber daya air, meliputi pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kewenangan kota. Ketiga, penyediaan drainase perkotaan meliputi: perencanaan pembangunan drainase perkotaan, perencanaan pemeliharaan drainase perkotaan, perencanaan rehabilitasi drainase perkotaan. Keempat, peningkatan sarana dan prasarana transportasi publik meliputi perencanaan pengembangan jaringan angkutan penumpang dalam trayek, perencanaan pengembangan jaringan angkutan penumpang tidak dalam trayek, perencanaan pengembangan sarana angkutan masal, perencanaan pembangunan dan peningkatan sistem jaringan kereta api lintas Utara - Selatan antara Galunggung - Tasikmalaya, Peningkatan Pengembangan Bandar Udara Wiriadinata. Kelima, peningkatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi meliputi: peningkatan Sistem Jaringan telekomunikasi, peningkatan pengembangan Menara Komunikasi Bersama, peningkatan Survei audit Menara Telekomunikasi existing dan planning, peningkatan pengembangan data/informasi, peningkatan kualitas pelayanan informasi dan peningkatan teknologi komunikasi dan informasi.

Tahap 2: Akselerasi pemerataan infrastruktur wilayah

Akselerasi Pemerataan Infrastruktur Wilayah meliputi: Pertama, Akselerasi konektivitas antar wilayah berupa: peningkatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan kewenangan kota; pembangunan jalan kewenangan kota antara lain: (1) ruas jalan Kawasan Peruntukan Industri (KPI); (2) ruas jalan menuju kawasan wisata; (3) ruas jalan yang menghubungkan pusat lingkungan di Kecamatan Tamansari; akselerasi perencanaan pembangunan antara lain: (1) ruas jalan Noenoeng - Jalan Mashudi; (2) ruas jalan Akses Bandara; (3) ruas jalan yang menghubungkan pusat lingkungan di Kecamatan Bungursari; (4) peningkatan ruas jalan lingkaran luar wilayah selatan Kota Tasikmalaya; (5) ruas jalan lingkaran utara yang menghubungkan Jalan DR. Moch Hatta - Jalan Letjen Ibrahim Adjie - Jalan Brigjen Wasita Kusumah; serta mendorong realisasi rencana pembangunan Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap (GETACI). Kedua, Perlindungan sumber daya air meliputi akselerasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi

kewenangan kota. Ketiga, Akselerasi pembangunan drainase perkotaan meliputi: akselerasi pembangunan drainase perkotaan, akselerasi pemeliharaan drainase perkotaan, akselerasi rehabilitasi drainase perkotaan. Keempat, akselerasi pemenuhan sarana dan prasarana transportasi publik meliputi pengembangan jaringan angkutan penumpaan dalam trayek, pengembangan jaringan angkutan penumpang tidak dalam trayek, pengembangan sarana angkutan masal, pembangunan dan peningkatan sistem jaringan kereta api lintas Utara – Selatan antara Galunggung – Tasikmalaya, akselerasi peningkatan pemanfaatan Bandar Udara Wiriadinata. Kelima, akselerasi penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi meliputi: akselerasi Pengembangan Sistem Jaringan telekomunikasi, akselerasi Pengembangan Menara Komunikasi Bersama, akselerasi Survei audit Menara Telekomunikasi existing dan planning, akselerasi Pengembangan data/informasi, akselerasi peningkatan kualitas pelayanan informasi dan akselerasi teknologi komunikasi dan informasi.

Tahap 3: Pemantapan infrastruktur wilayah secara inklusif

Pemantapan infrastruktur wilayah secara inklusif meliputi: Pertama, Pemantapan pembangunan dan peningkatan ruas jalan meliputi: peningkatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan kewenangan kota; pembangunan jalan kewenangan kota antara lain: (1) ruas jalan Noenoeng - Jalan Mashudi; (2) ruas jalan Akses Bandara; (3) ruas jalan yang menghubungkan pusat lingkungan di Kecamatan Bungursari; pemantapan perencanaan pembangunan antara lain: (1) peningkatan ruas jalan lingkaran luar wilayah selatan Kota Tasikmalaya; (2) ruas jalan lingkaran utara yang menghubungkan Jalan DR. Moch Hatta – Jalan Letjen Ibrahim Adjie – Jalan Brigjen Wasita Kusumah. Kedua, pemantapan infrastruktur sumber daya meliputi pemantapan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kewenangan kota. Ketiga, pemantapan pembangunan drainase meliputi: pemantapan pembangunan drainase perkotaan, pemantapan pemeliharaan drainase perkotaan, pemanfaatan rehabilitasi drainase perkotaan. Keempat, pemantapan sarana dan prasarana transportasi publik meliputi pemantapan pengembangan jaringan angkutan penumpang dalam trayek, pemantapan pengembangan jaringan angkutan penumpang tidak dalam trayek, pemantapan pengembangan sarana angkutan masal, pemantapan pembangunan dan peningkatan sistem jaringan kereta api lintas Utara – Selatan antara Galunggung – Tasikmalaya, pemantapan Pengembangan Bandar Udara Wiriadinata. Kelima, pemantapan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi meliputi: pemantapan Pengembangan Sistem Jaringan telekomunikasi, pemantapan Pengembangan Menara Komunikasi Bersama, pemantapan Survei audit Menara Telekomunikasi existing dan planning, pemantapan Pengembangan data/informasi, pemantapan kualitas pelayanan informasi, pemantapan teknologi komunikasi dan informasi.

Tahap 4: Perwujudan infrastruktur wilayah secara merata dan inklusif

Perwujudan infrastruktur wilayah secara merata dan inklusif meliputi: Pertama, Perwujudan pembangunan dan peningkatan ruas jalan diantaranya: peningkatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan kewenangan kota; pembangunan jalan kewenangan kota antara lain: (1) peningkatan ruas jalan lingkaran luar wilayah selatan Kota Tasikmalaya; (2) ruas jalan lingkaran utara yang menghubungkan Jalan DR. Moch Hatta

– Jalan Letjen Ibrahim Adjie – Jalan Brigjen Wasita Kusumah. Kedua, Perwujudan infrastruktur jaringan irigasi meliputi peningkatan, akselerasi, dan pemantapan sistem irigasi kewenangan kota. Ketiga, perwujudan pembangunan drainase perkotaan meliputi: perwujudan pembangunan drainase perkotaan, perwujudan pemeliharaan drainase perkotaan, perwujudan rehabilitasi drainase perkotaan. Keempat, Perwujudan sarana dan prasarana transportasi publik meliputi perwujudan pengembangan jaringan angkutan penumpang dalam trayek, perwujudan pengembangan jaringan angkutan penumpang tidak dalam trayek, perwujudan pengembangan sarana angkutan masal, Perwujudan pembangunan dan peningkatan sistem jaringan kereta api lintas Utara – Selatan antara Galunggung – Tasikmalaya, Perwujudan Pengembangan Bandar Udara Wiriadinata. Kelima, Perwujudan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi meliputi: Perwujudan Sistem Jaringan telekomunikasi, Perwujudan Menara Komunikasi Bersama, Perwujudan Survei audit Menara Telekomunikasi, Perwujudan data/informasi, Perwujudan kualitas pelayanan informasi, Perwujudan teknologi komunikasi dan informasi.

Misi 7: Meningkatkan Sarana dan Prasarana permukiman yang berkualitas dan inklusif

Untuk Meningkatkan Sarana dan Prasarana permukiman yang berkualitas dan inklusif diperlukan arah kebijakan sebagai berikut:

Tahap 1: Penyediaan sarana dan prasarana permukiman secara merata

Penyediaan sarana dan prasarana permukiman secara merata meliputi: Pertama, Penyediaan prasarana air minum meliputi: Pembangunan SPAM Perkotaan, Pembangunan Perlindungan dan Pemanfaatan Mata Air. Kedua, Penyediaan prasarana air limbah meliputi: Perencanaan Pembangunan SPAL Terpusat, Perencanaan Pembangunan SPAL Setempat, Perencanaan Pembangunan SPALD-T Skala Permukiman, Perencanaan Pembangunan Perluasan IPLT, Perencanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT, Perencanaan Penyediaan Sarana Pengangkut Lumpur Tinja, Perencanaan Pengelolaan Air Limbah Terjadwal. Ketiga, Transformasi pengelolaan persampahan meliputi: Perencanaan Penyusunan regulasi pengelolaan persampahan, Perencanaan Penyediaan sarana pengurangan persampahan, Perencanaan penyediaan sarana pengumpulan sampah, perencanaan pembangunan prasarana persampahan. Keempat, Pembangunan perumahan dan permukiman yang terjangkau masyarakat meliputi: Perencanaan pembangunan rumah susun, Perencanaan penyusunan regulasi perumahan, Perencanaan penyusunan regulasi Pengelolaan Sarana Prasarana Utilitas, Perencanaan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Tahap 2: Akselerasi penyediaan sarana dan prasarana permukiman

Akselerasi penyediaan sarana dan prasarana permukiman meliputi: Pertama, Akselerasi Pemenuhan Prasarana Air Minum meliputi: Akselerasi Pembangunan SPAM Perkotaan, Akselerasi Pembangunan Perlindungan dan Pemanfaatan Mata Air. Kedua, Akselerasi pemenuhan Prasarana Air Limbah meliputi: Akselerasi Pembangunan SPAL Terpusat, Akselerasi Pembangunan SPAL Setempat, Akselerasi Pembangunan SPALD-T Skala Permukiman, Akselerasi Pembangunan

Perluasan IPLT, Akselerasi Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT, Akselerasi Penyediaan Sarana Pengangkut Lumpur Tinja, Akselerasi Pengelolaan Air Limbah Terjadwal. Ketiga, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan meliputi: Akselerasi Penyusunan regulasi pengelolaan persampahan, Akselerasi Penyediaan sarana pengurangan persampahan, Akselerasi penyediaan sarana pengumpulan sampah, Akselerasi pembangunan prasarana persampahan. Keempat, Akselerasi pembangunan perumahan dan permukiman yang aman dan ramah lingkungan.

Tahap 3: Pemantapan sarana dan prasarana permukiman

Pemantapan sarana dan prasarana permukiman, meliputi: Pertama, Pemantapan prasarana air minum melalui: Pemantapan SPAM Perkotaan, Pemantapan SPAM Perkotaan, Pemantapan Pembangunan Perencanaan Perlindungan dan Pemanfaatan Mata Air. Kedua, Pemantapan prasarana air limbah meliputi: Pemantapan Pembangunan SPAL Terpusat, Pemantapan Pembangunan SPAL Setempat, Pemantapan Pembangunan SPALD-T Skala Permukiman, Pemantapan Pembangunan Perluasan IPLT, Pemantapan Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT, Pemantapan Penyediaan Sarana Pengangkut Lumpur Tinja, Pemantapan Pengelolaan Air Limbah Terjadwal. Ketiga, Pemantapan kualitas dan kuantitas prasarana pengelolaan persampahan meliputi: Pemantapan regulasi pengelolaan persampahan, Pemantapan Penyediaan sarana pengurangan persampahan, Pemantapan penyediaan sarana pengumpulan sampah, Pemantapan pembangunan Prasarana Persampahan. Keempat, Pemantapan pembangunan perumahan dan permukiman meliputi: Pemantapan pembangunan rumah susun, Pemantapan penyusunan regulasi perumahan, Pemantapan penyusunan regulasi Pengelolaan Sarana Prasarana Utilitas, Pemantapan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Tahap 4: Perwujudan sarana dan prasarana permukiman yang berkualitas

Perwujudan sarana dan prasarana permukiman yang berkualitas meliputi: Pertama, Perwujudan penyediaan prasarana air minum melalui: Perwujudan SPAM Perkotaan, Pembangunan Perlindungan dan Pemanfaatan Mata Air. Kedua, Perwujudan penyediaan prasarana air limbah meliputi: Perwujudan Pembangunan SPAL Terpusat, Perwujudan Pembangunan SPAL Setempat, Perwujudan Pembangunan SPALD-T Skala Permukiman, Perwujudan Pembangunan Perluasan IPLT, Perwujudan Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT, Perwujudan Penyediaan Sarana Pengangkut Lumpur Tinja, Perwujudan Pengelolaan Air Limbah Terjadwal. Ketiga, *Zero waste production* melalui: Perwujudan regulasi pengelolaan persampahan, Perwujudan Penyediaan sarana pengurangan persampahan, Perwujudan penyediaan sarana pengumpulan sampah, Perwujudan pembangunan Prasarana Persampahan. Keempat, Perwujudan rumah layak huni, aman, ramah lingkungan dan terjangkau oleh masyarakat meliputi: Perwujudan pembangunan rumah susun, Perwujudan regulasi perumahan, Perwujudan regulasi Pengelolaan Sarana Prasarana Utilitas, Perwujudan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Misi 8: Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

Untuk Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan diperlukan arah kebijakan sebagai berikut:

Tahap 1: Ketahanan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan

Ketahanan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan, meliputi: Pertama, Percepatan penyusunan panduan dan rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR); Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis. Kedua, Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim. Ketiga, Sinkronisasi substansi dokumen perencanaan pusat, provinsi Jawa Barat dan Kota Tasikmalaya.

Tahap 2: Peningkatan ketahanan sosial, ekonomi lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan

Peningkatan ketahanan sosial, ekonomi lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan, meliputi: Pertama, Akselerasi pengendalian pemanfaatan ruang dan struktur ruang. Kedua, Akselerasi penerapan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim. Ketiga, Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan Pusat, Provinsi Jawa Barat dan Kota Tasikmalaya.

Tahap 3: Pemantapan ketahanan sosial, ekonomi lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan

Pemantapan ketahanan sosial, ekonomi lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan, meliputi: Pertama, Optimalisasi pemanfaatan ruang dan struktur ruang. Kedua, Optimalisasi standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim. Ketiga, Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan Pusat, Provinsi Jawa Barat dan Kota Tasikmalaya.

Tahap 4: Perwujudan ketahanan sosial, ekonomi lingkungan dan tata kelola pemerintahan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan

Perwujudan ketahanan sosial, ekonomi lingkungan dan tata kelola pemerintahan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, meliputi: Pertama, Perwujudan Tata Ruang Wilayah yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing. Kedua, Perwujudan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim. Ketiga, Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan Pusat, Provinsi Jawa Barat dan Kota Tasikmalaya.

Adapun rincian arah kebijakan pembangunan Kota Tasikmalaya untuk dua puluh tahun mendatang, sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 5.1 Arah Kebijakan RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2045

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029) Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Pemantapan	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan
KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN	1. Mengembangkan SDM yang religius, berkualitas dan berkarakter	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan	Akselerasi kesehatan masyarakat dengan penerapan upaya promotif-preventif dan pemberdayaan masyarakat melalui pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat, kesehatan ibu dan anak, serta kesehatan lingkungan	Pemantapan kesehatan masyarakat dengan penerapan upaya promotif-preventif dan pemberdayaan masyarakat melalui pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat, kesehatan ibu dan anak, serta kesehatan lingkungan	Perwujudan masyarakat yang sehat dan mandiri
		Penyiapan dan peningkatan penuntasan <i>stunting</i> dan pencegahan <i>stunting</i>	<u>Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting</u>	Pemantapan gizi ibu hamil dan anak balita	Perwujudan Keluarga Sehat dan Sadar Gizi
		<u>Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan</u>	Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan, keamanan dan ketahanan kesehatan termasuk pengembangan ekosistem halal	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan
		<u>Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan</u>	Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan pemerataan tenaga medis serta pemerataan tenaga kesehatan	Penguatan sistem kesehatan daerah	Perwujudan sistem kesehatan daerah yang tangguh dan responsif
		Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya	Akselerasi pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya	Percepatan eliminasi penyakit menular, tidak menular dan penyakit tropis yang terabaikan	Perwujudan keluarga sehat dan tangguh terhadap penyakit

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029) Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Pemantapan	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan
		<u>Peningkatkan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) dan penguatan karakter berbasis nilai religi dan budaya</u>	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) dan penguatan karakter berbasis nilai religi dan budaya	Pemantapan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) dan penguatan karakter berbasis nilai religi dan budaya	Perwujudan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) dan penguatan karakter berbasis nilai religi dan budaya
		<u>Penguatan sekolah terbuka dan fasilitasi pendidikan keagamaan dan pesantren</u>	Akselerasi sekolah terbuka dan fasilitasi pendidikan keagamaan dan pesantren	Pemantapan sekolah terbuka dan fasilitasi pendidikan keagamaan dan pesantren	Perwujudan sekolah terbuka dan fasilitasi pendidikan keagamaan dan pesantren
		Peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang memenuhi standar serta didukung oleh sarana prasarana yang memadai	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang memenuhi standar serta didukung oleh sarana prasarana yang memadai	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang memenuhi standar dan aman bencana	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan
		Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	<u>Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan</u>	Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.	Terwujudnya kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan
		Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter, serta literasi digital	Percepatan implementasi kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter, serta literasi digital	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter, serta literasi digital	Terwujudnya kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter, serta literasi digital

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029) Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Pemantapan	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan
		Peningkatan penyediaan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat berbasis sistem basis data terpadu yang terintegrasi pada bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, perumahan dan sanitasi terutama bagi kelompok marjinal dan rentan	<u>Penguatan penyediaan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat berbasis sistem basis data terpadu yang terintegrasi pada bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, perumahan dan sanitasi terutama bagi kelompok marjinal dan rentan</u>	Percepatan sistem perlindungan dan jaminan sosial yang adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan	Perwujudan sistem perlindungan dan jaminan sosial yang adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan
		Pemberdayaan dan peningkatan usaha bagi masyarakat berbasis sistem basis data terpadu yang terintegrasi	Penguatan pemberdayaan dan peningkatan usaha bagi masyarakat berbasis sistem basis data terpadu yang terintegrasi	Percepatan pemberdayaan dan peningkatan usaha bagi masyarakat berbasis sistem basis data terpadu yang terintegrasi	Perwujudan pemberdayaan dan peningkatan usaha bagi masyarakat berbasis sistem basis data terpadu yang terintegrasi
	2. Mewujudkan perekonomian yang inklusif, tangguh dan berdaya saing	Peningkatan kualitas dan optimalisasi sumber daya lokal untuk industri unggulan daerah	Peningkatan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	Peningkatan diversifikasi produk dan bernilai tambah untuk ekspansi global	Kota Tasikmalaya menjadi pilar utama Jawa Barat dengan produk berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing di tingkat global
		Penguatan tata kelola perdagangan pada aspek sarana perdagangan, dukungan terhadap produk unggulan serta perlindungan konsumen	Ekspansi pasar perdagangan dalam dan luar negeri	Penguatan sistem jejaring perdagangan pada tingkat global	Sistem perdagangan yang andal dan menjadikan Kota Tasikmalaya sebagai pusat perdagangan di Priangan Timur
		Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik untuk mendukung tumbuhnya sektor industri pengolahan	Peningkatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik untuk mendukung tumbuhnya sektor industri pengolahan	Pemantapan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik untuk mendukung tumbuhnya sektor industri pengolahan	Perwujudan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik untuk mendukung tumbuhnya sektor industri pengolahan

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029) Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Pemantapan	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan
		Pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil yang inklusif dan berbasis kerakyatan	Pengembangan ekonomi mikro dan kecil yang inklusif dan berbasis kerakyatan	Pemantapan ekonomi mikro dan kecil yang inklusif dan berbasis kerakyatan	Perwujudan ekonomi mikro dan kecil yang inklusif dan berbasis kerakyatan
		Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital, disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif, penerapan teknologi dan kemitraan usaha	Peningkatan dan pemantapan rantai nilai melalui skema-skema kerja sama regional maupun internasional	Terwujudnya UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok global
		Pengembangan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan yang dapat diimplementasikan oleh petani, baik dari aspek budidaya maupun pasca panen	Penguatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan yang dapat diimplementasikan oleh petani, baik dari aspek budidaya maupun pasca panen	Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui penyiapan modernisasi pertanian dan implementasi teknologi pertanian	Perwujudan produktivitas pertanian yang berkelanjutan dan adaptif terhadap teknologi serta perubahan iklim untuk ketahanan pangan daerah
		Penyediaan infrastruktur esensial yang terintegrasi bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian, kualitas serta daya saing produk pertanian	Penyediaan infrastruktur esensial terintegrasi bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian, kualitas dan daya saing produk pertanian	Pemeliharaan infrastruktur esensial terintegrasi bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian, kualitas dan daya saing produk pertanian	Pemeliharaan infrastruktur esensial terintegrasi bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian, kualitas dan daya saing produk pertanian
		Pembentukan, penataan dan restrukturisasi BUMD	Peningkatan produktivitas BUMD	Pemantapan pengembangan bisnis BUMD yang berdaya saing	Optimalisasi BUMD yang berdaya saing

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029) Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Pemantapan	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan
		<u>Peningkatan kuantitas dan kualitas koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan serta adopsi teknologi tepat guna</u>	Peningkatan daya saing koperasi serta adopsi teknologi tepat guna dalam rangka mewujudkan modernisasi koperasi	Peningkatan keterkaitan koperasi pada rantai nilai pasok domestik dan global	Perwujudan koperasi sebagai soko guru ekonomi kerakyatan
		Penataan dan penyiapan kelembagaan, pembiayaan koperasi bagi petani serta penguatan kolaborasi dengan market, bank, dan asuransi pertanian dan perikanan	Pengembangan <i>closed loop</i> model pertanian melalui penyiapan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian	Penerapan <i>closed loop</i> model pertanian
		Penataan dan penguatan daya tarik wisata halal secara kolaboratif dan partisipatif	Pengembangan pariwisata halal dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan aspek 6A (<i>attraction, accessibility, amenity, ancillary service, activity, available packages</i>) Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif	Pemantapan daya saing pariwisata halal dan berkelanjutan	Perwujudan Kota Tasikmalaya menjadi pusat pariwisata halal dan berkelanjutan

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029) Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Pemantapan	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan
		Penyiapan, pemetaan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada usia produktif dan angkatan kerja, terutama bagi masyarakat umum, baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i>	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum, baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i> dan peningkatan akses terhadap kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja sesuai kebutuhan di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dan <i>green job</i> , pelayanan kesehatan dan pendidikan tenaga kerja bersertifikat	Pemantapan kualitas dan daya saing tenaga kerja bersertifikat	Perwujudan tenaga kerja yang bersertifikat dan berdaya saing global
		Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan, teknologi, serta akses terhadap layanan keuangan dan permodalan	Pengembangan pusat-pusat inkubasi, pusat kreatif, infrastruktur dasar dan digital serta perluasan akses terhadap layanan keuangan dan permodalan	Pemantapan pusat-pusat inkubasi dan pusat kreatif	Perwujudan kewirausahaan yang berdaya saing
		Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI daerah yang berdaya saing di tataran global	<u>Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI yang berdaya saing di tataran global.</u> Penguatan riset terkait sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas peneliti, peningkatan pembiayaan dan penguatan kolaborasi	Perluasan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah untuk mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI yang berdaya saing di tataran global	Perwujudan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah untuk mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI yang berdaya saing di tataran global

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029) Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Pemantapan	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan
			riset sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat baik dalam maupun luar negeri		
		Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang mempertimbangkan <i>link and match</i> industri besar dengan IKM/UMKM	Percepatan investasi, diversifikasi sektor dan pemerataan lokasi investasi	Pemantapan integrasi ekonomi dan konektivitas global	Perwujudan Kota Tasikmalaya sebagai pusat dan destinasi investasi di Wilayah Priangan Timur
		Pengembangan industri pengolahan berbasis keunggulan daerah termasuk industri kriya dan ekonomi kreatif, serta industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan yang halal dan ramah lingkungan	Peningkatan industri pengolahan terpadu berbasis keunggulan daerah yang bernilai tambah tinggi, halal dan ramah lingkungan	Pemantapan industri pengolahan bernilai tambah tinggi serta penguatan ekosistem ekonomi syariah dan industri halal	Perwujudan Kota Tasikmalaya menjadi pusat industri pengolahan yang berdaya saing, ramah lingkungan dan halal
		Pemberian deregulasi dan kemudahan perizinan, akses ke <i>green/low-cost financing</i> , bantuan/subsidi operasional dan ketenagakerjaan dan insentif fiskal/non fiskal lainnya terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan industri) serta sektor ekonomi hijau	Akselerasi implementasi kemudahan perizinan, akses ke <i>green/low-cost financing</i> bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif bantuan/subsidi operasional dan ketenagakerjaan dan insentif fiskal/non fiskal lainnya	Optimalisasi kemudahan perizinan, akses ke <i>green/low-cost financing</i> bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif bantuan/subsidi operasional dan ketenagakerjaan dan insentif fiskal/non fiskal lainnya	Perwujudan investasi yang efisien pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif serta sektor ekonomi hijau

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029) Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Pemantapan	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan
		Penyiapan infrastruktur industri pengolahan terpadu ramah lingkungan, industri kriya dan ekonomi kreatif serta rintisan <i>green industry</i>	Penerapan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan ekonomi kreatif serta rintisan <i>green Industry</i>	Percepatan penerapan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan, industri kriya dan ekonomi kreatif serta rintisan <i>green industry</i>	Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan
		Penyediaan instrumen pengendali hama, obat dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis dalam aktivitas budidaya pertanian dan perikanan	Percepatan pengembangan instrumen pengendali hama, obat dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis dalam aktivitas budidaya pertanian dan perikanan	Perluasan pemanfaatan instrumen pengendali hama, obat dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis dalam aktivitas budidaya pertanian dan perikanan	Penerapan instrumen pengendali hama, obat dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis dalam aktivitas budidaya pertanian dan perikanan
		Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan, teknologi, serta akses terhadap layanan keuangan dan permodalan	Pengembangan pusat-pusat inkubasi, pusat kreatif, infrastruktur dasar dan digital serta perluasan akses terhadap layanan keuangan dan permodalan	Pemantapan pusat-pusat inkubasi dan pusat kreatif	Perwujudan kewirausahaan yang berdaya saing
		<u>Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis</u>	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif, penerapan teknologi dan kemitraan usaha	Peningkatan dan pemantapan rantai nilai melalui skema-skema kerja sama regional maupun internasional	Terwujudnya UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok global
		Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang mempertimbangkan <i>link and match</i> industri besar dengan IKM/UMKM	Percepatan investasi, diversifikasi sektor dan pemerataan lokasi investasi	Pemantapan integrasi ekonomi dan konektivitas global	Perwujudan Kota Tasikmalaya sebagai pusat dan destinasi investasi di Wilayah Priangan Timur

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029) Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Pemantapan	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan
		Peningkatan kualitas dan optimalisasi sumber daya lokal untuk industri	Peningkatan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	Peningkatan diversifikasi produk dan bernilai tambah untuk ekspansi global	Kota Tasikmalaya menjadi pilar utama Jawa Barat dengan produk berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing di tingkat global
		Penguatan tata kelola perdagangan pada aspek sarana perdagangan, dukungan terhadap produk unggulan serta perlindungan konsumen	Ekspansi pasar perdagangan dalam dan luar negeri	Penguatan sistem jejaring perdagangan pada tingkat global	Sistem perdagangan yang andal dan menjadikan Tasikmalaya sebagai pusat perdagangan di Priangan Timur
		Peningkatan industri pengolahan terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan daerah termasuk industri kriya dan ekonomi kreatif, industri pengolahan pertanian dan perikanan	Pengembangan industri pengolahan terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan daerah termasuk industri kriya dan ekonomi kreatif, industri pengolahan pertanian dan perikanan	Pemantapan industri pengolahan bernilai tambah tinggi serta penguatan ekosistem ekonomi syariah dan industri halal	Perwujudan Kota Tasikmalaya menjadi pusat industri pengolahan yang berdaya saing, ramah lingkungan dan halal
		Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum di kawasan perkotaan Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> di kawasan perkotaan	Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan dan berketahanan	Perwujudan <i>city beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter dan <i>dignity</i> kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata <i>urban tourism</i>

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029) Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Pemantapan	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan
		Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan <i>hybrid (green and grey infrastructure)</i> di kawasan perkotaan			
		Pengembangan kawasan strategis ekonomi perkotaan	Akselerasi pengembangan kawasan strategis ekonomi perkotaan	Pemantapan pengembangan kawasan strategis ekonomi perkotaan	Perwujudan kawasan strategis ekonomi perkotaan
		Pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah	Peningkatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan	Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan melalui Pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah	Penerapan pengelolaan kawasan perkotaan yang terintegrasi
		Penataan dan pengembangan sistem kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah	Percepatan dan perluasan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah	Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah	Penerapan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah
		Peningkatan tata kelola sektor jasa dalam mendukung aktivitas perekonomian	Penguatan tata kelola sektor jasa dalam mendukung aktivitas perekonomian	Pemantapan tata kelola sektor jasa dalam mendukung aktivitas perekonomian	Perwujudan tata kelola sektor jasa dalam mendukung aktivitas perekonomian

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029) Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Pemantapan	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan
	3. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan adaptif	Peningkatan pelayanan publik berbasis ekosistem digital	Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat	Pemantapan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat	Perwujudan transformasi tata kelola dan pelayanan publik berbasis digital
		Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sektor pemerintahan	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital	Perwujudan layanan publik yang berkualitas dan inklusif
		Penataan kelembagaan dan regulasi sistem riset dan inovasi daerah	Percepatan pengembangan dan penerapan riset dan inovasi daerah	Pemantapan pengembangan dan penerapan riset dan inovasi daerah	Perwujudan ekosistem riset dan inovasi daerah yang unggul dan berdaya saing
		Peningkatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko	Penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko	Pemantapan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko	Perwujudan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko
		Peningkatan tata kelola keuangan dan barang milik daerah yang transparan dan akuntabel	Penguatan tata kelola keuangan dan barang milik daerah yang transparan dan akuntabel	Pemantapan tata kelola keuangan dan barang milik daerah yang transparan dan akuntabel	Perwujudan tata kelola keuangan dan barang milik daerah yang transparan dan akuntabel
		<u>Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah yang adaptif, sesuai dengan kebutuhan daerah dan berintegritas dalam upaya pencegahan korupsi</u>	Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional dan bebas dari korupsi	Pemantapan tata kelola kelembagaan pemerintah daerah dan manajemen ASN yang inklusif, tepat fungsi, berbasis digital, dan berorientasi pada peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat	Perwujudan tata kelola pemerintahan daerah berkelas dunia
		Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta,			

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029) Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Pemantapan	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan
		<i>reward and punishment</i> , termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja			
		Penataan dan peningkatan kualitas regulasi daerah	Peningkatan kualitas kelembagaan regulasi dan tata kelola pembentukan regulasi berbasis teknologi informasi	Pemantapan kualitas kelembagaan regulasi dan tata kelola pembentukan regulasi berbasis teknologi informasi	Perwujudan regulasi yang adaptif dan taat azas
	4. Mewujudkan Keamanan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Meningkatnya jaminan keadilan dan penegakan hukum secara demokratis dan berkualitas, serta keamanan daerah dan penguatan pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	<u>Peningkatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta koordinasi kelembagaan sektor ideologi, politik, hukum dan keamanan daerah untuk menopang stabilitas ekonomi daerah</u>	Pemantapan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta koordinasi kelembagaan sektor ideologi, politik, hukum dan keamanan daerah untuk menopang stabilitas ekonomi daerah	Perwujudan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai Pancasila dan tujuan pembangunan nasional
		Penguatan kelembagaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Optimalisasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Pemantapan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Perwujudan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
		Penguatan pengendalian inflasi daerah	Penguatan pengendalian inflasi daerah	Penguatan pengendalian inflasi daerah	Perwujudan sistem pengendalian inflasi daerah (produksi, distribusi, dan akses pangan)
		Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah (pinjaman daerah, Kerja sama Pemerintah Badan Usaha	<u>Percepatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah (pinjaman daerah, Kerja sama Pemerintah</u>	Pemantapan kapasitas fiskal daerah yang optimal/berkualitas, serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional	Perwujudan kapasitas fiskal daerah yang optimal/berkualitas serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029) Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Pemantapan	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan
		(KPBU) Daerah, <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR), jasa ekosistem, perdagangan karbon dalam upaya menurunkan tingkat emisi karbon, ekonomi dan keuangan syariah, dan lain sebagainya), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan transfer ke daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional	<u>Badan Usaha (KPBU) Daerah, Corporate Social Responsibility (CSR), jasa ekosistem, perdagangan karbon dalam upaya menurunkan tingkat emisi karbon, ekonomi dan keuangan syariah, dan lain sebagainya), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan transfer ke daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional</u>		
		Pengembangan pembiayaan inovatif termasuk KPBU dan <i>blended finance</i>	Percepatan pembiayaan inovatif termasuk KPBU dan <i>blended finance</i>	Pemantapan pembiayaan inovatif termasuk KPBU dan <i>blended finance</i>	Perwujudan pembiayaan inovatif termasuk KPBU dan <i>blended finance</i>
		Peningkatan kerja sama daerah, regional dan internasional	Percepatan kerja sama daerah, regional dan internasional	Penguatan kerja sama daerah, regional dan internasional	Perwujudan kerja sama daerah
	5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi	<u>Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat berbasis religi dan jati diri bangsa, serta berasaskan kepada Pancasila</u>	Penguatan karakter masyarakat berbasis religi dan jati diri bangsa, kearifan lokal, nilai budaya, dan tradisi masyarakat	Pelestarian kebudayaan lokal dan revitalisasi kearifan lokal, nilai budaya dan tradisi masyarakat	Pemajuan kebudayaan dan penguatan pengembangan diplomasi kebudayaan di kancah nasional
		Peningkatan komitmen seluruh lapisan masyarakat dalam membangun integritas, persatuan dan kesatuan bangsa	Percepatan implementasi kebijakan yang tegas dan konkret dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	Perwujudan stabilitas keamanan yang kondusif, mantap dan dinamis

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029) Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Pemantapan	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan
		Pemenuhan akses informasi, edukasi, sosialisasi, dan pelayanan ketahanan keluarga	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal masyarakat	Penguatan kualitas keluarga secara utuh dalam berbagai bidang	Perwujudan kualitas keluarga yang bahagia, tentram, dan mandiri
		Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang dalam rangka pemenuhan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan	Pemantapan pembangunan responsif gender	Perwujudan kesetaraan gender dan inklusi sosial
		Pemberdayaan perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan dalam rangka pemenuhan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan			
		Penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak			

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029) Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Pemantapan	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan
		Peningkatan pembinaan dan fasilitasi terhadap pemuda dan olahraga	Penguatan pembinaan dan fasilitasi terhadap pemuda dan olahraga yang berdaya saing dan berprestasi	Penguatan pembinaan dan fasilitasi terhadap pemuda dan olahraga yang berdaya saing dan berprestasi	Perwujudan generasi muda yang berkualitas dan berkarakter
		Pengendalian pencemaran dan kerusakan serta konservasi lingkungan hidup	Akselerasi pengendalian pencemaran dan kerusakan serta konservasi lingkungan hidup	Pemantapan pengendalian pencemaran dan kerusakan serta konservasi lingkungan hidup	Perwujudan pengendalian pencemaran dan kerusakan serta konservasi lingkungan hidup
		Implementasi Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim	Perluasan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim	Peningkatan kerjasama internasional untuk mengembangkan teknologi <i>clean energy</i> dan memperluas akses ke pasar global	<u>Pengembangan industri hijau seperti industri kimia hijau (green chemistry), dan teknologi nano hijau (green nanotechnology), didukung dengan pengembangan energi terbarukan (renewable energy)</u>
		Peningkatan prasarana dalam penanganan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di rumah tangga	Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga	Penguatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga	Pencapaian target nol persen praktik eliminasi Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga
		Peningkatan pengelolaan sampah terpadu di hulu	Percepatan pengelolaan sampah terpadu di hulu	<u>Pengintegrasian pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, serta pengembangan instrumen circular economy</u>	Perwujudan pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, serta integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>
		Pemanfaatan dan pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dan penganekaragaman	<u>Peningkatan produktivitas, kualitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya</u>	Penguatan akses, distribusi dan pemanfaatan pangan	Perwujudan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029) Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Pemantapan	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan
		produksi pangan dalam rangka ketahanan pangan	<u>penguatan ketahanan pangan</u>		
		Pengelolaan susut dan sisa pangan dalam rangka ketahanan pangan	Pengelolaan susut dan sisa pangan dalam rangka ketahanan pangan	Pengendalian susut dan sisa pangan dalam rangka ketahanan pangan	Pengendalian susut dan sisa pangan dalam rangka ketahanan pangan
		Peningkatan infrastruktur jaringan irigasi meliputi pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kewenangan kota	Akselerasi infrastruktur jaringan irigasi meliputi pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kewenangan kota	Pemantapan infrastruktur jaringan irigasi meliputi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kewenangan kota	Perwujudan infrastruktur jaringan irigasi meliputi peningkatan, akselerasi, dan pemantapan sistem jaringan irigasi kewenangan kota
		<u>Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan skala kecil</u>	Akselerasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan skala kecil	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur ketenagalistrikan skala kecil	Perwujudan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan skala kecil
		<u>Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air</u>	Percepatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air	Pemantapan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air	Perwujudan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air
		<u>Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-</u>	Akselerasi pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kapasitas masyarakat, pendidikan aman bencana dan budaya tanggap bencana serta peningkatan sistem peringatan dini, mitigasi struktural dan non struktural	Pemantapan pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kapasitas masyarakat, pendidikan aman bencana dan budaya tanggap bencana serta peningkatan sistem peringatan dini, mitigasi struktural dan non struktural	Perwujudan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029) Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Pemantapan	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan
	6. Meningkatkan infrastruktur wilayah perkotaan yang berkualitas dan merata	<u>struktural di daerah rawan bencana tinggi</u>			
		<u>Peningkatan konektivitas antar wilayah</u>	Akselerasi konektivitas antar wilayah	Pemantapan pembangunan dan peningkatan ruas jalan	Perwujudan pembangunan dan peningkatan ruas jalan
		Peningkatan infrastruktur sumber daya air	Perlindungan sumber daya air dan jaringan infrastruktur sumber daya air	Pemantapan infrastruktur sumber daya air	Perwujudan infrastruktur sumber daya air
		Pengembangan drainase perkotaan	Akselerasi pembangunan drainase perkotaan	Pemantapan pembangunan drainase perkotaan	Perwujudan drainase perkotaan
		Peningkatan sarana dan prasarana transportasi publik	Akselerasi pemenuhan sarana dan prasarana transportasi publik	Pemantapan sarana dan prasarana transportasi publik	Perwujudan sarana dan prasarana transportasi publik
		Peningkatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	Akselerasi penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	Pemantapan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	Perwujudan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
	7. Meningkatkan infrastruktur permukiman yang berkualitas dan inklusif	Penyediaan prasarana air minum	Akselerasi pemenuhan prasarana air minum	Pemantapan prasarana air minum	Perwujudan penyediaan prasarana air minum
		Penyediaan prasarana air limbah	Akselerasi pemenuhan prasarana air limbah	Pemantapan prasarana air limbah	Perwujudan penyediaan prasarana air limbah
		Transformasi pengelolaan persampahan	Akselerasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Pemantapan kualitas dan kuantitas prasarana pengelolaan persampahan	<i>Zero waste production</i>
		Pembangunan perumahan dan permukiman yang terjangkau masyarakat	<u>Akselerasi pembangunan perumahan dan permukiman yang aman dan ramah lingkungan</u>	Pemantapan pembangunan perumahan dan permukiman	Perwujudan rumah layak huni, aman, ramah lingkungan dan terjangkau oleh masyarakat
	8. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan	Percepatan penyusunan panduan dan rencana tata ruang wilayah (RTRW)	Akselerasi pengendalian pemanfaatan ruang dan struktur ruang	Optimalisasi pemanfaatan ruang dan struktur ruang	Perwujudan Tata Ruang Wilayah yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029) Fondasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi	TAHAP III (2035-2039) Pemantapan	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan
		Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim	Akselerasi penerapan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim	Optimalisasi standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim	Perwujudan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim
		Sinkronisasi substansi dokumen perencanaan pusat, provinsi Jawa Barat dan Kota Tasikmalaya	Sinkronisasi substansi dokumen perencanaan pusat, provinsi Jawa Barat dan Kota Tasikmalaya	Sinkronisasi substansi dokumen perencanaan pusat, provinsi Jawa Barat dan Kota Tasikmalaya	Sinkronisasi substansi dokumen perencanaan pusat, provinsi Jawa Barat dan Kota Tasikmalaya

Sumber: Hasil Analisis, 2024.

5.2. Sasaran Pokok

Sasaran pokok RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi Kota Tasikmalaya yang Religius, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.

Sasaran Pokok Kota Tasikmalaya dirumuskan dari Arah Pembangunan hasil penyelarasan RPJPD Provinsi dengan RPJPN Tahun 2025-2045, Arah Kebijakan Transformasi serta Indikator Utama Pembangunan berupa indikator hasil penyelarasan.

5.2.1. Arah Pembangunan Daerah

Mengacu pada Arah Pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045, maka Arah Pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2045 adalah:

- 1) Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas Untuk Semua;
- 2) Pelayanan Pendidikan Yang Berkualitas dan merata;
- 3) Perlindungan Sosial yang Adaptif dan inklusif;
- 4) Peningkatan Produktivitas Ekonomi Daerah;
- 5) Penerapan Ekonomi Hijau;
- 6) Transformasi Digital;
- 7) Intergrasi Ekonomi Domestik dan Global;
- 8) Pengembangan Kawasan Strategis Perekonomian;
- 9) Peningkatan Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, adaptif dan inovatif;
- 10) Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas;
- 11) Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah;
- 12) Peningkatan kerjasama daerah, regional dan internasional;
- 13) Peningkatan kerukunan umat beragama;
- 14) Peningkatan Keluarga Berkualitas, Pemuda, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif;
- 15) Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- 16) Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi; dan
- 17) Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim.

Tabel 5.2 Penyelarasan Arah Pembangunan RPJPD Kota Tasikmalaya dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045

Transformasi	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPN 2025-2045	Transformasi	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD Jawa Barat 2025-2045	Transformasi	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kota Tasikmalaya 2025-2045
Transformasi Sosial	IE1. Kesehatan untuk semua	Transformasi Sosial	Pelayanan kesehatan prima untuk semua	Transformasi Sosial	Pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk semua
	IE2. Pendidikan berkualitas yang merata		Pendidikan berkualitas yang merata		Pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata
	IE3. Perlindungan sosial yang adaptif		Ketahanan sosial Masyarakat yang berbudaya maju		Perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif
Transformasi Ekonomi	IE4. Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi	Transformasi Ekonomi	Peningkatan produktivitas ekonomi daerah	Transformasi Ekonomi	Peningkatan produktivitas ekonomi daerah
	IE5. Penerapan ekonomi hijau		Penerapan ekonomi hijau		Penerapan ekonomi hijau
	IE6. Transformasi digital		Transformasi digital		Transformasi digital
	IE7. Integrasi ekonomi domestik dan global		Integrasi rantai pasok produksi dan perdagangan domestik dan global		Integrasi ekonomi domestik dan global
	IE8. Perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi		Pembentukan pusat kegiatan yang mendukung kluster		Pengembangan kawasan strategis perekonomian

Transformasi	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPN 2025-2045	Transformasi	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD Jawa Barat 2025-2045	Transformasi	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kota Tasikmalaya 2025-2045
			perekonomian di setiap wilayah pengembangan		
Transformasi Tata Kelola	IE9. Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	Transformasi Tata Kelola	Peningkatan pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan inovatif	Transformasi Tata Kelola	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, adaptif dan inovatif
Supremasi Hukum, Stabilitas, Dan Kepemimpinan Indonesia	IE10. Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi substansial	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, Dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, Dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Meningkatnya jaminan penegakan hukum secara demokratis dan berkualitas
	IE11. Stabilitas ekonomi makro		Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah		Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah
	IE12. Ketangguhan diplomasi dan berdaya gentar kawasan		Peningkatan kerjasama internasional dan ketahanan daerah		Peningkatan kerjasama daerah, regional dan internasional
Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi	IE13. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju	Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi	Peningkatan kerukunan umat beragama	Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi	Peningkatan kerukunan umat beragama
	IE14. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif		Peningkatan keluarga berkualitas, pemuda, dan kesetaraan gender		Peningkatan keluarga berkualitas, pemuda, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif
	IE15. Lingkungan hidup berkualitas		Peningkatan kualitas lingkungan hidup		Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Transformasi	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPN 2025-2045	Transformasi	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD Jawa Barat 2025-2045	Transformasi	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kota Tasikmalaya 2025-2045
	IE16. Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan		Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi		Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi
	IE17. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim		Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim		Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim

Sumber: Hasil Analisis, 2024.

Adapun penjelasan dari Arah Pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2045 sebagai berikut.

1. **Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas Untuk Semua**, adalah sasaran yang akan dicapai pada tahun 2045, masyarakat harus dengan mudah mengakses layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, sehingga derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dapat tercapai. Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui arah kebijakan, antara lain Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan; Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting; Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan; Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal; Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan; Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan; Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya; Percepatan eliminasi penyakit menular, tidak menular dan penyakit tropis yang terabaikan.
2. **Pelayanan Pendidikan Yang Berkualitas dan merata**, adalah sasaran yang akan dicapai pada tahun 2045, untuk mewujudkan generasi unggul dan berkarakter disertai akses Pendidikan yang adil dan merata serta Pendidikan yang memenuhi standar kompetensi nasional dan global. Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui arah kebijakan, antara lain Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) dan penguatan karakter berbasis nilai religi dan budaya; Peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang memenuhi standar; Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter, serta digital literacy; Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang memenuhi standar; Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan; Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
3. **Perlindungan Sosial yang Adaptif dan inklusif**, mencerminkan masyarakat sejahtera, perlindungan inklusif bagi tenaga kerja, keberpihakan sektor formal dan informal terhadap gender, serta perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui arah kebijakan, antara lain Percepatan sistem perlindungan dan jaminan sosial yang adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan.

4. **Peningkatan Produktivitas Ekonomi Daerah** melalui perwujudan Kota Tasikmalaya sebagai pusat perdagangan, jasa, industri dan ekonomi kreatif sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang didukung dengan ekosistem riset dan inovasi IPTEK yang berdaya saing, investasi yang efisien pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif, ekonomi mikro dan kecil yang inklusif dan berbasis kerakyatan, optimalisasi sumber daya lokal untuk industri yang memiliki nilai tambah tinggi dan ramah lingkungan, tenaga kerja bersertifikat, pusat inkubasi dan pusat kreatif, ekonomi kreatif dan pariwisata halal dan berkelanjutan, koperasi yang memiliki daya saing dalam perekonomian, modernisasi pertanian, serta peluang dan akses kesempatan kerja bagi perempuan meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui arah kebijakan, antara lain Penguatan tata kelola perdagangan pada aspek sarana perdagangan, dukungan terhadap produk unggulan serta perlindungan konsumen, Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang mempertimbangkan *link and match industry* besar dengan IKM/UMKM, Penguatan riset terkait sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas peneliti, peningkatan pembiayaan riset sektor ekonomi produktif serta penguatan kolaborasi riset sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, Peningkatan kualitas koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan serta adopsi teknologi tepat guna, Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha, Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui *upskilling* maupun *reskilling*, Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif, Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha, Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik untuk mendukung tumbuhnya sektor industri pengolahan (jalan tol/jalan logistik, sarana prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan), Pengembangan *closed loop* model pertanian melalui penyiapan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian, Penyediaan dan pemeliharaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian
5. **Penerapan Ekonomi Hijau** sebagai komitmen pembangunan berkelanjutan untuk mengurangi kemiskinan serta memastikan inklusi sosial, pelestarian lingkungan, dan efisiensi sumber daya, yang mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup pertanian organik, industri hijau, pariwisata berkelanjutan, dan investasi hijau di berbagai sektor.

Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui arah kebijakan, antara lain: Peningkatan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan, Penyiapan infrastruktur industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan, industri kriya dan ekonomi kreatif, rintisan *green industry*, Perluasan pemanfaatan instrumen pengendali hama, obat dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis dalam aktivitas budidaya pertanian dan perikanan, Pengembangan industri pengolahan terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan daerah termasuk industri kriya dan ekonomi kreatif, industri pengolahan pertanian dan perikanan, Pemantapan daya saing pariwisata halal dan berkelanjutan

6. **Transformasi Digital**, merupakan salah satu upaya transformatif super prioritas di bidang ekonomi dalam mewujudkan Kota Tasikmalaya sebagai pusat perdagangan, jasa, industri dan ekonomi kreatif, yang memiliki kemampuan mengoptimalkan pengembangan superplatform digital tentang tata kelola pemerintahan, yang mencakup aspek regulasi, institusi, infrastruktur, riset dan inovasi digital, keamanan siber, pembiayaan dan insentif, hingga industri digital. Transformasi digital juga telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat berbasis teknologi yang bermanfaat dalam memproduksi SDM dan talenta digital yang adaptif dan berdaya saing global. Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui arah kebijakan, antara lain: Pengembangan pusat-pusat inkubasi, pusat kreatif, infrastruktur dasar dan digital serta perluasan akses terhadap layanan keuangan dan permodalan; Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis dan akselerasi peningkatan kualitas pelayanan informasi dan akselerasi teknologi komunikasi dan informasi
7. **Integrasi Ekonomi Domestik dan Global**, mewujudkan keterkaitan antar industri kecil, menengah dan besar dalam proses produksi dan perdagangan domestik dan global, yang didukung dengan berfungsinya infrastruktur transportasi dan logistik yang efektif dan efisien serta dilakukannya penetrasi produk pelaku usaha IKM dan besar ke pasar global. Untuk mewujudkan hal tersebut, dilakukan melalui arah kebijakan, antara lain: percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri pengolahan (jalan tol/jalan logistik), sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan, Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang mempertimbangkan link and match industry besar dengan IKM/UMKM, Peningkatan diversifikasi produk industri dan bernilai tambah untuk ekspansi global, Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) daerah yang berdaya saing di tataran global, Ekspansi pasar perdagangan dalam dan luar negeri.

8. **Pengembangan Kawasan Strategis Perekonomian**, melalui penerapan pusat kegiatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung kluster perekonomian; serta pengembangan infrastruktur perkotaan. Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui arah kebijakan, antara lain: Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan aspek 6A (*attraction, accessibility, amenity, ancillary service, activity, available packages*), penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan, percepatan pemerataan penyediaan infrastruktur air baku dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi; percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, Pengembangan system pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju *zero solid waste city* dan mendukung circular economy di kawasan perkotaan, Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (*green and grey infrastructure*) di kawasan perkotaan, Pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah.
9. **Peningkatan Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, adaptif dan inovatif**, merupakan wujud tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, responsif dan inovatif terhadap perubahan, serta efektif dan efisien. Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui arah kebijakan, antara lain Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur daerah yang adaptif, sesuai dengan kebutuhan daerah dan berintegritas dalam upaya pencegahan korupsi; Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja; Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi; Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat; Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital; Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko; Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas dari korupsi.
10. **Meningkatnya jaminan penegakan hukum secara demokratis dan berkualitas**, merupakan wujud kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan perundang-undangan, menjamin kebebasan dan kesetaraan kapasitas lembaga demokrasi yang menghormati kebebasan dan hak asasi manusia, sehingga tercapai ketentraman, keteriban dan rasa aman masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui arah kebijakan, antara lain Penguatan kelembagaan Pemerintah dalam Mewujudkan Kehidupan Demokrasi

Yang Sehat dan Kuat; Perwujudan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi yang sehat dan kuat.

11. **Terkendalnya stabilitas ekonomi makro daerah**, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kemudahan dunia usaha mengakses modal dan pembiayaan, terkendalnya inflasi, mengurangi risiko terjadinya fluktuasi ekonomi yang berlebihan dan bertambahnya sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui arah kebijakan, antara lain: Pengembangan *closed loop model* pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian; perluasan akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi, operasional dan ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/non fiskal lainnya, di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi hijau, peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, blended finance, ekonomi dan keuangan syariah, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan transfer ke daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; serta Penguatan pengendalian inflasi daerah.

12. **Peningkatan kerjasama daerah, regional dan internasional**, menjadikan Kota Tasikmalaya sebagai mitra strategis kerjasama baik kerjasama daerah, regional maupun internasional, dengan kondisi wilayah yang sangat tangguh yang mampu bertahan dan pulih dari berbagai tantangan eksternal, termasuk bencana alam, konflik, perubahan iklim, dan tekanan lingkungan lainnya. Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui arah kebijakan, antara lain : Penguatan kerja sama antar wilayah untuk pengelolaan wilayah dan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah; dan Perluasan Kerja Sama Daerah.

13. **Peningkatan kerukunan umat beragama** merupakan wujud masyarakat yang menjunjung nilai luhur agama, menghormati nilai-nilai spiritual, keyakinan, dan peribadatan yang diyakini oleh individu dan masyarakat, serta melestarikan kebudayaan dan memiliki toleransi yang tinggi antar etnis, agama dan golongan. Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui arah kebijakan, antara lain Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila; Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.

14. **Peningkatan Keluarga Berkualitas, Pemuda, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif** mewujudkan ketahanan keluarga yang berkualitas, menjamin hak seluruh lapisan masyarakat, serta perlindungan terhadap anak dan perempuan. Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui arah kebijakan, antara lain Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang dalam rangka pemenuhan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan; Pemberdayaan perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan dalam rangka pemenuhan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan; Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan; Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
15. **Peningkatan kualitas lingkungan hidup.** Mewujudkan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, yang secara fisik, biologis, maupun kimia dapat mendukung kehidupan manusia dan organisme lainnya dengan baik, didukung oleh keanekaragaman hayati yang lestari, kualitas udara yang baik, air bersih yang sehat, ekosistem laut yang terjaga, tutupan lahan yang meningkat di kawasan lindung, sanitasi yang aman, serta sistem pengolahan sampah terpadu dan menyeluruh.

Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui arah kebijakan, antara lain: Penyelenggaraan dan Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan dan perubahan iklim; Peningkatan upaya pelestarian kawasan lindung dan ekosistem alami serta pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis; Pengendalian pencemaran dan kerusakan, serta konservasi lingkungan hidup; Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu menuju zero waste dan mendukung circular economy; serta Peningkatan akses dan percepatan pemerataan infrastruktur pelayanan dasar antara lain air baku/air minum, sanitasi, persampahan, dan rumah layak.
16. **Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi**, menjadi perhatian dan agenda pembangunan di semua Negara. Ketahanan pangan dicirikan berdasarkan 3 (tiga) aspek: ketersediaan stok pangan, keterjangkauan harga dan akses, serta pemanfaatan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman bagi masyarakat. Ketahanan energi dicirikan dengan efisiensi penggunaan energi dalam mendukung perekonomian. Ketahanan air dicirikan dengan tersedianya kapasitas atau daya tampung air baku yang dapat

memenuhi kebutuhan berbagai kegiatan. Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui arah kebijakan, antara lain: Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat; Pengendalian susut dan sisa pangan; Pengembangan pertanian yang berkelanjutan dan adaptif terhadap teknologi serta perubahan iklim; Peningkatan pelayanan sistem irigasi; Penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis energi baru terbarukan dan jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan; Peningkatan konservasi dan efisiensi energi pada seluruh pengguna energi; Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air; serta Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar air minum jaringan perpipaan.

17. Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim.

Sejalan dengan semakin berkurangnya dampak negatif yang ditimbulkan dari bencana; kapasitas pemerintah dan masyarakat menghadapi bencana semakin membaik; nilai bahaya dan kerentanan berkurang serta adanya pemanasan global dan adaptif perubahan iklim.

Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui arah kebijakan, antara lain: Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid secara struktural (infrastruktur) dan non struktural; Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan secara menyeluruh; serta Implementasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.

5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi

Arah kebijakan menggambarkan upaya transformasi penjabaran dari arah kebijakan RPJPN dan RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan Provinsi serta menggambarkan upaya transformasi yang spesifik dengan karakteristik Kota Tasikmalaya dan mendukung tercapainya visi Kota Tasikmalaya. Secara rinci tercantum pada tabel berikut.

Tabel 5.3 Arah Kebijakan Transformasi Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2045

Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
Transformasi Sosial	Pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk semua	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.
		Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
		Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
		Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.
		Percepatan penuntasan <i>stunting</i> dan pencegahan <i>stunting</i> .
		Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan <i>universal</i>
		Percepatan eliminasi penyakit menular, tidak menular dan penyakit tropis yang terabaikan
		Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan
	Pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata	Peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang memenuhi standar
		Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan
		Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter, serta <i>digital literacy</i>
		Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) dan penguatan karakter berbasis nilai religi dan budaya
		Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang memenuhi standar

Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
	Perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif	Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan
		Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan
		Percepatan sistem perlindungan dan jaminan sosial yang adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan
		Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak) dan infrastruktur konektivitas
		Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & high-value economy</i>), guna memperluas kesempatan kerja dan berusaha, serta meningkatkan pendapatan masyarakat
Transformasi Ekonomi	Peningkatan produktivitas ekonomi daerah	Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui penyiapan modernisasi pertanian dan implementasi teknologi pertanian
		Penyediaan dan pemeliharaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian
		Peningkatan kualitas dan optimalisasi sumber daya lokal untuk industri
		Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik untuk mendukung tumbuhnya sektor industri pengolahan
		Penataan dan penguatan daya tarik wisata secara kolaboratif dan partisipatif.
		Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.
		Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif

Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i>
		Peningkatan akses terhadap kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja sesuai kebutuhan di DUDI dan <i>green job</i> , pelayanan kesehatan dan pendidikan tenaga kerja bersertifikat
		Pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil yang inklusif dan berbasis kerakyatan
		Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
		Peningkatan kualitas koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan serta adopsi teknologi tepat guna
		Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang mempertimbangkan <i>link and match</i> industry besar dengan IKM/UMKM
		Penguatan tata kelola perdagangan pada aspek sarana perdagangan, dukungan terhadap produk unggulan serta perlindungan konsumen
		Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang berdaya saing
		Penguatan riset terkait sector ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas peneliti, peningkatan pembiayaan riset sektor ekonomi produktif serta penguatan kolaborasi riset sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat

Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
	Penerapan ekonomi hijau	Peningkatan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan
		Penyiapan infrastruktur industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan, industri kriya dan ekonomi kreatif, rintisan <i>green industry</i> .
		Perluasan pemanfaatan instrumen pengendali hama, obat dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis dalam aktivitas budidaya pertanian dan perikanan
		Pengembangan industri pengolahan terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan daerah termasuk industri kriya dan ekonomi kreatif, industri pengolahan pertanian dan perikanan
		Pemantapan daya saing pariwisata halal dan berkelanjutan
		Penataan dan penyiapan instrumen kebijakan dan kelembagaan perdagangan karbon, <i>offsetting</i> , dan pajak karbon, serta pembayaran berbasis kinerja (<i>result base payment</i>)
		Pemberian deregulasi dan kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan / subsidi operasional dan ketenagakerjaan dan insentif fiskal/non fiskal lainnya terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan industri) serta sektor ekonomi hijau
		Penyediaan instrumen pengendali hama, obat dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis dalam aktivitas budidaya pertanian dan perikanan
	Transformasi digital	Pengembangan pusat-pusat inkubasi, pusat kreatif, infrastruktur dasar dan digital serta perluasan akses terhadap layanan keuangan dan permodalan
		Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis

Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
	Integrasi ekonomi domestik dan global	Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang mempertimbangkan <i>link and match</i> industri besar dengan IKM/UMKM
		Peningkatan diversifikasi produk industri dan bernilai tambah untuk ekspansi global
		Ekspansi pasar perdagangan dalam dan luar negeri
		Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) daerah yang berdaya saing di tataran global
		Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik untuk mendukung tumbuhnya sektor industri pengolahan
	Pengembangan kawasan strategis perekonomian	Peningkatan produktivitas BUMD
		Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan aspek 6A (<i>attraction, accessibility, amenity, ancillary service, activity, available packages</i>)
		Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan
		Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum di kawasan perkotaan
		Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> di kawasan perkotaan
		Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan <i>hybrid (green and grey infrastructure)</i> di kawasan perkotaan
		Pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik

Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
		dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan dan berketahanan Perwujudan <i>city beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter dan <i>dignity</i> kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata <i>urban tourism</i> Peningkatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan
Transformasi Tata Kelola	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, adaptif, dan inovatif	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur daerah yang adaptif, sesuai dengan kebutuhan daerah dan berintegritas dalam upaya pencegahan korupsi Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas dari korupsi Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas

Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
	Meningkatnya jaminan penegakan hukum secara demokratis dan berkualitas	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi yang sehat dan kuat Perwujudan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi yang sehat dan kuat
Keamanan, ketenteraman dan ketertiban daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas
		Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional
		Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat
		Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya
		Penguatan pengendalian inflasi daerah
		Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan transfer ke daerah (TKD) serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional
		Pengembangan <i>closed loop</i> model pertanian melalui penyiapan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani,

Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian
	Peningkatan kerjasama daerah, regional, dan internasional	Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah
	Peningkatan kerukunan umat beragama	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila
		Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan
	Peningkatan keluarga berkualitas, pemuda, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
		Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang
		Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan
		Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan
	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis
		Peningkatan upaya pelestarian ekosistem alami
		Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.
		Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup,

Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
		luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan
		Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>
	Peningkatan ketahanan pangan, air, dan energi	Pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan
		Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan pangan
		Penguatan akses, distribusi dan pemanfaatan pangan
		Pengelolaan dan pengendalian susut dan sisa pangan
	Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air
		Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi
Implementasi Transformasi		Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah
		Percepatan penyusunan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.)
		Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan

Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
		Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (<i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated</i>) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas
		Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke <i>green/low-cost financing</i> , bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, di daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi hijau, dan energi baru dan terbarukan
		Percepatan pelaksanaan reforma agraria
		Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas <i>researcher</i> , peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri
		Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim
		Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i>
		Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah
		Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kota
		Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional
		Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen resiko

Sumber: Hasil Analisis, 2024.

5.2.3. Indikator Utama Pembangunan

Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kota Tasikmalaya mengacu pada IUP dalam RPJPN yang terdiri dari 45 indikator dan 45 IUP Provinsi Jawa Barat. Adapun IUP Kota Tasikmalaya Tahun 2045 ditetapkan sebanyak 37 indikator. IUP dan target tahun 2045 ditetapkan untuk mengukur keberhasilan arah pembangunan dan sasaran pokok yang akan dicapai sebagai penjabaran visi dan misi Kota Tasikmalaya, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5.4
Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan Kota Tasikmalaya dengan RPJPN Tahun 2025-2045

No.	RPJPN 2025-2045			RPJPD POVINSI 2025-2045			RPJPD KOTA TASIKMALAYA 2025-2045		
	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPN 2025-2045	Target RPJPN		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025-2045	Target RPJPD PROVINSI JAWA BARAT		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kota Tasikmalaya 2025-2045	Target RPJPD KOTA TASIKMALAYA	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
TRANSFORMASI SOSIAL				TRANSFORMASI SOSIAL			TRANSFORMASI SOSIAL		
IE1	Kesehatan untuk Semua			Kesehatan untuk Semua			Pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk semua		
1	Usia Harapan Hidup (tahun)	74,4	80	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,29	80,78	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,44	79,18
2	Kesehatan Ibu dan Anak			Kesehatan Ibu dan Anak:			Kesehatan Ibu dan Anak:		
a.	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (jumlah)	115	16	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (jumlah)	114	15	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (jumlah)	26	3
b.	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,5	5	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,5	5	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) (SSGI)	23,73	6,24
3	Insidensi Turberkolis (per 100.000 penduduk)	274	76	Penanganan Tuberkulosis:	91	100	Penanganan Tuberkulosis:	91	98
				a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)*			a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)*		
				b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)*	91	100	b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)*	91	98

No.	RPJPN 2025-2045			RPJPD POVINSI 2025-2045			RPJPD KOTA TASIKMALAYA 2025-2045		
	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPN 2025-2045	Target RPJPN		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025-2045	Target RPJPD PROVINSI JAWA BARAT		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kota Tasikmalaya 2025-2045	Target RPJPD KOTA TASIKMALAYA	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	98	99,5	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	89,31	99,5	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	100	100
IE2	Pendidikan Berkualitas yang Merata			Pendidikan Berkualitas yang Merata			Pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata		
5	Hasil pembelajaran			Hasil pembelajaran			Hasil pembelajaran		
a.	Rata-rata nilai PISA			a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:					
	- Membaca	396	485	i) Literasi Membaca	22,25-24,25	71,81-73,81			
	- Matematika	404	490	ii) Numerasi	1,70-3,70	65,20-67,20			
				b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:			a) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk* (SD/SMP):		
				i) Literasi Membaca	35,55-37,55	71,42-73,42	i) Literasi Membaca (Poin)	63,87	72,81
				ii) Numerasi	19,34-21,34	63,01-65,01	ii) Numerasi (Poin)	58,47	66,20
							b) Persentase Literasi Al-Qur'an (SD/SMP) (%)	97,73	100
b.	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,46	12	c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,52-9,53	12,05-12,09	c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,68	12,07

No.	RPJPN 2025-2045			RPJPD POVINSI 2025-2045			RPJPD KOTA TASIKMALAYA 2025-2045		
	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPN 2025-2045	Target RPJPN		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025-2045	Target RPJPD PROVINSI JAWA BARAT		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kota Tasikmalaya 2025-2045	Target RPJPD KOTA TASIKMALAYA	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
c.	Harapan lama sekolah	13,37	14,81	d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,87-12,88	14,24-14,29	d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,52	14,32
6	Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan tinggi (%)	33,94	60	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*	9,64	9,64-14,50			
7	Presentasi Pekerjaan Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	61,87	75	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	63,3	75			
IE3	Perlindungan Sosial yang Adaptif			Perlindungan Sosial yang Adaptif			Perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif		
8	Tingkat kemiskinan (%)	6,0-7,0	0,5-0,8	Tingkat Kemiskinan (%)	5,35-5,85	0,09-0,34	Tingkat Kemiskinan (%)	9,20-10,16	0,14-0,92
9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	44,1	99,5	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	20,27	80,04	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Kota (%)	32,56	63,06
10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	20	60	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	24	70			
TRANSFORMASI EKONOMI				TRANSFORMASI EKONOMI			TRANSFORMASI EKONOMI		
IE4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi			Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi			Peningkatan produktivitas ekonomi daerah		
11	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	20,8	28	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	41,15 - 41,38	46,43 - 47,60	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	13,03	11,69

No.	RPJPN 2025-2045			RPJPD POVINSI 2025-2045			RPJPD KOTA TASIKMALAYA 2025-2045		
	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPN 2025-2045	Target RPJPN		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025-2045	Target RPJPD PROVINSI JAWA BARAT		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kota Tasikmalaya 2025-2045	Target RPJPD KOTA TASIKMALAYA	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
12	Pengembangan Pariwisata			Pengembangan Pariwisata			Pengembangan Pariwisata		
a.	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,5	8	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	2,88	4,89	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	6,11	6,63
b.	Devisa Pariwisata (Milliar US Dollar)	18	100	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)*	536,6	1.341,50	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)*	0,717	0,833
13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,9	110	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	1,84	2,06			
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
a.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)	1,3 (2019)	5	i) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)	12,31	20,28			
				ii) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	6,3	14			
							a) Persentase Penerapan Ekonomi Syariah	36,15	50,00
b.	Rasio Kewirausahaan (%)	2,9	8	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,5	9,86	b) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	4,94	13,46
		(Aug 2022)							

No.	RPJPN 2025-2045			RPJPD POVINSI 2025-2045			RPJPD KOTA TASIKMALAYA 2025-2045		
	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPN 2025-2045	Target RPJPN		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025-2045	Target RPJPD PROVINSI JAWA BARAT		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kota Tasikmalaya 2025-2045	Target RPJPD KOTA TASIKMALAYA	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
c.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	1,1 (2021)	10	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,8	12,5	c) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,04	2,45
d.	Return of Asset (ROA) BUMN (%)	3,4	5,6	Return on Aset (ROA) BUMD (%)*	1,62	5,56			
15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5	4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,3-7,0	6,1-7,1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,74-6,25	3,69-4,58
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	55,4	70	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	52,3	62,3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	48,25	58,23
17	Tingkat Penguasaan IPTEK			Indeks Inovasi Daerah			Indeks Inovasi Daerah	Inovatif (46,70)	Sangat Inovatif (85-90)
a.	Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	0,28 (2020)	2,2-2,3						
b.	Peringkat Index Inovasi Global (peringkat)	75 (2022)	30 besar						
IE5	Penerapan Ekonomi Hijau			Penerapan Ekonomi Hijau			Penerapan ekonomi hijau		
18	Tingkat penerapan ekonomi hijau			Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
a.	Indeks ekonomi hijau (%)	70,8	90,65	a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	61,3	85,05	Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi)	58,54	75,21
b.	Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	20	70	b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	23,4	67,91	Pertumbuhan Ekonomi	5,43-6,17	5,83-7,66

No.	RPJPN 2025-2045			RPJPD POVINSI 2025-2045			RPJPD KOTA TASIKMALAYA 2025-2045		
	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPN 2025-2045	Target RPJPN		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025-2045	Target RPJPD PROVINSI JAWA BARAT		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kota Tasikmalaya 2025-2045	Target RPJPD KOTA TASIKMALAYA	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
IE6	Transformasi Digital			Transformasi Digital			Transformasi digital		
19	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (Peringkat)	51	20 besar	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi*	6,4	8	Indeks Masyarakat Digital	47,82	53,06
IE7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			Integrasi ekonomi domestik dan global		
20	Biaya logistik (% PDB)	16,9 (2019)	9	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi*	7,88	5			
21	Pembentukan modal tetap bruto (% PDB)	29,8	27,2	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	23,6	23,8	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	32,79	33,25
22	Ekspor barang dan jasa (% PDB)	26	40	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	26,3	44,8	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	-10,18	1,75
IE8	Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			Pengembangan kawasan strategis perekonomian		
23	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan			Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan					
a.	Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	44,58	48,92	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)	24,63% WM Jakarta (terdiri dari DKI Jakarta,	31,19% WM Jakarta (terdiri dari DKI			
b.	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	64	100	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	56,95	100	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	51,83	100

No.	RPJPN 2025-2045			RPJPD POVINSI 2025-2045			RPJPD KOTA TASIKMALAYA 2025-2045		
	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPN 2025-2045	Target RPJPN		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025-2045	Target RPJPD PROVINSI JAWA BARAT		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kota Tasikmalaya 2025-2045	Target RPJPD KOTA TASIKMALAYA	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
c.	Persentase Desa Mandiri (%)			Persentase Desa Mandiri (%)	N/A	N/A			
TRANSFORMASI TATA KELOLA				TRANSFORMASI TATA KELOLA			TRANSFORMASI TATA KELOLA		
IE9	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrias dan Adaptif			Regulasi dan Tata Kelola yang berintegrias dan adaptif			Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, adaptif, dan inovatif		
							Indeks Reformasi Birokrasi	78,14 (BB)	90-100 (AA)
24	Indeks materi hukum	0,25	0,49	Indeks Reformasi Hukum*	90,7	100	Indeks Reformasi Hukum	86,87	95-100
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,34	5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,37	5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,6	4,50-5,00
26	Indeks pelayanan publik	3,87	5	Indeks Pelayanan Publik	4,62	5	Indeks Pelayanan Publik	4,18	4,75-5,00
27	Anti Korupsi			Indeks Integritas Nasional	72,96	87,89	Indeks Survei Penilaian Integritas	73,7	88,00
a.	Indeks integritas nasional	71,94	96,98						
b.	Indeks persepsi korupsi	34	60						
SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA				KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL, DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH			KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL, DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH		
IE10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial			Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial			Meningkatnya jaminan penegakan hukum secara demokratis dan berkualitas		
28	Indeks Pembangunan Hukum	0,6 (2021)	0,84						

No.	RPJPN 2025-2045			RPJPD POVINSI 2025-2045			RPJPD KOTA TASIKMALAYA 2025-2045		
	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPN 2025-2045	Target RPJPN		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025-2045	Target RPJPD PROVINSI JAWA BARAT		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kota Tasikmalaya 2025-2045	Target RPJPD KOTA TASIKMALAYA	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	62,8	80	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	51,78	69,16	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	60,00	85,00
30	Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang (60-80)	Tinggi (>80)	Indeks Demokrasi Indonesia	Tinggi	Tinggi	Tingkat Partisipasi Pemilih (%)	86,94	90,00
IE11	Stabilitas Ekonomi Makro			Stabilitas Ekonomi Makro			Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah		
31	Rasio Pajak terhadap PDB (%)	10,0-12,0	18,0-20,0	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	2,2	4,6	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,03	2,05
32	Tingkat inflasi (%)	2,5 ± 1	2,0 ± 1	Tingkat Inflasi (%)	3,3-3,9	1,1-3,2	Tingkat Inflasi (%)	2,30	2,00
33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan					
a.	Aset perbankan/PDB (%)	66,9	200	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	25,31	78,1			
b.	Aset dana pensiun/PDB (%)	7,6	60	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	1,24	2,78			
c.	Aset asuransi/PDB (%)	9,1	20	Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan*	55.162,04	302.703,47			
d.	Kapitalisasi pasar modal/PDB (%)	57,8	120	Total Kredit/PDRB (%)	23,7	73,8			
e.	Total kredit/PDB (%)	37,8	80-90						
34	Inklusi keuangan (%)	91	98	Inklusi Keuangan (%)	94,22	99,03			
IE12	Ketangguhan Diplomasi dan Berdaya Gentar Kawasan			Ketangguhan Diplomasi dan Berdaya Gentar Kawasan			Peningkatan Kerjasama Daerah, Regional dan Internasional		

No.	RPJPN 2025-2045			RPJPD POVINSI 2025-2045			RPJPD KOTA TASIKMALAYA 2025-2045		
	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPN 2025-2045	Target RPJPN		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025-2045	Target RPJPD PROVINSI JAWA BARAT		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kota Tasikmalaya 2025-2045	Target RPJPD KOTA TASIKMALAYA	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
35	Asia Power Index (<i>Diplomatic Influencer</i>)	60,4 (2023)	75,0-80,0	Efektivitas Kerjasama Internasional	90,91 (2023)	100	Jumlah Kerjasama Internasional	0	4
36	Asia Power Index (<i>Military Capability</i>)	14,16 (2023)	45	Indeks Ketahanan Nasional Daerah Jawa Barat	3,022	4,5	Indeks Daya Saing Daerah	3,87	5,00
KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI				KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI			KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI		
IE13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju			Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju			Peningkatan kerukunan umat beragama		
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,57*	68,15	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	54,09-54,1	66,08-66,41	Pelestarian OPK dan Cagar Budaya	73,91	88,41
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	75,19*	84,2	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	74,79-74,85	81,68-82,32	Persentase Intensitas Koordinasi antarumat Beragama	80,00	85,00
IE14	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif			Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif			Peningkatan keluarga berkualitas, pemuda, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif		
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	58,49 (2022)	80	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70,92-70,95	75,81-76,05	Indeks Pembangunan Keluarga	61,30	88,40
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,459 (2025)	0,15	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,46-0,45	0,23-0,21	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,455	0,212
IE15	Lingkungan Hidup Berkualitas			Lingkungan Hidup Berkualitas			Peningkatan kualitas lingkungan hidup		
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,35 (2020)	0,7	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,557	0,741			
42	Kualitas Lingkungan Hidup		Kualitas Lingkungan Hidup				Kualitas Lingkungan Hidup:		

No.	RPJPN 2025-2045			RPJPD POVINSI 2025-2045			RPJPD KOTA TASIKMALAYA 2025-2045		
	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPN 2025-2045	Target RPJPN		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025-2045	Target RPJPD PROVINSI JAWA BARAT		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kota Tasikmalaya 2025-2045	Target RPJPD KOTA TASIKMALAYA	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,42	76,12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	56,27	57,68	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	61,62	65,04
b.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	12,5	70	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	13,5	85	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	8,67	80,17
c.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	15 (13% terdaur ulang)	90 (35% terdaur ulang)	Pengelolaan Sampah	11,54	90	Pengelolaan Sampah	80,75	100
				- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)			- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)		
				- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	47,77	100	- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	72,77	100
IE16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			Peningkatan ketahanan pangan, air, dan energi		
43	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan			Ketahanan Energi, Air, dan Pangan			Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		
a.	Ketahanan Energi			Ketahanan Energi					
	- Indeks ketahanan energi	6,61	8,24	- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	1.400	2.670			
				- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp miliar)*	191	165			
b.	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (%)	6,2	2,1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	6,75	1,39	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	4,61	0,32

No.	RPJPN 2025-2045			RPJPD POVINSI 2025-2045			RPJPD KOTA TASIKMALAYA 2025-2045		
	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPN 2025-2045	Target RPJPN		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025-2045	Target RPJPD PROVINSI JAWA BARAT		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kota Tasikmalaya 2025-2045	Target RPJPD KOTA TASIKMALAYA	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
c.	Ketahanan air			Ketahanan Air			Ketahanan Air		
	- Kapasitas Tampungan Air Per Kapita (m ³ /kapita)	63,45	200	- Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)*	4,93	63,12	- Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)	1,06	3,70
	- Akses rumah tangga perkotaan terhadap asir siap minum perpipaan (%)	39	100	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	34,74	100	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	25,43	100
IE17	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim		
44	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB (%)	0,14	0,11	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	131,62	107,27 - 86,47	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	104,21	77,01
45	Presentasi penurunan emisi GRK (%)			Presentasi penurunan emisi GRK (%)			Penurunan Emisi GRK		
a.	Kumulatif	28,12	51,51	a. Kumulatif	2,66	31,65	a. Kumulatif (ton CO ² eq)	70.105,43	802.737,66
b.	Tahunan	32,65	80,89	b. Tahunan	9,27	70,08			

Sumber: Hasil Analisis dan SE Gubernur Jawa Barat, 2024.

Tabel 5.5
Perumusan Sasaran Pokok RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2045

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
1	Mengembangkan SDM yang religius, berkualitas dan berkarakter	Pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk semua	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,44	79,18	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk semua	
			Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.	Kesehatan Ibu dan Anak:				
			Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (jumlah)	26	3		
			Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	23,73	6,24		

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.	Penanganan Tuberkulosis:				
			Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.	a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)*	91	98		
			Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.	b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)*	91	98		
			Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	100	100		
		Pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) dan penguatan karakter berbasis nilai religi dan budaya.				Terwujudnya pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata	
			Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar					
			Penyediaan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat	a) Persentase Literasi Al-Qur'an (SD/SMP) (%)	97,73	100		

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi					
			Peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana	b) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,68	12,07		
			Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan	c) Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,52	14,32		
			Penguatan sekolah terbuka dan pesantren					
			Penguatan mutu, relevansi dan daya saing melalui penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter berbasis nilai religi serta literasi digital yang didukung oleh tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas dan terintegrasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)					

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Mendorong penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)					
		Perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif	Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%)	9,20–10,16	0,14-0,92	Terwujudnya Perlindungan Sosial yang adaptif	
			Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak) dan infrastruktur konektivitas	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota (%)	32,56	63,06		
			Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & high-value economy</i>), guna memperluas kesempatan kerja dan berusaha, serta meningkatkan pendapatan masyarakat					

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
2	Mewujudkan perekonomian yang inklusif, tangguh dan berdaya saing	Peningkatan produktivitas ekonomi daerah	Peningkatan kualitas dan optimalisasi sumber daya lokal untuk industri	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	13,03	11,69	Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah	
			Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik untuk mendukung tumbuhnya sektor industri pengolahan					
			Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui penyiapan modernisasi pertanian dan implementasi teknologi pertanian					
			Penyediaan dan pemeliharaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian					
			Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang mempertimbangkan <i>link and match</i> industri					

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			besar dengan IKM/UMKM					
			Penguatan tata kelola perdagangan pada aspek sarana perdagangan, dukungan terhadap produk unggulan serta perlindungan konsumen	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	4,94	13,46		
			Pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil yang inklusif dan berbasis kerakyatan					
			Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.					
			Penataan dan penguatan daya tarik wisata secara kolaboratif dan partisipatif.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	6,11	6,63		
			Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribuan Orang)*	0,717	0,833		

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			dan dunia usaha/asosiasi usaha.					
			Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif					
			Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan aspek 6A (<i>attraction, accessibility, amenity, ancillary service, activity, available packages</i>)					
			Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i>	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,74-6,25	3,69-4,58		
			Peningkatan produktivitas BUMD					
			Peningkatan akses terhadap kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja sesuai kebutuhan di DUDI dan <i>green job</i> , pelayanan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	48,25	58,23		

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			kesehatan dan pendidikan tenaga kerja bersertifikat					
			Pengembangan <i>closed loop</i> model pertanian melalui penyiapan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian					
			Peningkatan kualitas koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan serta adopsi teknologi tepat guna					
			Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang berdaya saing	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif (46,70)	Sangat Inovatif (85-90)		
			Penguatan riset terkait sektor ekonomi produktif, antara lain					

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas peneliti, peningkatan pembiayaan riset setor ekonomi produktif serta penguatan kolaborasi sektor riset ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat					
		Penerapan ekonomi hijau	Peningkatan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks ekonomi hijau daerah (pilar ekonomi)	58,54	75,21	Meningkatnya penerapan ekonomi hijau	
			Penyiapan infrastruktur industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan, industri kriya dan ekonomi kreatif, rintisan <i>green industry</i> .	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,43-6,17	5,83-7,66		
			Perluasan pemanfaatan instrumen pengendali hama, obat dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis dalam aktivitas budidaya pertanian dan perikanan	Persentase Penerapan Ekonomi Syariah	36,15	50,00		
			Pengembangan industri pengolahan terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan					

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			daerah termasuk industri kriya dan ekonomi kreatif, industri pengolahan pertanian dan perikanan					
			Pemantapan daya saing pariwisata halal dan berkelanjutan					
			Penataan dan penyiapan instrumen kebijakan dan kelembagaan perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon, serta pembayaran berbasis kinerja (<i>result base payment</i>)					
			Pemberian deregulasi dan kemudahan perizinan, akses ke <i>green/low-cost financing</i> , bantuan / subsidi operasional dan ketenagakerjaan dan insentif fiskal/non fiskal lainnya terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan industri) serta sektor ekonomi hijau					

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
		Transformasi digital	Pengembangan pusat-pusat inkubasi, pusat kreatif, infrastruktur dasar dan digital serta perluasan akses terhadap layanan keuangan dan permodalan	Indeks Masyarakat Digital	47,82	53,06	Meningkatnya Digitalisasi	
			Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis					
		Integrasi ekonomi domestik dan global	Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang mempertimbangkan <i>link and match</i> industri besar dengan IKM/UMKM	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	32,79	33,25	Meningkatnya Integrasi ekonomi domestik dan global	
			Peningkatan diversifikasi produk industri dan bernilai tambah untuk ekspansi global	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	-10,18	1,75		
			Ekspansi pasar perdagangan dalam dan luar negeri					

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) daerah yang berdaya saing di tataran global					
			Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik untuk mendukung tumbuhnya sektor industri pengolahan					
		Pengembangan kawasan strategis perekonomian	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	51,83	100	Mewujudkan Pengembangan kawasan strategis perekonomian	
			Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum di kawasan perkotaan					
			Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular</i>					

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			<i>economy</i> di kawasan perkotaan					
			Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan <i>hybrid (green and grey infrastructure)</i> di kawasan perkotaan					
			Pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah					
			Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan					
			Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan dan berketahanan					

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
3	Menguatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan adaptif	Peningkatan Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, adaptif dan inovatif	Perwujudan <i>city beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter dan <i>dignity</i> kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata <i>urban tourism</i>					
			Peningkatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan					
			Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	Indeks Reformasi Birokrasi	78,14 (BB)	90 – 100 (AA)	Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, adaptif dan inovatif	
			Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat	Indeks Reformasi Hukum	86,87	95 – 100		
			Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,6	4,50 - 5,00		

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi	Indeks Pelayanan Publik	4,18	4,75 – 5,00		
			Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital					
			Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, <i>reward</i> , dan <i>punishment</i> , termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	Indeks Survei Penilaian Integritas	73,7	88,00		
4	Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	60,00	85,00	Meningkatnya keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas	

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Penguatan integritas partai politik Peningkatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta koordinasi kelembagaan sektor ideologi, politik, hukum dan keamanan daerah untuk menopang stabilitas ekonomi daerah	Tingkat Partisipasi Pemilih	86,94	90,00		
			Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.					
			Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat					
		Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah,					

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional					
			Penguatan pengendalian inflasi daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,03	2,05	Mewujudkan stabilitas ekonomi makro daerah	
				Tingkat Inflasi (%)	2,30	2,00		
		Peningkatan kerjasama daerah, regional dan internasional	Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah	Kerjasama Internasional yang Ditindaklanjuti	0	4	Meningkatnya kerjasama daerah, regional dan internasional	
				Indeks Daya Saing Daerah	3,87	5,00		

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
5	Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi	Peningkatan kerukunan umat beragama	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila	Pelestarian OPK dan Cagar Budaya	73,91	88,41	Meningkatnya kerukunan umat beragama	
			Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	Persentase Intensitas Koordinasi antarumat Beragama	80,00	85,00		
		Peningkatan Keluarga Berkualitas, Pemuda, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Peningkatan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan local	Indeks Pembangunan Keluarga	61,30	88,40	Meningkatnya Keluarga Berkualitas, Pemuda, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	
			Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,455	0,212		

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
		Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pemberdayaan perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.					
			Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	61,62	65,04	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	
			Penyediaan instrumen pengendali hama, obat dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis dalam aktivitas budidaya pertanian dan perikanan					
			Peningkatan upaya pelestarian ekosistem alami	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	8,67	80,17		
		Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air	Pengelolaan Sampah			Meningkatnya ketahanan pangan, air dan energi	

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	80,75	100		
			Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	72,77	100		
			Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air					
			Pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	4,61	0,32		
			Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan pangan					
			Penguatan akses, distribusi dan pemanfaatan pangan					

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Pengelolaan dan pengendalian susut dan sisa pangan					
		Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim	Percepatan penyusunan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.)				Meningkatnya ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim	
			Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan					
			Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi	Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)*	1,06	3,70		

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.					
			Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	25,43	100		
			Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.	Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim				
			Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	104,21	77,01		
			Percepatan penyusunan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.).	Penurunan Emisi GRK a. Kumulatif (ton CO ² eq)	70.105,43	802.737,66		

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan					
			Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas					
			Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan,					

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, di daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi hijau, dan energi baru dan terbarukan.					
			Percepatan pelaksanaan reforma agraria.					
			Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI,					

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			masyarakat, baik dalam dan luar negeri.					
			Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i>					
			Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.					
			Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kota					
			Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.					
			Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.					

Sumber: Hasil Analisis dan SE Gubernur Jawa Barat, 2024.

Tabel 5.6 Sasaran Pokok RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2045

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
1	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk semua	Pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk semua	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,44	79,18	
			Kesehatan Ibu dan Anak:			
			Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (jumlah)	26	3	
			Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) (SSGI)	23,73	6,24	
			Penanganan Tuberkulosis:			
			a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)*	91	98	
			b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)*	91	98	
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	100	100	
2	Terwujudnya pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata	Pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata	Hasil pembelajaran			
			a) Persentase Literasi Al-Qur'an (SD/SMP) (%)	97,73	100	
			b) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,68	12,07	
			c) Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,52	14,32	
3	Terwujudnya Perlindungan Sosial yang adaptif	Perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif	Tingkat Kemiskinan (%)	9,20-10,16	0,14-0,92	
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota (%)	32,56	63,06	
4	Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah	Peningkatan produktivitas ekonomi daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	13,03	11,69	
			Pengembangan Pariwisata:			
			- Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	6,11	6,63	

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
			- Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribuan Orang)*	0,717	0,833	
			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:			
			- Persentase Penerapan Ekonomi Syariah	36,15	50,00	
			- Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	4,94	13,46	
			- Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,04	2,45	
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,74-6,25	3,69-4,58	
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	48,25	58,23	
5	Meningkatnya penerapan ekonomi hijau	Meningkatnya penerapan ekonomi hijau	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif (46,70)	Sangat Inovatif (85-90)	
			Tingkat penerapan ekonomi hijau:			
			- Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi)	58,54	75,21	
6	Meningkatnya Digitalisasi	Transformasi digital	- Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,43-6,17	5,83-7,66	
7	Meningkatnya Integrasi ekonomi domestik dan global	Integrasi ekonomi domestik dan global	Indeks Masyarakat Digital	47,82	53,06	
			Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	32,79	33,25	
8	Mewujudkan Pengembangan kawasan strategis perekonomian	Pengembangan kawasan strategis perekonomian	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	-10,18	1,75	
			Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	51,83	100	
9	Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, adaptif dan inovatif	Peningkatan Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, adaptif dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	78,14 (BB)	90 – 100 (AA)	
			Indeks Reformasi Hukum	86,87	95 – 100	
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,6	4,50 – 5,00	
			Indeks Pelayanan Publik	4,18	4,75 – 5,00	
			Indeks Persepsi Korupsi	73,7	88,00	

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
10	Meningkatnya keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas	Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	60,00	85,00	
			Tingkat Partisipasi Pemilih (%)	86,94	90,00	
11	Mewujudkan stabilitas ekonomi makro daerah	Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,03	2,05	
			Tingkat Inflasi (%)	2,30	2,00	
12	Meningkatnya kerjasama daerah, regional dan internasional	Peningkatan kerjasama daerah, regional dan internasional	Kerjasama Internasional yang Ditindaklanjuti	0	4	
			Indeks Daya Saing Daerah	3,87	5,00	
13	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Peningkatan kerukunan umat beragama	Pelestarian OPK dan Cagar Budaya	73,91	88,41	
			Persentase Intensitas Koordinasi antarumat Beragama	80,00	85,00	
14	Meningkatnya Keluarga Berkualitas, Pemuda, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Peningkatan Keluarga Berkualitas, Pemuda, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Keluarga	61,30	88,40	
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,455	0,212	

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	61,62	65,04	
			Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	8,67	80,17	
			Pengelolaan Sampah:			
			- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	80,75	100	
			- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	72,77	100	
16	Meningkatnya ketahanan pangan, air dan energi	Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	4,61	0,32	
			Ketahanan air:			
			- Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)*	1,06	3,70	
			- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	25,43	100	
17	Meningkatnya ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim			
			Indeks Risiko Bencana (IRB)*	104,21	77,01	
			Penurunan Emisi GRK a. Kumulatif (ton CO ² eq)	70.105,43	802.737,66	

Sumber: Hasil Analisis dan SE Gubernur Jawa Barat, 2024

BAB VI

PENUTUP

6.1. Pelaksanaan

Disusunnya RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2045 diharapkan menjadi arah kebijakan, sasaran pokok, dan target pembangunan jangka panjang untuk dijabarkan ke dalam RPJMD serta dioperasionalkan dalam RKPD. Untuk merealisasikan RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2045 yang penuh tantangan dan dinamika pembangunan, maka digunakan 5 (lima) prinsip utama yaitu:

- a. Prinsip perencanaan kegiatan mengacu kepada prinsip perencanaan yang cerdas (*SMART Planning*), yaitu program terpilih harus diyakini argumentatif dan memiliki kekhususan (*Specific*), terukur (*Measurable*), Ketercapaian (*Achievable*), ketersediaan sumber daya (*Resources Availability*), dan waktu (*Time*).
- b. Prinsip administrasi perencanaan, yaitu menggunakan *Shewhart Cycle* yang dikenal dengan Siklus PDCA dengan tahapan: Rencanakan (*Plan*), Kerjakan apa yang telah direncanakan (*Do*), periksa atau monitor pelaksanaan (*Check*), dan aksi tindak lanjut (*Action*). Untuk memudahkan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan pada level perangkat daerah tingkat kota serta Provinsi Jawa Barat dan Kementerian/Lembaga Pemerintah, maka digunakan pembagian peran perangkat daerah kota untuk melaksanakan RPJPD berdasarkan misi pembangunan, dengan membagi peran perangkat daerah kota setiap bidang pada setiap misi pembangunan Kota Tasikmalaya, serta diperlukan peran serta masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda, dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia.
- c. Prinsip pelaksanaan program menggunakan prinsip akuntabilitas (*accountability*) yang memiliki 3 (tiga) aspek, yaitu:
 - 1) Taat dan sesuai aturan (*compliance with regulation*);
 - 2) Sesuai dengan norma profesionalisme (*adherence with norm professionalism*); dan
 - 3) Berorientasi pada hasil yang berkualitas (*quality result driven*).
- d. Prinsip dukungan kebijakan keuangan mengikuti kebutuhan program prioritas (*money follow program*).
- e. Prinsip pengendalian untuk sukses pelaksanaan perencanaan pembangunan dengan memerankan:
 - 1) *Desk* monitoring dan evaluasi implementasi program untuk pengendalian kualitas implementasi kegiatan dan ketaatan waktu serta *output*; dan
 - 2) *Desk* akuntabilitas untuk kepentingan pendampingan (*counseling partner*) dan pengendalian ketaatan terhadap aturan dan disiplin anggaran atau prinsip 3E dan 1K (efisien, ekonomis, efektif dan ketaatan terhadap ketentuan).

Setiap perangkat daerah dapat merumuskan berbagai dokumen perencanaan sektoral yang mengacu pada RPJPD ini. Dokumen RPJPD ini juga dapat menjadi acuan penyelarasan terhadap dokumen perencanaan pembangunan spasial yang termuat dalam dokumen RTRW beserta turunannya. Hal ini dimaksudkan untuk keselarasan perwujudan ruang yang sesuai dengan arah kebijakan RPJPD.

Pada pelaksanaannya diperlukan monitoring yang harus dilakukan secara rutin dan berkala. Selain itu, evaluasi dan perubahan dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam dalam 5 (lima) tahun untuk mengetahui pencapaian target pembangunan dan melakukan penyesuaian sesuai dengan dinamika yang terjadi.

Pelaksanaan semua kebijakan dalam RPJPD ini harus melibatkan multipihak baik pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan, perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan seluruh elemen masyarakat di Kota Tasikmalaya.

6.2. Pendanaan

RPJPD Kota Tasikmalaya diharapkan dapat dilaksanakan dengan dukungan sumber pendanaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun sumber pendanaan pembangunan yang dapat digunakan, antara lain bersumber dari APBN, dan APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kota Tasikmalaya. Selain itu, dimungkinkan untuk pendanaan pembangunan dilakukan dengan menggunakan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan seperti sumber pendanaan alternatif (KPBU, *blended finance*, penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah).

Guna mengoptimalkan pemanfaatan barang produksi dalam negeri maka menjadi penting dalam pelaksanaan pembangunan agar memanfaatkan produk dari Kota Tasikmalaya khususnya. Hal ini untuk mewujudkan peningkatan dampak berganda dan nilai tambah dari hasil produk ekonomi Kota Tasikmalaya.

Keberhasilan pelaksanaan RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2045 sangat tergantung pada komitmen antara penyelenggara pemerintahan daerah dengan pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya. Untuk itu perlu sinergi dan kerja sama guna mewujudkan visi pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2045: “Kota Tasikmalaya yang Religius, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”.

6.3. Proses Pelaksanaan Manajemen Risiko

Dalam implementasi setiap visi, misi, tujuan dan sasaran pokok pada RPJPD Kota Tasikmalaya ada beberapa hal yang dapat menghambat atau mencegah ketercapaian keberhasilan RPJPD. Keberlangsungan dan keberhasilan rencana pembangunan dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah setiap elemen dapat membangun *framework* manajemen risiko, mengidentifikasi, mengantisipasi dan mengelola ketidakpastian yang akan terjadi di masa mendatang.

Manajemen risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi. Tujuan dari manajemen risiko

adalah untuk mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah dan mengidentifikasi, menganalisa, dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko di lingkungan pemerintah daerah.

Manajemen risiko dilakukan melalui mitigasi risiko berupa langkah pencegahan terhadap risiko yang telah diidentifikasi, hal ini dilakukan untuk mengurangi *impact* atau *probability* serta mencegah agar risiko tidak terjadi. Mitigasi risiko dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah menentukan strategi penanganan yang terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu: menerima risiko, transfer risiko, mengurangi risiko, dan menghindari risiko.

Manajemen risiko di Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dilaksanakan sebelum penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 yang penyusunannya mengikuti 5 (lima) unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern.



WALIKOTA TASIKMALAYA,

ASEP SUKMANA